SALINAN

BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peratiran Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAN

BUPATI MAMUJU TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024;

b. laporan perubahan SAL tahun anggaran 2024;

c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;

d. laporan operasional tahun anggaran 2024;

e. laporan arus kas tahun anggaran 2024;

f. laporan perubahan Ekuitas tahun anggaran 2024;

g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a. realisasi pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp669.951.188.922,24 (Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Koma Dua Puluh Empat Sen) yang berarti 99,34 (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Empat Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp674.398.741.239,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah);

b. realisasi belanja dan transfer Daerah tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp697.458.559.499,91 (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Sembilan Puluh Satu Sen) yang berarti 97,44% (Sembilan Puluh Tujuh Koma Empat Puluh Empat Persen) dari perubahan

APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp715.780.494.691,10 (Tujuh Ratus Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Sepuluh Sen);

c. berdasarkan realisasi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran tahun anggaran 2024 sebesar -Rp27.507.370.577,67 (Minus Dua Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Tujuh Sen) yang berarti 66,47% (Enam Puluh Enam Koma Empat Puluh Tujuh Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar -Rp41.381.753.452,10 (Minus Empat Puluh satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen);

d. pembiayaan untuk menutupi Defisit anggaran tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen); dan

e. berdasarkan Defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp13.874.382.874,42 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Dua Sen).

Pasal 5

Laporan perubahan SAL tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. SAL awal tahun anggaran 2024 sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);

b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Rupiah Koma Sepuluh Sen);

c. SiLPA tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen) ;dan

d. terdapat SAL akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp13.874.382.874,43 (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Koma Empat Puluh Tiga Sen).

Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. jumlah aset sebesar Rp1.378.301.374.472,31 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Satu Juta Tuga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Tiga Puluh Satu Sen);
b. jumlah kewajiban sebesar Rp7.439.661.925,71 (Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Koma Tujuh Puluh Satu Sen); dan
c. jumlah Ekuitas sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 7

Laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp631.124.344.302,20 (Enam Ratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Dua Koma Dua Puluh Sen);
b. beban operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp628.131.704.159,13 (Enam ratus Dua Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Seratus Lima Puluh Sembilan Koma Tiga Belas Sen);
c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Beban Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah);
d. beban luar biasa sebesar -Rp475.105.500,00 (Minus Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Lima Ribu Lima Ratus Rupiah); dan
e. berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit Laporan Operasional Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.517.534.643,08 (Dua Milyar Lima ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Sen).

Pasal 8

Laporan arus kas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp111.396.881.640,33 Seratus Sebelas Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Empat Puluh Koma Tiga Puluh Tiga Sen);

b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp138.904.252.218,00 (Minus Seratus Tiga Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah);

c. jumlah Arus Kas Bersih dari aktivitas Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol Koma Nol Rupiah);

d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar -Rp209.206.419,00 (Minus Dua Ratus Sembilan Juta Dua Ratus Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Belas Rupiah);

e. saldo awal kas di BUD Rp41.381.753.452,10 (Empat Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat ratus Lima Puluh Dua Koma Sepuluh Sen); dan

f. saldo akhir kas di BUD Rp14.083.589.293,43 (Empat Belas Milyar Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Koma Empat puluh Tiga Sen).

Pasal 9

Laporan perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

a. Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen);

b. tidak terdapat penyesuaian Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024;

c. berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian Ekuitas awal tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah Penyesuaian sebesar Rp1.370.346.846.195,22 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Koma Dua Puluh Dua Sen);

d. surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, sebesar Rp2.517.534.643,08 (Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Koma Delapan Sen);

e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi Ekuitas sebesar -Rp2.002.668.291,70 (Minus Dua Milyar Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Koma Tujuh Puluh Sen); dan

f. berdasarkan Ekuitas awal Tahun Anggaran 2024 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, Koreksi yang langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.370.861.712.546,60 (Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Enam Koma Enam Puluh Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

Pasal 11

Selain laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

Pasal 12

(1) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

Lampiran I	:	Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegaiatan, sub kegaiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan subkegaiatan;
Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

Lampiran III	:	Laporan operasional;
Lampiran IV	:	Laporan perubahan Ekuitas;
Lampiran V	:	Neraca;
Lampiran VI	:	Laporan arus kas;
Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan;
Lampiran VIII	:	Daftar rekapitulasi piutang daerah;
Lampiran IX	:	Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
Lampiran X	:	Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
Lampiran XI	:	Daftar menyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
Lampiran XII	:	Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
Lampiran XIII	:	Daftar rekapitulasi aset tetap;
Lampiran XIV	:	Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
Lampiran XV	:	Daftar rekapitulasi aset lainnya;
Lampiran XVI	:	Daftar dana cadangan daerah;
Lampiran XVII	:	Daftar kewajiban jangka pendek;
Lampiran XVIII	:	Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran XIX	:	Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
Lampiran XX	:	Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
Lampiran XX.1	:	lkhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
Lampiran XX.2	:	lkhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025
NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

DAFTAR ISI

Lampiran I.1	:	Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah Daerah dan Organisasi,	1
Lampiran I.2	:	Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan,	6
Lampiran I.3	:	Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan sub kegiatan, kelompok, Dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan.	8
Lampiran I.4	:	Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah organisasi, kegiatan dan sub kegiatan,	192
Lampiran II	:	Laporan perubahan saldo anggaran lebih,	213
Lampiran III	:	Laporan operasional,	214
Lampiran IV	:	Laporan perubahan ekuitas,	215
Lampiran V	:	Neraca,	216
Lampiran VI	:	Laporan arus kas,	217
Lampiran VII	:	Catatan atas laporan keuangan,	218
Lampiran VIII	:	Daftar Rekapitulasi piutang daerah,	325
Lampiran IX	:	Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih,	326
Lampiran X	:	Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan dana Bergulir,	327
Lampiran XI	:	Daftar penyertaan Modal (Investasi) pemerintah daerah,	328
Lampiran XII	:	Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Teap Daerah	329
Lampiran XIII	:	Daftar Rekapitulasi Aset Tetap,	330
Lampiran XIV	:	Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan,	331
Lampiran XV	:	Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya	332
Lampiran XVI	:	Daftar Dana Cadangan daerah,	333
Lampiran XVII	:	Daftar Kewajiban Jangka Pendek,	334

Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang, ... 335

Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, ... 336

Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah terdiri atas ;

Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah / perusahaan daerah, ... 337

Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba /rugi) badan usaha milik daerah / perusahaan daerah 338

Lampiran I.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGRAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1			2	3	4	5	6
		4	Pendapatan	674.398.741.239	669.951.188.922,24	(4.447.552.316,76)	99,34
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	P	41.422.311.560,77	(20.554.753,23)	99,95
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	34.830.378.064	35.133.706.290,77	303.328.226,77	100,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	15.000.761.361	13.079.239.619,91	(1.921.521.741,09)	87,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.761.361	13.079.239.619,91	(1.921.521.741,09)	87,19
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.744.144.425	5.386.710.716,91	(1.357.433.708,09)	79,87
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.744.144.425	5.143.267.855,00	(1.600.876.570,00)	76,26
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0	243.442.861,91	243.442.861,91	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.256.616.936	7.692.528.903,00	(564.088.033,00)	93,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.256.616.936	7.692.528.903,00	(564.088.033,00)	93,17
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	19.829.616.703	22.054.466.670,86	2.224.849.967,86	111,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4	PENDAPATAN DAERAH	19.829.616.703	22.054.466.670,86	2.224.849.967,86	111,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.829.616.703	22.054.466.670,86	2.224.849.967,86	111,22
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.02	Retribusi Daerah	1.829.616.703	2.026.718.214,00	197.101.511,00	110,77
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000.000	20.027.748.456,86	2.027.748.456,86	111,27
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.612.488.250	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.612.488.250	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	6.612.488.250	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.612.488.250	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	6.462.488.250	6.288.605.270,00	(173.882.980,00)	97,31
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000	0,00	(150.000.000,00)	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	710.893.000	541.590.000,00	(169.303.000,00)	76,18
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	256.500.000	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,56
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	256.500.000	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,56
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,56
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,56
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,56
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000	0,00	(10.000.000,00)	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	256.800.000	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	256.800.000	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	256.800.000	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.800.000	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,31
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	256.800.000	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,31
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	187.593.000	187.700.000,00	107.000,00	100,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	187.593.000	187.700.000,00	107.000,00	100,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	187.593.000	187.700.000,00	107.000,00	100,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.593.000	187.700.000,00	107.000,00	100,06
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	187.593.000	187.700.000,00	107.000,00	100,06
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	125.000.000	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	125.000.000	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	125.000.000	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	125.000.000	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.02	Retribusi Daerah	0	41.105.000,00	41.105.000,00	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.000.000	0,00	(125.000.000,00)	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN UMUM	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.000.000	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	632.096.981.925	627.933.157.361,47	(4.163.824.563,53)	99,34
5.02			KEUANGAN	632.096.981.925	627.933.157.361,47	(4.163.824.563,53)	99,34
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	632.096.981.925	627.933.157.361,47	(4.163.824.563,53)	99,34
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4	PENDAPATAN DAERAH	632.096.981.925	627.933.157.361,47	(4.163.824.563,53)	99,34
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.263.929.749	17.747.807.594,47	(516.122.154,53)	97,17
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.01	Pajak Daerah	12.993.479.302	12.064.921.118,00	(928.558.184,00)	92,85
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000	729.061.014,00	(1.250.938.986,00)	36,82
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.290.450.447	4.953.825.462,47	1.663.375.015,47	150,55
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2	PENDAPATAN TRANSFER	613.833.052.176	610.185.349.767,00	(3.647.702.409,00)	99,41
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.932.352.000	583.771.260.129,00	(4.161.091.871,00)	99,29
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.900.700.176	26.414.089.638,00	513.389.462,00	101,98
		5	Belanja	715.780.494.691	697.458.559.499,91	(18.321.935.191,19)	97,44
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	446.591.573.948	434.122.736.952,91	(12.468.836.995,86)	97,21
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	185.714.874.842	182.225.709.039,00	(3.489.165.803,95)	98,12
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	185.714.874.842	182.225.709.039,00	(3.489.165.803,95)	98,12
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	185.714.874.842	182.225.709.039,00	(3.489.165.803,95)	98,12
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	161.002.454.145	159.069.273.155,00	(1.933.180.990,95)	98,80
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	130.093.156.614	128.629.026.904,00	(1.464.129.710,91)	98,87
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.075.675.142	22.021.252.265,00	(54.422.877,04)	99,75
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	8.833.622.389	8.418.993.986,00	(414.628.403,00)	95,31
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	24.712.420.697	23.156.435.884,00	(1.555.984.813,00)	93,70
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.087.810.510	5.090.835.560,00	3.025.050,00	100,06
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.161.763.546	16.615.923.822,00	(1.545.839.724,00)	91,49
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.848.339	187.548.500,00	(12.299.839,00)	93,85
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.262.998.302	1.262.128.002,00	(870.300,00)	99,93
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	169.015.408.592	165.118.996.733,91	(3.896.411.858,69)	97,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	112.124.261.239	109.115.889.287,91	(3.008.371.951,09)	97,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	112.124.261.239	109.115.889.287,91	(3.008.371.951,09)	97,32
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	88.592.069.997	85.662.912.720,91	(2.929.157.276,09)	96,69
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	31.474.195.093	31.129.951.969,00	(344.243.124,00)	98,91
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.117.874.904	54.532.960.751,91	(2.584.914.152,09)	95,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	23.532.191.242	23.452.976.567,00	(79.214.675,00)	99,66
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.699.676.800	7.633.633.427,00	(66.043.373,00)	99,14
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.432.514.442	13.419.343.140,00	(13.171.302,00)	99,90

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.400.000.000	2.400.000.000,00	0,00	100,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	56.891.147.353	56.003.107.446,00	(888.039.907,60)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	56.891.147.353	56.003.107.446,00	(888.039.907,60)	98,44
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.243.086.419	36.824.247.194,00	(418.839.225,60)	98,88
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.598.716.050	11.537.032.810,00	(61.683.240,60)	99,47
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.644.370.369	25.287.214.384,00	(357.155.985,00)	98,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	19.648.060.934	19.178.860.252,00	(469.200.682,00)	97,61
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.570.061.245	18.429.413.052,00	(140.648.193,00)	99,24
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.077.999.689	749.447.200,00	(328.552.489,00)	69,52
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.341.817.198	71.020.561.696,00	(4.321.255.502,22)	94,26
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	75.341.817.198	71.020.561.696,00	(4.321.255.502,22)	94,26
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	75.341.817.198	71.020.561.696,00	(4.321.255.502,22)	94,26
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	14.720.105.660	13.944.851.982,00	(775.253.678,00)	94,73
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.380.317.873	2.343.283.766,00	(37.034.107,00)	98,44
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.811.737.866	11.187.150.216,00	(624.587.650,00)	94,71
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	528.049.921	414.418.000,00	(113.631.921,00)	78,48
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.621.711.538	57.075.709.714,00	(3.546.001.824,22)	94,15
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	236.327.448	198.789.000,00	(37.538.448,00)	84,12
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	474.640.354	194.980.000,00	(279.660.354,00)	41,08
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.381.372.440	1.341.469.500,00	(39.902.940,80)	97,11
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	58.529.371.295	55.340.471.214,00	(3.188.900.081,42)	94,55
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.518.601.009	2.478.567.235,00	(40.033.774,00)	98,41
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.518.601.009	2.478.567.235,00	(40.033.774,00)	98,41
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.518.601.009	2.478.567.235,00	(40.033.774,00)	98,41
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.514.601.009	2.474.569.235,00	(40.031.774,00)	98,41
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.142.403.307	1.120.614.695,00	(21.788.612,00)	98,09
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.372.197.702	1.353.954.540,00	(18.243.162,00)	98,67
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.562.138.287	10.892.025.931,00	(670.112.356,00)	94,20
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	8.206.095.200	8.172.035.756,00	(34.059.444,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	8.206.095.200	8.172.035.756,00	(34.059.444,00)	99,58
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	6.906.095.200	6.873.035.756,00	(33.059.444,00)	99,52
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.680.107.960	1.647.857.596,00	(32.250.364,00)	98,08
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.225.987.240	5.225.178.160,00	(809.080,00)	99,98
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.300.000.000	1.299.000.000,00	(1.000.000,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.000.000	1.299.000.000,00	(1.000.000,00)	99,92
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3.356.043.087	2.719.990.175,00	(636.052.912,00)	81,05
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	3.356.043.087	2.719.990.175,00	(636.052.912,00)	81,05
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.681.755.087	2.616.025.175,00	(65.729.912,00)	97,55
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.104.368.417	1.043.507.354,00	(60.861.063,00)	94,49
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.577.386.670	1.571.517.821,00	(5.868.849,00)	99,63
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.1.05	Belanja Hibah	0	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	674.288.000	103.965.000,00	(570.323.000,00)	15,42
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	52.770.000	52.750.000,00	(20.000,00)	99,96
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	621.518.000	51.215.000,00	(570.303.000,00)	8,24
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	2.438.734.019	2.386.876.318,00	(51.857.701,00)	97,87
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	2.438.734.019	2.386.876.318,00	(51.857.701,00)	97,87
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.438.734.019	2.386.876.318,00	(51.857.701,00)	97,87
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.426.188.519	2.374.330.818,00	(51.857.701,00)	97,86
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	818.277.739	801.241.775,00	(17.035.964,00)	97,92
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.575.910.780	1.567.089.043,00	(8.821.737,00)	99,44
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.000.000	6.000.000,00	(26.000.000,00)	18,75
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	12.545.500	12.545.500,00	0,00	100,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.545.500	12.545.500,00	0,00	100,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	47.615.542.036	45.613.969.024,00	(2.001.573.012,11)	95,80
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.036.233.260	2.026.111.587,00	(10.121.673,00)	99,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.036.233.260	2.026.111.587,00	(10.121.673,00)	99,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.036.233.260	2.026.111.587,00	(10.121.673,00)	99,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.036.233.260	2.026.111.587,00	(10.121.673,00)	99,50
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	309.682.032	307.306.133,00	(2.375.899,00)	99,23
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.726.551.228	1.718.805.454,00	(7.745.774,00)	99,55
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.408.324.706	3.353.159.462,00	(55.165.244,00)	98,38
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.408.324.706	3.353.159.462,00	(55.165.244,00)	98,38
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.408.324.706	3.353.159.462,00	(55.165.244,00)	98,38
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.404.779.206	3.349.613.962,00	(55.165.244,00)	98,38
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.284.746.779	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,94
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.120.032.427	1.111.959.087,00	(8.073.340,00)	99,28
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500	3.545.500,00	0,00	100,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500	3.545.500,00	0,00	100,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	256.600.915	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	256.600.915	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	256.600.915	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	256.600.915	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.600.915	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.853.985.503	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.853.985.503	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.853.985.503	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	903.235.503	749.703.893,00	(153.531.610,00)	83,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.000	3.250.000,00	0,00	100,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	899.985.503	746.453.893,00	(153.531.610,00)	82,94
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.950.750.000	1.856.384.000,00	(94.366.000,00)	95,16
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.950.750.000	1.856.384.000,00	(94.366.000,00)	95,16
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.453.839.401	5.288.564.012,00	(165.275.389,37)	96,97
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.453.839.401	5.288.564.012,00	(165.275.389,37)	96,97
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.453.839.401	5.288.564.012,00	(165.275.389,37)	96,97
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.077.213.819	4.956.796.012,00	(120.417.807,37)	97,63
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	974.042.072	960.376.539,00	(13.665.533,00)	98,60
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.103.171.747	3.996.419.473,00	(106.752.274,37)	97,40
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	376.625.582	331.768.000,00	(44.857.582,00)	88,09
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	363.735.582	331.768.000,00	(31.967.582,00)	91,21
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.890.000	0,00	(12.890.000,00)	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.695.483.358	2.648.176.400,00	(47.306.958,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.695.483.358	2.648.176.400,00	(47.306.958,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.695.483.358	2.648.176.400,00	(47.306.958,00)	98,24
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.629.103.358	2.581.796.400,00	(47.306.958,00)	98,20
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.117.336.864	1.098.441.628,00	(18.895.236,00)	98,31
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.511.766.494	1.483.354.772,00	(28.411.722,00)	98,12
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	66.380.000	66.380.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.380.000	61.380.000,00	0,00	100,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000	5.000.000,00	0,00	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.977.259.112	3.903.659.730,00	(73.599.382,99)	98,15
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.977.259.112	3.903.659.730,00	(73.599.382,99)	98,15
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	3.977.259.112	3.903.659.730,00	(73.599.382,99)	98,15
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.977.259.112	3.903.659.730,00	(73.599.382,99)	98,15
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	945.363.223	902.572.532,00	(42.790.691,00)	95,47
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.031.895.889	3.001.087.198,00	(30.808.691,99)	98,98
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.404.908.770	3.376.845.036,00	(28.063.734,00)	99,18
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.404.908.770	3.376.845.036,00	(28.063.734,00)	99,18
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.404.908.770	3.376.845.036,00	(28.063.734,00)	99,18
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.644.924.938	2.617.953.400,00	(26.971.538,00)	98,98
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.644.924.938	2.617.953.400,00	(26.971.538,00)	98,98
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	759.983.832	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,86
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.983.832	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,86
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.262.720.215	2.127.672.097,00	(135.048.118,00)	94,03
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	2.262.720.215	2.127.672.097,00	(135.048.118,00)	94,03
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.262.720.215	2.127.672.097,00	(135.048.118,00)	94,03
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.098.340.969	1.963.455.584,00	(134.885.385,00)	93,57
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.028.195.292	1.010.903.102,00	(17.292.190,00)	98,32
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.145.677	952.552.482,00	(117.593.195,00)	89,01
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	164.379.246	164.216.513,00	(162.733,00)	99,90
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	126.576.208	126.413.549,00	(162.659,00)	99,87
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.803.038	37.802.964,00	(74,00)	100,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.893.606.214	2.820.177.903,00	(73.428.311,75)	97,46
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.893.606.214	2.820.177.903,00	(73.428.311,75)	97,46
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	2.893.606.214	2.820.177.903,00	(73.428.311,75)	97,46
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.788.968.214	2.715.739.903,00	(73.228.311,75)	97,37
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	926.988.613	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,37
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.861.979.601	1.803.877.696,00	(58.101.905,75)	96,88
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	104.638.000	104.438.000,00	(200.000,00)	99,81
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.638.000	104.438.000,00	(200.000,00)	99,81
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	496.124.888	496.013.588,00	(111.300,00)	99,98
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	496.124.888	496.013.588,00	(111.300,00)	99,98
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	496.124.888	496.013.588,00	(111.300,00)	99,98
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	492.579.388	492.468.088,00	(111.300,00)	99,98
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.669.188	132.557.888,00	(111.300,00)	99,92
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	359.910.200	359.910.200,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500	3.545.500,00	0,00	100,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500	3.545.500,00	0,00	100,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.176.891.571	2.107.781.070,00	(69.110.501,00)	96,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.176.891.571	2.107.781.070,00	(69.110.501,00)	96,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.176.891.571	2.107.781.070,00	(69.110.501,00)	96,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.176.891.571	2.107.781.070,00	(69.110.501,00)	96,83
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.039.416.532	1.019.355.905,00	(20.060.627,00)	98,07
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.475.039	1.088.425.165,00	(49.049.874,00)	95,69
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	12.176.408.409	12.016.248.738,00	(160.159.671,00)	98,68
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	12.176.408.409	12.016.248.738,00	(160.159.671,00)	98,68
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	12.176.408.409	12.016.248.738,00	(160.159.671,00)	98,68
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.107.497.230	5.037.670.649,00	(69.826.581,00)	98,63
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	809.861.513	795.435.136,00	(14.426.377,00)	98,22
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.193.339.117	1.188.805.513,00	(4.533.604,00)	99,62
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	3.104.296.600	3.053.430.000,00	(50.866.600,00)	98,36
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	7.068.911.179	6.978.578.089,00	(90.333.090,00)	98,72
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.820.389	78.819.589,00	(800,00)	100,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.990.090.790	6.899.758.500,00	(90.332.290,00)	98,71
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	11.250.745	11.250.000,00	(745,00)	99,99
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	11.250.745	11.250.000,00	(745,00)	99,99
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	11.250.745	11.250.000,00	(745,00)	99,99
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.745	11.250.000,00	(745,00)	99,99
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.745	11.250.000,00	(745,00)	99,99
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	164.965.163	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	164.965.163	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5	BELANJA DAERAH	164.965.163	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	149.715.163	149.472.111,00	(243.052,00)	99,84
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.715.163	149.472.111,00	(243.052,00)	99,84
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	15.250.000	15.250.000,00	0,00	100,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.250.000	15.250.000,00	0,00	100,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	827.567.244	813.126.564,00	(14.440.680,00)	98,26
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	827.567.244	813.126.564,00	(14.440.680,00)	98,26
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	827.567.244	813.126.564,00	(14.440.680,00)	98,26
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	333.408.564	333.224.564,00	(184.000,00)	99,94
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	333.408.564	333.224.564,00	(184.000,00)	99,94
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	494.158.680	479.902.000,00	(14.256.680,00)	97,11
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	494.158.680	479.902.000,00	(14.256.680,00)	97,11
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.438.489.501	1.517.296.148,00	(921.193.353,00)	62,22
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	2.438.489.501	1.517.296.148,00	(921.193.353,00)	62,22
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	2.438.489.501	1.517.296.148,00	(921.193.353,00)	62,22
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.268.755.901	1.240.459.196,00	(28.296.705,00)	97,77
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	640.602.982	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,84
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.152.919	566.513.163,00	(1.639.756,00)	99,71
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000	60.000.000,00	0,00	100,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.169.733.600	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,67
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.169.733.600	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,67
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	80.883.059	80.670.985,00	(212.074,00)	99,74
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	80.883.059	80.670.985,00	(212.074,00)	99,74
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	80.883.059	80.670.985,00	(212.074,00)	99,74
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	80.883.059	80.670.985,00	(212.074,00)	99,74
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.883.059	80.670.985,00	(212.074,00)	99,74
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	19.775.319.225	18.745.216.767,00	(1.030.102.458,70)	94,79
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.844.492.246	5.779.422.564,00	(65.069.682,70)	98,89
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	5.844.492.246	5.779.422.564,00	(65.069.682,70)	98,89
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	5.844.492.246	5.779.422.564,00	(65.069.682,70)	98,89
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	5.672.870.646	5.607.811.964,00	(65.058.682,70)	98,85
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.645.663.100	1.603.350.072,00	(42.313.028,00)	97,43
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.321.763.645	2.299.977.568,00	(21.786.077,00)	99,06
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.705.443.901	1.704.484.324,00	(959.577,70)	99,94
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	171.621.600	171.610.600,00	(11.000,00)	99,99
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	171.621.600	171.610.600,00	(11.000,00)	99,99
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	869.193.516	869.170.371,00	(23.145,00)	100,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	869.193.516	869.170.371,00	(23.145,00)	100,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	869.193.516	869.170.371,00	(23.145,00)	100,00

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	869.193.516	869.170.371,00	(23.145,00)	100,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.993.516	781.970.371,00	(23.145,00)	100,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.05	Belanja Hibah	74.700.000	74.700.000,00	0,00	100,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.500.000	12.500.000,00	0,00	100,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.275.365.526	7.376.373.896,00	(898.991.630,00)	89,14
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.275.365.526	7.376.373.896,00	(898.991.630,00)	89,14
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	8.275.365.526	7.376.373.896,00	(898.991.630,00)	89,14
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	8.162.287.526	7.314.505.896,00	(847.781.630,00)	89,61
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	4.220.735.438	4.200.501.128,00	(20.234.310,00)	99,52
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.886.123.488	2.058.576.168,00	(827.547.320,00)	71,33
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	1.055.428.600	1.055.428.600,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	113.078.000	61.868.000,00	(51.210.000,00)	54,71
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.868.000	61.868.000,00	0,00	100,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.210.000	0,00	(51.210.000,00)	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.461.846.102	2.429.660.006,00	(32.186.096,00)	98,69
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.461.846.102	2.429.660.006,00	(32.186.096,00)	98,69
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	2.461.846.102	2.429.660.006,00	(32.186.096,00)	98,69
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	2.458.300.602	2.426.524.006,00	(31.776.596,00)	98,71
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.829.648.639	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	628.651.963	628.503.825,00	(148.138,00)	99,98
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	506.663.510	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,58
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	506.663.510	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,58
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5	BELANJA DAERAH	506.663.510	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,58
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	506.663.510	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,58
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.979.635	251.979.635,00	0,00	100,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	254.683.875	252.540.505,00	(2.143.370,00)	99,16
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.817.758.325	1.786.069.790,00	(31.688.535,00)	98,26
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.817.758.325	1.786.069.790,00	(31.688.535,00)	98,26
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.817.758.325	1.786.069.790,00	(31.688.535,00)	98,26
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.758.325	1.769.069.790,00	(31.688.535,00)	98,24
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.327.448	1.154.594.375,00	(20.733.073,00)	98,24
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	625.430.877	614.475.415,00	(10.955.462,00)	98,25
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000	17.000.000,00	0,00	100,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.000.000	17.000.000,00	0,00	100,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	51.737.774.081	50.720.839.869,00	(1.016.934.212,52)	98,03
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	30.843.472.879	30.468.332.157,00	(375.140.722,52)	98,78
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN PEMERINTAHAN	1.136.386.071	1.125.964.166,00	(10.421.905,00)	99,08
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5	BELANJA DAERAH	1.136.386.071	1.125.964.166,00	(10.421.905,00)	99,08
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	586.386.071	575.969.902,00	(10.416.169,00)	98,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	586.386.071	575.969.902,00	(10.416.169,00)	98,22
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	550.000.000	549.994.264,00	(5.736,00)	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000	549.994.264,00	(5.736,00)	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN HUKUM DAN HAM	530.870.285	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5	BELANJA DAERAH	530.870.285	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	530.870.285	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	530.870.285	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,53
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.130.561.875	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5	BELANJA DAERAH	2.130.561.875	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.130.561.875	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	816.561.875	814.899.032,00	(1.662.843,24)	99,80
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.314.000.000	1.036.000.000,00	(278.000.000,00)	78,84
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	482.306.071	479.014.670,00	(3.291.401,00)	99,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5	BELANJA DAERAH	482.306.071	479.014.670,00	(3.291.401,00)	99,32
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	469.202.871	465.911.470,00	(3.291.401,00)	99,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	469.202.871	465.911.470,00	(3.291.401,00)	99,30
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	13.103.200	13.103.200,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.103.200	13.103.200,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	374.048.478	373.633.177,00	(415.301,00)	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5	BELANJA DAERAH	374.048.478	373.633.177,00	(415.301,00)	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	374.048.478	373.633.177,00	(415.301,00)	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	374.048.478	373.633.177,00	(415.301,00)	99,89
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.212.739.151	1.212.082.650,00	(656.501,00)	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5	BELANJA DAERAH	1.212.739.151	1.212.082.650,00	(656.501,00)	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	914.739.151	914.082.650,00	(656.501,00)	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.01	Belanja Pegawai	9.750.000	9.750.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	904.989.151	904.332.650,00	(656.501,00)	99,93
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	298.000.000	298.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.000.000	198.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000	100.000.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN UMUM	23.402.256.892	23.361.348.081,00	(40.908.811,28)	99,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5	BELANJA DAERAH	23.402.256.892	23.361.348.081,00	(40.908.811,28)	99,83
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	23.218.067.281	23.177.249.470,00	(40.817.811,28)	99,82
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.01	Belanja Pegawai	4.269.425.187	4.246.630.673,00	(22.794.514,28)	99,47
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.948.642.094	18.930.618.797,00	(18.023.297,00)	99,90
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	184.189.611	184.098.611,00	(91.000,00)	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.189.611	184.098.611,00	(91.000,00)	99,95
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	984.642.800	984.080.142,00	(562.658,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5	BELANJA DAERAH	984.642.800	984.080.142,00	(562.658,00)	99,94
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	969.642.800	969.510.142,00	(132.658,00)	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	969.642.800	969.510.142,00	(132.658,00)	99,99
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000	14.570.000,00	(430.000,00)	97,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000	14.570.000,00	(430.000,00)	97,13
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	589.661.256	584.810.015,00	(4.851.241,00)	99,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5	BELANJA DAERAH	589.661.256	584.810.015,00	(4.851.241,00)	99,18
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	561.444.256	556.593.015,00	(4.851.241,00)	99,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	561.444.256	556.593.015,00	(4.851.241,00)	99,14
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2	BELANJA MODAL	28.217.000	28.217.000,00	0,00	100,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.217.000	28.217.000,00	0,00	100,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	20.894.301.202	20.252.507.712,00	(641.793.490,00)	96,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	20.894.301.202	20.252.507.712,00	(641.793.490,00)	96,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	20.894.301.202	20.252.507.712,00	(641.793.490,00)	96,93
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	20.569.824.327	19.929.530.837,00	(640.293.490,00)	96,89
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	9.415.583.819	9.330.892.401,00	(84.691.418,00)	99,10
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.154.240.508	10.598.638.436,00	(555.602.072,00)	95,02
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	324.476.875	322.976.875,00	(1.500.000,00)	99,54
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	175.518.000	174.018.000,00	(1.500.000,00)	99,15
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.958.875	148.958.875,00	0,00	100,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	110.917.185.277	109.428.386.586,00	(1.488.798.691,00)	98,66
5.01			PERENCANAAN	4.013.809.028	3.887.520.043,00	(126.288.985,00)	96,85
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	4.013.809.028	3.887.520.043,00	(126.288.985,00)	96,85
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	4.013.809.028	3.887.520.043,00	(126.288.985,00)	96,85
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.773.305.428	3.647.220.043,00	(126.085.385,00)	96,66
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.536.149.892	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,95
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.237.155.536	2.157.980.711,00	(79.174.825,00)	96,46
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	240.503.600	240.300.000,00	(203.600,00)	99,92
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.503.600	60.500.000,00	(3.600,00)	99,99
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000	5.000.000,00	0,00	100,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000	174.800.000,00	(200.000,00)	99,89

KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (Berkurang)	
				ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	Rp	%
5.02			KEUANGAN	102.480.453.204	101.174.946.927,00	(1.305.506.277,00)	98,73
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	102.480.453.204	101.174.946.927,00	(1.305.506.277,00)	98,73
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	102.480.453.204	101.174.946.927,00	(1.305.506.277,00)	98,73
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	11.217.035.825	10.242.341.265,00	(974.694.560,00)	91,31
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	3.491.701.376	3.140.961.872,00	(350.739.504,00)	89,96
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.725.334.449	7.101.379.393,00	(623.955.056,00)	91,92
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	1.822.984.000	1.633.836.862,00	(189.147.138,00)	89,62
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.612.984.000	1.425.836.862,00	(187.147.138,00)	88,40
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	210.000.000	208.000.000,00	(2.000.000,00)	99,05
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	616.770.079	475.105.500,00	(141.664.579,00)	77,03
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	616.770.079	475.105.500,00	(141.664.579,00)	77,03
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.4	BELANJA TRANSFER	88.823.663.300	88.823.663.300,00	0,00	100,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	88.823.663.300	88.823.663.300,00	0,00	100,00
5.03			KEPEGAWAIAN	3.692.209.516	3.636.592.640,00	(55.616.876,00)	98,49
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.692.209.516	3.636.592.640,00	(55.616.876,00)	98,49
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	3.692.209.516	3.636.592.640,00	(55.616.876,00)	98,49
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	3.591.711.052	3.536.554.420,00	(55.156.632,00)	98,46
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.309.186.027	1.281.222.182,00	(27.963.845,00)	97,86
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.282.525.025	2.255.332.238,00	(27.192.787,00)	98,81
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	100.498.464	100.038.220,00	(460.244,00)	99,54
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.498.464	50.088.220,00	(410.244,00)	99,19
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90
5.05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	730.713.529	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	730.713.529	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	730.713.529	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	705.713.529	704.326.976,00	(1.386.553,00)	99,80
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	705.713.529	704.326.976,00	(1.386.553,00)	99,80
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000	25.000.000,00	0,00	100,00
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000	25.000.000,00	0,00	100,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.302.293.596	4.152.688.743,00	(149.604.853,00)	96,52
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	4.302.293.596	4.152.688.743,00	(149.604.853,00)	96,52
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		INSPEKTORAT	4.302.293.596	4.152.688.743,00	(149.604.853,00)	96,52
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	4.302.293.596	4.152.688.743,00	(149.604.853,00)	96,52
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	4.262.853.355	4.113.339.502,00	(149.513.853,00)	96,49
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	2.133.996.689	2.081.861.955,00	(52.134.734,00)	97,56
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.128.856.666	2.031.477.547,00	(97.379.119,00)	95,43
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	39.440.241	39.349.241,00	(91.000,00)	99,77
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.091.000	22.000.000,00	(91.000,00)	99,59
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.349.241	17.349.241,00	0,00	100,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	7.227.605.786	7.079.486.842,00	(148.118.944,00)	97,95
7.01			KECAMATAN	7.227.605.786	7.079.486.842,00	(148.118.944,00)	97,95
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PANGALE	1.485.550.492	1.463.943.750,00	(21.606.742,00)	98,55
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5	BELANJA DAERAH	1.485.550.492	1.463.943.750,00	(21.606.742,00)	98,55
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.485.550.492	1.463.943.750,00	(21.606.742,00)	98,55
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.058.839.681	1.038.154.741,00	(20.684.940,00)	98,05
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	426.710.811	425.789.009,00	(921.802,00)	99,78
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN TOPOYO	1.612.379.624	1.555.407.822,00	(56.971.802,00)	96,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	1.612.379.624	1.555.407.822,00	(56.971.802,00)	96,47
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.581.879.624	1.526.707.822,00	(55.171.802,00)	96,51
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.046.108.425	995.948.214,00	(50.160.211,00)	95,21
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	535.771.199	530.759.608,00	(5.011.591,00)	99,06
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	30.500.000	28.700.000,00	(1.800.000,00)	94,10
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.500.000	28.700.000,00	(1.800.000,00)	94,10
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN TOBADAK	1.380.686.797	1.363.387.598,00	(17.299.199,00)	98,75
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5	BELANJA DAERAH	1.380.686.797	1.363.387.598,00	(17.299.199,00)	98,75
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.380.686.797	1.363.387.598,00	(17.299.199,00)	98,75
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	995.174.804	984.371.598,00	(10.803.206,00)	98,91
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.511.993	379.016.000,00	(6.495.993,00)	98,31
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN KAROSSA	1.577.991.061	1.555.581.040,00	(22.410.021,00)	98,58
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5	BELANJA DAERAH	1.577.991.061	1.555.581.040,00	(22.410.021,00)	98,58
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.558.991.061	1.536.581.040,00	(22.410.021,00)	98,56
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.307.169	1.148.793.470,00	(16.513.699,00)	98,58
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.683.892	387.787.570,00	(5.896.322,00)	98,50
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000	19.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000	19.000.000,00	0,00	100,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN BUDONG-BUDONG	1.170.997.812	1.141.166.632,00	(29.831.180,00)	97,45
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5	BELANJA DAERAH	1.170.997.812	1.141.166.632,00	(29.831.180,00)	97,45
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1	BELANJA OPERASI	1.170.997.812	1.141.166.632,00	(29.831.180,00)	97,45
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	739.449.385	728.200.733,00	(11.248.652,00)	98,48
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	431.548.427	412.965.899,00	(18.582.528,00)	95,69
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.613.200.740	27.595.234.716,00	(17.966.024,00)	99,93
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.613.200.740	27.595.234.716,00	(17.966.024,00)	99,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.613.200.740	27.595.234.716,00	(17.966.024,00)	99,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5	BELANJA DAERAH	27.613.200.740	27.595.234.716,00	(17.966.024,00)	99,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1	BELANJA OPERASI	27.552.637.004	27.534.670.980,00	(17.966.024,00)	99,93
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.01	Belanja Pegawai	770.265.726	752.641.490,00	(17.624.236,00)	97,71
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.641.571.278	1.641.284.490,00	(286.788,00)	99,98
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.1.05	Belanja Hibah	25.140.800.000	25.140.745.000,00	(55.000,00)	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2	BELANJA MODAL	60.563.736	60.563.736,00	0,00	100,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.563.736	60.563.736,00	0,00	100,00
			Jumlah	(41.381.753.452)	(27.507.370.577,67)	13.874.382.874,43	66,47

Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Kab. Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAHAN KAB. MAMUJU TENGAH

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**674.398.741.239,00**	**669.951.188.922,24**	**99,34**	**670.474.668.815,66**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**52.309.072.127,00**	**52.073.310.252,24**	**99,54**	**43.089.865.860,66**
4.1.01	Pajak Daerah	12.993.479.302,00	12.064.921.118,00	92,85	10.986.888.633,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.747.142.378,00	14.041.286.339,00	89,16	28.164.198.735,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	729.061.014,00	36,82	482.055.891,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.588.450.447,00	25.238.041.781,24	116,90	3.456.722.601,66
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**52.309.072.127,00**	**52.073.310.252,24**	**99,54**	**43.089.865.860,66**
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**613.833.052.176,00**	**610.185.349.767,00**	**99,40**	**620.367.960.197,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	536.471.137.000,00	532.310.045.129,00	99,22	535.895.712.061,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.880.365.000,00	12.479.058.000,00	105,03	14.557.434.438,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	370.177.399.000,00	369.183.892.749,00	99,73	349.658.672.391,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	82.474.072.000,00	82.048.913.591,00	99,48	101.224.309.437,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.939.301.000,00	68.598.180.789,00	95,35	70.455.295.795,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**536.471.137.000,00**	**532.310.045.129,00**	**99,22**	**535.895.712.061,00**
4.2.01.05	*Dana Desa*	51.461.215.000,00	51.461.215.000,00	100,00	51.720.040.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00	0,00	0,00	6.018.759.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**51.461.215.000,00**	**51.461.215.000,00**	**100,00**	**57.738.799.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.900.700.176,00	26.414.089.638,00	101,98	26.733.449.136,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.900.700.176,00	26.414.089.638,00	101,98	25.233.449.136,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**25.900.700.176,00**	**26.414.089.638,00**	**101,98**	**26.733.449.136,00**
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	**613.833.052.176,00**	**610.185.349.767,00**	**99,40**	**620.367.960.197,00**
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**8.256.616.936,00**	**7.692.528.903,00**	**93,16**	**7.016.842.758,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.256.616.936,00	7.692.528.903,00	93,16	7.016.842.758,00
	JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.256.616.936,00**	**7.692.528.903,00**	**93,16**	**7.016.842.758,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**674.398.741.239,00**	**669.951.188.922,24**	**99,34**	**670.474.668.815,66**
5	**BELANJA DAERAH**	**715.780.494.691,10**	**697.458.559.499,91**	**97,44**	**632.249.115.552,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**479.600.220.454,88**	**469.025.200.983,91**	**97,79**	**407.880.179.375,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	227.183.341.761,79	224.098.755.376,00	98,64	186.514.182.863,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	209.941.443.206,39	203.336.294.992,91	96,85	200.826.460.987,00
5.1.05	Belanja Hibah	42.430.935.486,70	41.571.650.615,00	97,97	20.415.535.525,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	44.500.000,00	18.500.000,00	41,57	124.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**479.600.220.454,88**	**469.025.200.983,91**	**97,79**	**407.880.179.375,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**146.739.840.857,22**	**139.134.589.716,00**	**94,81**	**131.997.518.417,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.187.077.448,00	2.055.173.000,00	93,96	1.653.332.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.666.199.299,00	35.957.625.906,00	98,06	13.926.590.864,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.217.268.932,80	41.278.328.853,00	93,35	52.462.883.837,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	61.801.947.634,42	57.979.234.714,00	93,81	62.321.642.916,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.267.998.302,00	1.267.128.002,00	99,93	1.363.483.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	599.349.241,00	597.099.241,00	99,62	269.585.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
	JUMLAH BELANJA MODAL	**146.739.840.857,22**	**139.134.589.716,00**	**94,81**	**131.997.518.417,00**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**616.770.079,00**	**475.105.500,00**	**77,03**	**326.062.160,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	616.770.079,00	475.105.500,00	77,03	326.062.160,00
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	**616.770.079,00**	**475.105.500,00**	**77,03**	**326.062.160,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**88.823.663.300,00**	**88.823.663.300,00**	**100,00**	**92.045.355.600,00**
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00	100,00	92.045.355.600,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**88.823.663.300,00**	**88.823.663.300,00**	**100,00**	**92.045.355.600,00**
	JUMLAH BELANJA	**715.780.494.691,10**	**697.458.559.499,91**	**97,44**	**632.249.115.552,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**(41.381.753.452,10)**	**(27.507.370.577,67)**	**66,47**	**38.225.553.263,66**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**41.381.753.452,10**	**41.381.753.452,10**	**100,00**	**3.156.200.188,44**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**41.381.753.452,10**	**41.381.753.452,10**	**100,00**	**6.156.200.188,44**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	100,00	6.156.200.188,44
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**41.381.753.452,10**	**41.381.753.452,10**	**100,00**	**6.156.200.188,44**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000.000,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**41.381.753.452,10**	**41.381.753.452,10**	**100,00**	**3.156.200.188,44**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**13.874.382.874,43**	**0,00**	**41.381.753.452,10**

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	185.714.874.842,95	182.225.709.039,00	(3.489.165.803,95)	98,12	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.231.863.962,91	128.764.281.668,00	(1.467.582.294,91)	98,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	132.480.039,00	132.480.039,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	75.057.963,00	75.057.963,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.057.963,00	75.057.963,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.057.963,00	75.057.963,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.235.126,00	12.235.126,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.188.527,00	9.188.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.234.352,00	10.234.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.278.527,00	8.278.527,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	17.485.544,00	17.485.544,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.485.544,00	17.485.544,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.485.544,00	17.485.544,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	129.139.815.182,91	127.675.680.472,00	(1.464.134.710,91)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	129.093.156.614,91	127.629.026.904,00	(1.464.129.710,91)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	129.093.156.614,91	127.629.026.904,00	(1.464.129.710,91)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	129.093.156.614,91	127.629.026.904,00	(1.464.129.710,91)	98,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.062.260,00	8.062.260,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.062.260,00	8.062.260,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.062.260,00	8.062.260,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	38.596.308,00	38.591.308,00	(5.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	38.596.308,00	38.591.308,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.596.308,00	38.591.308,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	66.698.930,00	66.609.590,00	(89.340,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	34.201.208,00	34.201.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	34.201.208,00	34.201.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.201.208,00	34.201.208,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	32.497.722,00	32.408.382,00	(89.340,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	32.497.722,00	32.408.382,00	(89.340,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.497.722,00	32.408.382,00	(89.340,00)	99,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	188.575.578,00	188.520.578,00	(55.000,00)	99,97	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	67.970.831,00	67.970.831,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.970.831,00	67.970.831,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.970.831,00	67.970.831,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	42.983.395,00	42.978.395,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	42.983.395,00	42.978.395,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.983.395,00	42.978.395,00	(5.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	55.504.000,00	55.454.000,00	(50.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	55.504.000,00	55.454.000,00	(50.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.504.000,00	55.454.000,00	(50.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010		SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.117.352,00	22.117.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1	BELANJA OPERASI	22.117.352,00	22.117.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.117.352,00	22.117.352,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	352.411.991,00	352.396.352,00	(15.639,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	2.048.890,00	2.048.890,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.048.890,00	2.048.890,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.048.890,00	2.048.890,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	28.052.951,00	28.052.000,00	(951,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.052.951,00	28.052.000,00	(951,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.052.951,00	28.052.000,00	(951,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	28.985.000,00	28.970.312,00	(14.688,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	28.985.000,00	28.970.312,00	(14.688,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.985.000,00	28.970.312,00	(14.688,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	293.325.150,00	293.325.150,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	293.325.150,00	293.325.150,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	293.325.150,00	293.325.150,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	167.721.000,00	167.721.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.291.000,00	28.291.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	28.291.000,00	28.291.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.291.000,00	23.291.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.430.000,00	134.430.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	122.271.147,00	122.207.542,00	(63.605,00)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	33.698.256,00	33.657.542,00	(40.714,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.698.256,00	33.657.542,00	(40.714,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.698.256,00	33.657.542,00	(40.714,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN USTRIK	54.972.891,00	54.950.000,00	(22.891,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	54.972.891,00	54.950.000,00	(22.891,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.972.891,00	54.950.000,00	(22.891,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.890.095,00	58.666.095,00	(3.224.000,00)	94,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	44.171.840,00	40.980.340,00	(3.191.500,00)	92,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.171.840,00	40.980.340,00	(3.191.500,00)	92,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.171.840,00	40.980.340,00	(3.191.500,00)	92,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.197.500,00	13.165.000,00	(32.500,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.197.500,00	13.165.000,00	(32.500,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.197.500,00	13.165.000,00	(32.500,00)	99,75	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	4.520.755,00	4.520.755,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	4.520.755,00	4.520.755,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.520.755,00	4.520.755,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	55.185.892.616,04	53.164.347.107,00	(2.021.545.509,04)	96,33	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	31.067.150.937,04	29.674.482.215,00	(1.392.668.722,04)	95,51	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	1.111.366.330,00	983.555.114,00	(127.811.216,00)	88,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	199.941.944,00	188.872.608,00	(11.069.336,00)	94,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.434.108,00	1.434.108,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	198.507.836,00	187.438.500,00	(11.069.336,00)	94,42	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	911.424.386,00	794.682.506,00	(116.741.880,00)	87,19	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	98.778.900,00	98.778.900,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	812.645.486,00	695.903.606,00	(116.741.880,00)	85,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	454.361.470,00	388.019.068,00	(66.342.402,00)	85,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	454.361.470,00	388.019.068,00	(66.342.402,00)	85,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	454.361.470,00	388.019.068,00	(66.342.402,00)	85,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	4.738.762.923,00	4.582.694.058,00	(156.068.865,00)	96,70	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	101.867.064,00	101.866.803,00	(261,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.867.064,00	101.866.803,00	(261,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	4.636.895.859,00	4.480.827.255,00	(156.068.604,00)	96,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.337.047.520,00	4.193.278.755,00	(143.768.765,00)	96,68	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.848.339,00	187.548.500,00	(12.299.839,00)	93,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	361.552.228,00	291.045.033,00	(70.507.195,00)	80,49	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	2.220.000,00	2.190.000,00	(30.000,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.220.000,00	2.190.000,00	(30.000,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2	BELANJA MODAL	359.332.228,00	288.855.033,00	(70.477.195,00)	80,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.691.500,00	30.691.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	328.640.728,00	258.163.533,00	(70.477.195,00)	78,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	1.705.153.769,00	1.700.337.069,00	(4.816.700,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	17.654.069,00	17.654.069,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.654.069,00	17.654.069,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.687.499.700,00	1.682.683.000,00	(4.816.700,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.687.499.700,00	1.682.683.000,00	(4.816.700,00)	99,71	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0021		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR	275.859.195,00	275.859.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	275.859.195,00	275.859.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	275.859.195,00	275.859.195,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	183.173.425,00	183.173.425,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1	BELANJA OPERASI	183.173.425,00	183.173.425,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.173.425,00	183.173.425,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026		PENYEDIAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	5.1.01	Belanja Pegawai	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	140.236.444,00	140.236.444,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1	BELANJA OPERASI	140.236.444,00	140.236.444,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.236.444,00	140.236.444,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	70.604.627,00	70.604.627,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	70.604.627,00	70.604.627,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.604.627,00	70.604.627,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	13.818.651.624,04	13.810.833.400,00	(7.818.224,04)	99,94	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	11.735.652.364,04	11.715.574.140,00	(20.078.224,04)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.735.652.364,04	11.715.574.140,00	(20.078.224,04)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	2.082.999.260,00	2.095.259.260,00	12.260.000,00	100,58	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.517.959.160,00	1.528.459.160,00	10.500.000,00	100,69	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	565.040.100,00	566.800.100,00	1.760.000,00	100,31	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH DASAR	256.610.646,00	256.610.646,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1	BELANJA OPERASI	256.610.646,00	256.610.646,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.610.646,00	256.610.646,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031		PEMBANGUNAN LABORATORIUM SEKOLAH DASAR	909.154.953,00	792.008.380,00	(117.146.573,00)	87,11	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2	BELANJA MODAL	909.154.953,00	792.008.380,00	(117.146.573,00)	87,11	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.982.700,00	94.788.450,00	(194.250,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	814.172.253,00	697.219.930,00	(116.952.323,00)	85,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035		PEMBINAAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) UNTUK PENDIDIKAN	49.753.077,00	49.753.077,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1	BELANJA OPERASI	49.753.077,00	49.753.077,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.753.077,00	49.753.077,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036		PENGEMBANGAN KONTEN DIGITAL UNTUK PENDIDIKAN	50.003.150,00	49.999.862,00	(3.288,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1	BELANJA OPERASI	50.003.150,00	49.999.862,00	(3.288,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.003.150,00	49.999.862,00	(3.288,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	149.997.447,00	149.997.447,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	149.997.447,00	149.997.447,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.997.447,00	149.997.447,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	445.742.631,00	444.117.331,00	(1.625.300,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1	BELANJA OPERASI	59.624.331,00	59.624.331,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.624.331,00	59.624.331,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2	BELANJA MODAL	386.118.300,00	384.493.000,00	(1.625.300,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	386.118.300,00	384.493.000,00	(1.625.300,00)	99,57	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	1.434.321.972,00	1.246.000.725,00	(188.321.247,00)	86,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1	BELANJA OPERASI	205.796.473,00	70.686.846,00	(135.109.627,00)	34,34	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.935.846,00	5.935.846,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.1.05	Belanja Hibah	199.860.627,00	64.751.000,00	(135.109.627,00)	32,39	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2	BELANJA MODAL	1.228.525.499,00	1.175.313.879,00	(53.211.620,00)	95,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	192.579.450,00	192.579.450,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.035.946.049,00	982.734.429,00	(53.211.620,00)	94,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	3.911.845.026,00	3.259.637.314,00	(652.207.712,00)	83,32	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1	BELANJA OPERASI	200.041.814,00	188.877.000,00	(11.164.814,00)	94,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.500,00	236.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.1.05	Belanja Hibah	199.805.314,00	188.640.500,00	(11.164.814,00)	94,41	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2	BELANJA MODAL	3.711.803.212,00	3.070.760.314,00	(641.042.898,00)	82,72	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	314.274.300,00	314.274.300,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.397.528.912,00	2.756.486.014,00	(641.042.898,00)	81,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02		PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	15.021.387.226,00	14.547.294.635,00	(474.092.591,00)	96,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0003		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	665.873.646,00	665.042.297,00	(831.349,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	665.873.646,00	665.042.297,00	(831.349,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	665.873.646,00	665.042.297,00	(831.349,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0004		PEMBANGUNAN RUANG UNIT KESEHATAN SEKOLAH	465.298.979,00	462.300.676,00	(2.998.303,00)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2	BELANJA MODAL	465.298.979,00	462.300.676,00	(2.998.303,00)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	465.298.979,00	462.300.676,00	(2.998.303,00)	99,35	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0006		PEMBANGUNAN LABORATORIUM	497.753.644,00	496.771.469,00	(982.175,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2	BELANJA MODAL	497.753.644,00	496.771.469,00	(982.175,00)	99,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	497.753.644,00	496.771.469,00	(982.175,00)	99,80	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	3.251.728.704,00	2.941.349.020,00	(310.379.684,00)	90,45	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	689.247.129,00	676.534.729,00	(12.712.400,00)	98,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	419.777.229,00	407.310.229,00	(12.467.000,00)	97,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.1.05	Belanja Hibah	269.469.900,00	269.224.500,00	(245.400,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2	BELANJA MODAL	2.562.481.575,00	2.264.814.291,00	(297.667.284,00)	88,38	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.250.000,00	88.365.000,00	(1.885.000,00)	97,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.472.231.575,00	2.176.449.291,00	(295.782.284,00)	88,03	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014		REHABILITASI SEDANG/BERAT RUANG KELAS SEKOLAH	1.792.830.478,00	1.783.337.404,00	(9.493.074,00)	99,47	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	206.675.833,00	206.585.500,00	(90.333,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.668.500,00	6.660.000,00	(8.500,00)	99,87	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.1.05	Belanja Hibah	200.007.333,00	199.925.500,00	(81.833,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	1.586.154.645,00	1.576.751.904,00	(9.402.741,00)	99,40	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	281.562.600,00	281.562.600,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.304.592.045,00	1.295.189.304,00	(9.402.741,00)	99,27	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0017		REHABILITASI SEDANG/BERAT PERPUSTAKAAN SEKOLAH	185.024.177,00	182.705.922,00	(2.318.255,00)	98,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2	BELANJA MODAL	185.024.177,00	182.705.922,00	(2.318.255,00)	98,74	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.703.050,00	24.259.050,00	(444.000,00)	98,20	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0017	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	160.321.127,00	158.446.872,00	(1.874.255,00)	98,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0018		REHABILITASI SEDANG/BERAT LABORATORIUM	497.753.644,00	493.610.825,00	(4.142.819,00)	99,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2	BELANJA MODAL	497.753.644,00	493.610.825,00	(4.142.819,00)	99,16	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.027.050,00	34.027.050,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	463.726.594,00	459.583.775,00	(4.142.819,00)	99,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0024		REHABILITASI SEDANG/BERAT SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS SEKOLAH	55.305.130,00	54.887.837,00	(417.293,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2	BELANJA MODAL	55.305.130,00	54.887.837,00	(417.293,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0024	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.305.130,00	54.887.837,00	(417.293,00)	99,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025		PENGADAAN MEBEL SEKOLAH	199.750.786,00	198.059.886,00	(1.690.900,00)	99,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	199.750.786,00	198.059.886,00	(1.690.900,00)	99,15	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.029.886,00	3.029.886,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	5.1.05	Belanja Hibah	196.720.900,00	195.030.000,00	(1.690.900,00)	99,14	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032		PENYEDIAAN BIAYA PERSONIL PESERTA DIDIK SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	80.641.443,00	80.641.443,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	80.641.443,00	80.641.443,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.641.443,00	80.641.443,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS SISWA	251.711.766,00	251.711.766,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1	BELANJA OPERASI	251.711.766,00	251.711.766,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	251.711.766,00	251.711.766,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040		PENGEMBANGAN KARIR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	49.911.842,00	49.911.842,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	49.911.842,00	49.911.842,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.911.842,00	49.911.842,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH	177.791.887,00	177.783.867,00	(8.020,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	177.791.887,00	177.783.867,00	(8.020,00)	99,99	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	177.791.887,00	177.783.867,00	(8.020,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042		PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	5.610.231.000,00	5.605.501.000,00	(4.730.000,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	5.009.520.998,00	5.004.790.998,00	(4.730.000,00)	99,90	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.662.480.998,00	4.657.813.998,00	(4.667.000,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.1.05	Belanja Hibah	347.040.000,00	346.977.000,00	(63.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2	BELANJA MODAL	600.710.002,00	600.710.002,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	445.520.100,00	445.520.100,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	155.189.902,00	155.189.902,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOS SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	171.089.097,00	171.089.097,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1	BELANJA OPERASI	171.089.097,00	171.089.097,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.089.097,00	171.089.097,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	149.998.916,00	149.998.916,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1	BELANJA OPERASI	149.998.916,00	149.998.916,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.998.916,00	149.998.916,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052		SOSIALISASI DAN ADVOKASI KEBIJAKAN BIDANG PENDIDIKAN	100.543.205,00	100.493.205,00	(50.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1	BELANJA OPERASI	100.543.205,00	100.493.205,00	(50.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.543.205,00	100.493.205,00	(50.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	411.469.577,00	275.623.858,00	(135.845.719,00)	66,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1	BELANJA OPERASI	404.778.629,00	269.023.858,00	(135.754.771,00)	66,46	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.460.154,00	2.460.154,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.1.05	Belanja Hibah	402.318.475,00	266.563.704,00	(135.754.771,00)	66,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2	BELANJA MODAL	6.690.948,00	6.600.000,00	(90.948,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.690.948,00	6.600.000,00	(90.948,00)	98,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	199.851.472,00	199.851.472,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1	BELANJA OPERASI	199.851.472,00	199.851.472,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.851.472,00	199.851.472,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061		PERLENGKAPAN DASAR BUKU TEKS DAN NON TEKS PESERTA DIDIK	155.761.583,00	155.556.583,00	(205.000,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1	BELANJA OPERASI	4.911.583,00	4.911.583,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.911.583,00	4.911.583,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.2	BELANJA MODAL	150.850.000,00	150.645.000,00	(205.000,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.850.000,00	150.645.000,00	(205.000,00)	99,86	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062		PENGADAAN PERLENGKAPAN PESERTA DIDIK	51.066.250,00	51.066.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1	BELANJA OPERASI	51.066.250,00	51.066.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.066.250,00	51.066.250,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03		PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)	6.392.368.244,00	6.317.934.048,00	(74.434.196,00)	98,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002		PEMBANGUNAN SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS PAUD	1.861.424.163,00	1.810.531.056,00	(50.893.107,00)	97,26	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.412.000.472,00	1.380.926.839,00	(31.073.633,00)	97,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.021.000,00	81.021.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	1.330.979.472,00	1.299.905.839,00	(31.073.633,00)	97,66	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	449.423.691,00	429.604.217,00	(19.819.474,00)	95,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	449.423.691,00	429.604.217,00	(19.819.474,00)	95,59	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003		REHABILITASI SEDANG/BERAT GEDUNG/RUANG KELAS/RUANG GURU PAUD	474.002.928,00	468.166.870,00	(5.836.058,00)	98,76	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	298.089.766,00	292.527.182,00	(5.562.584,00)	98,13	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.108.500,00	5.108.500,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	5.1.05	Belanja Hibah	292.981.266,00	287.418.682,00	(5.562.584,00)	98,10	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	175.913.162,00	175.639.688,00	(273.474,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.913.162,00	175.639.688,00	(273.474,00)	99,84	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007		PENGADAAN MEBEL PAUD	112.700.000,00	112.700.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007	5.1.05	Belanja Hibah	62.850.000,00	62.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2	BELANJA MODAL	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.850.000,00	49.850.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012		PENGADAAN ALAT PRAKTIK DAN PERAGA SISWA PAUD	184.500.000,00	184.365.000,00	(135.000,00)	99,92	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1	BELANJA OPERASI	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012	5.1.05	Belanja Hibah	122.000.000,00	122.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2	BELANJA MODAL	62.500.000,00	62.365.000,00	(135.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.500.000,00	62.365.000,00	(135.000,00)	99,78	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN PAUD	226.057.644,00	226.057.644,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1	BELANJA OPERASI	226.057.644,00	226.057.644,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.057.644,00	226.057.644,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018		PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	2.587.800.000,00	2.571.550.000,00	(16.250.000,00)	99,37	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1	BELANJA OPERASI	2.556.259.000,00	2.540.009.000,00	(16.250.000,00)	99,36	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.459.000,00	304.109.000,00	23.650.000,00	108,43	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.1.05	Belanja Hibah	2.275.800.000,00	2.235.900.000,00	(39.900.000,00)	98,24	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2	BELANJA MODAL	31.541.000,00	31.541.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.541.000,00	31.541.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP PAUD	163.267.223,00	163.267.223,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1	BELANJA OPERASI	163.267.223,00	163.267.223,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.267.223,00	163.267.223,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028		PEMBANGUNAN RUANG GURU/KEPALA SEKOLAH/TU	168.230.165,00	167.628.000,00	(602.165,00)	99,64	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028	5.1	BELANJA OPERASI	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2	BELANJA MODAL	166.630.165,00	166.028.000,00	(602.165,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	166.630.165,00	166.028.000,00	(602.165,00)	99,63	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030		PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU	403.743.610,00	403.025.744,00	(717.866,00)	99,82	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1	BELANJA OPERASI	306.083.188,00	305.450.683,00	(632.505,00)	99,79	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.101.922,00	12.781.922,00	(320.000,00)	97,55	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.1.05	Belanja Hibah	292.981.266,00	292.668.761,00	(312.505,00)	99,89	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2	BELANJA MODAL	97.660.422,00	97.575.061,00	(85.361,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.660.422,00	97.575.061,00	(85.361,00)	99,91	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0034		PEMBINAAN MINAT, BAKAT DAN KREATIVITAS PESERTA DIDIK	87.897.840,00	87.897.840,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0034	5.1	BELANJA OPERASI	87.897.840,00	87.897.840,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.897.840,00	87.897.840,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039		BIMBINGAN TEKNIS, PELATIHAN, DAN/ATAU MAGANG/PKL UNTUK PENINGKATAN KAPASITAS BIDANG PENDIDIKAN	122.744.671,00	122.744.671,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1	BELANJA OPERASI	122.744.671,00	122.744.671,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	122.744.671,00	122.744.671,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04		PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	2.704.986.209,00	2.624.636.209,00	(80.350.000,00)	97,02	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016		PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN MANAJEMEN SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	99.657.518,00	99.657.518,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1	BELANJA OPERASI	99.657.518,00	99.657.518,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.657.518,00	99.657.518,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017		PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	2.517.800.000,00	2.437.450.000,00	(80.350.000,00)	96,80	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1	BELANJA OPERASI	2.514.200.000,00	2.434.650.000,00	(79.550.000,00)	96,83	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.900.000,00	34.950.000,00	(36.950.000,00)	48,60	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.1.05	Belanja Hibah	2.442.300.000,00	2.399.700.000,00	(42.600.000,00)	98,25	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2	BELANJA MODAL	3.600.000,00	2.800.000,00	(800.000,00)	77,77	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	800.000,00	0,00	(800.000,00)	0,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0018		PENINGKATAN KAPASITAS PENGELOLAAN DANA BOP SEKOLAH NONFORMAL/KESETARAAN	64.384.610,00	64.384.610,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1	BELANJA OPERASI	64.384.610,00	64.384.610,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.384.610,00	64.384.610,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027		KOORDINASI, PERENCANAAN, SUPERVISI DAN EVALUASI LAYANAN DI BIDANG PENDIDIKAN	23.144.081,00	23.144.081,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1	BELANJA OPERASI	23.144.081,00	23.144.081,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.144.081,00	23.144.081,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	238.639.190,00	238.601.190,00	(38.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01		PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	238.639.190,00	238.601.190,00	(38.000,00)	99,98	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0002		PENYUSUNAN SILABUS MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	94.935.528,00	94.897.528,00	(38.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	94.935.528,00	94.897.528,00	(38.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	94.935.528,00	94.897.528,00	(38.000,00)	99,95	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007		PENYUSUNAN KOMPETENSI DASAR/CAPAIAN PEMBELAJARAN MUATAN LOKAL PENDIDIKAN DASAR	143.703.662,00	143.703.662,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	143.703.662,00	143.703.662,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.703.662,00	143.703.662,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	58.479.074,00	58.479.074,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01		PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	58.479.074,00	58.479.074,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001		PERHITUNGAN DAN PEMETAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002		PENATAAN PENDISTRIBUSIAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD, DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	10.479.074,00	10.479.074,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.479.074,00	10.479.074,00	0,00	100,00	
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.479.074,00	10.479.074,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
Organisasi : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	827.567.244,00	813.126.564,00	(14.440.680,00)	98,25	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	642.512.371,00	628.071.691,00	(14.440.680,00)	97,75	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01		PENGELOLAAN KEBUDAYAAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	142.512.553,00	142.328.553,00	(184.000,00)	99,87	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002		PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA, LEMBAGA, DAN PRANATA KEBUDAYAAN	142.512.553,00	142.328.553,00	(184.000,00)	99,87	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	142.512.553,00	142.328.553,00	(184.000,00)	99,87	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	142.512.553,00	142.328.553,00	(184.000,00)	99,87	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03		PEMBINAAN LEMBAGA ADAT YANG PENGANUTNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	499.999.818,00	485.743.138,00	(14.256.680,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBINAAN LEMBAGA ADAT	499.999.818,00	485.743.138,00	(14.256.680,00)	97,14	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.841.138,00	5.841.138,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.841.138,00	5.841.138,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	494.158.680,00	479.902.000,00	(14.256.680,00)	97,11	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	494.158.680,00	479.902.000,00	(14.256.680,00)	97,11	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	185.054.873,00	185.054.873,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01		PEMBINAAN KESENIAN YANG MASYARAKAT PELAKUNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	185.054.873,00	185.054.873,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001		PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA KESENIAN TRADISIONAL	85.054.896,00	85.054.896,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	85.054.896,00	85.054.896,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.054.896,00	85.054.896,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA LEMBAGA KESENIAN TRADISIONAL	99.999.977,00	99.999.977,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.977,00	99.999.977,00	0,00	100,00	
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.977,00	99.999.977,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : DINAS KESEHATAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	15.000.761.361,00	13.079.239.619,91	(1.921.521.741,09)	87,19	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.744.144.425,00	5.386.710.716,91	(1.357.433.708,09)	79,87	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.744.144.425,00	5.143.267.855,00	(1.600.876.570,00)	76,26	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	243.442.861,91	243.442.861,91	0,00	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.256.616.936,00	7.692.528.903,00	(564.088.033,00)	93,16	
	1.02.0.00.0.00.01.0000		4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.256.616.936,00	7.692.528.903,00	(564.088.033,00)	93,16	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	112.124.261.239,00	109.115.889.287,91	(3.008.371.951,09)	97,31	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.225.311.237,00	32.021.890.113,00	(203.421.124,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	147.378.008,00	142.352.500,00	(5.025.508,00)	96,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	79.271.498,00	78.011.000,00	(1.260.498,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	79.271.498,00	78.011.000,00	(1.260.498,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.271.498,00	78.011.000,00	(1.260.498,00)	98,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	9.920.419,00	9.914.500,00	(5.919,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.920.419,00	9.914.500,00	(5.919,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.920.419,00	9.914.500,00	(5.919,00)	99,94	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.217.836,00	7.715.000,00	(502.836,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.217.836,00	7.715.000,00	(502.836,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.217.836,00	7.715.000,00	(502.836,00)	93,88	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.478.179,00	9.174.000,00	(304.179,00)	96,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.478.179,00	9.174.000,00	(304.179,00)	96,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.478.179,00	9.174.000,00	(304.179,00)	96,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	7.487.364,00	5.839.500,00	(1.647.864,00)	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.487.364,00	5.839.500,00	(1.647.864,00)	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.487.364,00	5.839.500,00	(1.647.864,00)	77,99	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	33.002.712,00	31.698.500,00	(1.304.212,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.002.712,00	31.698.500,00	(1.304.212,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.002.712,00	31.698.500,00	(1.304.212,00)	96,04	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	30.632.508.345,00	30.508.941.894,00	(123.566.451,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	30.550.846.093,00	30.428.047.142,00	(122.798.951,00)	99,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.550.846.093,00	30.428.047.142,00	(122.798.951,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	30.550.846.093,00	30.428.047.142,00	(122.798.951,00)	99,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	14.247.348,00	14.004.848,00	(242.500,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	14.247.348,00	14.004.848,00	(242.500,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.247.348,00	14.004.848,00	(242.500,00)	98,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	67.414.904,00	66.889.904,00	(525.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	67.414.904,00	66.889.904,00	(525.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.414.904,00	66.889.904,00	(525.000,00)	99,22	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	16.928.825,00	15.768.825,00	(1.160.000,00)	93,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	7.563.634,00	7.563.634,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	7.563.634,00	7.563.634,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.563.634,00	7.563.634,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	9.365.191,00	8.205.191,00	(1.160.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.365.191,00	8.205.191,00	(1.160.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.365.191,00	8.205.191,00	(1.160.000,00)	87,61	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	136.850.484,00	129.420.484,00	(7.430.000,00)	94,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	78.000.000,00	73.300.000,00	(4.700.000,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.000.000,00	73.300.000,00	(4.700.000,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	73.300.000,00	(4.700.000,00)	93,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	18.010.484,00	15.820.484,00	(2.190.000,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	18.010.484,00	15.820.484,00	(2.190.000,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.010.484,00	15.820.484,00	(2.190.000,00)	87,84	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	31.840.000,00	31.300.000,00	(540.000,00)	98,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	31.840.000,00	31.300.000,00	(540.000,00)	98,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.840.000,00	31.300.000,00	(540.000,00)	98,30	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	650.647.511,00	632.076.461,00	(18.571.050,00)	97,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	262.907.811,00	260.825.998,00	(2.081.813,00)	99,20	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	31.786.271,00	31.586.271,00	(200.000,00)	99,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.786.271,00	31.586.271,00	(200.000,00)	99,37	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	231.121.540,00	229.239.727,00	(1.881.813,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	231.121.540,00	229.239.727,00	(1.881.813,00)	99,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	11.712.400,00	11.712.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.712.400,00	11.712.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.712.400,00	11.712.400,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.815.500,00	16.786.500,00	(29.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.815.500,00	16.786.500,00	(29.000,00)	99,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.815.500,00	16.786.500,00	(29.000,00)	99,82	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	33.825.000,00	32.135.000,00	(1.690.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	33.825.000,00	32.135.000,00	(1.690.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.825.000,00	32.135.000,00	(1.690.000,00)	95,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	325.386.800,00	310.616.563,00	(14.770.237,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	325.386.800,00	310.616.563,00	(14.770.237,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	325.386.800,00	310.616.563,00	(14.770.237,00)	95,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	70.867.000,00	70.817.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	70.867.000,00	70.817.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.1.01	Belanja Pegawai	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2	BELANJA MODAL	63.067.000,00	63.017.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	63.067.000,00	63.017.000,00	(50.000,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	202.164.000,00	195.648.755,00	(6.515.245,00)	96,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	151.164.000,00	145.248.755,00	(5.915.245,00)	96,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.164.000,00	145.248.755,00	(5.915.245,00)	96,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.164.000,00	145.248.755,00	(5.915.245,00)	96,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	51.000.000,00	50.400.000,00	(600.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	51.000.000,00	50.400.000,00	(600.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.000.000,00	50.400.000,00	(600.000,00)	98,82	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	257.855.500,00	228.037.630,00	(29.817.870,00)	88,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	151.910.000,00	126.040.630,00	(25.869.370,00)	82,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	151.910.000,00	126.040.630,00	(25.869.370,00)	82,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.910.000,00	126.040.630,00	(25.869.370,00)	82,97	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	105.945.500,00	101.997.000,00	(3.948.500,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	105.945.500,00	101.997.000,00	(3.948.500,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.945.500,00	101.997.000,00	(3.948.500,00)	96,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	110.111.564,00	98.826.564,00	(11.285.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	110.111.564,00	98.826.564,00	(11.285.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	110.111.564,00	98.826.564,00	(11.285.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	110.111.564,00	98.826.564,00	(11.285.000,00)	89,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	78.637.715.659,00	75.939.143.553,91	(2.698.572.105,09)	96,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.401.268.968,00	28.316.821.716,00	(84.447.252,00)	99,70	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002		PEMBANGUNAN PUSKESMAS	10.673.200.645,00	10.645.280.384,00	(27.920.261,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	895.162.703,00	874.243.244,00	(20.919.459,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.162.703,00	874.243.244,00	(20.919.459,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	9.778.037.942,00	9.771.037.140,00	(7.000.802,00)	99,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	373.037.942,00	367.375.000,00	(5.662.942,00)	98,48	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.405.000.000,00	9.403.662.140,00	(1.337.860,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003		PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	9.693.708.856,00	9.648.407.800,00	(45.301.056,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	81.708.994,00	81.133.800,00	(575.194,00)	99,29	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.708.994,00	81.133.800,00	(575.194,00)	99,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	9.611.999.862,00	9.567.274.000,00	(44.725.862,00)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.462.000.000,00	6.422.000.000,00	(40.000.000,00)	99,38	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	749.999.862,00	745.274.000,00	(4.725.862,00)	99,36	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.400.000.000,00	2.400.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004		PEMBANGUNAN RUMAH DINAS TENAGA KESEHATAN	3.463.405.338,00	3.455.468.750,00	(7.936.588,00)	99,77	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	185.890.758,00	185.061.750,00	(829.008,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.890.758,00	185.061.750,00	(829.008,00)	99,55	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.277.514.580,00	3.270.407.000,00	(7.107.580,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.277.514.580,00	3.270.407.000,00	(7.107.580,00)	99,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010		REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.565.000,00	41.565.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020		PEMELIHARAAN RUTIN DAN BERKALA ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	54.400.000,00	54.046.000,00	(354.000,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	54.400.000,00	54.046.000,00	(354.000,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.400.000,00	54.046.000,00	(354.000,00)	99,34	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	4.454.989.129,00	4.452.053.782,00	(2.935.347,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	4.454.989.129,00	4.452.053.782,00	(2.935.347,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.454.989.129,00	4.452.053.782,00	(2.935.347,00)	99,93	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	50.222.178.671,00	47.609.833.177,91	(2.612.345.493,09)	94,79	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	195.380.000,00	192.390.000,00	(2.990.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	195.380.000,00	192.390.000,00	(2.990.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.380.000,00	192.390.000,00	(2.990.000,00)	98,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	137.386.000,00	96.990.000,00	(40.396.000,00)	70,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	137.386.000,00	96.990.000,00	(40.396.000,00)	70,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.386.000,00	96.990.000,00	(40.396.000,00)	70,59	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	46.375.000,00	46.250.000,00	(125.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	46.375.000,00	46.250.000,00	(125.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.375.000,00	46.250.000,00	(125.000,00)	99,73	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	598.958.500,00	581.503.500,00	(17.455.000,00)	97,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	598.958.500,00	581.503.500,00	(17.455.000,00)	97,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	598.958.500,00	581.503.500,00	(17.455.000,00)	97,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	640.535.282,00	621.712.532,00	(18.822.750,00)	97,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1	BELANJA OPERASI	640.535.282,00	621.712.532,00	(18.822.750,00)	97,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	640.535.282,00	621.712.532,00	(18.822.750,00)	97,06	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV	130.987.141,00	129.867.141,00	(1.120.000,00)	99,14	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	130.987.141,00	129.867.141,00	(1.120.000,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	130.987.141,00	129.867.141,00	(1.120.000,00)	99,14	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN GIZI MASYARAKAT	2.210.066.652,00	1.308.128.500,00	(901.938.152,00)	59,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.210.066.652,00	1.308.128.500,00	(901.938.152,00)	59,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.210.066.652,00	1.308.128.500,00	(901.938.152,00)	59,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN LINGKUNGAN	615.750.268,00	613.058.349,00	(2.691.919,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	615.750.268,00	613.058.349,00	(2.691.919,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	615.750.268,00	613.058.349,00	(2.691.919,00)	99,56	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018		PENGELOLAAN PELAYANAN PROMOSI KESEHATAN	206.160.000,00	179.630.000,00	(26.530.000,00)	87,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1	BELANJA OPERASI	206.160.000,00	179.630.000,00	(26.530.000,00)	87,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	206.160.000,00	179.630.000,00	(26.530.000,00)	87,13	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020		PENGELOLAAN SURVEILANS KESEHATAN	669.871.487,00	625.754.472,00	(44.117.015,00)	93,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1	BELANJA OPERASI	669.871.487,00	625.754.472,00	(44.117.015,00)	93,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	669.871.487,00	625.754.472,00	(44.117.015,00)	93,41	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA DAN NAPZA	29.160.000,00	17.280.000,00	(11.880.000,00)	59,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1	BELANJA OPERASI	29.160.000,00	17.280.000,00	(11.880.000,00)	59,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.160.000,00	17.280.000,00	(11.880.000,00)	59,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025		PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	1.803.644.384,00	2.180.971.501,91	377.327.117,91	120,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1	BELANJA OPERASI	1.803.644.384,00	2.180.971.501,91	377.327.117,91	120,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.803.644.384,00	2.180.971.501,91	377.327.117,91	120,92	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026		PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT	36.104.992.790,00	35.088.607.290,00	(1.016.385.500,00)	97,18	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1	BELANJA OPERASI	35.576.107.472,00	34.578.170.590,00	(997.936.882,00)	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.576.107.472,00	34.578.170.590,00	(997.936.882,00)	97,19	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2	BELANJA MODAL	528.885.318,00	510.436.700,00	(18.448.618,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	528.885.318,00	510.436.700,00	(18.448.618,00)	96,51	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028		PENGAMBILAN DAN PENGIRIMAN SPESIMEN PENYAKIT POTENSIAL KLB KE LABORATORIUM RUJUKAN/NASIONAL	20.300.000,00	16.000.000,00	(4.300.000,00)	78,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1	BELANJA OPERASI	20.300.000,00	16.000.000,00	(4.300.000,00)	78,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	16.000.000,00	(4.300.000,00)	78,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033		OPERASIONAL PELAYANAN PUSKESMAS	2.597.538.389,00	2.032.789.341,00	(564.749.048,00)	78,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1	BELANJA OPERASI	2.597.538.389,00	2.032.789.341,00	(564.749.048,00)	78,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.01	Belanja Pegawai	915.549.000,00	694.104.827,00	(221.444.173,00)	75,81	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.681.989.389,00	1.338.684.514,00	(343.304.875,00)	79,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034		OPERASIONAL PELAYANAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA	2.892.077.600,00	2.738.164.091,00	(153.913.509,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1	BELANJA OPERASI	2.892.077.600,00	2.738.164.091,00	(153.913.509,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.892.077.600,00	2.738.164.091,00	(153.913.509,00)	94,67	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035		PELAKSANAAN AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA	38.240.000,00	26.540.000,00	(11.700.000,00)	69,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1	BELANJA OPERASI	38.240.000,00	26.540.000,00	(11.700.000,00)	69,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.240.000,00	26.540.000,00	(11.700.000,00)	69,40	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036		INVESTIGASI AWAL KEJADIAN TIDAK DIHARAPKAN (KEJADIAN IKUTAN PASCA IMUNISASI DAN PEMBERIAN OBAT MASSAL)	53.680.000,00	48.060.000,00	(5.620.000,00)	89,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1	BELANJA OPERASI	53.680.000,00	48.060.000,00	(5.620.000,00)	89,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.680.000,00	48.060.000,00	(5.620.000,00)	89,53	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TUBERKULOSIS	68.285.000,00	59.240.000,00	(9.045.000,00)	86,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1	BELANJA OPERASI	68.285.000,00	59.240.000,00	(9.045.000,00)	86,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.285.000,00	59.240.000,00	(9.045.000,00)	86,75	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN HIV (ODHIV)	24.075.000,00	20.120.000,00	(3.955.000,00)	83,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1	BELANJA OPERASI	24.075.000,00	20.120.000,00	(3.955.000,00)	83,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.075.000,00	20.120.000,00	(3.955.000,00)	83,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN MALARIA	105.111.000,00	94.908.960,00	(10.202.040,00)	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1	BELANJA OPERASI	105.111.000,00	94.908.960,00	(10.202.040,00)	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.111.000,00	94.908.960,00	(10.202.040,00)	90,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044		PENGELOLAAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI	90.630.000,00	85.165.000,00	(5.465.000,00)	93,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1	BELANJA OPERASI	90.630.000,00	85.165.000,00	(5.465.000,00)	93,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.630.000,00	85.165.000,00	(5.465.000,00)	93,96	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0045		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA	13.420.178,00	0,00	(13.420.178,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0045	5.1	BELANJA OPERASI	13.420.178,00	0,00	(13.420.178,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0045	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.420.178,00	0,00	(13.420.178,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046		PENGELOLAAN UPAYA KESEHATAN IBU DAN ANAK	929.554.000,00	806.702.500,00	(122.851.500,00)	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1	BELANJA OPERASI	929.554.000,00	806.702.500,00	(122.851.500,00)	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	929.554.000,00	806.702.500,00	(122.851.500,00)	86,78	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03		PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN SECARA TERINTEGRASI	14.268.020,00	12.488.660,00	(1.779.360,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN	14.268.020,00	12.488.660,00	(1.779.360,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.268.020,00	12.488.660,00	(1.779.360,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.268.020,00	12.488.660,00	(1.779.360,00)	87,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	820.551.658,00	730.968.749,00	(89.582.909,00)	89,08	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01		PEMBERIAN IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	43.577.854,00	41.442.854,00	(2.135.000,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TENAGA KESEHATAN SERTA TINDAK LANJUT PERIZINAN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN	43.577.854,00	41.442.854,00	(2.135.000,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	43.577.854,00	41.442.854,00	(2.135.000,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.577.854,00	41.442.854,00	(2.135.000,00)	95,10	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02		PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN UNTUK UKP DAN UKM DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA	88.178.518,00	73.446.018,00	(14.732.500,00)	83,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	88.178.518,00	73.446.018,00	(14.732.500,00)	83,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	88.178.518,00	73.446.018,00	(14.732.500,00)	83,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.178.518,00	73.446.018,00	(14.732.500,00)	83,29	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	688.795.286,00	616.079.877,00	(72.715.409,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001		PENGEMBANGAN MUTU DAN PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	688.795.286,00	616.079.877,00	(72.715.409,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	688.795.286,00	616.079.877,00	(72.715.409,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	688.795.286,00	616.079.877,00	(72.715.409,00)	89,44	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.176.042,00	10.175.000,00	(1.042,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01		PEMBERIAN IZIN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	10.176.042,00	10.175.000,00	(1.042,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001		PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SERTA TINDAK LANJUT PENGAWASAN PERIZINAN APOTEK, TOKO OBAT, TOKO ALAT KESEHATAN, DAN OPTIKAL, USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)	10.176.042,00	10.175.000,00	(1.042,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.176.042,00	10.175.000,00	(1.042,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.176.042,00	10.175.000,00	(1.042,00)	99,98	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	430.506.643,00	413.711.872,00	(16.794.771,00)	96,09	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01		ADVOKASI, PEMBERDAYAAN, KEMITRAAN, PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN LINTAS SEKTOR TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	319.386.643,00	317.786.872,00	(1.599.771,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001		PENINGKATAN UPAYA PROMOSI KESEHATAN, ADVOKASI, KEMITRAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	319.386.643,00	317.786.872,00	(1.599.771,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	319.386.643,00	317.786.872,00	(1.599.771,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	319.386.643,00	317.786.872,00	(1.599.771,00)	99,49	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03		PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	111.120.000,00	95.925.000,00	(15.195.000,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001		BIMBINGAN TEKNIS DAN SUPERVISI PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)	111.120.000,00	95.925.000,00	(15.195.000,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.120.000,00	95.925.000,00	(15.195.000,00)	86,32	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.120.000,00	95.925.000,00	(15.195.000,00)	86,32	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Organisasi : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4	PENDAPATAN DAERAH	19.829.616.703,00	22.054.466.670,86	2.224.849.967,86	111,21	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	19.829.616.703,00	22.054.466.670,86	2.224.849.967,86	111,21	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.02	Retribusi Daerah	1.829.616.703,00	2.026.718.214,00	197.101.511,00	110,77	
	1.02.0.00.0.00.01.0001		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	18.000.000.000,00	20.027.748.456,86	2.027.748.456,86	111,26	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	56.891.147.353,60	56.003.107.446,00	(888.039.907,60)	98,43	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.607.716.050,60	29.469.857.471,00	(137.858.579,60)	99,53	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	11.598.716.050,60	11.537.032.810,00	(61.683.240,60)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	11.598.716.050,60	11.537.032.810,00	(61.683.240,60)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	11.598.716.050,60	11.537.032.810,00	(61.683.240,60)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	11.598.716.050,60	11.537.032.810,00	(61.683.240,60)	99,46	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10		PENINGKATAN PELAYANAN BLUD	18.000.000.000,00	17.923.824.661,00	(76.175.339,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001		PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	18.000.000.000,00	17.923.824.661,00	(76.175.339,00)	99,57	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.637.917.850,00	17.564.948.661,00	(72.969.189,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.637.917.850,00	17.564.948.661,00	(72.969.189,00)	99,58	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2	BELANJA MODAL	362.082.150,00	358.876.000,00	(3.206.150,00)	99,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	362.082.150,00	358.876.000,00	(3.206.150,00)	99,11	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	27.283.431.303,00	26.533.249.975,00	(750.181.328,00)	97,25	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01		PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	20.115.508.784,00	19.646.573.872,00	(468.934.912,00)	97,66	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014		PENGADAAN ALAT KESEHATAN/ALAT PENUNJANG MEDIK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	5.883.507,00	0,00	(5.883.507,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2	BELANJA MODAL	5.883.507,00	0,00	(5.883.507,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.883.507,00	0,00	(5.883.507,00)	0,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022		PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT	19.655.095.277,00	19.194.984.252,00	(460.111.025,00)	97,65	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	100,00	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2	BELANJA MODAL	19.280.095.277,00	18.819.984.252,00	(460.111.025,00)	97,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.202.095.588,00	18.070.537.052,00	(131.558.536,00)	99,27	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.077.999.689,00	749.447.200,00	(328.552.489,00)	69,52	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023		PENGADAAN OBAT, BAHAN HABIS PAKAI, BAHAN MEDIS HABIS PAKAI,, VAKSIN, MAKANAN DAN MINUMAN DI FASILITAS KESEHATAN	454.530.000,00	451.589.620,00	(2.940.380,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	454.530.000,00	451.589.620,00	(2.940.380,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.530.000,00	451.589.620,00	(2.940.380,00)	99,35	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN KESEHATAN UNTUK UKM DAN UKP RUJUKAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.167.922.519,00	6.886.676.103,00	(281.246.416,00)	96,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032		OPERASIONAL PELAYANAN RUMAH SAKIT	7.167.922.519,00	6.886.676.103,00	(281.246.416,00)	96,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1	BELANJA OPERASI	7.167.922.519,00	6.886.676.103,00	(281.246.416,00)	96,07	
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.167.922.519,00	6.886.676.103,00	(281.246.416,00)	96,07	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Organisasi : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	6.612.488.250,00	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.612.488.250,00	6.288.605.270,00	(323.882.980,00)	95,10	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	6.462.488.250,00	6.288.605.270,00	(173.882.980,00)	97,30	
	1.03.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	150.000.000,00	0,00	(150.000.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	75.341.817.198,22	71.020.561.696,00	(4.321.255.502,22)	94,26	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.288.755.868,00	3.202.719.604,00	(86.036.264,00)	97,38	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	83.945.535,00	83.586.000,00	(359.535,00)	99,57	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	9.491.614,00	9.480.000,00	(11.614,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.491.614,00	9.480.000,00	(11.614,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.491.614,00	9.480.000,00	(11.614,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.999.641,00	12.948.000,00	(51.641,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.999.641,00	12.948.000,00	(51.641,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.999.641,00	12.948.000,00	(51.641,00)	99,60	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	16.493.604,00	16.413.000,00	(80.604,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.493.604,00	16.413.000,00	(80.604,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.493.604,00	16.413.000,00	(80.604,00)	99,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	12.989.228,00	12.940.000,00	(49.228,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.989.228,00	12.940.000,00	(49.228,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.989.228,00	12.940.000,00	(49.228,00)	99,62	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	16.488.909,00	16.455.000,00	(33.909,00)	99,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.488.909,00	16.455.000,00	(33.909,00)	99,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.488.909,00	16.455.000,00	(33.909,00)	99,79	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.482.539,00	15.350.000,00	(132.539,00)	99,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.482.539,00	15.350.000,00	(132.539,00)	99,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.482.539,00	15.350.000,00	(132.539,00)	99,14	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.406.298.477,00	2.369.173.766,00	(37.124.711,00)	98,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.380.317.873,00	2.343.283.766,00	(37.034.107,00)	98,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.380.317.873,00	2.343.283.766,00	(37.034.107,00)	98,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.380.317.873,00	2.343.283.766,00	(37.034.107,00)	98,44	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.493.926,00	7.450.000,00	(43.926,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.493.926,00	7.450.000,00	(43.926,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.493.926,00	7.450.000,00	(43.926,00)	99,41	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	18.486.678,00	18.440.000,00	(46.678,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.486.678,00	18.440.000,00	(46.678,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.486.678,00	18.440.000,00	(46.678,00)	99,74	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	18.492.898,00	18.490.000,00	(2.898,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	18.492.898,00	18.490.000,00	(2.898,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	18.492.898,00	18.490.000,00	(2.898,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.492.898,00	18.490.000,00	(2.898,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	113.750.308,00	100.505.000,00	(13.245.308,00)	88,35	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	68.890.308,00	68.835.000,00	(55.308,00)	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	68.890.308,00	68.835.000,00	(55.308,00)	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.890.308,00	68.835.000,00	(55.308,00)	99,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	44.860.000,00	31.670.000,00	(13.190.000,00)	70,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	44.860.000,00	31.670.000,00	(13.190.000,00)	70,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.860.000,00	31.670.000,00	(13.190.000,00)	70,59	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	427.919.885,00	427.499.853,00	(420.032,00)	99,90	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.091.000,00	7.000.000,00	(91.000,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.091.000,00	7.000.000,00	(91.000,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.091.000,00	7.000.000,00	(91.000,00)	98,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	35.600.000,00	35.530.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	35.600.000,00	35.530.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.600.000,00	35.530.000,00	(70.000,00)	99,80	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	39.950.000,00	39.835.000,00	(115.000,00)	99,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	39.950.000,00	39.835.000,00	(115.000,00)	99,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.950.000,00	39.835.000,00	(115.000,00)	99,71	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	328.791.000,00	328.744.853,00	(46.147,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	328.791.000,00	328.744.853,00	(46.147,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	328.791.000,00	328.744.853,00	(46.147,00)	99,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	16.487.885,00	16.390.000,00	(97.885,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	16.487.885,00	16.390.000,00	(97.885,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.487.885,00	16.390.000,00	(97.885,00)	99,40	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	151.599.415,00	127.840.565,00	(23.758.850,00)	84,32	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	135.999.415,00	112.240.565,00	(23.758.850,00)	82,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	135.999.415,00	112.240.565,00	(23.758.850,00)	82,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	135.999.415,00	112.240.565,00	(23.758.850,00)	82,53	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	86.749.350,00	75.624.420,00	(11.124.930,00)	87,17	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	40.708.950,00	37.106.420,00	(3.602.530,00)	91,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.708.950,00	37.106.420,00	(3.602.530,00)	91,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.708.950,00	37.106.420,00	(3.602.530,00)	91,15	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	14.700.000,00	7.218.000,00	(7.482.000,00)	49,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.700.000,00	7.218.000,00	(7.482.000,00)	49,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	7.218.000,00	(7.482.000,00)	49,10	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	31.340.400,00	31.300.000,00	(40.400,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	31.340.400,00	31.300.000,00	(40.400,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.340.400,00	31.300.000,00	(40.400,00)	99,87	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.476.701.571,00	2.936.148.500,00	(540.553.071,00)	84,45	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01		PENGELOLAAN SDA DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI PADA WILAYAH SUNGAI (WS) DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.320.505.502,00	2.885.059.500,00	(435.446.002,00)	86,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109		PEMBANGUNAN BANGUNAN PERKUATAN TEBING	44.351.000,00	0,00	(44.351.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2	BELANJA MODAL	44.351.000,00	0,00	(44.351.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	44.351.000,00	0,00	(44.351.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115		PEMBANGUNAN TANGGUL SUNGAI	627.657.404,00	413.330.800,00	(214.326.604,00)	65,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2	BELANJA MODAL	627.657.404,00	413.330.800,00	(214.326.604,00)	65,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	627.657.404,00	413.330.800,00	(214.326.604,00)	65,85	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117		PEMBANGUNAN SEAWALL DAN BANGUNAN PENGAMAN PANTAI LAINNYA	274.877.666,00	263.573.000,00	(11.304.666,00)	95,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2	BELANJA MODAL	274.877.666,00	263.573.000,00	(11.304.666,00)	95,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	274.877.666,00	263.573.000,00	(11.304.666,00)	95,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122		REHABILITASI KANAL BANJIR	2.142.428.161,00	1.985.832.000,00	(156.596.161,00)	92,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	5.2	BELANJA MODAL	2.142.428.161,00	1.985.832.000,00	(156.596.161,00)	92,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.142.428.161,00	1.985.832.000,00	(156.596.161,00)	92,69	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128		PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS DAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KONSTRUKSI BENDUNGAN, EMBUNG, DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA	231.191.271,00	222.323.700,00	(8.867.571,00)	96,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1	BELANJA OPERASI	231.191.271,00	222.323.700,00	(8.867.571,00)	96,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	231.191.271,00	222.323.700,00	(8.867.571,00)	96,16	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02		PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	156.196.069,00	51.089.000,00	(105.107.069,00)	32,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.300.000,00	0,00	(8.300.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014		REHABILITASI JARINGAN IRIGASI PERMUKAAN	98.070.501,00	4.418.000,00	(93.652.501,00)	4,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2	BELANJA MODAL	98.070.501,00	4.418.000,00	(93.652.501,00)	4,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	98.070.501,00	4.418.000,00	(93.652.501,00)	4,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022		OPERASI DAN PEMELIHARAAN BENDUNG IRIGASI	49.825.568,00	46.671.000,00	(3.154.568,00)	93,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	5.2	BELANJA MODAL	49.825.568,00	46.671.000,00	(3.154.568,00)	93,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.825.568,00	46.671.000,00	(3.154.568,00)	93,66	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	16.863.621.090,00	15.930.385.742,00	(933.235.348,00)	94,46	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.863.621.090,00	15.930.385.742,00	(933.235.348,00)	94,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026		PENINGKATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	7.159.750.292,00	6.730.239.014,00	(429.511.278,00)	94,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1	BELANJA OPERASI	8.954.000,00	0,00	(8.954.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.954.000,00	0,00	(8.954.000,00)	0,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2	BELANJA MODAL	7.150.796.292,00	6.730.239.014,00	(420.557.278,00)	94,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.150.796.292,00	6.730.239.014,00	(420.557.278,00)	94,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028		PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) JARINGAN PERPIPAAN	5.888.473.908,00	5.681.817.150,00	(206.656.758,00)	96,49	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1	BELANJA OPERASI	17.798.908,00	17.798.000,00	(908,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.798.908,00	17.798.000,00	(908,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2	BELANJA MODAL	5.870.675.000,00	5.664.019.150,00	(206.655.850,00)	96,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.870.675.000,00	5.664.019.150,00	(206.655.850,00)	96,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029		OPERASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM)	3.815.396.890,00	3.518.329.578,00	(297.067.312,00)	92,21	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1	BELANJA OPERASI	3.277.954.536,00	3.260.456.578,00	(17.497.958,00)	99,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.277.954.536,00	3.260.456.578,00	(17.497.958,00)	99,46	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2	BELANJA MODAL	537.442.354,00	257.873.000,00	(279.569.354,00)	47,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	467.549.354,00	187.980.000,00	(279.569.354,00)	40,20	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.893.000,00	69.893.000,00	0,00	100,00	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.922.780.841,00	5.716.288.000,00	(206.492.841,00)	96,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH DOMESTIK DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.922.780.841,00	5.716.288.000,00	(206.492.841,00)	96,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039		PENYEDIAAN SUB SISTEM PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK (SPALD) SETEMPAT	5.922.780.841,00	5.716.288.000,00	(206.492.841,00)	96,51	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1	BELANJA OPERASI	5.399.708.650,00	5.211.203.000,00	(188.505.650,00)	96,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.399.708.650,00	5.211.203.000,00	(188.505.650,00)	96,50	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2	BELANJA MODAL	523.072.191,00	505.085.000,00	(17.987.191,00)	96,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	523.072.191,00	505.085.000,00	(17.987.191,00)	96,56	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	569.002.363,00	424.231.000,00	(144.771.363,00)	74,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	569.002.363,00	424.231.000,00	(144.771.363,00)	74,55	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012		PEMBANGUNAN SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	464.879.339,00	323.034.000,00	(141.845.339,00)	69,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2	BELANJA MODAL	464.879.339,00	323.034.000,00	(141.845.339,00)	69,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	464.879.339,00	323.034.000,00	(141.845.339,00)	69,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020		OPTIMALISASAI SISTEM DRAINASE LINGKUNGAN	104.123.024,00	101.197.000,00	(2.926.024,00)	97,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.2	BELANJA MODAL	104.123.024,00	101.197.000,00	(2.926.024,00)	97,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	104.123.024,00	101.197.000,00	(2.926.024,00)	97,18	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.075.319.638,80	2.575.219.500,00	(500.100.138,80)	83,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01		PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	3.075.319.638,80	2.575.219.500,00	(500.100.138,80)	83,73	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018		PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PEMERIKSAAN BERKALA BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.504.407.409,80	2.004.326.500,00	(500.080.909,80)	80,03	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	918.047.921,00	495.368.000,00	(422.679.921,00)	53,95	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	389.998.000,00	80.950.000,00	(309.048.000,00)	20,75	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.1.05	Belanja Hibah	528.049.921,00	414.418.000,00	(113.631.921,00)	78,48	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2	BELANJA MODAL	1.586.359.488,80	1.508.958.500,00	(77.400.988,80)	95,12	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.01	Belanja Modal Tanah	236.327.448,00	198.789.000,00	(37.538.448,00)	84,11	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.350.032.040,80	1.310.169.500,00	(39.862.540,80)	97,04	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG	199.999.646,00	199.989.000,00	(10.646,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1	BELANJA OPERASI	199.999.646,00	199.989.000,00	(10.646,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.999.646,00	199.989.000,00	(10.646,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023		PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF), SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG (SBKBG), RENCANA TEKNIS PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG (RTB), TIM PROFESI AHLI (TPA), TIM PENILAI TEKNIS (TPT), PENILIK, DAN PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG	370.912.583,00	370.904.000,00	(8.583,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1	BELANJA OPERASI	370.912.583,00	370.904.000,00	(8.583,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	370.912.583,00	370.904.000,00	(8.583,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	112.447.823,00	112.047.000,00	(400.823,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01		PENYELENGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.447.823,00	112.047.000,00	(400.823,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010		PENYUSUNAN RENCANA DAN TEKNIS PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	112.447.823,00	112.047.000,00	(400.823,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	112.447.823,00	112.047.000,00	(400.823,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.447.823,00	112.047.000,00	(400.823,00)	99,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	41.853.555.693,42	39.959.299.150,00	(1.894.256.543,42)	95,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01		PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN/KOTA	41.853.555.693,42	39.959.299.150,00	(1.894.256.543,42)	95,47	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033		REKONSTRUKSI JALAN	33.878.830.833,02	33.172.672.350,00	(706.158.483,02)	97,91	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1	BELANJA OPERASI	123.200.000,00	96.894.000,00	(26.306.000,00)	78,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.200.000,00	96.894.000,00	(26.306.000,00)	78,64	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2	BELANJA MODAL	33.755.630.833,02	33.075.778.350,00	(679.852.483,02)	97,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.755.630.833,02	33.075.778.350,00	(679.852.483,02)	97,98	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034		PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	406.133.996,40	395.311.600,00	(10.822.396,40)	97,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2	BELANJA MODAL	406.133.996,40	395.311.600,00	(10.822.396,40)	97,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	406.133.996,40	395.311.600,00	(10.822.396,40)	97,33	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040		PEMBANGUNAN JEMBATAN	6.153.352.661,00	5.748.666.800,00	(404.685.861,00)	93,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2	BELANJA MODAL	6.153.352.661,00	5.748.666.800,00	(404.685.861,00)	93,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.153.352.661,00	5.748.666.800,00	(404.685.861,00)	93,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043		SURVEY KONDISI JALAN/JEMBATAN	629.933.544,00	629.225.900,00	(707.644,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1	BELANJA OPERASI	629.933.544,00	629.225.900,00	(707.644,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	629.933.544,00	629.225.900,00	(707.644,00)	99,88	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044		REHABILITASI JALAN	785.304.659,00	13.422.500,00	(771.882.159,00)	1,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2	BELANJA MODAL	785.304.659,00	13.422.500,00	(771.882.159,00)	1,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	785.304.659,00	13.422.500,00	(771.882.159,00)	1,70	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	179.632.310,00	164.223.200,00	(15.409.110,00)	91,42	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01		PENETAPAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN RENCANA RINCI TATA RUANG (RRTR) KABUPATEN/KOTA	47.229.250,00	47.229.200,00	(50,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005		PELAKSANAAN PERSETUJUAN SUBSTANSI RTRW KABUPATEN/KOTA	47.229.250,00	47.229.200,00	(50,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.229.250,00	47.229.200,00	(50,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.229.250,00	47.229.200,00	(50,00)	99,99	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA	132.403.060,00	116.994.000,00	(15.409.060,00)	88,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG	132.403.060,00	116.994.000,00	(15.409.060,00)	88,36	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.403.060,00	116.994.000,00	(15.409.060,00)	88,36	
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.403.060,00	116.994.000,00	(15.409.060,00)	88,36	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.518.601.009,00	2.478.567.235,00	(40.033.774,00)	98,41	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.069.494.992,00	2.030.037.953,00	(39.457.039,00)	98,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	88.751.824,00	88.746.397,00	(5.427,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	88.751.824,00	88.746.397,00	(5.427,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.751.824,00	88.746.397,00	(5.427,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.751.824,00	88.746.397,00	(5.427,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.158.452.663,00	1.136.663.008,00	(21.789.655,00)	98,11	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.142.403.307,00	1.120.614.695,00	(21.788.612,00)	98,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.142.403.307,00	1.120.614.695,00	(21.788.612,00)	98,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.142.403.307,00	1.120.614.695,00	(21.788.612,00)	98,09	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	16.049.356,00	16.048.313,00	(1.043,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.049.356,00	16.048.313,00	(1.043,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.049.356,00	16.048.313,00	(1.043,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	19.517.881,00	19.513.416,00	(4.465,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.517.881,00	19.513.416,00	(4.465,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.517.881,00	19.513.416,00	(4.465,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.517.881,00	19.513.416,00	(4.465,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	44.403.108,00	44.389.181,00	(13.927,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	21.903.108,00	21.889.181,00	(13.927,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	21.903.108,00	21.889.181,00	(13.927,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.903.108,00	21.889.181,00	(13.927,00)	99,93	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	409.149.081,00	409.032.901,00	(116.180,00)	99,97	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.400.000,00	12.398.000,00	(2.000,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	3.998.000,00	(2.000,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	43.491.500,00	43.488.052,00	(3.448,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.491.500,00	43.488.052,00	(3.448,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.491.500,00	43.488.052,00	(3.448,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	73.526.000,00	73.525.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	73.526.000,00	73.525.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.526.000,00	73.525.000,00	(1.000,00)	99,99	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	235.450.750,00	235.345.560,00	(105.190,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	235.450.750,00	235.345.560,00	(105.190,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	235.450.750,00	235.345.560,00	(105.190,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	44.280.831,00	44.276.289,00	(4.542,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	44.280.831,00	44.276.289,00	(4.542,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.280.831,00	44.276.289,00	(4.542,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	206.484.000,00	191.207.000,00	(15.277.000,00)	92,60	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	86.484.000,00	86.484.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	86.484.000,00	86.484.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.484.000,00	86.484.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	104.723.000,00	(15.277.000,00)	87,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	104.723.000,00	(15.277.000,00)	87,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	104.723.000,00	(15.277.000,00)	87,26	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.283.320,00	112.087.750,00	(2.195.570,00)	98,07	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	35.283.320,00	33.087.750,00	(2.195.570,00)	93,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.283.320,00	33.087.750,00	(2.195.570,00)	93,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.283.320,00	33.087.750,00	(2.195.570,00)	93,77	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	100,00	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	28.453.115,00	28.398.300,00	(54.815,00)	99,80	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	28.453.115,00	28.398.300,00	(54.815,00)	99,80	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	28.453.115,00	28.398.300,00	(54.815,00)	99,80	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.453.115,00	28.398.300,00	(54.815,00)	99,80	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	157.622.112,00	157.221.698,00	(400.414,00)	99,74	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01		PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	74.364.135,00	74.268.422,00	(95.713,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004		PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN RUMAH AKIBAT BENCANA	74.364.135,00	74.268.422,00	(95.713,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.364.135,00	74.268.422,00	(95.713,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.364.135,00	74.268.422,00	(95.713,00)	99,87	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03		PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001		REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	34.995.000,00	(5.000,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06		PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	48.257.977,00	47.958.276,00	(299.701,00)	99,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN	48.257.977,00	47.958.276,00	(299.701,00)	99,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	48.257.977,00	47.958.276,00	(299.701,00)	99,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.257.977,00	47.958.276,00	(299.701,00)	99,37	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	260.578.687,00	260.496.100,00	(82.587,00)	99,96	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02		PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	144.459.699,00	144.432.100,00	(27.599,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0014		SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH	144.459.699,00	144.432.100,00	(27.599,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1	BELANJA OPERASI	144.459.699,00	144.432.100,00	(27.599,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.459.699,00	144.432.100,00	(27.599,00)	99,98	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03		PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA	116.118.988,00	116.064.000,00	(54.988,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002		PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	116.118.988,00	116.064.000,00	(54.988,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	116.118.988,00	116.064.000,00	(54.988,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	116.118.988,00	116.064.000,00	(54.988,00)	99,95	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	30.905.218,00	30.811.484,00	(93.734,00)	99,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01		URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN	30.905.218,00	30.811.484,00	(93.734,00)	99,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0003		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN	30.905.218,00	30.811.484,00	(93.734,00)	99,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	30.905.218,00	30.811.484,00	(93.734,00)	99,69	
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.905.218,00	30.811.484,00	(93.734,00)	99,69	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Organisasi : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.853.985.503,00	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.853.985.503,00	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01		PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.853.985.503,00	2.606.087.893,00	(247.897.610,00)	91,31	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0001		PENETAPAN DAFTAR MASYARAKAT PENERIMA SANTUNAN TANAH DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	191.489.731,00	191.485.195,00	(4.536,00)	99,99	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	191.489.731,00	191.485.195,00	(4.536,00)	99,99	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	100,00	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.239.731,00	188.235.195,00	(4.536,00)	99,99	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELESAIAN MASALAH GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.662.495.772,00	2.414.602.698,00	(247.893.074,00)	90,68	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	711.745.772,00	558.218.698,00	(153.527.074,00)	78,42	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	711.745.772,00	558.218.698,00	(153.527.074,00)	78,42	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.950.750.000,00	1.856.384.000,00	(94.366.000,00)	95,16	
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.950.750.000,00	1.856.384.000,00	(94.366.000,00)	95,16	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	8.206.095.200,00	8.172.035.756,00	(34.059.444,00)	99,58	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.537.125.112,00	2.504.233.296,00	(32.891.816,00)	98,70	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	38.462.588,00	38.211.600,00	(250.988,00)	99,34	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	25.020.628,00	24.769.900,00	(250.728,00)	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.020.628,00	24.769.900,00	(250.728,00)	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.020.628,00	24.769.900,00	(250.728,00)	98,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	6.761.856,00	6.761.800,00	(56,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.761.856,00	6.761.800,00	(56,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.761.856,00	6.761.800,00	(56,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	6.680.104,00	6.679.900,00	(204,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.680.104,00	6.679.900,00	(204,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.680.104,00	6.679.900,00	(204,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.713.057.322,00	1.680.805.196,00	(32.252.126,00)	98,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.680.107.960,00	1.647.857.596,00	(32.250.364,00)	98,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.680.107.960,00	1.647.857.596,00	(32.250.364,00)	98,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.680.107.960,00	1.647.857.596,00	(32.250.364,00)	98,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	19.992.246,00	19.992.200,00	(46,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	19.992.246,00	19.992.200,00	(46,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.992.246,00	19.992.200,00	(46,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0006		PENGELOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	5.924.210,00	5.923.200,00	(1.010,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.924.210,00	5.923.200,00	(1.010,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.924.210,00	5.923.200,00	(1.010,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	7.032.906,00	7.032.200,00	(706,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	7.032.906,00	7.032.200,00	(706,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.032.906,00	7.032.200,00	(706,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	136.484.000,00	136.400.000,00	(84.000,00)	99,93	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	86.484.000,00	86.400.000,00	(84.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	86.484.000,00	86.400.000,00	(84.000,00)	99,90	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.484.000,00	86.400.000,00	(84.000,00)	99,90	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	487.162.500,00	487.041.500,00	(121.000,00)	99,97	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	84.662.500,00	84.541.500,00	(121.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	84.662.500,00	84.541.500,00	(121.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.662.500,00	84.541.500,00	(121.000,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	402.500.000,00	402.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	402.500.000,00	402.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	402.500.000,00	402.500.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	161.958.702,00	161.775.000,00	(183.702,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	161.958.702,00	161.775.000,00	(183.702,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.958.702,00	161.775.000,00	(183.702,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.958.702,00	161.775.000,00	(183.702,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.912.770.088,00	2.912.602.460,00	(167.628,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01		PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.912.770.088,00	2.912.602.460,00	(167.628,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	37.358.750,00	37.194.160,00	(164.590,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.358.750,00	37.194.160,00	(164.590,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.358.750,00	37.194.160,00	(164.590,00)	99,55	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0006		KERJA SAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	150.483.000,00	150.480.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	150.483.000,00	150.480.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.483.000,00	150.480.000,00	(3.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015		PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN, DAN PENGAWALAN	2.724.928.338,00	2.724.928.300,00	(38,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	2.724.928.338,00	2.724.928.300,00	(38,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.724.928.338,00	2.724.928.300,00	(38,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.756.200.000,00	2.755.200.000,00	(1.000.000,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01		PENCEGAHAN, PENGENDALIAN, PEMADAMAN, PENYELAMATAN, DAN PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.756.200.000,00	2.755.200.000,00	(1.000.000,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002		PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.456.200.000,00	1.456.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.456.200.000,00	1.456.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.456.200.000,00	1.456.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN ALAT PELINDUNG DIRI	1.300.000.000,00	1.299.000.000,00	(1.000.000,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2	BELANJA MODAL	1.300.000.000,00	1.299.000.000,00	(1.000.000,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.300.000.000,00	1.299.000.000,00	(1.000.000,00)	99,92	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Organisasi : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	3.356.043.087,00	2.719.990.175,00	(636.052.912,00)	81,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.707.326.163,00	1.642.985.961,00	(64.340.202,00)	96,23	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	30.339.479,00	30.304.000,00	(35.479,00)	99,88	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.236.197,00	12.227.500,00	(8.697,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.236.197,00	12.227.500,00	(8.697,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.236.197,00	12.227.500,00	(8.697,00)	99,92	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.142.574,00	2.136.000,00	(6.574,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.142.574,00	2.136.000,00	(6.574,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.142.574,00	2.136.000,00	(6.574,00)	99,69	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	965.436,00	964.000,00	(1.436,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	965.436,00	964.000,00	(1.436,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	965.436,00	964.000,00	(1.436,00)	99,85	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.161.662,00	2.154.500,00	(7.162,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.161.662,00	2.154.500,00	(7.162,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.161.662,00	2.154.500,00	(7.162,00)	99,66	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.050.436,00	1.049.000,00	(1.436,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.050.436,00	1.049.000,00	(1.436,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.050.436,00	1.049.000,00	(1.436,00)	99,86	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	11.783.174,00	11.773.000,00	(10.174,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	11.783.174,00	11.773.000,00	(10.174,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.783.174,00	11.773.000,00	(10.174,00)	99,91	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.149.669.201,00	1.089.684.854,00	(59.984.347,00)	94,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.104.368.417,00	1.043.507.354,00	(60.861.063,00)	94,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.104.368.417,00	1.043.507.354,00	(60.861.063,00)	94,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.104.368.417,00	1.043.507.354,00	(60.861.063,00)	94,48	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.645.436,00	12.534.000,00	888.564,00	107,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.645.436,00	12.534.000,00	888.564,00	107,63	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.645.436,00	11.534.000,00	(111.436,00)	99,04	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	5.1.05	Belanja Hibah	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	33.655.348,00	33.643.500,00	(11.848,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.655.348,00	33.643.500,00	(11.848,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.655.348,00	33.643.500,00	(11.848,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	16.854.935,00	16.847.500,00	(7.435,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004		PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	16.854.935,00	16.847.500,00	(7.435,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	16.854.935,00	16.847.500,00	(7.435,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.854.935,00	16.847.500,00	(7.435,00)	99,95	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	211.029.500,00	210.600.176,00	(429.324,00)	99,79	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.790.000,00	7.770.000,00	(20.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	7.770.000,00	7.750.000,00	(20.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.770.000,00	7.750.000,00	(20.000,00)	99,74	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.321.500,00	4.320.000,00	(1.500,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.321.500,00	4.320.000,00	(1.500,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.321.500,00	4.320.000,00	(1.500,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	185.318.000,00	184.910.176,00	(407.824,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	185.318.000,00	184.910.176,00	(407.824,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.318.000,00	184.910.176,00	(407.824,00)	99,77	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.314.431,00	109.304.431,00	(10.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	109.314.431,00	109.304.431,00	(10.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	109.314.431,00	109.304.431,00	(10.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.314.431,00	109.304.431,00	(10.000,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.243.000,00	74.719.750,00	(523.250,00)	99,30	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.043.000,00	25.519.750,00	(523.250,00)	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.043.000,00	25.519.750,00	(523.250,00)	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.043.000,00	25.519.750,00	(523.250,00)	97,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	114.875.617,00	111.525.250,00	(3.350.367,00)	97,08	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	49.393.250,00	46.205.250,00	(3.188.000,00)	93,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	49.393.250,00	46.205.250,00	(3.188.000,00)	93,54	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.393.250,00	46.205.250,00	(3.188.000,00)	93,54	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	62.682.367,00	62.575.000,00	(107.367,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.682.367,00	62.575.000,00	(107.367,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.682.367,00	62.575.000,00	(107.367,00)	99,82	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.800.000,00	2.745.000,00	(55.000,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.800.000,00	2.745.000,00	(55.000,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.745.000,00	(55.000,00)	98,03	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.648.716.924,00	1.077.004.214,00	(571.712.710,00)	65,32	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01		PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	20.511.603,00	20.505.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004		SOSIALISASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA (PER JENIS ANCAMAN BENCANA)	20.511.603,00	20.505.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	20.511.603,00	20.505.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.511.603,00	20.505.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02		PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	128.589.278,00	128.579.000,00	(10.278,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0006		PENGUATAN KAPASITAS KAWASAN UNTUK PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	17.211.603,00	17.205.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	17.211.603,00	17.205.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.211.603,00	17.205.000,00	(6.603,00)	99,96	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010		GLADI KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	11.650.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016		PELATIHAN PENCEGAHAN DAN MITIGASI BENCANA KABUPATEN/KOTA	81.727.675,00	81.724.000,00	(3.675,00)	99,99	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1	BELANJA OPERASI	36.727.675,00	36.724.000,00	(3.675,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.727.675,00	36.724.000,00	(3.675,00)	99,98	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.2	BELANJA MODAL	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017		PENGENDALIAN OPERASI DAN PENYEDIAAN SARANA PRASARANA KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA KABUPATEN/KOTA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03		PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	825.000.000,00	823.720.000,00	(1.280.000,00)	99,84	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002		RESPON CEPAT DARURAT BENCANA KABUPATEN/KOTA	786.600.000,00	786.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	786.600.000,00	786.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	786.600.000,00	786.600.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003		PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	14.400.000,00	13.120.000,00	(1.280.000,00)	91,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.400.000,00	13.120.000,00	(1.280.000,00)	91,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	13.120.000,00	(1.280.000,00)	91,11	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0010		RESPON CEPAT BENCANA NON ALAM EPIDEMI/WABAH PENYAKIT	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00	100,00	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04		PENATAAN SISTEM DASAR PENANGGULANGAN BENCANA	674.616.043,00	104.200.214,00	(570.415.829,00)	15,44	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013		PENYUSUNAN KAJIAN KEBUTUHAN PASCABENCANA (JITUPASNA) DAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA (R3P) KAB/KOTA	674.616.043,00	104.200.214,00	(570.415.829,00)	15,44	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013	5.1	BELANJA OPERASI	53.098.043,00	52.985.214,00	(112.829,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.098.043,00	52.985.214,00	(112.829,00)	99,78	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013	5.2	BELANJA MODAL	621.518.000,00	51.215.000,00	(570.303.000,00)	8,24	
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	621.518.000,00	51.215.000,00	(570.303.000,00)	8,24	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
Organisasi : DINAS SOSIAL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.438.734.019,00	2.386.876.318,00	(51.857.701,00)	97,87	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.483.025.057,00	1.458.597.904,00	(24.427.153,00)	98,35	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	58.110.548,00	58.109.156,00	(1.392,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	38.281.048,00	38.279.656,00	(1.392,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.281.048,00	38.279.656,00	(1.392,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.281.048,00	38.279.656,00	(1.392,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	19.829.500,00	19.829.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.829.500,00	19.829.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.829.500,00	19.829.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	847.061.721,00	830.025.111,00	(17.036.610,00)	97,98	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	818.277.739,00	801.241.775,00	(17.035.964,00)	97,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	818.277.739,00	801.241.775,00	(17.035.964,00)	97,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	818.277.739,00	801.241.775,00	(17.035.964,00)	97,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	28.783.982,00	28.783.336,00	(646,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.783.982,00	28.783.336,00	(646,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.783.982,00	28.783.336,00	(646,00)	99,99	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	301.684.378,00	301.428.797,00	(255.581,00)	99,91	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	144.695.878,00	144.695.878,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	132.150.378,00	132.150.378,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.150.378,00	132.150.378,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	12.545.500,00	12.545.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12.545.500,00	12.545.500,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	156.988.500,00	156.732.919,00	(255.581,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	156.988.500,00	156.732.919,00	(255.581,00)	99,83	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	156.988.500,00	156.732.919,00	(255.581,00)	99,83	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.734.910,00	170.453.000,00	(1.281.910,00)	99,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.224.910,00	25.943.000,00	(1.281.910,00)	95,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.224.910,00	25.943.000,00	(1.281.910,00)	95,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.224.910,00	25.943.000,00	(1.281.910,00)	95,29	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	139.110.000,00	139.110.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	139.110.000,00	139.110.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.110.000,00	139.110.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	90.933.500,00	85.081.840,00	(5.851.660,00)	93,56	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	56.583.500,00	56.440.140,00	(143.360,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.583.500,00	56.440.140,00	(143.360,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.583.500,00	56.440.140,00	(143.360,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	34.350.000,00	28.641.700,00	(5.708.300,00)	83,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	34.350.000,00	28.641.700,00	(5.708.300,00)	83,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.350.000,00	28.641.700,00	(5.708.300,00)	83,38	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	76.022.233,00	76.022.233,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03		PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL DAERAH KABUPATEN/KOTA	76.022.233,00	76.022.233,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002		PENINGKATAN KEMAMPUAN POTENSI TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	76.022.233,00	76.022.233,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	76.022.233,00	76.022.233,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.022.233,00	76.022.233,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01		PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001		FASILITASI PEMULANGAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DARI TITIK DEBARKASI DI DAERAH KABUPATEN/KOTA UNTUK DIPULANGKAN KE DESA/KELURAHAN ASAL	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.040.000,00	3.040.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	143.191.382,00	142.106.380,00	(1.085.002,00)	99,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01		REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR, ANAK TERLANTAR, LANJUT USIA TERLANTAR, SERTA GELANDANGAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	143.191.382,00	142.106.380,00	(1.085.002,00)	99,24	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009		PEMBERIAN LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	101.686.830,00	100.614.611,00	(1.072.219,00)	98,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	101.686.830,00	100.614.611,00	(1.072.219,00)	98,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.686.830,00	100.614.611,00	(1.072.219,00)	98,94	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010		PEMBERIAN LAYANAN KEDARURATAN	41.504.552,00	41.491.769,00	(12.783,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	41.504.552,00	41.491.769,00	(12.783,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.504.552,00	41.491.769,00	(12.783,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	147.398.140,00	121.238.294,00	(26.159.846,00)	82,25	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02		PENGELOLAAN DATA FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	147.398.140,00	121.238.294,00	(26.159.846,00)	82,25	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001		PENDATAAN FAKIR MISKIN CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	75.006.752,00	48.992.904,00	(26.013.848,00)	65,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	75.006.752,00	48.992.904,00	(26.013.848,00)	65,31	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.006.752,00	42.992.904,00	(13.848,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	32.000.000,00	6.000.000,00	(26.000.000,00)	18,75	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003		FASILITASI BANTUAN SOSIAL KESEJAHTERAAN KELUARGA	72.391.388,00	72.245.390,00	(145.998,00)	99,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	72.391.388,00	72.245.390,00	(145.998,00)	99,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.391.388,00	72.245.390,00	(145.998,00)	99,79	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	545.057.700,00	544.872.000,00	(185.700,00)	99,96	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01		PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DAN SOSIAL KABUPATEN/KOTA	73.267.700,00	73.082.000,00	(185.700,00)	99,74	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001		PENYEDIAAN MAKANAN	8.351.700,00	8.320.800,00	(30.900,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	8.351.700,00	8.320.800,00	(30.900,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.351.700,00	8.320.800,00	(30.900,00)	99,63	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005		PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL	64.916.000,00	64.761.200,00	(154.800,00)	99,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	64.916.000,00	64.761.200,00	(154.800,00)	99,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.916.000,00	64.761.200,00	(154.800,00)	99,76	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02		PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KESIAPSIAGAAN BENCANA KABUPATEN/KOTA	471.790.000,00	471.790.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002		KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN TARUNA SIAGA BENCANA	471.790.000,00	471.790.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	471.790.000,00	471.790.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	471.790.000,00	471.790.000,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.999.507,00	40.999.507,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	40.999.507,00	40.999.507,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002		PEMELIHARAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KABUPATEN/KOTA	40.999.507,00	40.999.507,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.999.507,00	40.999.507,00	0,00	100,00	
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.999.507,00	40.999.507,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.036.233.260,00	2.026.111.587,00	(10.121.673,00)	99,50	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	39.724.410,00	39.634.410,00	(90.000,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA (RTK)	39.724.410,00	39.634.410,00	(90.000,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001		PENYUSUNAN RENCANA TENAGA KERJA MAKRO	39.724.410,00	39.634.410,00	(90.000,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	39.724.410,00	39.634.410,00	(90.000,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.724.410,00	39.634.410,00	(90.000,00)	99,77	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	54.743.054,00	54.733.054,00	(10.000,00)	99,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01		PELAKSANAAN PELATIHAN BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI	54.743.054,00	54.733.054,00	(10.000,00)	99,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001		PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN KLASTER KOMPETENSI	54.743.054,00	54.733.054,00	(10.000,00)	99,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	54.743.054,00	54.733.054,00	(10.000,00)	99,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.743.054,00	54.733.054,00	(10.000,00)	99,98	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.941.765.796,00	1.931.744.123,00	(10.021.673,00)	99,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02		PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.941.765.796,00	1.931.744.123,00	(10.021.673,00)	99,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001		PENCEGAHAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL, MOGOK KERJA, DAN PENUTUPAN PERUSAHAAN YANG BERAKIBAT/BERDAMPAK PADA KEPENTINGAN DI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.941.765.796,00	1.931.744.123,00	(10.021.673,00)	99,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.941.765.796,00	1.931.744.123,00	(10.021.673,00)	99,48	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	309.682.032,00	307.306.133,00	(2.375.899,00)	99,23	
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.632.083.764,00	1.624.437.990,00	(7.645.774,00)	99,53	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
Organisasi : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.817.758.325,00	1.786.069.790,00	(31.688.535,00)	98,25	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.688.641.132,00	1.657.467.559,00	(31.173.573,00)	98,15	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	241.456.276,00	235.256.276,00	(6.200.000,00)	97,43	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.049.204,00	51.449.204,00	(1.600.000,00)	96,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.049.204,00	51.449.204,00	(1.600.000,00)	96,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.049.204,00	51.449.204,00	(1.600.000,00)	96,98	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	37.171.152,00	36.771.152,00	(400.000,00)	98,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	37.171.152,00	36.771.152,00	(400.000,00)	98,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.171.152,00	36.771.152,00	(400.000,00)	98,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	36.620.562,00	36.520.562,00	(100.000,00)	99,72	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.620.562,00	36.520.562,00	(100.000,00)	99,72	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.620.562,00	36.520.562,00	(100.000,00)	99,72	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	35.661.214,00	32.961.214,00	(2.700.000,00)	92,42	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	35.661.214,00	32.961.214,00	(2.700.000,00)	92,42	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.661.214,00	32.961.214,00	(2.700.000,00)	92,42	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	36.817.478,00	36.417.478,00	(400.000,00)	98,91	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	36.817.478,00	36.417.478,00	(400.000,00)	98,91	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.817.478,00	36.417.478,00	(400.000,00)	98,91	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	42.136.666,00	41.136.666,00	(1.000.000,00)	97,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	42.136.666,00	41.136.666,00	(1.000.000,00)	97,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.136.666,00	41.136.666,00	(1.000.000,00)	97,62	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.203.647.386,00	1.182.914.313,00	(20.733.073,00)	98,27	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.175.327.448,00	1.154.594.375,00	(20.733.073,00)	98,23	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.175.327.448,00	1.154.594.375,00	(20.733.073,00)	98,23	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.175.327.448,00	1.154.594.375,00	(20.733.073,00)	98,23	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	28.319.938,00	28.319.938,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	28.319.938,00	28.319.938,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.319.938,00	28.319.938,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	5.241.202,00	3.081.202,00	(2.160.000,00)	58,78	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	5.241.202,00	3.081.202,00	(2.160.000,00)	58,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.241.202,00	3.081.202,00	(2.160.000,00)	58,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.241.202,00	3.081.202,00	(2.160.000,00)	58,78	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	99,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	99,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	99,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.400.000,00	25.380.000,00	(20.000,00)	99,92	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	79.830.228,00	79.327.028,00	(503.200,00)	99,36	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	56.595.228,00	56.092.028,00	(503.200,00)	99,11	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	56.595.228,00	56.092.028,00	(503.200,00)	99,11	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.595.228,00	56.092.028,00	(503.200,00)	99,11	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	27.472.300,00	25.915.000,00	(1.557.300,00)	94,33	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	27.472.300,00	25.915.000,00	(1.557.300,00)	94,33	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.472.300,00	25.915.000,00	(1.557.300,00)	94,33	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.472.300,00	25.915.000,00	(1.557.300,00)	94,33	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.596.500,00	9.596.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	8.596.500,00	8.596.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.596.500,00	8.596.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.596.500,00	8.596.500,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	119.000,00	0,00	(119.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01		PENCADANGAN TANAH UNTUK KAWASAN TRANSMIGRASI	119.000,00	0,00	(119.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001		IDENTIFIKASI POTENSI KAWASAN TRANSMIGRASI	119.000,00	0,00	(119.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	119.000,00	0,00	(119.000,00)	0,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.000,00	0,00	(119.000,00)	0,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	65.784.109,00	65.650.021,00	(134.088,00)	99,79	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01		PENATAAN PERSEBARAN PENDUDUK YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	65.784.109,00	65.650.021,00	(134.088,00)	99,79	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001		KOORDINASI DAN SINKRONISASI KERJA SAMA PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI YANG BERASAL DARI 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.511.080,00	29.376.992,00	(134.088,00)	99,54	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.511.080,00	29.376.992,00	(134.088,00)	99,54	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.511.080,00	29.376.992,00	(134.088,00)	99,54	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0003		PELAKSANAAN PENATAAN PENDUDUK SETEMPAT SEKITAR LOKASI KAWASAN TRANSMIGRASI	36.273.029,00	36.273.029,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.273.029,00	36.273.029,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.273.029,00	36.273.029,00	0,00	100,00	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63.214.084,00	62.952.210,00	(261.874,00)	99,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01		PENGEMBANGAN SATUAN PERMUKIMAN PADA TAHAP KEMANDIRIAN	63.214.084,00	62.952.210,00	(261.874,00)	99,58	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0001		PENGUATAN SDM DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PEMUKIMAN	43.040.410,00	43.013.260,00	(27.150,00)	99,93	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.040.410,00	43.013.260,00	(27.150,00)	99,93	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.040.410,00	43.013.260,00	(27.150,00)	99,93	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002		PENGUATAN INFRASTRUKTUR SOSIAL, EKONOMI DAN KELEMBAGAAN DALAM RANGKA KEMANDIRIAN SATUAN PEMUKIMAN	20.173.674,00	19.938.950,00	(234.724,00)	98,83	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	20.173.674,00	19.938.950,00	(234.724,00)	98,83	
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.173.674,00	19.938.950,00	(234.724,00)	98,83	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.408.324.706,00	3.353.159.462,00	(55.165.244,00)	98,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.860.269.952,00	2.812.480.445,00	(47.789.507,00)	98,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	164.809.415,00	164.783.000,00	(26.415,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.324.747.050,00	2.277.629.375,00	(47.117.675,00)	97,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	71.993.741,00	71.993.000,00	(741,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	52.783.000,00	52.474.400,00	(308.600,00)	99,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	184.587.410,00	184.578.170,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.599.336,00	34.413.500,00	(185.836,00)	99,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.750.000,00	26.609.000,00	(141.000,00)	99,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	212.868.634,00	212.317.700,00	(550.934,00)	99,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	159.661.743,00	154.359.217,00	(5.302.526,00)	96,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.661.743,00	154.359.217,00	(5.302.526,00)	96,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.404.908.770,00	3.376.845.036,00	(28.063.734,00)	99,17	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	169.870.852,00	169.858.800,00	(12.052,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021		KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.349.686.236,00	2.325.374.336,00	(24.311.900,00)	98,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	667.500.812,00	663.523.100,00	(3.977.712,00)	99,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.229.884.624,00	1.210.918.236,00	(18.966.388,00)	98,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006		PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	769.263.832,00	768.171.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	759.983.832,00	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.983.832,00	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	284.299.000,00	283.733.000,00	(566.000,00)	99,80	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	885.351.682,00	881.611.900,00	(3.739.782,00)	99,57	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	352.184.362,00	350.262.000,00	(1.922.362,00)	99,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	533.167.320,00	531.349.900,00	(1.817.420,00)	99,65	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.408.324.706,00	3.353.159.462,00	(55.165.244,00)	98,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.860.269.952,00	2.812.480.445,00	(47.789.507,00)	98,32	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	164.809.415,00	164.783.000,00	(26.415,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.800.280,00	102.798.000,00	(2.280,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.426.905,00	32.423.500,00	(3.405,00)	99,98	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.030.838,00	8.019.000,00	(11.838,00)	99,85	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.023.175,00	4.022.000,00	(1.175,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.177.990,00	3.174.000,00	(3.990,00)	99,87	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.350.227,00	14.346.500,00	(3.727,00)	99,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.324.747.050,00	2.277.629.375,00	(47.117.675,00)	97,97	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.284.746.779,00	2.237.654.875,00	(47.091.904,00)	97,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.271,00	39.974.500,00	(25.771,00)	99,93	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	71.993.741,00	71.993.000,00	(741,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.813.741,00	39.813.000,00	(741,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.180.000,00	32.180.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	52.783.000,00	52.474.400,00	(308.600,00)	99,41	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.783.000,00	49.474.400,00	(308.600,00)	99,38	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	184.587.410,00	184.578.170,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.988.000,00	(9.240,00)	99,99	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.590.170,00	88.590.170,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.599.336,00	34.413.500,00	(185.836,00)	99,46	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.999.336,00	18.813.500,00	(185.836,00)	99,02	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	26.750.000,00	26.609.000,00	(141.000,00)	99,47	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.959.000,00	(41.000,00)	99,83	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	1.650.000,00	(100.000,00)	94,28	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	212.868.634,00	212.317.700,00	(550.934,00)	99,74	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01		PELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) PADA LEMBAGA PEMERINTAH KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN PUG KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.868.169,00	62.380.500,00	(487.669,00)	99,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BIDANG POLITIK, HUKUM, SOSIAL, DAN EKONOMI PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEREMPUAN DAN POLITIK, HUKUM, SOSIAL DAN EKONOMI	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.465,00	149.937.200,00	(63.265,00)	99,95	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02		PENYEDIAAN LAYANAN RUJUKAN LANJUTAN BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN YANG MEMERLUKAN KOORDINASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001		PENYEDIAAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	163.207.243,00	157.904.717,00	(5.302.526,00)	96,75	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	159.661.743,00	154.359.217,00	(5.302.526,00)	96,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	159.661.743,00	154.359.217,00	(5.302.526,00)	96,67	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01		PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN GENDER (KG) DAN HAK ANAK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001		ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK MEWUJUDKAN KG DAN PERLINDUNGAN ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	99.999.854,00	98.504.500,00	(1.495.354,00)	98,50	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01		PELEMBAGAAN PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH, NONPEMERINTAH, DAN DUNIA USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002		KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELEMBAGAAN PEMENUHAN HAK ANAK KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.979.023,00	71.952.100,00	(26.923,00)	99,96	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.404.908.770,00	3.376.845.036,00	(28.063.734,00)	99,17	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	169.870.852,00	169.858.800,00	(12.052,00)	99,99	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01		PEMADUAN DAN SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021		KERJASAMA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN JALUR PENDIDIKAN FORMAL	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1	BELANJA OPERASI	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.470.852,00	23.458.800,00	(12.052,00)	99,94	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02		PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK CAKUPAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	146.400.000,00	146.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012		PENCATATAN DAN PENGUMPULAN DATA KELUARGA	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1	BELANJA OPERASI	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	86.400.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013		PENGOLAHAN DAN PELAPORAN DATA PENGENDALIAN LAPANGAN DAN PELAYANAN KB	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.349.686.236,00	2.325.374.336,00	(24.311.900,00)	98,96	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01		PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL	667.500.812,00	663.523.100,00	(3.977.712,00)	99,40	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008		PENGENDALIAN PROGRAM KKBPK	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.995.437,00	134.815.000,00	(180.437,00)	99,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010		PENGELOLAAN OPERASIONAL DAN SARANA DI BALAI PENYULUHAN BANGGA KENCANA	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.500.008,00	157.392.400,00	(107.608,00)	99,93	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011		PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI KECAMATAN (RAKORCAM), RAPAT KOORDINASI DESA (RAKORDES), DAN MINI LOKAKARYA (MINILOK)	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.000.367,00	73.585.700,00	(1.414.667,00)	98,11	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012		PROMOSI DAN KIE PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI MEDIA MASSA CETAK DAN ELEKTRONIK SERTA MEDIA LUAR RUANG	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014		ADVOKASI PROGRAM BANGGA KENCANA OLEH POKJA ADVOKASI KEPADA STAKEHOLDERS DAN MITRA KERJA	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.005.000,00	197.730.000,00	(2.275.000,00)	98,86	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02		PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004		PENGGERAKAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP)	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	168.001.800,00	167.200.000,00	(801.800,00)	99,52	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03		PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.229.884.624,00	1.210.918.236,00	(18.966.388,00)	98,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001		PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB KE FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.552.400,00	173.134.700,00	(1.417.700,00)	99,18	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003		PENINGKATAN KESERTAAN PENGGUNAAN METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.358.392,00	256.901.900,00	(16.456.492,00)	93,97	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006		PENYEDIAAN SARANA PENUNJANG PELAYANAN KB	769.263.832,00	768.171.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.280.000,00	9.280.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2	BELANJA MODAL	759.983.832,00	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	759.983.832,00	758.891.636,00	(1.092.196,00)	99,85	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008		PEMBINAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN KESEHATAN REPRODUKSI DI FASILITAS KESEHATAN TERMASUK JARINGAN DAN JEJARINGNYA	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.710.000,00	12.710.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04		PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN DAN PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB	284.299.000,00	283.733.000,00	(566.000,00)	99,80	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002		INTEGRASI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR DI KAMPUNG KB	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006		PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM BANGGA KENCANA DI KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1	BELANJA OPERASI	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.549.000,00	279.983.000,00	(566.000,00)	99,79	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	885.351.682,00	881.611.900,00	(3.739.782,00)	99,57	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01		PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	352.184.362,00	350.262.000,00	(1.922.362,00)	99,45	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008		PROMOSI DAN SOSIALISASI KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (MENJADI ORANG TUA HEBAT, GENERASI BERENCANA, KELANJUTUSIAAN SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN KELUARGA)	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.384.362,00	23.382.000,00	(2.362,00)	99,98	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016		PENGELOLAAN KETAHANAN KELUARGA MELALUI PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1	BELANJA OPERASI	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	28.800.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018		PENGADAAN SARANA KELOMPOK KEGIATAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R DAN USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA AKSEPTOR (UPPKA)	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	298.080.000,00	(1.920.000,00)	99,35	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02		PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	533.167.320,00	531.349.900,00	(1.817.420,00)	99,65	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005		PEMANTAUAN DATA DAN INFORMASI KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	269.167.320,00	267.349.900,00	(1.817.420,00)	99,32	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006		PENDAMPINGAN KELUARGA BERISIKO STUNTING (TERMASUK REMAJA CALON PENGANTIN/CALON PUS, IBU HAMIL, PASCA SALIN/KELAHIRAN, BADUTA/BALITA)	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.000.000,00	264.000.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Organisasi : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.800.000,00	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,30	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.800.000,00	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,30	
	2.11.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.800.000,00	221.640.000,00	(35.160.000,00)	86,30	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.453.839.401,37	5.288.564.012,00	(165.275.389,37)	96,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.332.925.626,37	2.282.397.702,00	(50.527.924,37)	97,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	37.072.511,00	36.199.500,00	(873.011,00)	97,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.254.181,00	30.231.500,00	(22.681,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.254.181,00	30.231.500,00	(22.681,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.254.181,00	30.231.500,00	(22.681,00)	99,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.252.405,00	911.000,00	(341.405,00)	72,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.252.405,00	911.000,00	(341.405,00)	72,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.252.405,00	911.000,00	(341.405,00)	72,74	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	1.229.674,00	1.103.000,00	(126.674,00)	89,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.229.674,00	1.103.000,00	(126.674,00)	89,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.229.674,00	1.103.000,00	(126.674,00)	89,69	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.429.244,00	1.320.000,00	(109.244,00)	92,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.429.244,00	1.320.000,00	(109.244,00)	92,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.429.244,00	1.320.000,00	(109.244,00)	92,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.305.244,00	1.203.000,00	(102.244,00)	92,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.305.244,00	1.203.000,00	(102.244,00)	92,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.305.244,00	1.203.000,00	(102.244,00)	92,16	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.601.763,00	1.431.000,00	(170.763,00)	89,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.601.763,00	1.431.000,00	(170.763,00)	89,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.601.763,00	1.431.000,00	(170.763,00)	89,33	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.078.390.941,00	1.063.751.539,00	(14.639.402,00)	98,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	974.042.072,00	960.376.539,00	(13.665.533,00)	98,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	974.042.072,00	960.376.539,00	(13.665.533,00)	98,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	974.042.072,00	960.376.539,00	(13.665.533,00)	98,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	83.300.000,00	82.800.000,00	(500.000,00)	99,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	83.300.000,00	82.800.000,00	(500.000,00)	99,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.300.000,00	82.800.000,00	(500.000,00)	99,39	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.373.940,00	3.304.000,00	(69.940,00)	97,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.373.940,00	3.304.000,00	(69.940,00)	97,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.373.940,00	3.304.000,00	(69.940,00)	97,92	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	17.674.929,00	17.271.000,00	(403.929,00)	97,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	17.674.929,00	17.271.000,00	(403.929,00)	97,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.674.929,00	17.271.000,00	(403.929,00)	97,71	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04		ADMINISTRASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	10.813.272,00	10.700.000,00	(113.272,00)	98,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN RETRIBUSI DAERAH	10.813.272,00	10.700.000,00	(113.272,00)	98,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.813.272,00	10.700.000,00	(113.272,00)	98,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.813.272,00	10.700.000,00	(113.272,00)	98,95	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	15.850.000,00	15.190.000,00	(660.000,00)	95,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	15.850.000,00	15.190.000,00	(660.000,00)	95,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	15.850.000,00	15.190.000,00	(660.000,00)	95,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.850.000,00	15.190.000,00	(660.000,00)	95,83	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	163.325.962,00	158.373.250,00	(4.952.712,00)	96,96	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.721.305,00	1.035.000,00	(686.305,00)	60,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.721.305,00	1.035.000,00	(686.305,00)	60,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.721.305,00	1.035.000,00	(686.305,00)	60,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	75.955.582,00	75.468.000,00	(487.582,00)	99,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	75.955.582,00	75.468.000,00	(487.582,00)	99,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.955.582,00	75.468.000,00	(487.582,00)	99,35	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	3.251.275,00	2.594.000,00	(657.275,00)	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.251.275,00	2.594.000,00	(657.275,00)	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.251.275,00	2.594.000,00	(657.275,00)	79,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.605.000,00	1.677.400,00	(2.927.600,00)	36,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.605.000,00	1.677.400,00	(2.927.600,00)	36,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.605.000,00	1.677.400,00	(2.927.600,00)	36,42	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	7.710.000,00	7.667.000,00	(43.000,00)	99,44	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	7.710.000,00	7.667.000,00	(43.000,00)	99,44	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.710.000,00	7.667.000,00	(43.000,00)	99,44	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	70.082.800,00	69.931.850,00	(150.950,00)	99,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	70.082.800,00	69.931.850,00	(150.950,00)	99,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.082.800,00	69.931.850,00	(150.950,00)	99,78	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	119.991.000,00	119.991.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	119.991.000,00	119.991.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	119.991.000,00	119.991.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.991.000,00	119.991.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.160.988,37	49.732.480,00	(3.428.508,37)	93,55	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.560.988,37	22.132.480,00	(3.428.508,37)	86,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.560.988,37	22.132.480,00	(3.428.508,37)	86,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.560.988,37	22.132.480,00	(3.428.508,37)	86,58	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	854.320.952,00	828.459.933,00	(25.861.019,00)	96,97	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	59.018.250,00	58.309.123,00	(709.127,00)	98,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	59.018.250,00	58.309.123,00	(709.127,00)	98,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.018.250,00	58.309.123,00	(709.127,00)	98,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	568.792.702,00	548.797.500,00	(19.995.202,00)	96,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	568.792.702,00	548.797.500,00	(19.995.202,00)	96,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	568.792.702,00	548.797.500,00	(19.995.202,00)	96,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR	214.610.000,00	211.603.310,00	(3.006.690,00)	98,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	5.1	BELANJA OPERASI	214.610.000,00	211.603.310,00	(3.006.690,00)	98,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	214.610.000,00	211.603.310,00	(3.006.690,00)	98,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010		PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	11.900.000,00	9.750.000,00	(2.150.000,00)	81,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	5.1	BELANJA OPERASI	11.900.000,00	9.750.000,00	(2.150.000,00)	81,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.900.000,00	9.750.000,00	(2.150.000,00)	81,93	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	592.040.000,00	592.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02		PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA	592.040.000,00	592.040.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002		PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KLHS RPJPD/RPJMD	552.200.000,00	552.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	552.200.000,00	552.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.200.000,00	552.200.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005		PENYELENGGARAAN KLHS RENCANA TATA RUANG	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.840.000,00	39.840.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	83.290.918,00	74.323.000,00	(8.967.918,00)	89,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01		PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA	83.290.918,00	74.323.000,00	(8.967.918,00)	89,23	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT	61.709.632,00	59.129.000,00	(2.580.632,00)	95,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	61.709.632,00	59.129.000,00	(2.580.632,00)	95,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.709.632,00	59.129.000,00	(2.580.632,00)	95,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM	21.581.286,00	15.194.000,00	(6.387.286,00)	70,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.581.286,00	15.194.000,00	(6.387.286,00)	70,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.581.286,00	15.194.000,00	(6.387.286,00)	70,40	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	290.380.536,00	250.426.000,00	(39.954.536,00)	86,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01		PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA	290.380.536,00	250.426.000,00	(39.954.536,00)	86,24	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004		PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)	290.380.536,00	250.426.000,00	(39.954.536,00)	86,24	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	276.090.536,00	249.026.000,00	(27.064.536,00)	90,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	276.090.536,00	249.026.000,00	(27.064.536,00)	90,19	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	14.290.000,00	1.400.000,00	(12.890.000,00)	9,79	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	100,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.890.000,00	0,00	(12.890.000,00)	0,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	85.823.663,00	82.082.000,00	(3.741.663,00)	95,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01		PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	85.823.663,00	82.082.000,00	(3.741.663,00)	95,64	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	77.781.659,00	74.271.000,00	(3.510.659,00)	95,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	77.781.659,00	74.271.000,00	(3.510.659,00)	95,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.781.659,00	74.271.000,00	(3.510.659,00)	95,48	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002		VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3	8.042.004,00	7.811.000,00	(231.004,00)	97,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.042.004,00	7.811.000,00	(231.004,00)	97,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.042.004,00	7.811.000,00	(231.004,00)	97,12	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	109.193.091,00	101.531.310,00	(7.661.781,00)	92,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	109.193.091,00	101.531.310,00	(7.661.781,00)	92,98	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH	25.981.010,00	21.459.000,00	(4.522.010,00)	82,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.981.010,00	21.459.000,00	(4.522.010,00)	82,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.981.010,00	21.459.000,00	(4.522.010,00)	82,59	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005		PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	83.212.081,00	80.072.310,00	(3.139.771,00)	96,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	83.212.081,00	80.072.310,00	(3.139.771,00)	96,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.212.081,00	80.072.310,00	(3.139.771,00)	96,22	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.312.191,00	17.107.000,00	(205.191,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01		PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	17.312.191,00	17.107.000,00	(205.191,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004		PENGELOLAAN PENGADUAN PERMASALAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT KABUPATEN/KOTA	17.312.191,00	17.107.000,00	(205.191,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.312.191,00	17.107.000,00	(205.191,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.312.191,00	17.107.000,00	(205.191,00)	98,81	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.942.873.376,00	1.888.657.000,00	(54.216.376,00)	97,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01		PENGELOLAAN SAMPAH	1.942.873.376,00	1.888.657.000,00	(54.216.376,00)	97,20	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DI TPA/TPST/SPA KABUPATEN/KOTA	286.380.000,00	254.900.000,00	(31.480.000,00)	89,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	286.380.000,00	254.900.000,00	(31.480.000,00)	89,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	286.380.000,00	254.900.000,00	(31.480.000,00)	89,00	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019		PENGURANGAN SAMPAH MELALUI PENDAURAN ULANG SAMPAH	17.843.376,00	10.857.000,00	(6.986.376,00)	60,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1	BELANJA OPERASI	17.843.376,00	10.857.000,00	(6.986.376,00)	60,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.843.376,00	10.857.000,00	(6.986.376,00)	60,84	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020		PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL	1.638.650.000,00	1.622.900.000,00	(15.750.000,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1	BELANJA OPERASI	1.638.650.000,00	1.622.900.000,00	(15.750.000,00)	99,03	
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.638.650.000,00	1.622.900.000,00	(15.750.000,00)	99,03	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Organisasi : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.695.483.358,00	2.648.176.400,00	(47.306.958,00)	98,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.676.027.279,00	1.632.570.495,00	(43.456.784,00)	97,40	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	145.381.410,00	144.722.808,00	(658.602,00)	99,54	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	74.143.646,00	73.643.176,00	(500.470,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.143.646,00	73.643.176,00	(500.470,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.143.646,00	73.643.176,00	(500.470,00)	99,32	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	71.237.764,00	71.079.632,00	(158.132,00)	99,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	71.237.764,00	71.079.632,00	(158.132,00)	99,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.237.764,00	71.079.632,00	(158.132,00)	99,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.117.336.864,00	1.098.441.628,00	(18.895.236,00)	98,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.117.336.864,00	1.098.441.628,00	(18.895.236,00)	98,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.117.336.864,00	1.098.441.628,00	(18.895.236,00)	98,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.117.336.864,00	1.098.441.628,00	(18.895.236,00)	98,30	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	30.112.500,00	30.112.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.112.500,00	8.112.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.112.500,00	8.112.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.112.500,00	8.112.500,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	109.980.000,00	95.695.688,00	(14.284.312,00)	87,01	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.980.000,00	19.980.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	90.000.000,00	75.715.688,00	(14.284.312,00)	84,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	90.000.000,00	75.715.688,00	(14.284.312,00)	84,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.000.000,00	75.715.688,00	(14.284.312,00)	84,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	220.704.505,00	213.581.721,00	(7.122.784,00)	96,77	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	88.104.505,00	80.981.721,00	(7.122.784,00)	91,91	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	88.104.505,00	80.981.721,00	(7.122.784,00)	91,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.104.505,00	80.981.721,00	(7.122.784,00)	91,91	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	132.600.000,00	132.600.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.512.000,00	50.016.150,00	(2.495.850,00)	95,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.512.000,00	50.016.150,00	(2.495.850,00)	95,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.512.000,00	50.016.150,00	(2.495.850,00)	95,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.512.000,00	50.016.150,00	(2.495.850,00)	95,24	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	402.598.372,00	399.075.700,00	(3.522.672,00)	99,12	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01		PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	88.319.875,00	88.276.500,00	(43.375,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PENDAFTARAN PENDUDUK	78.320.475,00	78.314.000,00	(6.475,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	78.320.475,00	78.314.000,00	(6.475,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.320.475,00	78.314.000,00	(6.475,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004		PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	9.999.400,00	9.962.500,00	(36.900,00)	99,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.400,00	9.962.500,00	(36.900,00)	99,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	9.962.500,00	(36.900,00)	99,63	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02		PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	35.322.160,00	35.311.200,00	(10.960,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	35.322.160,00	35.311.200,00	(10.960,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.322.160,00	35.311.200,00	(10.960,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.322.160,00	35.311.200,00	(10.960,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03		PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK	278.956.337,00	275.488.000,00	(3.468.337,00)	98,75	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENDAFTARAN PENDUDUK	91.528.680,00	91.520.000,00	(8.680,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.528.680,00	91.520.000,00	(8.680,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.528.680,00	91.520.000,00	(8.680,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003		FASILITASI PENDAFTARAN PENDUDUK	187.427.657,00	183.968.000,00	(3.459.657,00)	98,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	187.427.657,00	183.968.000,00	(3.459.657,00)	98,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.427.657,00	183.968.000,00	(3.459.657,00)	98,15	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	341.875.077,00	341.772.500,00	(102.577,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01		PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	140.419.101,00	140.359.500,00	(59.601,00)	99,95	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001		PENCATATAN, PENATAUSAHAAN DAN PENERBITAN DOKUMEN ATAS PELAPORAN PERISTIWA PENTING	63.315.581,00	63.312.000,00	(3.581,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	63.315.581,00	63.312.000,00	(3.581,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.315.581,00	63.312.000,00	(3.581,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002		PENINGKATAN DALAM PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	9.999.400,00	9.967.500,00	(31.900,00)	99,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	9.999.400,00	9.967.500,00	(31.900,00)	99,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.999.400,00	9.967.500,00	(31.900,00)	99,68	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005		PENGADAAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SELAIN BLANGKO KTP-EL, FORMULIR, DAN BUKU TERKAIT PENCATATAN SIPIL SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	67.104.120,00	67.080.000,00	(24.120,00)	99,96	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	67.104.120,00	67.080.000,00	(24.120,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.104.120,00	67.080.000,00	(24.120,00)	99,96	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02		PENYELENGGARAAN PENCATATAN SIPIL	201.455.976,00	201.413.000,00	(42.976,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004		PELAYANAN SECARA AKTIF PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN PERISTIWA PENTING TERKAIT PENCATATAN SIPIL	55.702.128,00	55.697.000,00	(5.128,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	55.702.128,00	55.697.000,00	(5.128,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.702.128,00	55.697.000,00	(5.128,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006		FASILITASI TERKAIT PENCATATAN SIPIL	145.753.848,00	145.716.000,00	(37.848,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	145.753.848,00	145.716.000,00	(37.848,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.753.848,00	145.716.000,00	(37.848,00)	99,97	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	179.669.896,00	179.451.705,00	(218.191,00)	99,87	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01		PENGUMPULAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DAN PENYAJIAN DATABASE KEPENDUDUKAN	14.036.455,00	13.947.000,00	(89.455,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001		PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN DATA KEPENDUDUKAN	14.036.455,00	13.947.000,00	(89.455,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.036.455,00	13.947.000,00	(89.455,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.036.455,00	13.947.000,00	(89.455,00)	99,36	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03		PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	165.633.441,00	165.504.705,00	(128.736,00)	99,92	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001		KOORDINASI ANTAR LEMBAGA PEMERINTAH DAN LEMBAGA NON-PEMERINTAH DI KABUPATEN/KOTA DALAM PENERTIBAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	57.827.000,00	57.702.205,00	(124.795,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.827.000,00	57.702.205,00	(124.795,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.827.000,00	57.702.205,00	(124.795,00)	99,78	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003		FASILITASI TERKAIT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	46.400.000,00	46.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.400.000,00	41.400.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004		PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN	36.406.441,00	36.402.500,00	(3.941,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	36.406.441,00	36.402.500,00	(3.941,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.406.441,00	36.402.500,00	(3.941,00)	99,98	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	95.312.734,00	95.306.000,00	(6.734,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01		PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	95.312.734,00	95.306.000,00	(6.734,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001		PENYEDIAAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN/KOTA	80.312.734,00	80.306.000,00	(6.734,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	80.312.734,00	80.306.000,00	(6.734,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.312.734,00	80.306.000,00	(6.734,00)	99,99	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002		PENYUSUNAN PROFIL DATA PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI KEPENDUDUKAN SERTA KEBUTUHAN YANG LAIN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	3.977.259.112,99	3.903.659.730,00	(73.599.382,99)	98,14	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.535.453.178,99	1.463.453.916,00	(71.999.262,99)	95,31	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	103.049.629,00	103.033.670,00	(15.959,00)	99,98	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	24.804.914,00	24.794.714,00	(10.200,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.804.914,00	24.794.714,00	(10.200,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.804.914,00	24.794.714,00	(10.200,00)	99,95	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	30.550.652,00	30.549.779,00	(873,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	30.550.652,00	30.549.779,00	(873,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.550.652,00	30.549.779,00	(873,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	32.307.198,00	32.307.198,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.307.198,00	32.307.198,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.307.198,00	32.307.198,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	15.386.865,00	15.381.979,00	(4.886,00)	99,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.386.865,00	15.381.979,00	(4.886,00)	99,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.386.865,00	15.381.979,00	(4.886,00)	99,96	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.050.035.217,00	1.007.070.026,00	(42.965.191,00)	95,90	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	945.363.223,00	902.572.532,00	(42.790.691,00)	95,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	945.363.223,00	902.572.532,00	(42.790.691,00)	95,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	945.363.223,00	902.572.532,00	(42.790.691,00)	95,47	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	50.385.974,00	50.385.974,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	50.385.974,00	50.385.974,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.385.974,00	50.385.974,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	8.276.193,00	8.276.193,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.276.193,00	8.276.193,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.276.193,00	8.276.193,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	46.009.827,00	45.835.327,00	(174.500,00)	99,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	46.009.827,00	45.835.327,00	(174.500,00)	99,62	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.009.827,00	45.835.327,00	(174.500,00)	99,62	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	180.220.300,99	179.777.914,00	(442.386,99)	99,75	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.417.700,00	1.417.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.417.700,00	1.417.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.417.700,00	1.417.700,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.428.500,00	8.397.500,00	(31.000,00)	99,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.428.500,00	8.397.500,00	(31.000,00)	99,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.428.500,00	8.397.500,00	(31.000,00)	99,63	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.485.000,00	15.485.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.485.000,00	15.485.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.485.000,00	15.485.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	140.945.127,99	140.533.741,00	(411.386,99)	99,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	140.945.127,99	140.533.741,00	(411.386,99)	99,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.945.127,99	140.533.741,00	(411.386,99)	99,70	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010		PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	13.943.973,00	13.943.973,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1	BELANJA OPERASI	13.943.973,00	13.943.973,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.943.973,00	13.943.973,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	92.927.206,00	(27.072.794,00)	77,43	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	16.579.782,00	15.225.900,00	(1.353.882,00)	91,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	16.579.782,00	15.225.900,00	(1.353.882,00)	91,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.579.782,00	15.225.900,00	(1.353.882,00)	91,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.579.782,00	15.225.900,00	(1.353.882,00)	91,83	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	52.068.250,00	51.919.200,00	(149.050,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	52.068.250,00	51.919.200,00	(149.050,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	52.068.250,00	51.919.200,00	(149.050,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.068.250,00	51.919.200,00	(149.050,00)	99,71	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.491.632.250,00	1.490.032.130,00	(1.600.120,00)	99,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.491.632.250,00	1.490.032.130,00	(1.600.120,00)	99,89	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001		FASILITASI PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.257.728.175,00	1.257.728.055,00	(120,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.257.728.175,00	1.257.728.055,00	(120,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.257.728.175,00	1.257.728.055,00	(120,00)	99,99	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003		FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA	32.681.743,00	32.681.743,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.681.743,00	32.681.743,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.681.743,00	32.681.743,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008		PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN BUM DESA DAN LEMBAGA KERJA SAMA ANTAR DESA	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009		PENYELENGGARAAN PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA	33.942.332,00	32.342.332,00	(1.600.000,00)	95,28	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	33.942.332,00	32.342.332,00	(1.600.000,00)	95,28	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.942.332,00	32.342.332,00	(1.600.000,00)	95,28	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013		FASILITASI PENGELOLAAN ASET DESA	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	950.173.684,00	950.173.684,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01		PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG BERGERAK DI BIDANG PEMBERDAYAAN DESA DAN LEMBAGA ADAT TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG MASYARAKAT PELAKUNYA HUKUM ADAT YANG SAMA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	950.173.684,00	950.173.684,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003		PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN (RT, RW, PKK, POSYANDU, LPM, DAN KARANG TARUNA), LEMBAGA ADAT DESA/KELURAHAN DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	950.173.684,00	950.173.684,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	950.173.684,00	950.173.684,00	0,00	100,00	
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	950.173.684,00	950.173.684,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Organisasi : DINAS PERHUBUNGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	187.593.000,00	187.700.000,00	107.000,00	100,05	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	187.593.000,00	187.700.000,00	107.000,00	100,05	
	2.15.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	187.593.000,00	187.700.000,00	107.000,00	100,05	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.262.720.215,00	2.127.672.097,00	(135.048.118,00)	94,03	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.823.322.571,00	1.778.365.710,00	(44.956.861,00)	97,53	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	224.049.004,00	213.143.001,00	(10.906.003,00)	95,13	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	38.246.156,00	37.065.653,00	(1.180.503,00)	96,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.246.156,00	37.065.653,00	(1.180.503,00)	96,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.246.156,00	37.065.653,00	(1.180.503,00)	96,91	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	16.428.334,00	14.928.334,00	(1.500.000,00)	90,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.428.334,00	14.928.334,00	(1.500.000,00)	90,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.428.334,00	14.928.334,00	(1.500.000,00)	90,86	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	32.249.269,00	31.949.269,00	(300.000,00)	99,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.249.269,00	31.949.269,00	(300.000,00)	99,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.249.269,00	31.949.269,00	(300.000,00)	99,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	21.633.156,00	20.733.156,00	(900.000,00)	95,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	21.633.156,00	20.733.156,00	(900.000,00)	95,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.633.156,00	20.733.156,00	(900.000,00)	95,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	81.339.995,00	76.414.495,00	(4.925.500,00)	93,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	81.339.995,00	76.414.495,00	(4.925.500,00)	93,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	81.339.995,00	76.414.495,00	(4.925.500,00)	93,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	34.152.094,00	32.052.094,00	(2.100.000,00)	93,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	34.152.094,00	32.052.094,00	(2.100.000,00)	93,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.152.094,00	32.052.094,00	(2.100.000,00)	93,85	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.121.510.343,00	1.100.759.116,00	(20.751.227,00)	98,14	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.021.695.292,00	1.005.703.102,00	(15.992.190,00)	98,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.021.695.292,00	1.005.703.102,00	(15.992.190,00)	98,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.021.695.292,00	1.005.703.102,00	(15.992.190,00)	98,43	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	47.907.452,00	44.707.449,00	(3.200.003,00)	93,32	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	47.907.452,00	44.707.449,00	(3.200.003,00)	93,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.907.452,00	44.707.449,00	(3.200.003,00)	93,32	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	51.907.599,00	50.348.565,00	(1.559.034,00)	96,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	51.907.599,00	50.348.565,00	(1.559.034,00)	96,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.907.599,00	50.348.565,00	(1.559.034,00)	96,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	209.883.234,00	203.731.423,00	(6.151.811,00)	97,06	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	27.251.699,00	27.251.699,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	27.251.699,00	27.251.699,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.251.699,00	27.251.699,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	20.402.885,00	14.340.585,00	(6.062.300,00)	70,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	20.402.885,00	14.340.585,00	(6.062.300,00)	70,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.402.885,00	14.340.585,00	(6.062.300,00)	70,28	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	158.688.650,00	158.599.139,00	(89.511,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	158.688.650,00	158.599.139,00	(89.511,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	158.688.650,00	158.599.139,00	(89.511,00)	99,94	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	202.925.670,00	202.925.670,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	106.928.430,00	106.928.430,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	106.928.430,00	106.928.430,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	106.928.430,00	106.928.430,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	25.856.320,00	24.093.500,00	(1.762.820,00)	93,18	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	10.256.320,00	8.493.500,00	(1.762.820,00)	82,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.256.320,00	8.493.500,00	(1.762.820,00)	82,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.256.320,00	8.493.500,00	(1.762.820,00)	82,81	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	21.098.000,00	15.713.000,00	(5.385.000,00)	74,47	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	13.328.000,00	7.943.000,00	(5.385.000,00)	59,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	13.328.000,00	7.943.000,00	(5.385.000,00)	59,59	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.328.000,00	7.943.000,00	(5.385.000,00)	59,59	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.770.000,00	0,00	100,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	439.397.644,00	349.306.387,00	(90.091.257,00)	79,49	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02		PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	287.690.688,00	201.519.431,00	(86.171.257,00)	70,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001		PEMBANGUNAN PRASARANA JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	287.690.688,00	201.519.431,00	(86.171.257,00)	70,04	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	150.563.141,00	64.554.617,00	(86.008.524,00)	42,87	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	6.500.000,00	5.200.000,00	(1.300.000,00)	80,00	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	144.063.141,00	59.354.617,00	(84.708.524,00)	41,20	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2	BELANJA MODAL	137.127.547,00	136.964.814,00	(162.733,00)	99,88	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.324.509,00	99.161.850,00	(162.659,00)	99,83	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.803.038,00	37.802.964,00	(74,00)	99,99	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06		PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	151.706.956,00	147.786.956,00	(3.920.000,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004		PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN UNTUK JALAN KABUPATEN/KOTA	151.706.956,00	147.786.956,00	(3.920.000,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	151.706.956,00	147.786.956,00	(3.920.000,00)	97,41	
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.706.956,00	147.786.956,00	(3.920.000,00)	97,41	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	2.893.606.214,75	2.820.177.903,00	(73.428.311,75)	97,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.412.288.851,75	1.347.230.908,00	(65.057.943,75)	95,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	62.181.517,00	61.476.200,00	(705.317,00)	98,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	982.742.868,75	966.518.707,00	(16.224.161,75)	98,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.064.250,00	50.864.991,00	(199.259,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	137.991.000,00	95.297.970,00	(42.693.030,00)	69,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.942.000,00	31.380.000,00	(1.562.000,00)	95,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	367.513.095,00	367.434.095,00	(79.000,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.513.095,00	367.434.095,00	(79.000,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18.880.000,00	18.805.000,00	(75.000,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.825.000,00	(75.000,00)	99,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.825.000,00	(75.000,00)	99,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007		LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.113.804.268,00	1.105.512.900,00	(8.291.368,00)	99,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.047.536.000,00	1.039.250.400,00	(8.285.600,00)	99,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002		PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	322.928.000,00	315.600.000,00	(7.328.000,00)	97,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	247.928.000,00	240.800.000,00	(7.128.000,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.928.000,00	240.800.000,00	(7.128.000,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.800.000,00	(200.000,00)	99,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.800.000,00	(200.000,00)	99,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003		PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	724.608.000,00	723.650.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	715.950.000,00	714.992.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.950.000,00	714.992.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003		MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	164.965.163,00	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	164.965.163,00	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.049.163,00	156.937.311,00	(111.852,00)	99,92	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	109.247.679,00	109.192.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.997.679,00	93.942.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.997.679,00	93.942.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001		OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	2.893.606.214,75	2.820.177.903,00	(73.428.311,75)	97,46	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.412.288.851,75	1.347.230.908,00	(65.057.943,75)	95,39	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	62.181.517,00	61.476.200,00	(705.317,00)	98,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.947.330,00	26.603.200,00	(344.130,00)	98,72	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.857.413,00	3.815.000,00	(42.413,00)	98,90	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.638.779,00	3.568.000,00	(70.779,00)	98,05	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.620.180,00	3.580.000,00	(40.180,00)	98,89	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.117.815,00	23.910.000,00	(207.815,00)	99,13	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	982.742.868,75	966.518.707,00	(16.224.161,75)	98,34	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	926.988.613,00	911.862.207,00	(15.126.406,00)	98,36	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.320.585,00	25.240.300,00	(80.285,00)	99,68	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.953.670,75	10.771.200,00	(182.470,75)	98,33	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008		PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.480.000,00	18.645.000,00	(835.000,00)	95,71	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.058.442,00	10.905.600,00	(152.842,00)	98,61	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	51.064.250,00	50.864.991,00	(199.259,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.705.000,00	4.705.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.359.250,00	46.159.991,00	(199.259,00)	99,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	137.991.000,00	95.297.970,00	(42.693.030,00)	69,06	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.991.000,00	77.297.970,00	(42.693.030,00)	64,41	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.942.000,00	31.380.000,00	(1.562.000,00)	95,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.136.000,00	4.136.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.806.000,00	27.244.000,00	(1.562.000,00)	94,57	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.308.774,00	130.787.440,00	(3.521.334,00)	97,37	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	367.513.095,00	367.434.095,00	(79.000,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01		PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	367.513.095,00	367.434.095,00	(79.000,00)	99,97	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006		PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	18.880.000,00	18.805.000,00	(75.000,00)	99,60	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.900.000,00	15.825.000,00	(75.000,00)	99,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	15.825.000,00	(75.000,00)	99,52	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007		LAYANAN HUBUNGAN MEDIA	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	296.998.310,00	296.998.310,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012		PENYELENGGARAAN HUBUNGAN MASYARAKAT, MEDIA DAN KEMITRAAN KOMUNITAS	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.634.785,00	51.630.785,00	(4.000,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.113.804.268,00	1.105.512.900,00	(8.291.368,00)	99,25	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01		PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT DAN SUB DOMAIN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.047.536.000,00	1.039.250.400,00	(8.285.600,00)	99,20	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002		PENATALAKSANAAN DAN PENGAWASAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	322.928.000,00	315.600.000,00	(7.328.000,00)	97,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	247.928.000,00	240.800.000,00	(7.128.000,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	247.928.000,00	240.800.000,00	(7.128.000,00)	97,12	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	75.000.000,00	74.800.000,00	(200.000,00)	99,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.000.000,00	74.800.000,00	(200.000,00)	99,73	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003		PENYELENGGARAAN SISTEM JARINGAN INTRA PEMERINTAH DAERAH	724.608.000,00	723.650.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	715.950.000,00	714.992.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	715.950.000,00	714.992.400,00	(957.600,00)	99,86	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.658.000,00	8.658.000,00	0,00	100,00	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02		PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006		KOORDINASI DAN SINKRONISASI DATA DAN INFORMASI ELEKTRONIK	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.268.268,00	66.262.500,00	(5.768,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01		PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003		MEMBANGUN METADATA STATISTIK SEKTORAL	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.250.745,00	11.250.000,00	(745,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
Organisasi : DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		5	BELANJA DAERAH	164.965.163,00	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	164.965.163,00	164.722.111,00	(243.052,00)	99,85	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01		PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	157.049.163,00	156.937.311,00	(111.852,00)	99,92	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001		PENETAPAN KEBIJAKAN TATA KELOLA KEAMANAN INFORMASI DAN JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.801.484,00	47.744.384,00	(57.100,00)	99,88	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA BERBASIS ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK	109.247.679,00	109.192.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.997.679,00	93.942.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.997.679,00	93.942.927,00	(54.752,00)	99,94	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.250.000,00	15.250.000,00	0,00	100,00	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02		PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001		OPERASIONALISASI JARING KOMUNIKASI SANDI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.916.000,00	7.784.800,00	(131.200,00)	98,34	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Organisasi : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.176.891.571,00	2.107.781.070,00	(69.110.501,00)	96,82	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.565.974.864,00	1.502.451.306,00	(63.523.558,00)	95,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	90.520.357,00	89.892.857,00	(627.500,00)	99,30	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	57.806.324,00	57.178.824,00	(627.500,00)	98,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	57.806.324,00	57.178.824,00	(627.500,00)	98,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.806.324,00	57.178.824,00	(627.500,00)	98,91	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.341.414,00	3.341.414,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.341.414,00	3.341.414,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.341.414,00	3.341.414,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	10.462.197,00	10.462.197,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	10.462.197,00	10.462.197,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.462.197,00	10.462.197,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	18.910.422,00	18.910.422,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	18.910.422,00	18.910.422,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.910.422,00	18.910.422,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.110.249.469,00	1.089.486.574,00	(20.762.895,00)	98,12	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.039.416.532,00	1.019.355.905,00	(20.060.627,00)	98,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.039.416.532,00	1.019.355.905,00	(20.060.627,00)	98,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.039.416.532,00	1.019.355.905,00	(20.060.627,00)	98,07	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	67.262.226,00	66.559.958,00	(702.268,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	67.262.226,00	66.559.958,00	(702.268,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	67.262.226,00	66.559.958,00	(702.268,00)	98,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.570.711,00	3.570.711,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.570.711,00	3.570.711,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.570.711,00	3.570.711,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	8.661.568,00	8.661.568,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	8.661.568,00	8.661.568,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	8.661.568,00	8.661.568,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.661.568,00	8.661.568,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	40.717.400,00	38.209.400,00	(2.508.000,00)	93,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	40.717.400,00	38.209.400,00	(2.508.000,00)	93,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	40.717.400,00	38.209.400,00	(2.508.000,00)	93,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.717.400,00	38.209.400,00	(2.508.000,00)	93,84	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	82.254.400,00	81.143.700,00	(1.110.700,00)	98,64	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	10.795.000,00	10.794.500,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	10.795.000,00	10.794.500,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.795.000,00	10.794.500,00	(500,00)	99,99	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	71.459.400,00	70.349.200,00	(1.110.200,00)	98,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	71.459.400,00	70.349.200,00	(1.110.200,00)	98,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	71.459.400,00	70.349.200,00	(1.110.200,00)	98,44	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	119.991.000,00	83.944.607,00	(36.046.393,00)	69,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	119.991.000,00	83.944.607,00	(36.046.393,00)	69,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	119.991.000,00	83.944.607,00	(36.046.393,00)	69,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	119.991.000,00	83.944.607,00	(36.046.393,00)	69,95	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	53.418.420,00	51.784.500,00	(1.633.920,00)	96,94	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	25.818.420,00	24.184.500,00	(1.633.920,00)	93,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	25.818.420,00	24.184.500,00	(1.633.920,00)	93,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.818.420,00	24.184.500,00	(1.633.920,00)	93,67	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	60.162.250,00	59.328.100,00	(834.150,00)	98,61	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	46.562.250,00	45.728.100,00	(834.150,00)	98,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.562.250,00	45.728.100,00	(834.150,00)	98,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.562.250,00	45.728.100,00	(834.150,00)	98,20	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.600.000,00	13.600.000,00	0,00	100,00	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	149.739.707,00	149.071.287,00	(668.420,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01		PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DIBIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	149.739.707,00	149.071.287,00	(668.420,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006		PENYEDIAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	149.739.707,00	149.071.287,00	(668.420,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	149.739.707,00	149.071.287,00	(668.420,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.739.707,00	149.071.287,00	(668.420,00)	99,55	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	461.177.000,00	456.258.477,00	(4.918.523,00)	98,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01		PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	461.177.000,00	456.258.477,00	(4.918.523,00)	98,93	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005		BIMBINGAN TEKNIS KEPADA PELAKU USAHA	280.872.000,00	277.647.000,00	(3.225.000,00)	98,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	280.872.000,00	277.647.000,00	(3.225.000,00)	98,85	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.872.000,00	277.647.000,00	(3.225.000,00)	98,85	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006		PENGAWASAN PENANAMAN MODAL	180.305.000,00	178.611.477,00	(1.693.523,00)	99,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	180.305.000,00	178.611.477,00	(1.693.523,00)	99,06	
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.305.000,00	178.611.477,00	(1.693.523,00)	99,06	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	12.176.408.409,00	12.016.248.738,00	(160.159.671,00)	98,68	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.349.806.541,00	1.331.073.560,00	(18.732.981,00)	98,61	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	75.961.125,00	75.961.125,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	18.074.471,00	18.074.471,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	18.074.471,00	18.074.471,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.074.471,00	18.074.471,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	14.085.025,00	14.085.025,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.085.025,00	14.085.025,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.085.025,00	14.085.025,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	14.366.092,00	14.366.092,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	14.366.092,00	14.366.092,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.366.092,00	14.366.092,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.121.301,00	9.121.301,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.121.301,00	9.121.301,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.121.301,00	9.121.301,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	9.867.702,00	9.867.702,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.867.702,00	9.867.702,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.867.702,00	9.867.702,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	4.913.715,00	4.913.715,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	4.913.715,00	4.913.715,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.913.715,00	4.913.715,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5.532.819,00	5.532.819,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	5.532.819,00	5.532.819,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.532.819,00	5.532.819,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	888.662.054,00	874.235.442,00	(14.426.612,00)	98,37	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	809.861.513,00	795.435.136,00	(14.426.377,00)	98,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	809.861.513,00	795.435.136,00	(14.426.377,00)	98,21	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	809.861.513,00	795.435.136,00	(14.426.377,00)	98,21	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	61.340.400,00	61.340.165,00	(235,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	61.340.400,00	61.340.165,00	(235,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.340.400,00	61.340.165,00	(235,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	17.460.141,00	17.460.141,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.460.141,00	17.460.141,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.460.141,00	17.460.141,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	23.592.933,00	23.567.933,00	(25.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	23.592.933,00	23.567.933,00	(25.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	23.592.933,00	23.567.933,00	(25.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.592.933,00	23.567.933,00	(25.000,00)	99,89	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	198.237.025,00	196.996.325,00	(1.240.700,00)	99,37	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.800.389,00	72.799.589,00	(800,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	72.800.389,00	72.799.589,00	(800,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.800.389,00	72.799.589,00	(800,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	8.265.536,00	8.265.536,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	8.265.536,00	8.265.536,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.265.536,00	8.265.536,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.860.000,00	13.860.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	102.109.100,00	100.869.200,00	(1.239.900,00)	98,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	102.109.100,00	100.869.200,00	(1.239.900,00)	98,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	102.109.100,00	100.869.200,00	(1.239.900,00)	98,78	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	92.120.179,00	92.120.179,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	34.051.225,00	33.161.556,00	(889.669,00)	97,38	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.065.000,00	7.065.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	26.986.225,00	26.096.556,00	(889.669,00)	96,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	26.986.225,00	26.096.556,00	(889.669,00)	96,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.986.225,00	26.096.556,00	(889.669,00)	96,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	37.182.000,00	35.031.000,00	(2.151.000,00)	94,21	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	37.182.000,00	35.031.000,00	(2.151.000,00)	94,21	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.182.000,00	35.031.000,00	(2.151.000,00)	94,21	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.182.000,00	35.031.000,00	(2.151.000,00)	94,21	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.493.404.334,00	1.442.428.934,00	(50.975.400,00)	96,58	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01		PENYADARAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	1.493.404.334,00	1.442.428.934,00	(50.975.400,00)	96,58	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA PELOPOR	83.372.798,00	83.372.798,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	83.372.798,00	83.372.798,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.372.798,00	83.372.798,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0002		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING WIRA USAHA PEMULA	267.750.000,00	267.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	267.750.000,00	267.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	267.750.000,00	267.750.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS DAYA SAING PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA	1.111.977.468,00	1.061.110.868,00	(50.866.600,00)	95,42	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.111.977.468,00	1.061.110.868,00	(50.866.600,00)	95,42	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.430.868,00	75.430.868,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	1.036.546.600,00	985.680.000,00	(50.866.600,00)	95,09	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0008		PENINGKATAN KEPEMIMPINAN, KEPELOPORAN DAN KESUKARELAWANAN PEMUDA	30.304.068,00	30.195.268,00	(108.800,00)	99,64	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	30.304.068,00	30.195.268,00	(108.800,00)	99,64	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.304.068,00	30.195.268,00	(108.800,00)	99,64	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03		PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	9.333.197.534,00	9.242.746.244,00	(90.451.290,00)	99,03	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.990.090.790,00	6.899.758.500,00	(90.332.290,00)	98,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA KABUPATEN/KOTA	6.990.090.790,00	6.899.758.500,00	(90.332.290,00)	98,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	6.990.090.790,00	6.899.758.500,00	(90.332.290,00)	98,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0003	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6.990.090.790,00	6.899.758.500,00	(90.332.290,00)	98,70	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.299.467.132,00	2.299.348.132,00	(119.000,00)	99,99	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0001		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA MULTI EVENT DAN SINGLE EVENT TINGKAT KABUPATEN/KOTA	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002		PENYELENGGARAAN KEJUARAAN DAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT KABUPATEN/KOTA	499.467.132,00	499.348.132,00	(119.000,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	493.447.132,00	493.328.132,00	(119.000,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.447.132,00	493.328.132,00	(119.000,00)	99,97	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.020.000,00	6.020.000,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04		PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA	43.639.612,00	43.639.612,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0001		STANDARDISASI ORGANISASI KEOLAHRAGAAN	43.639.612,00	43.639.612,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.639.612,00	43.639.612,00	0,00	100,00	
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.639.612,00	43.639.612,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
Organisasi : DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
	2.19.3.26.0.00.02.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	869.193.516,00	869.170.371,00	(23.145,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	339.804.410,00	339.781.279,00	(23.131,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02		PENGELOLAAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	259.242.478,00	259.242.478,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0004		PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM PENGELOLAAN KAWASAN WISATA STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	74.700.000,00	74.700.000,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0008		PENINGKATAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	184.542.478,00	184.542.478,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0008	5.1	BELANJA OPERASI	184.542.478,00	184.542.478,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	184.542.478,00	184.542.478,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03		PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	80.561.932,00	80.538.801,00	(23.131,00)	99,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003		PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	80.561.932,00	80.538.801,00	(23.131,00)	99,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	80.561.932,00	80.538.801,00	(23.131,00)	99,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.561.932,00	80.538.801,00	(23.131,00)	99,97	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	353.865.533,00	353.865.533,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01		PEMASARAN PARIWISATA DALAM DAN LUAR NEGERI DAYA TARIK, DESTINASI DAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	353.865.533,00	353.865.533,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006		FASILITASI KEGIATAN PEMASARAN PARIWISATA BAIK DALAM DAN LUAR NEGERI PARIWISATA KABUPATEN/KOTA	353.865.533,00	353.865.533,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	353.865.533,00	353.865.533,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	353.865.533,00	353.865.533,00	0,00	100,00	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	175.523.573,00	175.523.559,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02		PENGEMBANGAN EKOSISTEM EKONOMI KREATIFÂ	175.523.573,00	175.523.559,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003		FASILITASI PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	175.523.573,00	175.523.559,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	175.523.573,00	175.523.559,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	163.023.573,00	163.023.559,00	(14,00)	99,99	
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.438.489.501,00	1.517.296.148,00	(921.193.353,00)	62,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.090.588.295,00	1.062.430.503,00	(28.157.792,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	97.215.143,00	97.157.159,00	(57.984,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	686.169.087,00	659.361.573,00	(26.807.514,00)	96,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	138.706.825,00	138.641.171,00	(65.654,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.430.000,00	58.373.360,00	(56.640,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.347.901.206,00	454.865.645,00	(893.035.561,00)	33,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.333.078.000,00	440.157.249,00	(892.920.751,00)	33,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001		SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	80.883.059,00	80.670.985,00	(212.074,00)	99,73	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05		PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001		PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	2.438.489.501,00	1.517.296.148,00	(921.193.353,00)	62,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.090.588.295,00	1.062.430.503,00	(28.157.792,00)	97,41	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	97.215.143,00	97.157.159,00	(57.984,00)	99,94	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.061.084,00	60.050.269,00	(10.815,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.939.169,00	3.894.538,00	(44.631,00)	98,86	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.309.770,00	3.309.770,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.963.616,00	3.963.444,00	(172,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.583.159,00	3.583.159,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.358.345,00	22.355.979,00	(2.366,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	686.169.087,00	659.361.573,00	(26.807.514,00)	96,09	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	640.602.982,00	613.946.033,00	(26.656.949,00)	95,83	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.171.540,00	29.151.540,00	(20.000,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.394.565,00	16.264.000,00	(130.565,00)	99,20	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.070.000,00	5.900.000,00	(1.170.000,00)	83,45	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	138.706.825,00	138.641.171,00	(65.654,00)	99,95	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.030.500,00	47.001.225,00	(29.275,00)	99,93	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.535.000,00	25.534.067,00	(933,00)	99,99	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	2.749.166,00	(834,00)	99,96	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.080.000,00	2.060.000,00	(20.000,00)	99,03	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.311.325,00	61.296.713,00	(14.612,00)	99,97	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.430.000,00	58.373.360,00	(56.640,00)	99,90	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	56.030.000,00	55.973.360,00	(56.640,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1.347.901.206,00	454.865.645,00	(893.035.561,00)	33,74	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01		PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009		PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.823.206,00	14.708.396,00	(114.810,00)	99,22	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02		PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.333.078.000,00	440.157.249,00	(892.920.751,00)	33,01	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001		SOSIAISASI BUDAYA BACA DAN LITERASI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN KHUSUS SERTA MASYARAKAT	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.764.753,00	9.754.750,00	(10.003,00)	99,89	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002		PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PERPUSTAKAAN DI TEMPAT-TEMPAT UMUM YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2	BELANJA MODAL	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.169.733.600,00	276.836.952,00	(892.896.648,00)	23,66	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003		PEMBERIAN PENGHARGAAN GERAKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.579.647,00	93.565.547,00	(14.100,00)	99,98	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004		PENGEMBANGAN LITERASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	5.1.05	Belanja Hibah	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Organisasi : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	80.883.059,00	80.670.985,00	(212.074,00)	99,73	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01		PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001		PENCIPTAAN DAN PENGGUNAAN ARSIP DINAMIS	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.066.819,00	45.859.200,00	(207.619,00)	99,54	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05		PENCARIAN ARSIP STATIS KABUPATEN/KOTA YANG DINYATAKAN HILANG	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001		PENILAIAN DAN PENETAPAN AUTENTISITAS ARSIP STATIS YANG DINYATAKAN HILANG	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.816.240,00	34.811.785,00	(4.455,00)	99,98	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
Organisasi : DINAS PERIKANAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	125.000.000,00	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	125.000.000,00	41.105.000,00	(83.895.000,00)	32,88	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	0,00	41.105.000,00	41.105.000,00	0,00	
	3.25.0.00.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	0,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	5.844.492.246,70	5.779.422.564,00	(65.069.682,70)	98,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.252.126.458,00	2.205.369.780,00	(46.756.678,00)	97,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	39.227.593,00	39.102.500,00	(125.093,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	20.321.598,00	20.318.000,00	(3.598,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	20.321.598,00	20.318.000,00	(3.598,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.321.598,00	20.318.000,00	(3.598,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.098.541,00	4.015.000,00	(83.541,00)	97,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.098.541,00	4.015.000,00	(83.541,00)	97,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.098.541,00	4.015.000,00	(83.541,00)	97,96	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	3.896.412,00	3.884.000,00	(12.412,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.896.412,00	3.884.000,00	(12.412,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.896.412,00	3.884.000,00	(12.412,00)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.878.659,00	1.870.000,00	(8.659,00)	99,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	1.878.659,00	1.870.000,00	(8.659,00)	99,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.878.659,00	1.870.000,00	(8.659,00)	99,53	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	1.177.483,00	1.175.000,00	(2.483,00)	99,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.177.483,00	1.175.000,00	(2.483,00)	99,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.177.483,00	1.175.000,00	(2.483,00)	99,78	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.854.900,00	7.840.500,00	(14.400,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.854.900,00	7.840.500,00	(14.400,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.854.900,00	7.840.500,00	(14.400,00)	99,81	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.682.120.667,00	1.639.802.072,00	(42.318.595,00)	97,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.645.663.100,00	1.603.350.072,00	(42.313.028,00)	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.645.663.100,00	1.603.350.072,00	(42.313.028,00)	97,42	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.645.663.100,00	1.603.350.072,00	(42.313.028,00)	97,42	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.438.384,00	3.438.000,00	(384,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.438.384,00	3.438.000,00	(384,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.438.384,00	3.438.000,00	(384,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	33.019.183,00	33.014.000,00	(5.183,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	33.019.183,00	33.014.000,00	(5.183,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.019.183,00	33.014.000,00	(5.183,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.901.564,00	3.900.000,00	(1.564,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.901.564,00	3.900.000,00	(1.564,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.901.564,00	3.900.000,00	(1.564,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.901.564,00	3.900.000,00	(1.564,00)	99,95	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	30.680.038,00	29.968.500,00	(711.538,00)	97,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	5.020.038,00	4.998.500,00	(21.538,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	5.020.038,00	4.998.500,00	(21.538,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.020.038,00	4.998.500,00	(21.538,00)	99,57	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	25.660.000,00	24.970.000,00	(690.000,00)	97,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	25.660.000,00	24.970.000,00	(690.000,00)	97,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.660.000,00	24.970.000,00	(690.000,00)	97,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	215.430.431,00	215.256.449,00	(173.982,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	57.591.000,00	57.580.000,00	(11.000,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	57.091.000,00	57.080.000,00	(11.000,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	57.091.000,00	57.080.000,00	(11.000,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	7.112.500,00	7.111.250,00	(1.250,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.112.500,00	7.111.250,00	(1.250,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.112.500,00	7.111.250,00	(1.250,00)	99,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.219.364,00	5.219.000,00	(364,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.219.364,00	5.219.000,00	(364,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.219.364,00	5.219.000,00	(364,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	145.507.567,00	145.346.199,00	(161.368,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	145.507.567,00	145.346.199,00	(161.368,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.507.567,00	145.346.199,00	(161.368,00)	99,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	178.140.289,00	175.145.659,00	(2.994.630,00)	98,31	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	95.997.240,00	95.990.490,00	(6.750,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.990.490,00	(6.750,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.990.490,00	(6.750,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009		PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	5.1	BELANJA OPERASI	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.143.049,00	79.155.169,00	(2.987.880,00)	96,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	101.965.876,00	101.650.000,00	(315.876,00)	99,69	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.070.876,00	1.020.000,00	(50.876,00)	95,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.070.876,00	1.020.000,00	(50.876,00)	95,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.876,00	1.020.000,00	(50.876,00)	95,24	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.095.000,00	18.080.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.095.000,00	18.080.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.095.000,00	18.080.000,00	(15.000,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	82.800.000,00	82.550.000,00	(250.000,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	82.800.000,00	82.550.000,00	(250.000,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.800.000,00	82.550.000,00	(250.000,00)	99,69	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	660.000,00	544.600,00	(115.400,00)	82,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	660.000,00	544.600,00	(115.400,00)	82,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	660.000,00	544.600,00	(115.400,00)	82,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	660.000,00	544.600,00	(115.400,00)	82,51	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	885.942.333,00	880.336.010,00	(5.606.323,00)	99,36	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01		PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	301.463.500,00	301.449.000,00	(14.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	301.463.500,00	301.449.000,00	(14.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	301.463.500,00	301.449.000,00	(14.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.599.000,00	21.599.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	279.864.500,00	279.850.000,00	(14.500,00)	99,99	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02		PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	584.478.833,00	578.887.010,00	(5.591.823,00)	99,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS NELAYAN KECIL	584.478.833,00	578.887.010,00	(5.591.823,00)	99,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	584.478.833,00	578.887.010,00	(5.591.823,00)	99,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	584.478.833,00	578.887.010,00	(5.591.823,00)	99,04	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.559.624.997,70	2.551.489.784,00	(8.135.213,70)	99,68	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02		PEMBERDAYAAN PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	730.794.141,00	730.109.100,00	(685.041,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001		PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMBUDI DAYA IKAN KECIL	627.134.141,00	626.449.100,00	(685.041,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	627.134.141,00	626.449.100,00	(685.041,00)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	343.798.541,00	343.113.500,00	(685.041,00)	99,80	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	283.335.600,00	283.335.600,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004		PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHANAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	103.660.000,00	103.660.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	103.660.000,00	103.660.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.660.000,00	103.660.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04		PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN	1.828.830.856,70	1.821.380.684,00	(7.450.172,70)	99,59	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002		PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	533.501.867,00	533.101.084,00	(400.783,00)	99,92	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	418.971.267,00	418.570.484,00	(400.783,00)	99,90	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	176.388.543,00	175.987.760,00	(400.783,00)	99,77	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.1.05	Belanja Hibah	242.582.724,00	242.582.724,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	114.530.600,00	114.530.600,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.530.600,00	114.530.600,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003		PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDIDAYAAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.057.691.077,70	1.052.292.400,00	(5.398.677,70)	99,48	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.057.691.077,70	1.052.292.400,00	(5.398.677,70)	99,48	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	208.580.000,00	204.080.000,00	(4.500.000,00)	97,84	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	5.1.05	Belanja Hibah	849.111.077,70	848.212.400,00	(898.677,70)	99,89	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0005		PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDIDAYAAN IKAN DI DARAT	237.637.912,00	235.987.200,00	(1.650.712,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	237.637.912,00	235.987.200,00	(1.650.712,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.637.912,00	235.987.200,00	(1.650.712,00)	99,30	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	146.798.458,00	142.226.990,00	(4.571.468,00)	96,88	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02		PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	30.662.514,00	26.363.890,00	(4.298.624,00)	85,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001		PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL	30.662.514,00	26.363.890,00	(4.298.624,00)	85,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.662.514,00	26.363.890,00	(4.298.624,00)	85,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.662.514,00	26.363.890,00	(4.298.624,00)	85,98	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA	116.135.944,00	115.863.100,00	(272.844,00)	99,76	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001		PENINGKATAN KETERSEDIAAN IKAN UNTUK KONSUMSI DAN USAHA PENGOLAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	64.145.944,00	63.919.500,00	(226.444,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.145.944,00	63.919.500,00	(226.444,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.145.944,00	63.919.500,00	(226.444,00)	99,64	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002		PEMBERIAN FASILITAS BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN SKALA MIKRO DAN KECIL DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	51.990.000,00	51.943.600,00	(46.400,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.990.000,00	51.943.600,00	(46.400,00)	99,91	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00	100,00	
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	5.1.05	Belanja Hibah	50.550.000,00	50.503.600,00	(46.400,00)	99,90	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025 B
upati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	256.600.915,00	256.405.700,00	(195.215,00)	99,92	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	229.393.420,00	229.205.700,00	(187.720,00)	99,91	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01		PENYEDIAAN DAN PENYALURAN PANGAN POKOK ATAU PANGAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN	97.600.430,00	97.469.200,00	(131.230,00)	99,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015		PEMANTAUAN HARGA DAN PASOKAN PANGAN	97.600.430,00	97.469.200,00	(131.230,00)	99,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	97.600.430,00	97.469.200,00	(131.230,00)	99,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	97.600.430,00	97.469.200,00	(131.230,00)	99,86	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04		PELAKSANAAN PENCAPAIAN TARGET KONSUMSI PANGAN PERKAPITA/TAHUN SESUAI DENGAN ANGKA KECUKUPAN GIZI	131.792.990,00	131.736.500,00	(56.490,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001		PENYUSUNAN DAN PENETAPAN TARGET KONSUMSI PANGAN PER KAPITA PER TAHUN	41.130.043,00	41.114.400,00	(15.643,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	41.130.043,00	41.114.400,00	(15.643,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.130.043,00	41.114.400,00	(15.643,00)	99,96	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL	90.662.947,00	90.622.100,00	(40.847,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	90.662.947,00	90.622.100,00	(40.847,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	90.662.947,00	90.622.100,00	(40.847,00)	99,95	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.207.495,00	27.200.000,00	(7.495,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01		PELAKSANAAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN SEGAR DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.207.495,00	27.200.000,00	(7.495,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007		PENYEDIAAN SARANA PENGUJIAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	27.207.495,00	27.200.000,00	(7.495,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	27.207.495,00	27.200.000,00	(7.495,00)	99,97	
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.207.495,00	27.200.000,00	(7.495,00)	99,97	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Organisasi : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	8.275.365.526,00	7.376.373.896,00	(898.991.630,00)	89,13	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.894.135.218,00	4.863.492.516,00	(30.642.702,00)	99,37	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	106.222.984,00	105.389.400,00	(833.584,00)	99,21	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	88.620.408,00	87.795.400,00	(825.008,00)	99,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	88.620.408,00	87.795.400,00	(825.008,00)	99,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.620.408,00	87.795.400,00	(825.008,00)	99,06	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.997.873,00	4.995.500,00	(2.373,00)	99,95	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	4.983.415,00	4.981.500,00	(1.915,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	4.983.415,00	4.981.500,00	(1.915,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.983.415,00	4.981.500,00	(1.915,00)	99,96	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.623.415,00	2.621.500,00	(1.915,00)	99,92	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.623.415,00	2.621.500,00	(1.915,00)	99,92	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.623.415,00	2.621.500,00	(1.915,00)	99,92	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.278.260.109,00	4.257.542.528,00	(20.717.581,00)	99,51	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	4.220.735.438,00	4.200.501.128,00	(20.234.310,00)	99,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.220.735.438,00	4.200.501.128,00	(20.234.310,00)	99,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	4.220.735.438,00	4.200.501.128,00	(20.234.310,00)	99,52	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	57.524.671,00	57.041.400,00	(483.271,00)	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	57.524.671,00	57.041.400,00	(483.271,00)	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	57.524.671,00	57.041.400,00	(483.271,00)	99,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	26.291.374,00	26.289.000,00	(2.374,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	26.291.374,00	26.289.000,00	(2.374,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	26.291.374,00	26.289.000,00	(2.374,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.291.374,00	26.289.000,00	(2.374,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	23.610.000,00	21.580.000,00	(2.030.000,00)	91,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.610.000,00	21.580.000,00	(2.030.000,00)	91,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.610.000,00	21.580.000,00	(2.030.000,00)	91,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.610.000,00	21.580.000,00	(2.030.000,00)	91,40	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	278.365.435,00	278.215.174,00	(150.261,00)	99,94	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	72.642.857,00	72.638.000,00	(4.857,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	19.274.857,00	19.270.000,00	(4.857,00)	99,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.274.857,00	19.270.000,00	(4.857,00)	99,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	53.368.000,00	53.368.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.368.000,00	53.368.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.769.170,00	2.755.000,00	(14.170,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.769.170,00	2.755.000,00	(14.170,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.170,00	2.755.000,00	(14.170,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.370.000,00	17.370.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	48.360.000,00	48.355.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	48.360.000,00	48.355.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.360.000,00	48.355.000,00	(5.000,00)	99,98	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	137.223.408,00	137.097.174,00	(126.234,00)	99,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	137.223.408,00	137.097.174,00	(126.234,00)	99,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	137.223.408,00	137.097.174,00	(126.234,00)	99,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	116.383.076,00	112.785.284,00	(3.597.792,00)	96,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	51.691.504,00	48.097.284,00	(3.594.220,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	51.691.504,00	48.097.284,00	(3.594.220,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.691.504,00	48.097.284,00	(3.594.220,00)	93,04	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	64.691.572,00	64.688.000,00	(3.572,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.691.572,00	64.688.000,00	(3.572,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.691.572,00	64.688.000,00	(3.572,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	65.002.240,00	61.691.130,00	(3.311.110,00)	94,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	65.002.240,00	61.691.130,00	(3.311.110,00)	94,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	65.002.240,00	61.691.130,00	(3.311.110,00)	94,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	65.002.240,00	61.691.130,00	(3.311.110,00)	94,90	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.539.047.877,00	1.496.861.000,00	(42.186.877,00)	97,25	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PERTANIAN	1.229.834.001,00	1.187.840.500,00	(41.993.501,00)	96,58	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001		PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN SESUAI DENGAN KOMODITAS, TEKNOLOGI DAN SPESIFIK LOKASI	757.200.209,00	756.989.900,00	(210.309,00)	99,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	757.200.209,00	756.989.900,00	(210.309,00)	99,97	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	257.200.209,00	256.989.900,00	(210.309,00)	99,91	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002		PENDAMPINGAN PENGGUNAAN SARANA PENDUKUNG PERTANIAN	472.633.792,00	430.850.600,00	(41.783.192,00)	91,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	472.633.792,00	430.850.600,00	(41.783.192,00)	91,15	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.340.192,00	66.557.000,00	(41.783.192,00)	61,43	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	5.1.05	Belanja Hibah	364.293.600,00	364.293.600,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06		PENYEDIAAN BENIH/BIBIT TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK YANG SUMBERNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	309.213.876,00	309.020.500,00	(193.376,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003		PENGADAAN BIBIT TERNAK YANG SUMBERNYA DARI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAIN	309.213.876,00	309.020.500,00	(193.376,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	309.213.876,00	309.020.500,00	(193.376,00)	99,93	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	118.078.876,00	117.885.500,00	(193.376,00)	99,83	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	5.1.05	Belanja Hibah	191.135.000,00	191.135.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	395.060.134,00	43.673.700,00	(351.386.434,00)	11,05	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01		PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	343.850.134,00	43.673.700,00	(300.176.434,00)	12,70	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015		PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LP2B, KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/KP2B DAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN/LCP2B DI KABUPATEN/KOTA	43.850.134,00	43.673.700,00	(176.434,00)	99,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	43.850.134,00	43.673.700,00	(176.434,00)	99,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.850.134,00	43.673.700,00	(176.434,00)	99,59	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0017		PENYUSUNAN ACTION PLAN PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA, KAWASAN PERTANIAN	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0017	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0017	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02		PEMBANGUNAN PRASARANA PERTANIAN	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003		PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0003	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	51.210.000,00	0,00	(51.210.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	181.920.828,00	181.654.500,00	(266.328,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03		PENGELOLAAN PELAYANAN JASA LABORATORIUM DAN JASA MEDIK VETERINER DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.920.828,00	181.654.500,00	(266.328,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002		PENYEDIAAN PELAYANAN JASA MEDIK VETERINER	181.920.828,00	181.654.500,00	(266.328,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	181.920.828,00	181.654.500,00	(266.328,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.920.828,00	181.654.500,00	(266.328,00)	99,85	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95.400.789,00	94.906.500,00	(494.289,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01		PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN KABUPATEN/KOTA	95.400.789,00	94.906.500,00	(494.289,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001		PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT) TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PERKEBUNAN	95.400.789,00	94.906.500,00	(494.289,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.400.789,00	94.906.500,00	(494.289,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.400.789,00	94.906.500,00	(494.289,00)	99,48	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.169.800.680,00	695.785.680,00	(474.015.000,00)	59,47	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01		PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN	1.169.800.680,00	695.785.680,00	(474.015.000,00)	59,47	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002		PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PETANI DI KECAMATAN DAN DESA	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	450.000.000,00	0,00	(450.000.000,00)	0,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003		PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA PENYULUHAN PERTANIAN	319.800.680,00	319.782.500,00	(18.180,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	311.300.680,00	311.282.500,00	(18.180,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	311.300.680,00	311.282.500,00	(18.180,00)	99,99	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2	BELANJA MODAL	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0009		DISEMINASI INFORMASI TEKNIS, SOSIAL, EKONOMI DAN INOVASI PERTANIAN	400.000.000,00	376.003.180,00	(23.996.820,00)	94,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	400.000.000,00	376.003.180,00	(23.996.820,00)	94,00	
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000.000,00	376.003.180,00	(23.996.820,00)	94,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.461.846.102,00	2.429.660.006,00	(32.186.096,00)	98,69	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.138.084.777,00	2.106.326.482,00	(31.758.295,00)	98,51	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	109.123.231,00	109.011.723,00	(111.508,00)	99,89	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.722.799,00	70.722.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.041.308,00	70.024.969,00	(16.339,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.598.800,00	38.596.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01		PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	176.608.304,00	176.608.304,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002		PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	73.914.854,00	73.487.053,00	(427.801,00)	99,42	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	73.914.854,00	73.487.053,00	(427.801,00)	99,42	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	49.650.666,00	49.222.865,00	(427.801,00)	99,13	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.105.166,00	46.086.865,00	(18.301,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.105.166,00	46.086.865,00	(18.301,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500,00	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500,00	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	506.663.510,00	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,57	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	429.653.914,00	427.510.544,00	(2.143.370,00)	99,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	429.653.914,00	427.510.544,00	(2.143.370,00)	99,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	77.009.596,00	77.009.596,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	77.009.596,00	77.009.596,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	496.124.888,00	496.013.588,00	(111.300,00)	99,97	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	30.820.688,00	30.820.688,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01		PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA	30.820.688,00	30.820.688,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004		PELAKSANAAN PROSES PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA DAERAH KABUPATEN/KOTA	30.820.688,00	30.820.688,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	27.275.188,00	27.275.188,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.275.188,00	27.275.188,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500,00	3.545.500,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.116.038,00	25.004.738,00	(111.300,00)	99,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01		PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAANYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.116.038,00	25.004.738,00	(111.300,00)	99,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001		PELAKSANAAN PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	25.116.038,00	25.004.738,00	(111.300,00)	99,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.116.038,00	25.004.738,00	(111.300,00)	99,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.116.038,00	25.004.738,00	(111.300,00)	99,55	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	24.412.591,00	24.412.591,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01		PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YANG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN, KEMITRAAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	24.412.591,00	24.412.591,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014		PENYUSUNAN BASIS DATA USAHA MIKRO	24.412.591,00	24.412.591,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	24.412.591,00	24.412.591,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.412.591,00	24.412.591,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	415.775.571,00	415.775.571,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01		PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	415.775.571,00	415.775.571,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006		PRODUKSI DAN PENGOLAHAN, PEMASARAN, SUMBER DAYA MANUSIA, SERTA DESAIN DAN TEKNOLOGI	415.775.571,00	415.775.571,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	415.775.571,00	415.775.571,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.865.371,00	55.865.371,00	0,00	100,00	
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	5.1.05	Belanja Hibah	359.910.200,00	359.910.200,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.461.846.102,00	2.429.660.006,00	(32.186.096,00)	98,69	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.138.084.777,00	2.106.326.482,00	(31.758.295,00)	98,51	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	109.123.231,00	109.011.723,00	(111.508,00)	99,89	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.012.975,00	35.956.275,00	(56.700,00)	99,84	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.480.368,00	27.469.500,00	(10.868,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.939.544,00	4.918.000,00	(21.544,00)	99,56	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.164.396,00	20.162.000,00	(2.396,00)	99,98	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.525.948,00	20.505.948,00	(20.000,00)	99,90	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.829.648.639,00	1.798.020.181,00	(31.628.458,00)	98,27	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.950.000,00	19.950.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	70.722.799,00	70.722.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	609.799,00	609.799,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.992.000,00	1.992.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.405.000,00	8.405.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.716.000,00	59.716.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	70.041.308,00	70.024.969,00	(16.339,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.101.600,00	11.097.100,00	(4.500,00)	99,95	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.539.708,00	58.527.869,00	(11.839,00)	99,97	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	38.598.800,00	38.596.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.698.800,00	37.696.810,00	(1.990,00)	99,99	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	900.000,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01		PENERBITAN IZIN PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN IZIN USAHA TOKO SWALAYAN	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001		FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN PERIZINAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO SWALAYAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.644.965,00	6.644.965,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	176.608.304,00	176.608.304,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01		PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001		PENYEDIAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.525.630,00	15.525.630,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02		PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002		PEMBERDAYAAN PENGELOLA SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	161.082.674,00	161.082.674,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02		PENGENDALIAN HARGA, DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KABUPATEN/KOTA	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001		PEMANTAUAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.593.202,00	66.593.202,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	73.914.854,00	73.487.053,00	(427.801,00)	99,42	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG, DAN PENGAWASAN	73.914.854,00	73.487.053,00	(427.801,00)	99,42	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001		PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG	49.650.666,00	49.222.865,00	(427.801,00)	99,13	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.105.166,00	46.086.865,00	(18.301,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.105.166,00	46.086.865,00	(18.301,00)	99,96	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	3.545.500,00	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.545.500,00	3.136.000,00	(409.500,00)	88,45	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002		PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.264.188,00	24.264.188,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Bidang Urusan : URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
Organisasi : DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
	2.17.3.30.3.31.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	256.500.000,00	132.250.000,00	(124.250.000,00)	51,55	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		5	BELANJA DAERAH	506.663.510,00	504.520.140,00	(2.143.370,00)	99,57	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	429.653.914,00	427.510.544,00	(2.143.370,00)	99,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01		PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	429.653.914,00	427.510.544,00	(2.143.370,00)	99,50	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	5.1.05	Belanja Hibah	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	5.1.05	Belanja Hibah	199.683.875,00	197.540.505,00	(2.143.370,00)	98,92	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005		KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN INDUSTRI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	174.970.039,00	174.970.039,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	77.009.596,00	77.009.596,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01		PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	77.009.596,00	77.009.596,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001		FASILITASI PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA INDUSTRI, DATA KAWASAN INDUSTRI SERTA DATA LAIN LINGKUP KABUPATEN/KOTA MELALUI SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.218.786,00	44.218.786,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003		PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEPATUHAN PERUSAHAAN INDUSTRI DAN PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI LINGKUP KABUPATEN/KOTA DALAM PENYAMPAIAN DATA KE SIINAS	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.790.810,00	32.790.810,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 Septembr 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PEMERINTAHAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		5	BELANJA DAERAH	1.136.386.071,00	1.125.964.166,00	(10.421.905,00)	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.136.386.071,00	1.125.964.166,00	(10.421.905,00)	99,08	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01		ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	1.095.461.321,00	1.085.352.103,00	(10.109.218,00)	99,07	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001		PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	221.042.551,00	216.924.155,00	(4.118.396,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	221.042.551,00	216.924.155,00	(4.118.396,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	221.042.551,00	216.924.155,00	(4.118.396,00)	98,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	641.677.772,00	636.656.196,00	(5.021.576,00)	99,21	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	91.677.772,00	86.661.932,00	(5.015.840,00)	94,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	91.677.772,00	86.661.932,00	(5.015.840,00)	94,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	550.000.000,00	549.994.264,00	(5.736,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	550.000.000,00	549.994.264,00	(5.736,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003		FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH	232.740.998,00	231.771.752,00	(969.246,00)	99,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	232.740.998,00	231.771.752,00	(969.246,00)	99,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	232.740.998,00	231.771.752,00	(969.246,00)	99,58	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04		FASILITASI KERJA SAMA DAERAH	40.924.750,00	40.612.063,00	(312.687,00)	99,23	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001		FASILITASI KERJA SAMA DALAM NEGERI	38.337.033,00	38.226.696,00	(110.337,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	38.337.033,00	38.226.696,00	(110.337,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.337.033,00	38.226.696,00	(110.337,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003		EVALUASI PELAKSANAAN KERJA SAMA	2.587.717,00	2.385.367,00	(202.350,00)	92,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.587.717,00	2.385.367,00	(202.350,00)	92,18	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.587.717,00	2.385.367,00	(202.350,00)	92,18	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN HUKUM DAN HAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		5	BELANJA DAERAH	530.870.285,00	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	530.870.285,00	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03		FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	530.870.285,00	496.500.224,00	(34.370.061,00)	93,52	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH	228.974.351,00	225.187.190,00	(3.787.161,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	228.974.351,00	225.187.190,00	(3.787.161,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.974.351,00	225.187.190,00	(3.787.161,00)	98,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002		FASILITASI BANTUAN HUKUM	147.951.686,00	121.364.986,00	(26.586.700,00)	82,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	147.951.686,00	121.364.986,00	(26.586.700,00)	82,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	147.951.686,00	121.364.986,00	(26.586.700,00)	82,03	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003		PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	153.944.248,00	149.948.048,00	(3.996.200,00)	97,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	153.944.248,00	149.948.048,00	(3.996.200,00)	97,40	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	153.944.248,00	149.948.048,00	(3.996.200,00)	97,40	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		5	BELANJA DAERAH	2.130.561.875,24	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.130.561.875,24	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02		PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.130.561.875,24	1.850.899.032,00	(279.662.843,24)	86,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001		FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL	1.834.709.409,00	1.556.709.409,00	(278.000.000,00)	84,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.834.709.409,00	1.556.709.409,00	(278.000.000,00)	84,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	520.709.409,00	520.709.409,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	5.1.05	Belanja Hibah	1.314.000.000,00	1.036.000.000,00	(278.000.000,00)	78,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL	216.891.999,24	216.507.406,00	(384.593,24)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	216.891.999,24	216.507.406,00	(384.593,24)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.891.999,24	216.507.406,00	(384.593,24)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003		PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI, DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	78.960.467,00	77.682.217,00	(1.278.250,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	78.960.467,00	77.682.217,00	(1.278.250,00)	98,38	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.960.467,00	77.682.217,00	(1.278.250,00)	98,38	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		5	BELANJA DAERAH	482.306.071,00	479.014.670,00	(3.291.401,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	482.306.071,00	479.014.670,00	(3.291.401,00)	99,31	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01		PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	384.793.267,00	383.311.250,00	(1.482.017,00)	99,61	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002		PENGENDALIAN DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN	279.542.210,00	278.748.520,00	(793.690,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	266.439.010,00	265.645.320,00	(793.690,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	266.439.010,00	265.645.320,00	(793.690,00)	99,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.2	BELANJA MODAL	13.103.200,00	13.103.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.103.200,00	13.103.200,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003		PERENCANAAN DAN PENGAWASAN EKONOMI MIKRO KECIL	105.251.057,00	104.562.730,00	(688.327,00)	99,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.251.057,00	104.562.730,00	(688.327,00)	99,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.251.057,00	104.562.730,00	(688.327,00)	99,34	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04		PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	97.512.804,00	95.703.420,00	(1.809.384,00)	98,14	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0001		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN, KELAUTAN, DAN PERIKANAN	19.999.564,00	19.969.360,00	(30.204,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.999.564,00	19.969.360,00	(30.204,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.999.564,00	19.969.360,00	(30.204,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003		KOORDINASI, SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN ENERGI DAN AIR	77.513.240,00	75.734.060,00	(1.779.180,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	77.513.240,00	75.734.060,00	(1.779.180,00)	97,70	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	77.513.240,00	75.734.060,00	(1.779.180,00)	97,70	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		5	BELANJA DAERAH	374.048.478,00	373.633.177,00	(415.301,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	374.048.478,00	373.633.177,00	(415.301,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02		PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	374.048.478,00	373.633.177,00	(415.301,00)	99,88	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001		FASILITASI PENYUSUNAN PROGRAM PEMBANGUNAN	228.799.478,00	228.385.977,00	(413.501,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	228.799.478,00	228.385.977,00	(413.501,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.799.478,00	228.385.977,00	(413.501,00)	99,81	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002		PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN	80.289.000,00	80.287.200,00	(1.800,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	80.289.000,00	80.287.200,00	(1.800,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.289.000,00	80.287.200,00	(1.800,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003		PENGELOLAAN EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	64.960.000,00	64.960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.960.000,00	64.960.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.960.000,00	64.960.000,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		5	BELANJA DAERAH	1.212.739.151,00	1.212.082.650,00	(656.501,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.212.739.151,00	1.212.082.650,00	(656.501,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.212.739.151,00	1.212.082.650,00	(656.501,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001		PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	454.852.667,00	454.720.040,00	(132.627,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	454.852.667,00	454.720.040,00	(132.627,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	454.852.667,00	454.720.040,00	(132.627,00)	99,97	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002		PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	660.945.477,00	660.934.700,00	(10.777,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	362.945.477,00	362.934.700,00	(10.777,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1.01	Belanja Pegawai	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	362.195.477,00	362.184.700,00	(10.777,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.2	BELANJA MODAL	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	198.000.000,00	198.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003		PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	96.941.007,00	96.427.910,00	(513.097,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	96.941.007,00	96.427.910,00	(513.097,00)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1.01	Belanja Pegawai	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	87.941.007,00	87.427.910,00	(513.097,00)	99,41	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN UMUM

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4	PENDAPATAN DAERAH	23.000.000,00	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.000.000,00	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63	
	4.01.0.00.0.00.01.0007		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	23.000.000,00	13.025.000,00	(9.975.000,00)	56,63	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		5	BELANJA DAERAH	23.402.256.892,28	23.361.348.081,00	(40.908.811,28)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.402.256.892,28	23.361.348.081,00	(40.908.811,28)	99,82	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	24.438.460,00	24.435.000,00	(3.460,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.221.960,00	10.221.000,00	(960,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.371.960,00	6.370.000,00	(1.960,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.371.960,00	6.370.000,00	(1.960,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.371.960,00	6.370.000,00	(1.960,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.844.540,00	7.844.000,00	(540,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.008.001.715,28	3.988.304.515,00	(19.697.200,28)	99,50	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.774.151.873,28	3.754.459.515,00	(19.692.358,28)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.774.151.873,28	3.754.459.515,00	(19.692.358,28)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.774.151.873,28	3.754.459.515,00	(19.692.358,28)	99,47	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003		PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	233.849.842,00	233.845.000,00	(4.842,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	233.849.842,00	233.845.000,00	(4.842,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.849.842,00	233.845.000,00	(4.842,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	467.305.478,00	467.303.891,00	(1.587,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	369.043.891,00	369.043.891,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	369.043.891,00	369.043.891,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	369.043.891,00	369.043.891,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	98.261.587,00	98.260.000,00	(1.587,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	98.261.587,00	98.260.000,00	(1.587,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.261.587,00	98.260.000,00	(1.587,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	896.620.000,00	896.520.000,00	(100.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	896.620.000,00	896.520.000,00	(100.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	896.620.000,00	896.520.000,00	(100.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.620.000,00	896.520.000,00	(100.000,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	7.236.908.195,00	7.236.526.992,00	(381.203,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	294.589.195,00	294.585.000,00	(4.195,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	294.589.195,00	294.585.000,00	(4.195,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	294.589.195,00	294.585.000,00	(4.195,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.073.097.400,00	1.072.915.850,00	(181.550,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.073.097.400,00	1.072.915.850,00	(181.550,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.073.097.400,00	1.072.915.850,00	(181.550,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	58.592.750,00	58.500.000,00	(92.750,00)	99,84	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.092.750,00	32.000.000,00	(92.750,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.092.750,00	32.000.000,00	(92.750,00)	99,71	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	26.500.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004		PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	457.860.000,00	457.850.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1	BELANJA OPERASI	457.860.000,00	457.850.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.860.000,00	457.850.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	30.142.000,00	30.110.000,00	(32.000,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	30.142.000,00	30.110.000,00	(32.000,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.142.000,00	30.110.000,00	(32.000,00)	99,89	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.326.450.000,00	1.326.445.500,00	(4.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.326.450.000,00	1.326.445.500,00	(4.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.326.450.000,00	1.326.445.500,00	(4.500,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	3.996.176.850,00	3.996.120.642,00	(56.208,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	3.996.176.850,00	3.996.120.642,00	(56.208,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.996.176.850,00	3.996.120.642,00	(56.208,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	252.629.693,00	252.536.611,00	(93.082,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	19.548.611,00	19.548.611,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.548.611,00	19.548.611,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.548.611,00	19.548.611,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	233.081.082,00	232.988.000,00	(93.082,00)	99,96	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.1	BELANJA OPERASI	111.940.082,00	111.938.000,00	(2.082,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.940.082,00	111.938.000,00	(2.082,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	121.141.000,00	121.050.000,00	(91.000,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	121.141.000,00	121.050.000,00	(91.000,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.540.494.187,00	3.535.402.858,00	(5.091.329,00)	99,85	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	43.724.738,00	43.720.000,00	(4.738,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.724.738,00	43.720.000,00	(4.738,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.724.738,00	43.720.000,00	(4.738,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	972.823.000,00	972.765.010,00	(57.990,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	972.823.000,00	972.765.010,00	(57.990,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	972.823.000,00	972.765.010,00	(57.990,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003		PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	1.799.815.000,00	1.798.972.348,00	(842.652,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.799.815.000,00	1.798.972.348,00	(842.652,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.799.815.000,00	1.798.972.348,00	(842.652,00)	99,95	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	724.131.449,00	719.945.500,00	(4.185.949,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	724.131.449,00	719.945.500,00	(4.185.949,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.131.449,00	719.945.500,00	(4.185.949,00)	99,42	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.074.994.000,00	2.062.923.319,00	(12.070.681,00)	99,41	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	1.070.310.000,00	1.058.259.319,00	(12.050.681,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.070.310.000,00	1.058.259.319,00	(12.050.681,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.070.310.000,00	1.058.259.319,00	(12.050.681,00)	98,87	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	552.945.000,00	552.935.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	552.945.000,00	552.935.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.945.000,00	552.935.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	451.739.000,00	451.729.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	451.739.000,00	451.729.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	451.739.000,00	451.729.000,00	(10.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11		ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	959.143.314,00	956.026.895,00	(3.116.419,00)	99,67	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	174.273.314,00	172.171.158,00	(2.102.156,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	5.1	BELANJA OPERASI	174.273.314,00	172.171.158,00	(2.102.156,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	174.273.314,00	172.171.158,00	(2.102.156,00)	98,79	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT KELENGKAPAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	183.870.000,00	183.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	5.1	BELANJA OPERASI	183.870.000,00	183.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	183.870.000,00	183.870.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003		PELAKSANAAN MEDICAL CHECK UP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	280.000.000,00	279.985.737,00	(14.263,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	5.1	BELANJA OPERASI	280.000.000,00	279.985.737,00	(14.263,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.000.000,00	279.985.737,00	(14.263,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004		PENYEDIAAN DANA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	321.000.000,00	320.000.000,00	(1.000.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	5.1	BELANJA OPERASI	321.000.000,00	320.000.000,00	(1.000.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	321.000.000,00	320.000.000,00	(1.000.000,00)	99,68	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12		FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIAT DAERAH	3.941.721.850,00	3.941.368.000,00	(353.850,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA KEPALA DAERAH	2.143.370.000,00	2.143.240.000,00	(130.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.126.370.000,00	2.126.240.000,00	(130.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.126.370.000,00	2.126.240.000,00	(130.000,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.2	BELANJA MODAL	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA WAKIL KEPALA DAERAH	1.798.351.850,00	1.798.128.000,00	(223.850,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.1	BELANJA OPERASI	1.798.351.850,00	1.798.128.000,00	(223.850,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.798.351.850,00	1.798.128.000,00	(223.850,00)	99,98	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		5	BELANJA DAERAH	984.642.800,00	984.080.142,00	(562.658,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	984.642.800,00	984.080.142,00	(562.658,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	984.642.800,00	984.080.142,00	(562.658,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001		PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	429.600.340,00	429.520.595,00	(79.745,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1	BELANJA OPERASI	429.600.340,00	429.520.595,00	(79.745,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	429.600.340,00	429.520.595,00	(79.745,00)	99,98	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002		FASILITASI PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	155.075.964,00	154.645.900,00	(430.064,00)	99,72	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1	BELANJA OPERASI	140.075.964,00	140.075.900,00	(64,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.075.964,00	140.075.900,00	(64,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.2	BELANJA MODAL	15.000.000,00	14.570.000,00	(430.000,00)	97,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	15.000.000,00	14.570.000,00	(430.000,00)	97,13	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003		PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI	115.381.504,00	115.381.504,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1	BELANJA OPERASI	115.381.504,00	115.381.504,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.381.504,00	115.381.504,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	83.288.862,00	83.241.943,00	(46.919,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	83.288.862,00	83.241.943,00	(46.919,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	83.288.862,00	83.241.943,00	(46.919,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	201.296.130,00	201.290.200,00	(5.930,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.1	BELANJA OPERASI	201.296.130,00	201.290.200,00	(5.930,00)	99,99	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.296.130,00	201.290.200,00	(5.930,00)	99,99	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DAERAH
Organisasi : BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		5	BELANJA DAERAH	589.661.256,00	584.810.015,00	(4.851.241,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	589.661.256,00	584.810.015,00	(4.851.241,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14		PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	589.661.256,00	584.810.015,00	(4.851.241,00)	99,17	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001		FASILITASI KEPROTOKOLAN	382.955.119,00	378.238.415,00	(4.716.704,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1	BELANJA OPERASI	382.955.119,00	378.238.415,00	(4.716.704,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	382.955.119,00	378.238.415,00	(4.716.704,00)	98,76	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002		FASILITASI KOMUNIKASI PIMPINAN	145.869.539,00	145.766.100,00	(103.439,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1	BELANJA OPERASI	145.869.539,00	145.766.100,00	(103.439,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	145.869.539,00	145.766.100,00	(103.439,00)	99,92	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003		PENDOKUMENTASIAN TUGAS PIMPINAN	60.836.598,00	60.805.500,00	(31.098,00)	99,94	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1	BELANJA OPERASI	32.619.598,00	32.588.500,00	(31.098,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.619.598,00	32.588.500,00	(31.098,00)	99,90	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.2	BELANJA MODAL	28.217.000,00	28.217.000,00	0,00	100,00	
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	28.217.000,00	28.217.000,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : SEKRETARIAT DPRD
Organisasi : SEKRETARIAT DPRD

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	20.894.301.202,00	20.252.507.712,00	(641.793.490,00)	96,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.743.675.675,00	14.170.260.413,00	(573.415.262,00)	96,11	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	48.735.207,00	48.710.233,00	(24.974,00)	99,94	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.617.533,00	6.617.533,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.617.533,00	6.617.533,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.617.533,00	6.617.533,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	7.435.200,00	7.435.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.435.200,00	7.435.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.435.200,00	7.435.200,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	8.450.145,00	8.444.000,00	(6.145,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	8.450.145,00	8.444.000,00	(6.145,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.450.145,00	8.444.000,00	(6.145,00)	99,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	9.559.966,00	9.546.000,00	(13.966,00)	99,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.559.966,00	9.546.000,00	(13.966,00)	99,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.559.966,00	9.546.000,00	(13.966,00)	99,85	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.541.966,00	6.539.500,00	(2.466,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.541.966,00	6.539.500,00	(2.466,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.541.966,00	6.539.500,00	(2.466,00)	99,96	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	10.130.397,00	10.128.000,00	(2.397,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	10.130.397,00	10.128.000,00	(2.397,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.130.397,00	10.128.000,00	(2.397,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.428.952.570,00	1.395.235.193,00	(33.717.377,00)	97,64	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.419.680.826,00	1.385.964.193,00	(33.716.633,00)	97,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.419.680.826,00	1.385.964.193,00	(33.716.633,00)	97,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.419.680.826,00	1.385.964.193,00	(33.716.633,00)	97,62	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	9.271.744,00	9.271.000,00	(744,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	9.271.744,00	9.271.000,00	(744,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.271.744,00	9.271.000,00	(744,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	597.806.487,00	581.701.600,00	(16.104.887,00)	97,30	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	518.445.487,00	517.643.000,00	(802.487,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	518.445.487,00	517.643.000,00	(802.487,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	518.445.487,00	517.643.000,00	(802.487,00)	99,84	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	33.860.000,00	33.860.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.860.000,00	33.860.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.860.000,00	33.860.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22.125.000,00	17.000.000,00	(5.125.000,00)	76,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.125.000,00	17.000.000,00	(5.125.000,00)	76,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.125.000,00	17.000.000,00	(5.125.000,00)	76,83	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	23.376.000,00	13.198.600,00	(10.177.400,00)	56,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	23.376.000,00	13.198.600,00	(10.177.400,00)	56,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.376.000,00	13.198.600,00	(10.177.400,00)	56,46	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.566.308.026,00	1.355.195.121,00	(211.112.905,00)	86,52	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	7.825.068,00	7.825.068,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.825.068,00	7.825.068,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.825.068,00	7.825.068,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	66.378.000,00	66.378.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	66.378.000,00	66.378.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.378.000,00	66.378.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	21.557.750,00	9.000.000,00	(12.557.750,00)	41,74	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.057.750,00	0,00	(11.057.750,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.057.750,00	0,00	(11.057.750,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2	BELANJA MODAL	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	85,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.500.000,00	9.000.000,00	(1.500.000,00)	85,71	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	101.125.038,00	98.226.953,00	(2.898.085,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	101.125.038,00	98.226.953,00	(2.898.085,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.125.038,00	98.226.953,00	(2.898.085,00)	97,13	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	1.361.885.000,00	1.173.765.100,00	(188.119.900,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	1.361.885.000,00	1.173.765.100,00	(188.119.900,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.361.885.000,00	1.173.765.100,00	(188.119.900,00)	86,18	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	7.537.170,00	0,00	(7.537.170,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	7.537.170,00	0,00	(7.537.170,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.537.170,00	0,00	(7.537.170,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	69.882.000,00	69.882.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	43.242.000,00	43.242.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	43.242.000,00	43.242.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.242.000,00	43.242.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.640.000,00	26.640.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	592.688.278,00	524.988.766,00	(67.699.512,00)	88,57	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	19.747.878,00	19.739.551,00	(8.327,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	19.747.878,00	19.739.551,00	(8.327,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.747.878,00	19.739.551,00	(8.327,00)	99,95	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	287.340.400,00	234.149.215,00	(53.191.185,00)	81,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	287.340.400,00	234.149.215,00	(53.191.185,00)	81,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	287.340.400,00	234.149.215,00	(53.191.185,00)	81,48	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	285.600.000,00	271.100.000,00	(14.500.000,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	285.600.000,00	271.100.000,00	(14.500.000,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.600.000,00	271.100.000,00	(14.500.000,00)	94,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	388.740.375,00	301.539.675,00	(87.200.700,00)	77,56	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	199.781.500,00	116.780.800,00	(83.000.700,00)	58,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	199.781.500,00	116.780.800,00	(83.000.700,00)	58,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	199.781.500,00	116.780.800,00	(83.000.700,00)	58,45	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007		PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	40.000.000,00	35.800.000,00	(4.200.000,00)	89,5	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	35.800.000,00	(4.200.000,00)	89,5	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	35.800.000,00	(4.200.000,00)	89,5	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	148.958.875,00	148.958.875,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2	BELANJA MODAL	148.958.875,00	148.958.875,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	148.958.875,00	148.958.875,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15		LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD	8.628.902.993,00	8.545.648.208,00	(83.254.785,00)	99,03	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DPRD	7.995.902.993,00	7.944.928.208,00	(50.974.785,00)	99,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.995.902.993,00	7.944.928.208,00	(50.974.785,00)	99,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	7.995.902.993,00	7.944.928.208,00	(50.974.785,00)	99,36	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002		PENYEDIAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD	633.000.000,00	600.720.000,00	(32.280.000,00)	94,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1	BELANJA OPERASI	633.000.000,00	600.720.000,00	(32.280.000,00)	94,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.000.000,00	600.720.000,00	(32.280.000,00)	94,90	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16		LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	1.421.659.739,00	1.347.359.617,00	(74.300.122,00)	94,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001		PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEANGGOTAAN DPRD	324.315.989,00	252.745.200,00	(71.570.789,00)	77,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1	BELANJA OPERASI	324.315.989,00	252.745.200,00	(71.570.789,00)	77,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	324.315.989,00	252.745.200,00	(71.570.789,00)	77,93	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003		FASILITASI RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DPRD	1.025.343.750,00	1.022.614.417,00	(2.729.333,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.025.343.750,00	1.022.614.417,00	(2.729.333,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.025.343.750,00	1.022.614.417,00	(2.729.333,00)	99,73	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004		PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DPRD	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2	BELANJA MODAL	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.150.625.527,00	6.082.247.299,00	(68.378.228,00)	98,88	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01		PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD	165.969.126,00	160.618.000,00	(5.351.126,00)	96,77	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001		PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	149.969.126,00	144.618.000,00	(5.351.126,00)	96,43	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	149.969.126,00	144.618.000,00	(5.351.126,00)	96,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	149.969.126,00	144.618.000,00	(5.351.126,00)	96,43	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002		PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02		PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	113.702.727,00	111.883.500,00	(1.819.227,00)	98,40	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001		PEMBAHASAN KUA DAN PPAS	21.218.420,00	21.213.000,00	(5.420,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	21.218.420,00	21.213.000,00	(5.420,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.218.420,00	21.213.000,00	(5.420,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002		PEMBAHASAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	24.831.805,00	23.125.000,00	(1.706.805,00)	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	24.831.805,00	23.125.000,00	(1.706.805,00)	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.831.805,00	23.125.000,00	(1.706.805,00)	93,12	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003		PEMBAHASAN APBD	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	10.720.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004		PEMBAHASAN APBD PERUBAHAN	19.327.502,00	19.325.500,00	(2.002,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.327.502,00	19.325.500,00	(2.002,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.327.502,00	19.325.500,00	(2.002,00)	99,98	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005		PEMBAHASAN LAPORAN SEMESTER	105.000,00	0,00	(105.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	105.000,00	0,00	(105.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.000,00	0,00	(105.000,00)	0,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006		PEMBAHASAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1	BELANJA OPERASI	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.500.000,00	37.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03		PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008		PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04		PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	1.578.620.803,00	1.547.133.474,00	(31.487.329,00)	98,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001		ORIENTASI DPRD	406.359.003,00	386.989.000,00	(19.370.003,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	406.359.003,00	386.989.000,00	(19.370.003,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.359.003,00	386.989.000,00	(19.370.003,00)	95,23	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002		PENDALAMAN TUGAS DPRD	751.163.800,00	739.144.474,00	(12.019.326,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	751.163.800,00	739.144.474,00	(12.019.326,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	751.163.800,00	739.144.474,00	(12.019.326,00)	98,39	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005		PENYEDIAAN TENAGA AHLI FRAKSI	338.598.000,00	338.500.000,00	(98.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1	BELANJA OPERASI	338.598.000,00	338.500.000,00	(98.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	338.598.000,00	338.500.000,00	(98.000,00)	99,97	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008		PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DPRD	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1	BELANJA OPERASI	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.500.000,00	82.500.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05		PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	723.509.883,00	694.041.276,00	(29.468.607,00)	95,92	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001		KUNJUNGAN KERJA DALAM DAERAH	30.361.500,00	9.185.000,00	(21.176.500,00)	30,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.361.500,00	9.185.000,00	(21.176.500,00)	30,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.361.500,00	9.185.000,00	(21.176.500,00)	30,25	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002		PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD	7.213.551,00	7.213.551,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.213.551,00	7.213.551,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.213.551,00	7.213.551,00	0,00	100,00	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003		PELAKSANAAN RESES	685.934.832,00	677.642.725,00	(8.292.107,00)	98,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	685.934.832,00	677.642.725,00	(8.292.107,00)	98,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.934.832,00	677.642.725,00	(8.292.107,00)	98,79	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06		PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	14.678.308,00	14.677.000,00	(1.308,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001		PENYUSUNAN KODE ETIK DPRD	14.678.308,00	14.677.000,00	(1.308,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.678.308,00	14.677.000,00	(1.308,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.678.308,00	14.677.000,00	(1.308,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08		FASILITASI TUGAS DPRD	3.534.144.680,00	3.533.894.049,00	(250.631,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001		KOORDINASI DAN KONSULTASI PELAKSANAAN TUGAS DPRD	3.534.144.680,00	3.533.894.049,00	(250.631,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.534.144.680,00	3.533.894.049,00	(250.631,00)	99,99	
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.534.144.680,00	3.533.894.049,00	(250.631,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.013.809.028,00	3.887.520.043,00	(126.288.985,00)	96,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.669.855.024,00	2.597.563.751,00	(72.291.273,00)	97,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	195.302.935,00	193.299.600,00	(2.003.335,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.547.964.866,00	1.500.731.732,00	(47.233.134,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	102.349.943,00	102.006.600,00	(343.343,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	435.444.722,00	431.665.531,00	(3.779.191,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.444.967,00	73.431.500,00	(13.467,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.941.367,00	7.931.500,00	(9.867,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.941.367,00	7.931.500,00	(9.867,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	65.503.600,00	65.500.000,00	(3.600,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.503.600,00	60.500.000,00	(3.600,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176.627.580,00	174.818.906,00	(1.808.674,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.164.978,00	127.622.734,00	(4.542.244,00)	96,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	799.405.833,00	766.415.573,00	(32.990.260,00)	95,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	352.062.078,00	346.433.641,00	(5.628.437,00)	98,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40.827.611,00	39.105.000,00	(1.722.611,00)	95,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002		PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	336.485.450,00	316.813.328,00	(19.672.122,00)	94,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280.907.771,00	278.462.854,00	(2.444.917,00)	99,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.907.771,00	103.662.854,00	(2.244.917,00)	97,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.907.771,00	103.662.854,00	(2.244.917,00)	97,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	174.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	174.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04		IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	70.030.694,00	64.063.604,00	(5.967.090,00)	91,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001		PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	544.548.171,00	523.540.719,00	(21.007.452,00)	96,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	282.321.169,00	275.028.044,00	(7.293.125,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	81.040.387,00	79.895.200,00	(1.145.187,00)	98,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	181.186.615,00	168.617.475,00	(12.569.140,00)	93,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	730.713.529,00	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.713.529,00	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	391.883.613,00	390.592.279,00	(1.291.334,00)	99,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	338.829.916,00	338.734.697,00	(95.219,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002		UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	198.829.916,00	198.734.697,00	(95.219,00)	99,95	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.829.916,00	173.734.697,00	(95.219,00)	99,94	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.829.916,00	173.734.697,00	(95.219,00)	99,94	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PERENCANAAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	4.013.809.028,00	3.887.520.043,00	(126.288.985,00)	96,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.669.855.024,00	2.597.563.751,00	(72.291.273,00)	97,29	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	195.302.935,00	193.299.600,00	(2.003.335,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.013.778,00	52.993.800,00	(19.978,00)	99,96	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.587.421,00	11.885.400,00	(702.021,00)	94,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.089.914,00	8.987.600,00	(102.314,00)	98,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.765.322,00	11.689.400,00	(75.922,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.141.031,00	9.040.000,00	(1.101.031,00)	89,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	98.705.469,00	98.703.400,00	(2.069,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.547.964.866,00	1.500.731.732,00	(47.233.134,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.536.149.892,00	1.489.239.332,00	(46.910.560,00)	96,94	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.814.974,00	11.492.400,00	(322.574,00)	97,26	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007		PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.000.000,00	67.418.648,00	(12.581.352,00)	84,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	102.349.943,00	102.006.600,00	(343.343,00)	99,66	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1	BELANJA OPERASI	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.539.943,00	37.536.600,00	(3.343,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.810.000,00	64.470.000,00	(340.000,00)	99,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	435.444.722,00	431.665.531,00	(3.779.191,00)	99,13	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.218.155,00	4.198.300,00	(19.855,00)	99,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	73.444.967,00	73.431.500,00	(13.467,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	7.941.367,00	7.931.500,00	(9.867,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.941.367,00	7.931.500,00	(9.867,00)	99,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	65.503.600,00	65.500.000,00	(3.600,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60.503.600,00	60.500.000,00	(3.600,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.784.000,00	33.784.000,00	0,00	100,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.800.000,00	50.760.000,00	(40.000,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	273.197.600,00	269.491.731,00	(3.705.869,00)	98,64	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	176.627.580,00	174.818.906,00	(1.808.674,00)	98,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.658.672,00	78.626.900,00	(31.772,00)	99,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.868.908,00	20.592.006,00	(1.276.902,00)	94,16	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	75.600.000,00	(500.000,00)	99,34	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	132.164.978,00	127.622.734,00	(4.542.244,00)	96,56	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.914.978,00	107.392.734,00	(4.522.244,00)	95,95	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.250.000,00	20.230.000,00	(20.000,00)	99,90	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	799.405.833,00	766.415.573,00	(32.990.260,00)	95,87	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01		PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN	352.062.078,00	346.433.641,00	(5.628.437,00)	98,40	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001		ANALISIS KONDISI DAERAH, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	165.750.000,00	165.385.000,00	(365.000,00)	99,77	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002		KOORDINASI PENELAAHAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN DOKUMEN KEBIJAKAN LAINNYA	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.919.745,00	58.908.107,00	(11.638,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003		PELAKSANAAN KONSULTASI PUBLIK	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.999.086,00	15.725.136,00	(1.273.950,00)	92,50	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.461.573,00	7.501.000,00	(1.960.573,00)	79,27	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005		PELAKSANAAN MUSRENBANG KABUPATEN/KOTA	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.687.054,00	39.460.002,00	(227.052,00)	99,42	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006		PENYIAPAN BAHAN KOORDINASI MUSRENBANG KECAMATAN	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.490.816,00	12.895.816,00	(595.000,00)	95,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007		KOORDINASI PENYUSUNAN DAN PENETAPAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.753.804,00	46.558.580,00	(1.195.224,00)	97,49	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	40.827.611,00	39.105.000,00	(1.722.611,00)	95,78	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001		ANALISIS DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.374.608,00	11.158.400,00	(1.216.208,00)	90,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002		PEMBINAAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.319.443,00	10.813.400,00	(506.043,00)	95,52	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003		PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.133.560,00	17.133.200,00	(360,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03		PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	336.485.450,00	316.813.328,00	(19.672.122,00)	94,15	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001		KOORDINASI PENGENDALIAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN/KOTA	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.577.679,00	38.350.474,00	(17.227.205,00)	69,00	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003		MONITORING, EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BERKALA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	280.907.771,00	278.462.854,00	(2.444.917,00)	99,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	105.907.771,00	103.662.854,00	(2.244.917,00)	97,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.907.771,00	103.662.854,00	(2.244.917,00)	97,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2	BELANJA MODAL	175.000.000,00	174.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	175.000.000,00	174.800.000,00	(200.000,00)	99,88	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04		IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	70.030.694,00	64.063.604,00	(5.967.090,00)	91,47	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001		PENGELOLAAN DATA DALAM SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.729.400,00	30.538.200,00	(1.191.200,00)	96,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.301.294,00	33.525.404,00	(4.775.890,00)	87,53	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	544.548.171,00	523.540.719,00	(21.007.452,00)	96,14	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	282.321.169,00	275.028.044,00	(7.293.125,00)	97,41	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.360.915,00	9.360.700,00	(215,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.134.404,00	3.134.000,00	(404,00)	99,98	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.260.040,00	3.259.200,00	(840,00)	99,97	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.679.839,00	13.660.200,00	(19.639,00)	99,85	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	51.406.144,00	51.368.582,00	(37.562,00)	99,92	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.833.950,00	5.833.400,00	(550,00)	99,99	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.727.636,00	6.567.200,00	(160.436,00)	97,61	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	188.918.241,00	181.844.762,00	(7.073.479,00)	96,25	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)	81.040.387,00	79.895.200,00	(1.145.187,00)	98,58	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG PEREKONOMIAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.350.808,00	54.930.500,00	(420.308,00)	99,24	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG SDA (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.689.579,00	24.964.700,00	(724.879,00)	97,17	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03		KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	181.186.615,00	168.617.475,00	(12.569.140,00)	93,06	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.206.398,00	23.161.800,00	(7.044.598,00)	76,67	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG INFRASTRUKTUR	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.783.736,00	19.608.576,00	(175.160,00)	99,11	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005		KOORDINASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.088.534,00	23.932.800,00	(155.734,00)	99,35	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006		ASISTENSI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.333.522,00	46.272.290,00	(1.061.232,00)	97,75	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007		PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1	BELANJA OPERASI	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.182.400,00	19.316.409,00	(1.865.991,00)	91,19	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008		KOORDINASI PELAKSANAAN SINERGITAS DAN HARMONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BIDANG KEWILAYAHAN	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1	BELANJA OPERASI	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.592.025,00	36.325.600,00	(2.266.425,00)	94,12	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	730.713.529,00	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.713.529,00	729.326.976,00	(1.386.553,00)	99,81	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	391.883.613,00	390.592.279,00	(1.291.334,00)	99,67	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	111.684.131,00	110.453.479,00	(1.230.652,00)	98,89	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002		FASILITASI, PELAKSANAAN DAN EVALUASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN UMUM	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	280.199.482,00	280.138.800,00	(60.682,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04		PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI	338.829.916,00	338.734.697,00	(95.219,00)	99,97	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001		PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PEREKAYASAAN DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1	BELANJA OPERASI	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002		UJI COBA DAN PENERAPAN RANCANG BANGUN/MODEL REPLIKASI DAN INVENSI DI BIDANG DIFUSI INOVASI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	198.829.916,00	198.734.697,00	(95.219,00)	99,95	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1	BELANJA OPERASI	173.829.916,00	173.734.697,00	(95.219,00)	99,94	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	173.829.916,00	173.734.697,00	(95.219,00)	99,94	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.2	BELANJA MODAL	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	
5.05	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.05.02.2.04.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEUANGAN
Organisasi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	632.096.981.925,00	627.933.157.361,47	(4.163.824.563,53)	99,34	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	18.263.929.749,00	17.747.807.594,47	(516.122.154,53)	97,17	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.01	Pajak Daerah	12.993.479.302,00	12.064.921.118,00	(928.558.184,00)	92,85	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	729.061.014,00	(1.250.938.986,00)	36,82	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.290.450.447,00	4.953.825.462,47	1.663.375.015,47	150,55	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2	PENDAPATAN TRANSFER	613.833.052.176,00	610.185.349.767,00	(3.647.702.409,00)	99,40	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	587.932.352.000,00	583.771.260.129,00	(4.161.091.871,00)	99,29	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.900.700.176,00	26.414.089.638,00	513.389.462,00	101,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	102.480.453.204,00	101.174.946.927,00	(1.305.506.277,00)	98,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.921.050.086,00	5.222.912.788,00	(698.137.298,00)	88,20	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	117.293.832,00	117.228.615,00	(65.217,00)	99,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	29.003.641,00	29.003.641,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	29.003.641,00	29.003.641,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.003.641,00	29.003.641,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11.448.990,00	11.448.990,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.448.990,00	11.448.990,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.448.990,00	11.448.990,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	10.864.418,00	10.864.418,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.864.418,00	10.864.418,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.864.418,00	10.864.418,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	11.815.618,00	11.815.618,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	11.815.618,00	11.815.618,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.815.618,00	11.815.618,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	10.255.882,00	10.255.882,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	10.255.882,00	10.255.882,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.255.882,00	10.255.882,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	28.378.481,00	28.313.264,00	(65.217,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	28.378.481,00	28.313.264,00	(65.217,00)	99,77	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.378.481,00	28.313.264,00	(65.217,00)	99,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	15.526.802,00	15.526.802,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.526.802,00	15.526.802,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.526.802,00	15.526.802,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.596.796.116,00	3.242.967.925,00	(353.828.191,00)	90,16	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.491.701.376,00	3.140.961.872,00	(350.739.504,00)	89,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.491.701.376,00	3.140.961.872,00	(350.739.504,00)	89,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	3.491.701.376,00	3.140.961.872,00	(350.739.504,00)	89,95	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	105.094.740,00	102.006.053,00	(3.088.687,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	105.094.740,00	102.006.053,00	(3.088.687,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	105.094.740,00	102.006.053,00	(3.088.687,00)	97,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	43.452.213,00	43.445.000,00	(7.213,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	24.400.957,00	24.395.000,00	(5.957,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.400.957,00	24.395.000,00	(5.957,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.400.957,00	24.395.000,00	(5.957,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006		PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	19.051.256,00	19.050.000,00	(1.256,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1	BELANJA OPERASI	19.051.256,00	19.050.000,00	(1.256,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.051.256,00	19.050.000,00	(1.256,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	293.433.464,00	293.401.950,00	(31.514,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	109.601.462,00	109.571.000,00	(30.462,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	109.601.462,00	109.571.000,00	(30.462,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	109.601.462,00	109.571.000,00	(30.462,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	63.340.052,00	63.339.000,00	(1.052,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	63.340.052,00	63.339.000,00	(1.052,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	63.340.052,00	63.339.000,00	(1.052,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	120.491.950,00	120.491.950,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	120.491.950,00	120.491.950,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.491.950,00	120.491.950,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	921.620.005,00	907.537.155,00	(14.082.850,00)	98,47	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	406.890.750,00	401.919.900,00	(4.970.850,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	406.890.750,00	401.919.900,00	(4.970.850,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.890.750,00	401.919.900,00	(4.970.850,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	71.931.705,00	67.511.705,00	(4.420.000,00)	93,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	47.511.705,00	47.511.705,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.511.705,00	47.511.705,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	24.420.000,00	20.000.000,00	(4.420.000,00)	81,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.420.000,00	20.000.000,00	(4.420.000,00)	81,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	62.875.000,00	62.875.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	62.875.000,00	62.875.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.875.000,00	62.875.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	364.922.550,00	360.230.550,00	(4.692.000,00)	98,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	364.922.550,00	360.230.550,00	(4.692.000,00)	98,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	364.922.550,00	360.230.550,00	(4.692.000,00)	98,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	227.564.000,00	219.924.862,00	(7.639.138,00)	96,64	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	162.000.000,00	156.000.000,00	(6.000.000,00)	96,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	162.000.000,00	156.000.000,00	(6.000.000,00)	96,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.000.000,00	156.000.000,00	(6.000.000,00)	96,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	32.564.000,00	32.009.862,00	(554.138,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	32.564.000,00	32.009.862,00	(554.138,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.564.000,00	32.009.862,00	(554.138,00)	98,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	33.000.000,00	31.915.000,00	(1.085.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	33.000.000,00	31.915.000,00	(1.085.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.000.000,00	31.915.000,00	(1.085.000,00)	96,71	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	187.080.000,00	186.332.362,00	(747.638,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	187.080.000,00	186.332.362,00	(747.638,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	187.080.000,00	186.332.362,00	(747.638,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	187.080.000,00	186.332.362,00	(747.638,00)	99,60	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	533.810.456,00	212.074.919,00	(321.735.537,00)	39,72	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	372.819.440,00	76.095.225,00	(296.724.215,00)	20,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	372.819.440,00	76.095.225,00	(296.724.215,00)	20,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	372.819.440,00	76.095.225,00	(296.724.215,00)	20,41	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.000.000,00	7.832.000,00	(13.168.000,00)	37,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	21.000.000,00	7.832.000,00	(13.168.000,00)	37,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	7.832.000,00	(13.168.000,00)	37,29	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	139.991.016,00	128.147.694,00	(11.843.322,00)	91,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	139.991.016,00	128.147.694,00	(11.843.322,00)	91,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.991.016,00	128.147.694,00	(11.843.322,00)	91,53	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	92.718.010.245,00	92.435.330.862,00	(282.679.383,00)	99,69	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN DAERAH	1.739.187.958,00	1.666.687.111,00	(72.500.847,00)	95,83	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS	30.941.884,00	30.400.000,00	(541.884,00)	98,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.941.884,00	30.400.000,00	(541.884,00)	98,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.941.884,00	30.400.000,00	(541.884,00)	98,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS	32.061.884,00	31.520.000,00	(541.884,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	32.061.884,00	31.520.000,00	(541.884,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.061.884,00	31.520.000,00	(541.884,00)	98,30	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD	64.812.577,00	63.311.000,00	(1.501.577,00)	97,68	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	64.812.577,00	63.311.000,00	(1.501.577,00)	97,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.812.577,00	63.311.000,00	(1.501.577,00)	97,68	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD	64.882.577,00	64.400.000,00	(482.577,00)	99,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	64.882.577,00	64.400.000,00	(482.577,00)	99,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.882.577,00	64.400.000,00	(482.577,00)	99,25	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD	28.904.978,00	28.899.000,00	(5.978,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	28.904.978,00	28.899.000,00	(5.978,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.904.978,00	28.899.000,00	(5.978,00)	99,97	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006		KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD	59.289.724,00	58.840.000,00	(449.724,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	59.289.724,00	58.840.000,00	(449.724,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.289.724,00	58.840.000,00	(449.724,00)	99,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN APBD	781.968.329,00	740.769.363,00	(41.198.966,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	781.968.329,00	740.769.363,00	(41.198.966,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	781.968.329,00	740.769.363,00	(41.198.966,00)	94,73	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD	412.518.005,00	387.912.500,00	(24.605.505,00)	94,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	412.518.005,00	387.912.500,00	(24.605.505,00)	94,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	412.518.005,00	387.912.500,00	(24.605.505,00)	94,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0009		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN	263.808.000,00	260.635.248,00	(3.172.752,00)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	263.808.000,00	260.635.248,00	(3.172.752,00)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	263.808.000,00	260.635.248,00	(3.172.752,00)	98,79	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH	414.158.067,00	401.411.101,00	(12.746.966,00)	96,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001		KOORDINASI DAN PENGELOLAAN KAS DAERAH	210.432.462,00	203.341.891,00	(7.090.571,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	210.432.462,00	203.341.891,00	(7.090.571,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	210.432.462,00	203.341.891,00	(7.090.571,00)	96,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003		PENYIAPAN, PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENERBITAN ANGGARAN KAS DAN SPD	11.267.776,00	11.260.000,00	(7.776,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	11.267.776,00	11.260.000,00	(7.776,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.267.776,00	11.260.000,00	(7.776,00)	99,93	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005		KOORDINASI, FASILITASI, ASISTENSI, SINKRONISASI, SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DANA PERIMBANGAN DAN DANA TRANSFER LAINNYA	103.662.503,00	98.042.210,00	(5.620.293,00)	94,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	103.662.503,00	98.042.210,00	(5.620.293,00)	94,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	103.662.503,00	98.042.210,00	(5.620.293,00)	94,57	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH, LAPORAN ALIRAN KAS, DAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN/ PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PERHITUNGAN FIHAK KETIGA (PFK)	88.795.326,00	88.767.000,00	(28.326,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	88.795.326,00	88.767.000,00	(28.326,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	88.795.326,00	88.767.000,00	(28.326,00)	99,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH	523.942.606,00	521.326.866,00	(2.615.740,00)	99,50	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001		KOORDINASI PELAKSANAAN AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS DAERAH	34.553.008,00	34.550.000,00	(3.008,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.553.008,00	34.550.000,00	(3.008,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.553.008,00	34.550.000,00	(3.008,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003		KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BULANAN, TRIWULANAN DAN SEMESTERAN	31.039.665,00	29.455.000,00	(1.584.665,00)	94,89	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1	BELANJA OPERASI	31.039.665,00	29.455.000,00	(1.584.665,00)	94,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.039.665,00	29.455.000,00	(1.584.665,00)	94,89	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004		KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN SKPD, BLUD DAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	185.662.613,00	185.270.445,00	(392.168,00)	99,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	185.662.613,00	185.270.445,00	(392.168,00)	99,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.662.613,00	185.270.445,00	(392.168,00)	99,78	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN/KOTA	84.293.324,00	84.216.500,00	(76.824,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	84.293.324,00	84.216.500,00	(76.824,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.293.324,00	84.216.500,00	(76.824,00)	99,90	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0010		PENYUSUNAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	73.243.996,00	73.109.921,00	(134.075,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1	BELANJA OPERASI	73.243.996,00	73.109.921,00	(134.075,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	73.243.996,00	73.109.921,00	(134.075,00)	99,81	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0011		PEMBINAAN AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	115.150.000,00	114.725.000,00	(425.000,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1	BELANJA OPERASI	115.150.000,00	114.725.000,00	(425.000,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.150.000,00	114.725.000,00	(425.000,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04		PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	89.440.433.379,00	89.298.768.800,00	(141.664.579,00)	99,84	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008		ANALISIS PERENCANAAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4	BELANJA TRANSFER	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009		PENGELOLAAN DANA DARURAT DAN MENDESAK	616.770.079,00	475.105.500,00	(141.664.579,00)	77,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	616.770.079,00	475.105.500,00	(141.664.579,00)	77,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0009	5.3.01	Belanja Tidak Terduga	616.770.079,00	475.105.500,00	(141.664.579,00)	77,03	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05		PENGELOLAAN DATA DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH LINGKUP KEUANGAN DAERAH	600.288.235,00	547.136.984,00	(53.151.251,00)	91,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001		INVENTARISASI DAN ANALISIS DATA BIDANG KEUANGAN DAERAH	100.061.248,00	88.120.000,00	(11.941.248,00)	88,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1	BELANJA OPERASI	100.061.248,00	88.120.000,00	(11.941.248,00)	88,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	100.061.248,00	88.120.000,00	(11.941.248,00)	88,06	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002		IMPLEMENTASI DAN PEMELIHARAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH	374.534.000,00	336.536.984,00	(37.997.016,00)	89,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	204.534.000,00	168.536.984,00	(35.997.016,00)	82,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.534.000,00	168.536.984,00	(35.997.016,00)	82,40	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.2	BELANJA MODAL	170.000.000,00	168.000.000,00	(2.000.000,00)	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0002	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	170.000.000,00	168.000.000,00	(2.000.000,00)	98,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003		PEMBINAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH BIDANG KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	125.692.987,00	122.480.000,00	(3.212.987,00)	97,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	125.692.987,00	122.480.000,00	(3.212.987,00)	97,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	125.692.987,00	122.480.000,00	(3.212.987,00)	97,44	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	577.531.201,00	462.791.793,00	(114.739.408,00)	80,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01		PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	577.531.201,00	462.791.793,00	(114.739.408,00)	80,13	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001		PENYUSUNAN STANDAR HARGA	58.275.172,00	53.417.500,00	(4.857.672,00)	91,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	58.275.172,00	53.417.500,00	(4.857.672,00)	91,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	58.275.172,00	53.417.500,00	(4.857.672,00)	91,66	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003		PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	28.259.263,00	28.259.000,00	(263,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	28.259.263,00	28.259.000,00	(263,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	28.259.263,00	28.259.000,00	(263,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007		PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH	109.162.000,00	90.440.920,00	(18.721.080,00)	82,85	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	61.162.000,00	42.440.920,00	(18.721.080,00)	69,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.162.000,00	42.440.920,00	(18.721.080,00)	69,39	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2	BELANJA MODAL	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0007	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008		PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH	80.686.433,00	55.083.000,00	(25.603.433,00)	68,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	80.686.433,00	55.083.000,00	(25.603.433,00)	68,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	80.686.433,00	55.083.000,00	(25.603.433,00)	68,26	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010		OPTIMALISASI PENGGUNAAN, PEMANFAATAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN, DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH	74.513.221,00	45.262.000,00	(29.251.221,00)	60,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	74.513.221,00	45.262.000,00	(29.251.221,00)	60,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.513.221,00	45.262.000,00	(29.251.221,00)	60,74	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011		REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	11.246.049,00	11.246.000,00	(49,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.246.049,00	11.246.000,00	(49,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.246.049,00	11.246.000,00	(49,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012		PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	215.389.063,00	179.083.373,00	(36.305.690,00)	83,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	215.389.063,00	179.083.373,00	(36.305.690,00)	83,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.03.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	215.389.063,00	179.083.373,00	(36.305.690,00)	83,14	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.263.861.672,00	3.053.911.484,00	(209.950.188,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01		KEGIATAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.263.861.672,00	3.053.911.484,00	(209.950.188,00)	93,56	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001		PERENCANAAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	1.681.266.954,00	1.496.222.600,00	(185.044.354,00)	88,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	216.266.954,00	212.310.600,00	(3.956.354,00)	98,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	216.266.954,00	212.310.600,00	(3.956.354,00)	98,17	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.2	BELANJA MODAL	1.465.000.000,00	1.283.912.000,00	(181.088.000,00)	87,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0001	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.465.000.000,00	1.283.912.000,00	(181.088.000,00)	87,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003		PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH	285.086.503,00	282.083.175,00	(3.003.328,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	285.086.503,00	282.083.175,00	(3.003.328,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	285.086.503,00	282.083.175,00	(3.003.328,00)	98,94	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004		PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH	227.600.000,00	223.178.453,00	(4.421.547,00)	98,05	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	217.600.000,00	213.178.453,00	(4.421.547,00)	97,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	217.600.000,00	213.178.453,00	(4.421.547,00)	97,96	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0004	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006		PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN, DAN PELAPORAN BASIS DATA PAJAK DAERAH	192.052.788,00	187.867.000,00	(4.185.788,00)	97,82	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	152.052.788,00	147.867.000,00	(4.185.788,00)	97,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	152.052.788,00	147.867.000,00	(4.185.788,00)	97,24	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.2	BELANJA MODAL	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007		PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) SERTA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)	36.846.392,00	36.843.914,00	(2.478,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	36.846.392,00	36.843.914,00	(2.478,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.846.392,00	36.843.914,00	(2.478,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008		PENETAPAN WAJIB PAJAK DAERAH	47.087.015,00	37.987.015,00	(9.100.000,00)	80,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1	BELANJA OPERASI	47.087.015,00	37.987.015,00	(9.100.000,00)	80,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.087.015,00	37.987.015,00	(9.100.000,00)	80,67	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009		PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH	143.187.696,00	143.187.696,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	143.187.696,00	143.187.696,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.187.696,00	143.187.696,00	0,00	100,00	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010		PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH	17.663.346,00	17.599.500,00	(63.846,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1	BELANJA OPERASI	17.663.346,00	17.599.500,00	(63.846,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.663.346,00	17.599.500,00	(63.846,00)	99,63	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011		PENAGIHAN PAJAK DAERAH	385.053.447,00	383.451.381,00	(1.602.066,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	385.053.447,00	383.451.381,00	(1.602.066,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.053.447,00	383.451.381,00	(1.602.066,00)	99,58	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0012		PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH	2.769.355,00	2.769.000,00	(355,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1	BELANJA OPERASI	2.769.355,00	2.769.000,00	(355,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0012	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.769.355,00	2.769.000,00	(355,00)	99,98	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013		PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN PAJAK DAERAH	204.623.046,00	202.119.750,00	(2.503.296,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1	BELANJA OPERASI	204.623.046,00	202.119.750,00	(2.503.296,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0013	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	204.623.046,00	202.119.750,00	(2.503.296,00)	98,77	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014		PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	30.604.348,00	30.582.000,00	(22.348,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1	BELANJA OPERASI	30.604.348,00	30.582.000,00	(22.348,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0014	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.604.348,00	30.582.000,00	(22.348,00)	99,92	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015		ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH	10.020.782,00	10.020.000,00	(782,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1	BELANJA OPERASI	10.020.782,00	10.020.000,00	(782,00)	99,99	
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.04.2.01.0015	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.020.782,00	10.020.000,00	(782,00)	99,99	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6	PEMBIAYAAN DAERAH	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000				0,00	0,00	0,00	0,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	0,00	100,00	
	5.02.0.00.0.00.04.0000		6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : KEPEGAWAIAN
Organisasi : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	3.692.209.516,00	3.636.592.640,00	(55.616.876,00)	98,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.839.940.394,00	1.804.329.947,00	(35.610.447,00)	98,06	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.427.792,00	41.427.000,00	(792,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14.279.707,00	14.279.500,00	(207,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	14.279.707,00	14.279.500,00	(207,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.279.707,00	14.279.500,00	(207,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	6.260.533,00	6.260.000,00	(533,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.260.533,00	6.260.000,00	(533,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.533,00	6.260.000,00	(533,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	6.260.533,00	6.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.260.533,00	6.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.260.533,00	6.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.627.019,00	6.627.000,00	(19,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.627.019,00	6.627.000,00	(19,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.627.019,00	6.627.000,00	(19,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.337.146.560,00	1.309.182.682,00	(27.963.878,00)	97,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.307.886.027,00	1.279.922.182,00	(27.963.845,00)	97,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.307.886.027,00	1.279.922.182,00	(27.963.845,00)	97,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.307.886.027,00	1.279.922.182,00	(27.963.845,00)	97,86	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	29.260.533,00	29.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	29.260.533,00	29.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.260.533,00	29.260.500,00	(33,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.03		ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	3.855.298,00	3.855.000,00	(298,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0005		REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	3.855.298,00	3.855.000,00	(298,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.855.298,00	3.855.000,00	(298,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.03.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.855.298,00	3.855.000,00	(298,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	177.811.280,00	177.765.775,00	(45.505,00)	99,97	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	12.633.680,00	12.589.500,00	(44.180,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	8.748.680,00	8.704.500,00	(44.180,00)	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.748.680,00	8.704.500,00	(44.180,00)	99,49	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.885.000,00	3.885.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.150.000,00	8.150.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	157.027.600,00	157.026.275,00	(1.325,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	157.027.600,00	157.026.275,00	(1.325,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	157.027.600,00	157.026.275,00	(1.325,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	46.613.464,00	46.203.220,00	(410.244,00)	99,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	46.613.464,00	46.203.220,00	(410.244,00)	99,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	46.613.464,00	46.203.220,00	(410.244,00)	99,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.613.464,00	46.203.220,00	(410.244,00)	99,11	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	171.664.000,00	164.664.000,00	(7.000.000,00)	95,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	171.664.000,00	164.664.000,00	(7.000.000,00)	95,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	171.664.000,00	164.664.000,00	(7.000.000,00)	95,92	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.01	Belanja Pegawai	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	170.364.000,00	163.364.000,00	(7.000.000,00)	95,89	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	61.422.000,00	61.232.270,00	(189.730,00)	99,69	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	55.122.000,00	54.932.270,00	(189.730,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	55.122.000,00	54.932.270,00	(189.730,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	55.122.000,00	54.932.270,00	(189.730,00)	99,65	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.852.269.122,00	1.832.262.693,00	(20.006.429,00)	98,91	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	600.270.929,00	599.853.344,00	(417.585,00)	99,93	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002		PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JUMLAH JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN	17.051.516,00	16.861.016,00	(190.500,00)	98,88	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	17.051.516,00	16.861.016,00	(190.500,00)	98,88	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.051.516,00	16.861.016,00	(190.500,00)	98,88	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003		KOORDINASI DAN FASILITASI PENGADAAN PNS DAN PPPK	512.758.753,00	512.758.468,00	(285,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	512.758.753,00	512.758.468,00	(285,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	512.758.753,00	512.758.468,00	(285,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006		KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN	20.460.660,00	20.283.860,00	(176.800,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	20.460.660,00	20.283.860,00	(176.800,00)	99,13	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.460.660,00	20.283.860,00	(176.800,00)	99,13	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010		PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010	5.2	BELANJA MODAL	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.01.0010	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	49.950.000,00	(50.000,00)	99,90	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02		MUTASI DAN PROMOSI ASN	452.844.909,00	452.044.878,00	(800.031,00)	99,82	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001		PENGELOLAAN MUTASI ASN	3.131.415,00	3.131.415,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	3.131.415,00	3.131.415,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.131.415,00	3.131.415,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002		PENGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT ASN	35.713.583,00	35.713.583,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	35.713.583,00	35.713.583,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	35.713.583,00	35.713.583,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003		PENGELOLAAN PROMOSI ASN	413.999.911,00	413.199.880,00	(800.031,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	413.999.911,00	413.199.880,00	(800.031,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	413.999.911,00	413.199.880,00	(800.031,00)	99,80	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	686.568.268,00	667.780.868,00	(18.787.400,00)	97,26	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0002		PENGELOLAAN ASSESSMENT CENTER	201.513.054,00	182.778.654,00	(18.734.400,00)	90,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1	BELANJA OPERASI	201.513.054,00	182.778.654,00	(18.734.400,00)	90,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	201.513.054,00	182.778.654,00	(18.734.400,00)	90,70	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004		PENGELOLAAN PENDIDIKAN LANJUTAN ASN	485.055.214,00	485.002.214,00	(53.000,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1	BELANJA OPERASI	485.055.214,00	485.002.214,00	(53.000,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.03.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	485.055.214,00	485.002.214,00	(53.000,00)	99,98	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	112.585.016,00	112.583.603,00	(1.413,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003		EVALUASI HASIL PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	37.512.379,00	37.512.379,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	37.512.379,00	37.512.379,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	37.512.379,00	37.512.379,00	0,00	100,00	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007		PEMBINAAN DISIPLIN ASN	75.072.637,00	75.071.224,00	(1.413,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1	BELANJA OPERASI	75.072.637,00	75.071.224,00	(1.413,00)	99,99	
5.03	5.03.5.04.0.00.02.0000	5.03.02.2.04.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	75.072.637,00	75.071.224,00	(1.413,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
Bidang Urusan : INSPEKTORAT DAERAH
Organisasi : INSPEKTORAT

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	4.302.293.596,00	4.152.688.743,00	(149.604.853,00)	96,52	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.103.180.700,00	2.954.419.512,00	(148.761.188,00)	95,20	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	124.282.998,00	124.170.000,00	(112.998,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	16.435.035,00	16.392.500,00	(42.535,00)	99,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	16.435.035,00	16.392.500,00	(42.535,00)	99,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.435.035,00	16.392.500,00	(42.535,00)	99,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	11.517.140,00	11.506.500,00	(10.640,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.517.140,00	11.506.500,00	(10.640,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.517.140,00	11.506.500,00	(10.640,00)	99,90	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	12.489.820,00	12.476.500,00	(13.320,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	12.489.820,00	12.476.500,00	(13.320,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.489.820,00	12.476.500,00	(13.320,00)	99,89	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	61.579.600,00	61.572.500,00	(7.100,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	61.579.600,00	61.572.500,00	(7.100,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.579.600,00	61.572.500,00	(7.100,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	11.953.971,00	11.934.500,00	(19.471,00)	99,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.953.971,00	11.934.500,00	(19.471,00)	99,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.953.971,00	11.934.500,00	(19.471,00)	99,83	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	10.307.432,00	10.287.500,00	(19.932,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	10.307.432,00	10.287.500,00	(19.932,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.307.432,00	10.287.500,00	(19.932,00)	99,80	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	2.156.307.933,00	2.104.162.455,00	(52.145.478,00)	97,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.133.996.689,00	2.081.861.955,00	(52.134.734,00)	97,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	2.133.996.689,00	2.081.861.955,00	(52.134.734,00)	97,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	2.133.996.689,00	2.081.861.955,00	(52.134.734,00)	97,55	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	11.125.611,00	11.119.500,00	(6.111,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	11.125.611,00	11.119.500,00	(6.111,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.125.611,00	11.119.500,00	(6.111,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	11.185.633,00	11.181.000,00	(4.633,00)	99,95	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	11.185.633,00	11.181.000,00	(4.633,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.185.633,00	11.181.000,00	(4.633,00)	99,95	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	134.880.800,00	110.399.665,00	(24.481.135,00)	81,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	134.880.800,00	110.399.665,00	(24.481.135,00)	81,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	134.880.800,00	110.399.665,00	(24.481.135,00)	81,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	134.880.800,00	110.399.665,00	(24.481.135,00)	81,84	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	383.790.587,00	328.977.761,00	(54.812.826,00)	85,71	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.262.287,00	1.260.000,00	(2.287,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.262.287,00	1.260.000,00	(2.287,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.262.287,00	1.260.000,00	(2.287,00)	99,81	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	120.000.000,00	65.714.557,00	(54.285.443,00)	54,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	120.000.000,00	65.714.557,00	(54.285.443,00)	54,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	120.000.000,00	65.714.557,00	(54.285.443,00)	54,76	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	2.341.500,00	1.916.000,00	(425.500,00)	81,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.341.500,00	1.916.000,00	(425.500,00)	81,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.341.500,00	1.916.000,00	(425.500,00)	81,82	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.299.000,00	4.290.000,00	(9.000,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.299.000,00	4.290.000,00	(9.000,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.299.000,00	4.290.000,00	(9.000,00)	99,79	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	255.887.800,00	255.797.204,00	(90.596,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	255.887.800,00	255.797.204,00	(90.596,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	255.887.800,00	255.797.204,00	(90.596,00)	99,96	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	22.091.000,00	22.000.000,00	(91.000,00)	99,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	22.091.000,00	22.000.000,00	(91.000,00)	99,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	22.091.000,00	22.000.000,00	(91.000,00)	99,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.091.000,00	22.000.000,00	(91.000,00)	99,58	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	223.317.132,00	209.343.431,00	(13.973.701,00)	93,74	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	40.617.132,00	36.843.431,00	(3.773.701,00)	90,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	40.617.132,00	36.843.431,00	(3.773.701,00)	90,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.617.132,00	36.843.431,00	(3.773.701,00)	90,70	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	181.200.000,00	171.000.000,00	(10.200.000,00)	94,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	181.200.000,00	171.000.000,00	(10.200.000,00)	94,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	181.200.000,00	171.000.000,00	(10.200.000,00)	94,37	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	58.510.250,00	55.366.200,00	(3.144.050,00)	94,62	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	26.261.250,00	24.961.200,00	(1.300.050,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.261.250,00	24.961.200,00	(1.300.050,00)	95,04	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.261.250,00	24.961.200,00	(1.300.050,00)	95,04	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	11.249.000,00	9.405.000,00	(1.844.000,00)	83,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	11.249.000,00	9.405.000,00	(1.844.000,00)	83,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.249.000,00	9.405.000,00	(1.844.000,00)	83,60	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.2	BELANJA MODAL	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	988.140.000,00	988.033.400,00	(106.600,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN INTERNAL	772.536.000,00	772.431.400,00	(104.600,00)	99,98	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001		PENGAWASAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002		PENGAWASAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	167.360.000,00	167.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	167.360.000,00	167.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	167.360.000,00	167.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003		REVIU LAPORAN KINERJA	226.240.000,00	226.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	226.240.000,00	226.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	226.240.000,00	226.240.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004		REVIU LAPORAN KEUANGAN	193.108.000,00	193.008.200,00	(99.800,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	193.108.000,00	193.008.200,00	(99.800,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	193.108.000,00	193.008.200,00	(99.800,00)	99,94	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005		PENGAWASAN DESA	59.360.000,00	59.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	59.360.000,00	59.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.360.000,00	59.360.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007		MONITORING DAN EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP	66.468.000,00	66.463.200,00	(4.800,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	66.468.000,00	66.463.200,00	(4.800,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	66.468.000,00	66.463.200,00	(4.800,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	215.604.000,00	215.602.000,00	(2.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001		PENANGANAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	64.000.000,00	64.000.000,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002		PENGAWASAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	151.604.000,00	151.602.000,00	(2.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	151.604.000,00	151.602.000,00	(2.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.604.000,00	151.602.000,00	(2.000,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	210.972.896,00	210.235.831,00	(737.065,00)	99,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	210.972.896,00	210.235.831,00	(737.065,00)	99,65	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	74.831.666,00	74.104.000,00	(727.666,00)	99,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	74.831.666,00	74.104.000,00	(727.666,00)	99,02	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	74.831.666,00	74.104.000,00	(727.666,00)	99,02	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003		KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI SERTA VERIFIKASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI	136.141.230,00	136.131.831,00	(9.399,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1	BELANJA OPERASI	123.791.989,00	123.782.590,00	(9.399,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.791.989,00	123.782.590,00	(9.399,00)	99,99	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.2	BELANJA MODAL	12.349.241,00	12.349.241,00	0,00	100,00	
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	12.349.241,00	12.349.241,00	0,00	100,00	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN PANGALE

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		5	BELANJA DAERAH	1.485.550.492,00	1.463.943.750,00	(21.606.742,00)	98,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.402.471.709,00	1.380.887.750,00	(21.583.959,00)	98,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	41.771.057,00	41.713.000,00	(58.057,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	2.613.124,00	2.599.000,00	(14.124,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	2.613.124,00	2.599.000,00	(14.124,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.613.124,00	2.599.000,00	(14.124,00)	99,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	2.613.124,00	2.605.000,00	(8.124,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	2.613.124,00	2.605.000,00	(8.124,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.613.124,00	2.605.000,00	(8.124,00)	99,68	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.613.124,00	2.607.500,00	(5.624,00)	99,78	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	31.318.561,00	31.294.000,00	(24.561,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	31.318.561,00	31.294.000,00	(24.561,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.318.561,00	31.294.000,00	(24.561,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.127.641.707,00	1.106.930.741,00	(20.710.966,00)	98,16	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.058.839.681,00	1.038.154.741,00	(20.684.940,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.058.839.681,00	1.038.154.741,00	(20.684.940,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.058.839.681,00	1.038.154.741,00	(20.684.940,00)	98,04	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002		PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN	10.225.810,00	10.212.000,00	(13.810,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	10.225.810,00	10.212.000,00	(13.810,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.225.810,00	10.212.000,00	(13.810,00)	99,86	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	43.464.232,00	43.456.000,00	(8.232,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	43.464.232,00	43.456.000,00	(8.232,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.464.232,00	43.456.000,00	(8.232,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	15.111.984,00	15.108.000,00	(3.984,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	15.111.984,00	15.108.000,00	(3.984,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.111.984,00	15.108.000,00	(3.984,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	16.820.000,00	16.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002		PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.720.000,00	11.720.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	42.328.000,00	42.264.000,00	(64.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.400.000,00	15.400.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	25.053.000,00	24.989.000,00	(64.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	25.053.000,00	24.989.000,00	(64.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.053.000,00	24.989.000,00	(64.000,00)	99,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	64.403.149,00	64.281.909,00	(121.240,00)	99,81	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	26.997.824,00	26.963.900,00	(33.924,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.997.824,00	26.963.900,00	(33.924,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.997.824,00	26.963.900,00	(33.924,00)	99,87	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	6.068.405,00	6.000.509,00	(67.896,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.068.405,00	6.000.509,00	(67.896,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.068.405,00	6.000.509,00	(67.896,00)	98,88	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	31.336.920,00	31.317.500,00	(19.420,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	31.336.920,00	31.317.500,00	(19.420,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	31.336.920,00	31.317.500,00	(19.420,00)	99,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.672.000,00	89.045.100,00	(626.900,00)	99,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	82.672.000,00	82.045.100,00	(626.900,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1	BELANJA OPERASI	82.672.000,00	82.045.100,00	(626.900,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	82.672.000,00	82.045.100,00	(626.900,00)	99,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13		PENATAAN ORGANISASI	19.835.796,00	19.833.000,00	(2.796,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13.0004		MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA	19.835.796,00	19.833.000,00	(2.796,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13.0004	5.1	BELANJA OPERASI	19.835.796,00	19.833.000,00	(2.796,00)	99,98	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.835.796,00	19.833.000,00	(2.796,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.555.488,00	5.543.000,00	(12.488,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.555.488,00	5.543.000,00	(12.488,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	5.555.488,00	5.543.000,00	(12.488,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.555.488,00	5.543.000,00	(12.488,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.555.488,00	5.543.000,00	(12.488,00)	99,77	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.358.528,00	34.354.000,00	(4.528,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	34.358.528,00	34.354.000,00	(4.528,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	24.653.992,00	24.650.000,00	(3.992,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	24.653.992,00	24.650.000,00	(3.992,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.653.992,00	24.650.000,00	(3.992,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	9.704.536,00	9.704.000,00	(536,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	9.704.536,00	9.704.000,00	(536,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.704.536,00	9.704.000,00	(536,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.065.695,00	27.061.000,00	(4.695,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.065.695,00	27.061.000,00	(4.695,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001		SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	27.065.695,00	27.061.000,00	(4.695,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	27.065.695,00	27.061.000,00	(4.695,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.065.695,00	27.061.000,00	(4.695,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.099.072,00	16.098.000,00	(1.072,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	16.099.072,00	16.098.000,00	(1.072,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	16.099.072,00	16.098.000,00	(1.072,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	16.099.072,00	16.098.000,00	(1.072,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.099.072,00	16.098.000,00	(1.072,00)	99,99	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN TOPOYO

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	1.612.379.624,00	1.555.407.822,00	(56.971.802,00)	96,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.472.998.304,00	1.416.031.022,00	(56.967.282,00)	96,13	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	143.919.856,00	143.917.496,00	(2.360,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	6.728.271,00	6.728.100,00	(171,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	6.728.271,00	6.728.100,00	(171,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.728.271,00	6.728.100,00	(171,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	5.286.710,00	5.286.000,00	(710,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	5.286.710,00	5.286.000,00	(710,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.286.710,00	5.286.000,00	(710,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.553.582,00	5.553.400,00	(182,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.553.582,00	5.553.400,00	(182,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.553.582,00	5.553.400,00	(182,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.995.142,00	3.994.700,00	(442,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.995.142,00	3.994.700,00	(442,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.995.142,00	3.994.700,00	(442,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA- SKPD	4.161.207,00	4.160.696,00	(511,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.161.207,00	4.160.696,00	(511,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.161.207,00	4.160.696,00	(511,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	115.407.268,00	115.407.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	115.407.268,00	115.407.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.407.268,00	115.407.200,00	(68,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007		EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	2.787.676,00	2.787.400,00	(276,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	2.787.676,00	2.787.400,00	(276,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.787.676,00	2.787.400,00	(276,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.048.579.836,00	998.419.114,00	(50.160.722,00)	95,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.046.108.425,00	995.948.214,00	(50.160.211,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.046.108.425,00	995.948.214,00	(50.160.211,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.046.108.425,00	995.948.214,00	(50.160.211,00)	95,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	2.471.411,00	2.470.900,00	(511,00)	99,97	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.471.411,00	2.470.900,00	(511,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.471.411,00	2.470.900,00	(511,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	21.992.215,00	21.867.000,00	(125.215,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	2.822.215,00	2.822.000,00	(215,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.822.215,00	2.822.000,00	(215,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.822.215,00	2.822.000,00	(215,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19.170.000,00	19.045.000,00	(125.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	19.170.000,00	19.045.000,00	(125.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.170.000,00	19.045.000,00	(125.000,00)	99,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	94.255.202,00	92.363.749,00	(1.891.453,00)	97,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	26.850.000,00	25.050.000,00	(1.800.000,00)	93,29	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	26.500.000,00	24.700.000,00	(1.800.000,00)	93,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.500.000,00	24.700.000,00	(1.800.000,00)	93,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	4.176.202,00	4.174.600,00	(1.602,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	4.176.202,00	4.174.600,00	(1.602,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.176.202,00	4.174.600,00	(1.602,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.640.000,00	14.640.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	44.584.000,00	44.494.149,00	(89.851,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	44.584.000,00	44.494.149,00	(89.851,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	44.584.000,00	44.494.149,00	(89.851,00)	99,79	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	7.148.078,00	7.146.200,00	(1.878,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010		PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3.148.078,00	3.146.200,00	(1.878,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1	BELANJA OPERASI	3.148.078,00	3.146.200,00	(1.878,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.148.078,00	3.146.200,00	(1.878,00)	99,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67.569.117,00	66.290.463,00	(1.278.654,00)	98,10	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	34.760.687,00	34.754.800,00	(5.887,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.760.687,00	34.754.800,00	(5.887,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.760.687,00	34.754.800,00	(5.887,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	14.941.780,00	13.670.663,00	(1.271.117,00)	91,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	14.941.780,00	13.670.663,00	(1.271.117,00)	91,49	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.941.780,00	13.670.663,00	(1.271.117,00)	91,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	17.866.650,00	17.865.000,00	(1.650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	17.866.650,00	17.865.000,00	(1.650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.866.650,00	17.865.000,00	(1.650,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	89.534.000,00	86.027.000,00	(3.507.000,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	89.534.000,00	86.027.000,00	(3.507.000,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	89.534.000,00	86.027.000,00	(3.507.000,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	89.534.000,00	86.027.000,00	(3.507.000,00)	96,08	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.045.284,00	84.044.200,00	(1.084,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	84.045.284,00	84.044.200,00	(1.084,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	30.442.144,00	30.441.200,00	(944,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.442.144,00	30.441.200,00	(944,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.442.144,00	30.441.200,00	(944,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	53.603.140,00	53.603.000,00	(140,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	53.603.140,00	53.603.000,00	(140,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	53.603.140,00	53.603.000,00	(140,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.918.354,00	41.915.200,00	(3.154,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	41.918.354,00	41.915.200,00	(3.154,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	34.772.810,00	34.772.400,00	(410,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	34.772.810,00	34.772.400,00	(410,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	34.772.810,00	34.772.400,00	(410,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	7.145.544,00	7.142.800,00	(2.744,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	7.145.544,00	7.142.800,00	(2.744,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.145.544,00	7.142.800,00	(2.744,00)	99,96	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.020.536,00	6.020.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.020.536,00	6.020.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	6.020.536,00	6.020.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.020.536,00	6.020.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.020.536,00	6.020.400,00	(136,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.577.146,00	3.577.000,00	(146,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.577.146,00	3.577.000,00	(146,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	3.577.146,00	3.577.000,00	(146,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	3.577.146,00	3.577.000,00	(146,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.577.146,00	3.577.000,00	(146,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN TOBADAK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		5	BELANJA DAERAH	1.380.686.797,00	1.363.387.598,00	(17.299.199,00)	98,74	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.300.312.095,00	1.285.013.598,00	(15.298.497,00)	98,82	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	17.054.515,00	17.054.000,00	(515,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	17.054.515,00	17.054.000,00	(515,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	17.054.515,00	17.054.000,00	(515,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.054.515,00	17.054.000,00	(515,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.017.358.613,00	1.006.553.598,00	(10.805.015,00)	98,93	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	995.174.804,00	984.371.598,00	(10.803.206,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	995.174.804,00	984.371.598,00	(10.803.206,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	995.174.804,00	984.371.598,00	(10.803.206,00)	98,91	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.681.821,00	1.681.000,00	(821,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.681.821,00	1.681.000,00	(821,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.681.821,00	1.681.000,00	(821,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/ TRIWULANAN/ SEMESTERAN SKPD	20.501.988,00	20.501.000,00	(988,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1	BELANJA OPERASI	20.501.988,00	20.501.000,00	(988,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.501.988,00	20.501.000,00	(988,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	46.724.021,00	46.224.000,00	(500.021,00)	98,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005		MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	32.724.021,00	32.724.000,00	(21,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1	BELANJA OPERASI	32.724.021,00	32.724.000,00	(21,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	32.724.021,00	32.724.000,00	(21,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	14.000.000,00	13.500.000,00	(500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	14.000.000,00	13.500.000,00	(500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	13.500.000,00	(500.000,00)	96,42	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	69.265.892,00	66.977.000,00	(2.288.892,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	974.200,00	974.000,00	(200,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	974.200,00	974.000,00	(200,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	974.200,00	974.000,00	(200,00)	99,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	9.253.692,00	9.253.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	9.253.692,00	9.253.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.253.692,00	9.253.000,00	(692,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	45.288.000,00	43.000.000,00	(2.288.000,00)	94,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	45.288.000,00	43.000.000,00	(2.288.000,00)	94,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	45.288.000,00	43.000.000,00	(2.288.000,00)	94,94	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.026.527,00	43.323.000,00	(1.703.527,00)	96,21	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	26.162.527,00	26.162.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	26.162.527,00	26.162.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.162.527,00	26.162.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	18.864.000,00	17.161.000,00	(1.703.000,00)	90,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.864.000,00	17.161.000,00	(1.703.000,00)	90,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.864.000,00	17.161.000,00	(1.703.000,00)	90,97	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	32.882.527,00	32.882.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	10.021.000,00	10.021.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	10.021.000,00	10.021.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.021.000,00	10.021.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006		PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	20.861.527,00	20.861.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	20.861.527,00	20.861.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.861.527,00	20.861.000,00	(527,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.739.151,00	31.739.000,00	(2.000.151,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.739.151,00	31.739.000,00	(2.000.151,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.739.151,00	31.739.000,00	(2.000.151,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	33.739.151,00	31.739.000,00	(2.000.151,00)	94,07	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.739.151,00	31.739.000,00	(2.000.151,00)	94,07	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.635.551,00	46.635.000,00	(551,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	46.635.551,00	46.635.000,00	(551,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001		PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	46.635.551,00	46.635.000,00	(551,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	46.635.551,00	46.635.000,00	(551,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.635.551,00	46.635.000,00	(551,00)	99,99	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN KAROSSA

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		5	BELANJA DAERAH	1.577.991.061,00	1.555.581.040,00	(22.410.021,00)	98,57	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.504.463.754,00	1.482.920.640,00	(21.543.114,00)	98,56	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	45.066.804,00	44.936.150,00	(130.654,00)	99,71	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	15.230.336,00	15.224.200,00	(6.136,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	15.230.336,00	15.224.200,00	(6.136,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.230.336,00	15.224.200,00	(6.136,00)	99,95	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	18.421.668,00	18.330.000,00	(91.668,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	18.421.668,00	18.330.000,00	(91.668,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.421.668,00	18.330.000,00	(91.668,00)	99,50	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.550.850,00	5.518.000,00	(32.850,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.550.850,00	5.518.000,00	(32.850,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.550.850,00	5.518.000,00	(32.850,00)	99,40	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	5.863.950,00	5.863.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	5.863.950,00	5.863.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.863.950,00	5.863.950,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.222.066.095,00	1.205.061.348,00	(17.004.747,00)	98,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1.165.307.169,00	1.148.793.470,00	(16.513.699,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.165.307.169,00	1.148.793.470,00	(16.513.699,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	1.165.307.169,00	1.148.793.470,00	(16.513.699,00)	98,58	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004		KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	52.950.653,00	52.585.500,00	(365.153,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	5.1	BELANJA OPERASI	52.950.653,00	52.585.500,00	(365.153,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.950.653,00	52.585.500,00	(365.153,00)	99,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	3.808.273,00	3.682.378,00	(125.895,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	3.808.273,00	3.682.378,00	(125.895,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.808.273,00	3.682.378,00	(125.895,00)	96,69	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	12.700.000,00	12.680.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	12.700.000,00	12.680.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	12.700.000,00	12.680.000,00	(20.000,00)	99,84	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.700.000,00	12.680.000,00	(20.000,00)	99,84	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	67.784.017,00	66.064.986,00	(1.719.031,00)	97,46	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	1.152.017,00	1.145.000,00	(7.017,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	1.152.017,00	1.145.000,00	(7.017,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.152.017,00	1.145.000,00	(7.017,00)	99,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002		PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2	BELANJA MODAL	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.002.000,00	1.000.000,00	(2.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.002.000,00	1.000.000,00	(2.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.002.000,00	1.000.000,00	(2.000,00)	99,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	1.978.000,00	1.970.000,00	(8.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	1.978.000,00	1.970.000,00	(8.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.978.000,00	1.970.000,00	(8.000,00)	99,59	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	4.822.000,00	4.660.000,00	(162.000,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	4.822.000,00	4.660.000,00	(162.000,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.822.000,00	4.660.000,00	(162.000,00)	96,64	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	38.630.000,00	37.089.986,00	(1.540.014,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	38.630.000,00	37.089.986,00	(1.540.014,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	38.630.000,00	37.089.986,00	(1.540.014,00)	96,01	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	75.502.624,00	73.845.156,00	(1.657.468,00)	97,80	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	47.681.024,00	47.679.756,00	(1.268,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	47.681.024,00	47.679.756,00	(1.268,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.681.024,00	47.679.756,00	(1.268,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	15.821.600,00	14.165.400,00	(1.656.200,00)	89,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	15.821.600,00	14.165.400,00	(1.656.200,00)	89,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.821.600,00	14.165.400,00	(1.656.200,00)	89,53	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09		PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.344.214,00	8.333.000,00	(1.011.214,00)	89,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001		PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	4.341.286,00	3.394.000,00	(947.286,00)	78,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1	BELANJA OPERASI	4.341.286,00	3.394.000,00	(947.286,00)	78,17	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.341.286,00	3.394.000,00	(947.286,00)	78,17	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009		PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	5.002.928,00	4.939.000,00	(63.928,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1	BELANJA OPERASI	5.002.928,00	4.939.000,00	(63.928,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.002.928,00	4.939.000,00	(63.928,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.492.636,00	10.485.000,00	(7.636,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	10.492.636,00	10.485.000,00	(7.636,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10.492.636,00	10.485.000,00	(7.636,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	10.492.636,00	10.485.000,00	(7.636,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.492.636,00	10.485.000,00	(7.636,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.870.000,00	12.870.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.164.671,00	49.305.400,00	(859.271,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.164.671,00	49.305.400,00	(859.271,00)	98,28	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009		FASILITASI SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PEMBANGUNAN DESA	23.397.465,00	23.380.400,00	(17.065,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1	BELANJA OPERASI	23.397.465,00	23.380.400,00	(17.065,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	23.397.465,00	23.380.400,00	(17.065,00)	99,92	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0011		FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0011	5.1	BELANJA OPERASI	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.990.000,00	8.990.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	17.777.206,00	16.935.000,00	(842.206,00)	95,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	17.777.206,00	16.935.000,00	(842.206,00)	95,26	
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.777.206,00	16.935.000,00	(842.206,00)	95,26	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR KEWILAYAHAN
Bidang Urusan : KECAMATAN
Organisasi : KECAMATAN BUDONG-BUDONG

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		5	BELANJA DAERAH	1.170.997.812,00	1.141.166.632,00	(29.831.180,00)	97,45	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.006.802.893,00	979.660.632,00	(27.142.261,00)	97,30	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	46.810.513,00	44.235.000,00	(2.575.513,00)	94,49	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	30.528.829,00	30.525.000,00	(3.829,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	30.528.829,00	30.525.000,00	(3.829,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	30.528.829,00	30.525.000,00	(3.829,00)	99,98	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	4.853.108,00	4.530.000,00	(323.108,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	4.853.108,00	4.530.000,00	(323.108,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.853.108,00	4.530.000,00	(323.108,00)	93,34	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD	5.243.235,00	3.960.000,00	(1.283.235,00)	75,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	5.243.235,00	3.960.000,00	(1.283.235,00)	75,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.243.235,00	3.960.000,00	(1.283.235,00)	75,52	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	6.185.341,00	5.220.000,00	(965.341,00)	84,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	6.185.341,00	5.220.000,00	(965.341,00)	84,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.185.341,00	5.220.000,00	(965.341,00)	84,39	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	746.592.132,00	732.810.733,00	(13.781.399,00)	98,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	739.449.385,00	728.200.733,00	(11.248.652,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	739.449.385,00	728.200.733,00	(11.248.652,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	739.449.385,00	728.200.733,00	(11.248.652,00)	98,47	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	7.142.747,00	4.610.000,00	(2.532.747,00)	64,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1	BELANJA OPERASI	7.142.747,00	4.610.000,00	(2.532.747,00)	64,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.142.747,00	4.610.000,00	(2.532.747,00)	64,54	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	41.575.000,00	36.862.899,00	(4.712.101,00)	88,66	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	22.625.000,00	18.462.899,00	(4.162.101,00)	81,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1	BELANJA OPERASI	22.625.000,00	18.462.899,00	(4.162.101,00)	81,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.625.000,00	18.462.899,00	(4.162.101,00)	81,60	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	18.950.000,00	18.400.000,00	(550.000,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	18.950.000,00	18.400.000,00	(550.000,00)	97,09	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.950.000,00	18.400.000,00	(550.000,00)	97,09	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	32.502.006,00	29.220.000,00	(3.282.006,00)	89,90	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001		PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	834.706,00	830.000,00	(4.706,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1	BELANJA OPERASI	834.706,00	830.000,00	(4.706,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	834.706,00	830.000,00	(4.706,00)	99,43	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003		PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	1.137.300,00	960.000,00	(177.300,00)	84,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1	BELANJA OPERASI	1.137.300,00	960.000,00	(177.300,00)	84,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.137.300,00	960.000,00	(177.300,00)	84,41	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.770.000,00	2.525.000,00	(245.000,00)	91,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.770.000,00	2.525.000,00	(245.000,00)	91,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.770.000,00	2.525.000,00	(245.000,00)	91,15	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006		PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1	BELANJA OPERASI	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	1.800.000,00	(600.000,00)	75,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	13.980.000,00	13.965.000,00	(15.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	13.980.000,00	13.965.000,00	(15.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.980.000,00	13.965.000,00	(15.000,00)	99,89	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	11.380.000,00	9.140.000,00	(2.240.000,00)	80,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	11.380.000,00	9.140.000,00	(2.240.000,00)	80,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.380.000,00	9.140.000,00	(2.240.000,00)	80,31	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0002		PENGADAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1	BELANJA OPERASI	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	67.323.242,00	64.532.000,00	(2.791.242,00)	95,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	48.513.978,00	48.510.000,00	(3.978,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	48.513.978,00	48.510.000,00	(3.978,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.513.978,00	48.510.000,00	(3.978,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	12.809.264,00	10.022.000,00	(2.787.264,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.809.264,00	10.022.000,00	(2.787.264,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.809.264,00	10.022.000,00	(2.787.264,00)	78,24	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	100,00	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.150.125,00	99.350.000,00	(800.125,00)	99,20	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01		KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	33.640.476,00	33.640.000,00	(476,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001		KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT	33.640.476,00	33.640.000,00	(476,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	33.640.476,00	33.640.000,00	(476,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.640.476,00	33.640.000,00	(476,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN	29.517.669,00	29.140.000,00	(377.669,00)	98,72	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002		FASILITASI PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN	29.517.669,00	29.140.000,00	(377.669,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1	BELANJA OPERASI	29.517.669,00	29.140.000,00	(377.669,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.517.669,00	29.140.000,00	(377.669,00)	98,72	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	36.991.980,00	36.570.000,00	(421.980,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003		PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN	36.991.980,00	36.570.000,00	(421.980,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1	BELANJA OPERASI	36.991.980,00	36.570.000,00	(421.980,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.991.980,00	36.570.000,00	(421.980,00)	98,85	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.979.301,00	16.979.000,00	(301,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01		KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA	16.979.301,00	16.979.000,00	(301,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003		PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	16.979.301,00	16.979.000,00	(301,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1	BELANJA OPERASI	16.979.301,00	16.979.000,00	(301,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.979.301,00	16.979.000,00	(301,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.997.744,00	12.997.000,00	(744,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01		KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.997.744,00	12.997.000,00	(744,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002		HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	12.997.744,00	12.997.000,00	(744,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	12.997.744,00	12.997.000,00	(744,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.997.744,00	12.997.000,00	(744,00)	99,99	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.430.452,00	14.050.000,00	(1.380.452,00)	91,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01		PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM SESUAI PENUGASAN KEPALA DAERAH	15.430.452,00	14.050.000,00	(1.380.452,00)	91,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005		PENANGANAN KONFLIK SOSIAL SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15.430.452,00	14.050.000,00	(1.380.452,00)	91,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	15.430.452,00	14.050.000,00	(1.380.452,00)	91,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.430.452,00	14.050.000,00	(1.380.452,00)	91,05	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.637.297,00	18.130.000,00	(507.297,00)	97,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01		FASILITASI, REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.637.297,00	18.130.000,00	(507.297,00)	97,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018		KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN DI WILAYAH KECAMATAN	18.637.297,00	18.130.000,00	(507.297,00)	97,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1	BELANJA OPERASI	18.637.297,00	18.130.000,00	(507.297,00)	97,27	
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	18.637.297,00	18.130.000,00	(507.297,00)	97,27	

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran I.3 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Urusan Pemerintahan : UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
Bidang Urusan : KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Organisasi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	27.613.200.740,00	27.595.234.716,00	(17.966.024,00)	99,93	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.252.280.583,00	1.234.578.799,00	(17.701.784,00)	98,58	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01		PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	21.916.108,00	21.916.108,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001		PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	12.349.591,00	12.349.591,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	12.349.591,00	12.349.591,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.349.591,00	12.349.591,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	3.267.745,00	3.267.745,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1	BELANJA OPERASI	3.267.745,00	3.267.745,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.267.745,00	3.267.745,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	3.169.386,00	3.169.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1	BELANJA OPERASI	3.169.386,00	3.169.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.169.386,00	3.169.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006		KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	3.129.386,00	3.129.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	3.129.386,00	3.129.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.129.386,00	3.129.386,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02		ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	770.265.726,00	752.641.490,00	(17.624.236,00)	97,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001		PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	770.265.726,00	752.641.490,00	(17.624.236,00)	97,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1	BELANJA OPERASI	770.265.726,00	752.641.490,00	(17.624.236,00)	97,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	5.1.01	Belanja Pegawai	770.265.726,00	752.641.490,00	(17.624.236,00)	97,71	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05		ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	204.040.000,00	204.040.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003		PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	192.200.000,00	192.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1	BELANJA OPERASI	192.200.000,00	192.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	192.200.000,00	192.200.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011		BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	5.1	BELANJA OPERASI	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.840.000,00	11.840.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06		ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.557.850,00	54.503.401,00	(54.449,00)	99,90	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005		PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	2.118.200,00	2.118.000,00	(200,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1	BELANJA OPERASI	2.118.200,00	2.118.000,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.118.200,00	2.118.000,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008		FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1	BELANJA OPERASI	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009		PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	47.409.650,00	47.355.401,00	(54.249,00)	99,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1	BELANJA OPERASI	47.409.650,00	47.355.401,00	(54.249,00)	99,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	47.409.650,00	47.355.401,00	(54.249,00)	99,88	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07		PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	156.560.976,00	156.560.976,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001		PENGADAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	5.1	BELANJA OPERASI	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	95.997.240,00	95.997.240,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005		PENGADAAN MEBEL	33.329.363,00	33.329.363,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2	BELANJA MODAL	33.329.363,00	33.329.363,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.329.363,00	33.329.363,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006		PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.234.373,00	27.234.373,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2	BELANJA MODAL	27.234.373,00	27.234.373,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.234.373,00	27.234.373,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08		PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	44.939.923,00	44.916.824,00	(23.099,00)	99,94	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001		PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.046.538,00	7.045.824,00	(714,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1	BELANJA OPERASI	7.046.538,00	7.045.824,00	(714,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	7.046.538,00	7.045.824,00	(714,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002		PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	13.293.385,00	13.271.000,00	(22.385,00)	99,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1	BELANJA OPERASI	13.293.385,00	13.271.000,00	(22.385,00)	99,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.293.385,00	13.271.000,00	(22.385,00)	99,83	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004		PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1	BELANJA OPERASI	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	850.111.282,00	849.915.042,00	(196.240,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	850.111.282,00	849.915.042,00	(196.240,00)	99,97	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA, PEMBAURAN KEBANGSAAN, BINEKA TUNGGAL IKA DAN SEJARAH KEBANGSAAN	424.413.644,00	424.217.404,00	(196.240,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	424.413.644,00	424.217.404,00	(196.240,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	424.413.644,00	424.217.404,00	(196.240,00)	99,95	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0007		PEMBINAAN TERHADAP AKTIVITAS KEPASKIBRAKAAN DAN PURNAPASKIBRAKA	425.697.638,00	425.697.638,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0007	5.1	BELANJA OPERASI	425.697.638,00	425.697.638,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0007	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	425.697.638,00	425.697.638,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.164.516.299,00	25.164.448.499,00	(67.800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK	25.164.516.299,00	25.164.448.499,00	(67.800,00)	99,99	

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	25.151.506.174,00	25.151.438.374,00	(67.800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	25.151.506.174,00	25.151.438.374,00	(67.800,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	85.706.174,00	85.693.374,00	(12.800,00)	99,98	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	25.065.800.000,00	25.065.745.000,00	(55.000,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005		PELAKSANAAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN DI BIDANG PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI, FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA PEMANTAUAN SITUASI POLITIK DI DAERAH	13.010.125,00	13.010.125,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1	BELANJA OPERASI	13.010.125,00	13.010.125,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.010.125,00	13.010.125,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	87.600.663,00	87.600.663,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	87.600.663,00	87.600.663,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA DAN FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAGUNAAN NARKOTIKA, FASILITASI KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN DI DAERAH	87.600.663,00	87.600.663,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	87.600.663,00	87.600.663,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.600.663,00	12.600.663,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	5.1.05	Belanja Hibah	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	258.691.913,00	258.691.713,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	258.691.913,00	258.691.713,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001		PENYUSUNAN PROGRAM KERJA DI BIDANG KEWASPADAAN DINI, KERJA SAMA INTELIJEN, PEMANTAUAN ORANG ASING, TENAGA KERJA ASING DAN LEMBAGA ASING, KEWASPADAAN PERBATASAN ANTAR NEGARA, FASILITASI KELEMBAGAAN BIDANG KEWASPADAAN, SERTA PENANGANAN KONFLIK DI DAERAH	236.152.041,00	236.151.841,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	5.1	BELANJA OPERASI	236.152.041,00	236.151.841,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.152.041,00	236.151.841,00	(200,00)	99,99	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006		PELAKSANAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	22.539.872,00	22.539.872,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1	BELANJA OPERASI	22.539.872,00	22.539.872,00	0,00	100,00	
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.539.872,00	22.539.872,00	0,00	100,00	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Kab. Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

PEMERINTAH KAB. MAMUJU TENGAH

REKAPITULASI REALISASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	316.086.356.037	309.839.246.035,91	130.505.217.911	124.283.490.917,00	0	0,00	0	0,00
1.01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	161.002.454.145	159.069.273.155,00	24.712.420.697	23.156.435.884,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	161.002.454.145	159.069.273.155,00	24.712.420.697	23.156.435.884,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	130.198.572.962	128.750.990.668,00	33.291.000	33.291.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	132.480.039	132.480.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.057.963	75.057.963,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.235.126	12.235.126,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.188.527	9.188.527,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.234.352	10.234.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	8.278.527	8.278.527,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.485.544	17.485.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	129.139.815.182	127.675.680.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	129.093.156.614	127.629.026.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.062.260	8.062.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	38.596.308	38.591.308,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	66.698.930	66.609.590,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	34.201.208	34.201.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.03.0006	Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada SKPD	32.497.722	32.408.382,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	188.575.578	188.520.578,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	67.970.831	67.970.831,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	42.983.395	42.978.395,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	55.504.000	55.454.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.117.352	22.117.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	352.411.991	352.396.352,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.048.890	2.048.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.052.951	28.052.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	28.985.000	28.970.312,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	293.325.150	293.325.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	134.430.000	134.430.000,00	33.291.000	33.291.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	28.291.000	28.291.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	134.430.000	134.430.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.271.147	122.207.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	33.698.256	33.657.542,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	54.972.891	54.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	33.600.000	33.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.890.095	58.666.095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44.171.840	40.980.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.197.500	13.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.520.755	4.520.755,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	30.506.762.919	30.041.207.223,00	24.679.129.697	23.123.144.884,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	14.699.636.970	14.521.580.520,00	16.368.114.867	15.152.901.695,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	199.941.944	188.872.608,00	911.424.386	794.682.506,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	454.361.470	388.019.068,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	101.867.864	101.866.803,00	4.636.895.859	4.480.827.255,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	2.220.000	2.190.000,00	359.332.228	258.855.933,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah	17.654.069	17.654.069,00	1.687.499.700	1.682.683.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	275.859.195	275.859.195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	183.173.425	183.173.425,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.000.000.000	1.000.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	140.236.444	140.236.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	70.604.627	70.604.627,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	11.735.652.364	11.715.574.140,00	2.082.999.286	2.095.259.260,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	256.610.646	256.610.646,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	0	0,00	909.154.953	792.008.380,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	49.753.077	49.753.077,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.003.159	49.999.862,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	149.997.447	149.997.447,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	59.624.331	59.624.331,00	386.118.300	384.493.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	205.796.473	70.686.846,00	1.228.525.499	1.175.313.879,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.041.814	188.477.000,00	3.711.803.212	3.070.760.314,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	7.747.490.836	7.592.454.412,00	7.273.896.390	6.954.840.223,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	0	0,00	665.873.646	665.042.297,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	0	0,00	465.298.979	462.380.676,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	0	0,00	497.753.644	496.771.469,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	689.247.129	676.534.729,00	2.562.481.575	2.264.814.291,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	206.675.833	206.585.500,00	1.586.154.645	1.576.751.904,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	0	0,00	185.024.177	182.795.922,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	0	0,00	497.753.644	493.610.825,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	0	0,00	55.305.136	54.887.837,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	199.750.786	198.059.886,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	80.641.443	80.641.443,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	251.711.766	251.711.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	49.911.842	49.911.842,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	177.791.887	177.783.867,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	5.009.520.998	5.004.790.998,00	600.710.002	600.710.002,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	171.089.997	171.089.997,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	149.998.916	149.998.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	100.543.205	100.493.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	404.778.629	269.023.858,00	6.690.948	6.600.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	199.851.472	199.851.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	4.911.583	4.911.583,00	150.858.000	150.645.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	51.066.750	51.066.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	5.358.849.804	5.305.331.082,00	1.033.518.440	1.012.602.966,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.412.000.472	1.350.926.859,00	449.423.691	429.604.217,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	298.089.766	292.527.182,00	175.913.162	175.639.683,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD	62.850.000	62.850.000,00	49.850.000	49.850.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	122.000.000	122.000.000,00	62.500.000	62.365.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	226.057.644	226.057.644,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.536.259.000	2.540.009.000,00	31.541.000	31.541.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	163.267.223	163.267.223,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	1.600.000	1.600.000,00	166.630.165	166.028.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	306.083.188	305.450.683,00	97.660.422	97.575.061,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	87.897.840	87.897.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	122.744.671	122.744.671,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.701.386.209	2.621.836.209,00	3.600.000	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	99.657.518	99.657.518,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	2.514.200.000	2.434.650.000,00	3.600.000	2.800.000,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	64.384.610	64.384.610,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	23.144.081	23.144.081,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	238.639.190	238.601.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	238.639.190	238.601.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	94.935.528	94.897.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	143.703.662	143.703.662,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	58.479.074	58.479.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01	Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	58.479.074	58.479.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	48.000.000	48.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.01	1.01.2.22.0.00.02.0000	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	10.479.074	10.479.074,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	125.835.156.416	122.487.199.914,91	43.180.252.176	42.631.836.819,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000		DINAS KESEHATAN	88.592.069.997	85.662.952.720,91	23.532.191.242	23.452.976.567,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.931.122.697	31.729.633.386,00	294.188.540	292.256.727,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	147.378.008	142.352.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	79.271.498	78.011.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.920.419	9.914.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.217.836	7.715.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.478.179	9.174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.487.364	5.839.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.002.712	31.698.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.632.508.345	30.508.941.894,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.550.846.093	30.428.047.142,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.247.348	14.004.848,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	67.414.904	66.889.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16.928.825	15.768.825,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	7.563.634	7.563.634,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.365.191	8.205.191,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	136.850.484	129.420.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	78.000.000	73.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	18.010.484	15.820.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.840.000	31.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.525.971	402.836.734,00	231.121.540	229.239.727,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.786.271	31.586.271,00	231.121.540	229.239.727,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.712.400	11.712.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.815.500	16.786.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.825.000	32.135.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325.386.800	310.616.563,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.800.000	7.800.000,00	63.067.000	63.017.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.800.000	7.800.000,00	63.067.000	63.017.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	202.164.000	195.648.755,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	151.164.000	145.248.755,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	51.000.000	50.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	257.855.500	228.037.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	151.910.000	126.040.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	105.945.500	101.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	110.111.564	98.876.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	110.111.564	98.876.564,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	55.399.712.957	52.778.423.713,91	23.238.002.702	23.160.719.840,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5.692.151.584	5.666.538.576,00	22.709.117.384	22.650.283.140,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas	895.162.703	874.243.244,00	9.778.037.942	9.771.037.140,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	81.708.994	81.133.800,00	9.611.999.862	9.567.274.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	185.890.758	185.061.750,00	3.277.514.580	3.270.407.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	41.565.000	41.565.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.400.000	54.046.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	4.454.989.129	4.452.053.782,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.693.293.353	47.099.396.477,91	528.885.318	510.436.700,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	195.380.000	192.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	137.386.000	96.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	46.375.000	46.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	598.958.500	581.503.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	640.535.282	621.712.532,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	130.987.141	129.867.141,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.210.066.652	1.308.128.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	615.750.268	613.058.349,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	205.160.000	179.630.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	669.871.487	625.754.472,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	29.160.000	17.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.803.644.384	2.180.971.501,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	35.576.107.472	34.578.170.990,00	528.885.318	510.436.700,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	20.300.000	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	2.597.538.389	2.032.789.341,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.892.077.600	2.738.164.091,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	38.240.000	26.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	53.680.000	48.060.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	68.285.000	59.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	24.075.000	20.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	105.111.000	94.908.960,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	90.630.000	85.165.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	13.420.178	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	929.554.000	806.702.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	14.268.020	12.488.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	14.268.020	12.488.660,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	820.551.658	730.968.749,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	43.577.854	41.442.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	43.577.854	41.442.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	88.178.518	73.446.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	88.178.518	73.446.018,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.795.286	616.079.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	688.795.286	616.079.877,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	10.176.042	10.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.176.042	10.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	10.176.042	10.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	430.506.643	413.711.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	319.386.643	317.786.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	319.386.643	317.786.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	111.120.000	95.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0000	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	111.120.000	95.925.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	37.243.086.419	36.824.247.194,00	19.648.060.934	19.178.860.252,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.245.633.900	29.110.981.471,00	362.082.150	358.876.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.598.716.050	11.537.032.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.598.716.050	11.537.032.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	9.000.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	17.637.917.850	17.564.948.661,00	362.082.150	358.876.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	17.637.917.850	17.564.948.661,00	362.082.150	358.876.000,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	7.997.452.519	7.713.265.723,00	19.285.978.784	18.819.984.252,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	829.530.000	826.589.620,00	19.285.978.784	18.819.984.252,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	0	0,00	5.883.507	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit	375.000.000	375.000.000,00	19.280.095.277	18.819.984.252,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	454.530.000	451.589.620,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	7.167.922.519	6.886.676.103,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.02	1.02.0.00.0.00.01.0001	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	7.167.922.519	6.885.676.103,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.720.105.660	13.944.851.982,00	60.621.711.538	57.075.709.714,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	14.720.105.660	13.944.851.982,00	60.621.711.538	57.075.709.714,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.250.324.468	3.164.419.604,00	38.431.400	38.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	83.945.535	83.586.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.491.614	9.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.999.641	12.948.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16.493.604	16.413.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.989.225	12.940.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.488.909	16.459.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.482.539	15.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.406.298.477	2.369.173.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.380.317.873	2.343.283.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.493.926	7.450.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18.486.678	18.440.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	18.492.898	18.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	18.492.898	18.490.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	113.750.308	100.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	68.890.308	68.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	44.860.000	31.670.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	420.828.885	420.499.853,00	7.091.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	7.091.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.600.000	35.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	39.950.000	39.835.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.791.000	328.744.853,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	16.487.885	16.390.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	151.599.415	127.840.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.999.415	112.240.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55.408.950	44.324.420,00	31.340.400	31.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.708.950	37.106.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.700.000	7.218.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	31.340.400	31.300.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	231.191.271	222.323.700,00	3.245.510.300	2.713.824.800,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	231.191.271	222.323.700,00	3.089.314.231	2.662.735.800,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	0	0,00	44.351.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0115	Pembangunan Tanggul Sungai	0	0,00	627.657.404	413.330.800,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	0	0,00	274.877.666	263.573.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	0	0,00	2.142.428.161	1.985.832.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	231.191.271	222.323.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	156.196.069	51.089.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	8.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	0	0,00	98.070.501	4.418.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	0	0,00	49.825.568	46.671.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	3.304.707.444	3.278.254.578,00	13.558.913.646	12.652.131.164,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	3.304.707.444	3.278.254.578,00	13.558.913.646	12.652.131.164,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	8.954.000	0,00	7.150.796.292	6.730.239.014,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17.798.908	17.798.000,00	5.870.675.000	5.664.019.150,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	3.277.954.536	3.260.456.578,00	537.442.354	257.873.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.399.708.650	5.211.203.000,00	523.072.191	505.085.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.399.708.650	5.211.203.000,00	523.072.191	505.085.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	5.399.708.650	5.211.203.000,00	523.072.191	505.085.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	0	0,00	569.002.363	424.231.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	569.002.363	424.231.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	0	0,00	464.879.339	323.034.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.06.2.01.0020	Optimalisasi Sistem Drainase Lingkungan	0	0,00	104.123.024	101.197.000,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.488.960.150	1.066.261.000,00	1.586.359.488	1.508.958.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.488.960.150	1.066.261.000,00	1.586.359.488	1.508.958.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	918.047.921	495.368.000,00	1.586.359.488	1.508.958.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	199.999.646	199.989.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	370.912.583	370.904.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	112.447.823	112.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	112.447.823	112.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.09.2.01.0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	112.447.823	112.047.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	753.133.544	726.119.900,00	41.100.422.149	39.233.179.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	753.133.544	726.119.900,00	41.100.422.149	39.233.179.250,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan	123.200.000	96.894.000,00	33.755.630.833	33.075.778.350,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	0	0,00	406.133.996	395.311.600,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	0	0,00	6.153.352.661	5.748.666.800,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	629.933.544	629.225.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	0	0,00	785.304.659	13.422.500,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	179.632.310	164.223.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	47.229.250	47.229.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	47.229.250	47.229.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	132.403.060	116.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.03	1.03.0.00.0.00.01.0000	1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	132.403.060	116.994.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	2.514.601.039	2.474.569.235,00	4.000.000	3.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.514.601.039	2.474.569.235,00	4.000.000	3.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.065.494.992	2.026.039.953,00	4.000.000	3.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.751.824	88.746.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.751.824	88.746.397,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.158.452.663	1.136.663.008,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.142.403.307	1.120.614.695,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	16.049.356	16.048.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.517.881	19.513.416,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.517.881	19.513.416,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	44.403.108	44.389.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	21.903.108	21.889.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22.500.000	22.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	405.149.081	405.034.901,00	4.000.000	3.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.400.000	8.400.000,00	4.000.000	3.998.000,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	43.491.500	43.488.052,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	73.576.000	73.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	235.450.750	235.345.560,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	44.280.831	44.276.289,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	206.484.000	191.207.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.484.000	86.484.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	104.723.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.283.320	112.087.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.283.320	33.087.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	79.000.000	79.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.453.115	28.398.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.453.115	28.398.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.07.0000	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	157.627.113	157.221.698,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	74.364.135	74.268.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	74.364.135	74.268.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	35.000.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah Pasi Korban Bencana	35.000.000	34.995.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	48.257.977	47.958.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.02.2.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	48.257.977	47.958.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	260.578.047	260.496.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	144.459.699	144.432.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman dan Permukiman Kumuh	144.459.699	144.432.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	116.118.988	116.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.07.0000	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	116.118.988	116.064.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	30.905.218	30.811.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01	Urusan Pemerintahan PSU Perumahan	30.905.218	30.811.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.04	1.04.2.10.0.00.02.0000	1.04.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyelesaian Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	30.905.218	30.811.484,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	9 587 850 287	9 489 060 931,00	1 974 288 000	1 402 965 000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	6 906 095 200	6 873 035 756,00	1 300 000 000	1 299 000 000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 597 125 117	2 504 233 296,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38 462 583	38.211.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25 030 628	24.799.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6.761 856	6.761.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.680 104	6.679.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 711 657 322	1.660.899.196,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.682 107.960	1.647.857.996,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.992.246	19.992.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.924.210	5.923.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	7.032.906	7.032.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.484.000	136.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	86.484.000	86.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	487.162.500	487.041.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	84 662 500	84.541.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	402.500.000	402.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.958.702	161.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	161.958.702	161.775.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.912.770.088	2.912.602.460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan/Kota	2 912 770 088	2 912 602 460,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	37 358.750	37.194.160,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150 483 000	150 480 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2 724 928 338	2 724 928 300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.456.200.000	1.456.200.000,00	1.300.000.000	1.299.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Barang Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.456.200.000	1.456.200.000,00	1.300.000.000	1.299.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.456.200.000	1.456.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.03.0000	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	0	0,00	1.300.000.000	1.299.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.681 755.087	2.616.025.175,00	674.228.000	103.965.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.699.556.163	1.635.235.961,00	7.750.000	7.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.339.479	30.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.236.197	12.227.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.142.574	2.136.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan REA SKPD	905.436	904.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.161.667	2.154.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.050.436	1.049.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.783.174	11.773.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 149 669 201	1.089.684.854,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.104 368.417	1.043.507.354,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.645.436	12.534.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33 655 548	33 643.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	16 854.935	16.847.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	16 854.935	16.847.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	293.259.500	292.850.176,00	7.750.000	7.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.500	20.000,00	7.750.000	7.750.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.321.500	4.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.600.000	13.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	185.318.000	184.910.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	109.314.431	109.304.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.314.431	109.304.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.243.000	74.719.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.043.000	25.519.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	43.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114 875.017	111 525.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	49.393.150	46.205.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	62.682 367	62.575.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.800.000	2.745.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	982.198.924	980.789.214,00	666.518.000	96.215.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.511.603	20.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	20.511.603	20.505.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	83.589.278	83.579.000,00	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0006	Pengacuan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	17.211.603	17.205.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	11.650.000	11.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	36.727.675	36.724.000,00	45.000.000	45.000.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	825.000.000	823.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	786.600.000	786.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14.400.000	13.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	24.000.000	24.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Data Penanggulangan Bencana	55 098.043	52.985.214,00	621.518.000	51.215.000,00	0	0,00	0	0,00
1.05	1.05.0.00.0.00.04.0000	1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RJP) Kab/Kota	53.098.043	52.985.214,00	621.518.000	51.215.000,00	0	0,00	0	0,00
1.06			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7.426.188.519	7.374.330.818,00	12.545.500	12.545.500,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000		DINAS SOSIAL	7.426.188.519	7.374.330.818,00	12.545.500	12.545.500,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.470.479.557	1.446.052.404,00	12.545.500	12.545.500,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	58.110.548	58.109.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.781.548	38.779.656,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.829.500	19.829.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	847.061.921	838.025.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0001	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	818.277.739	921.241.775,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.783.982	28.783.336,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.500.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	288.138.878	288.883.797,00	12.545.500	12.545.500,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.150.378	132.150.378,00	12.545.500	12.545.500,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	156.988.500	156.732.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.764.910	170.453.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.224.910	23.943.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	139.110.000	139.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90.933.500	83.081.840,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0021	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.583.500	56.440.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.01.2.09.0022	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	34.350.000	28.641.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	76.022.233	76.022.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	76.022.233	76.022.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.02.2.03.0002	Pemerintah Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kabupaten/Kota	76.022.233	76.022.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	3.040.000	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.040.000	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	3.040.000	3.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	143.191.282	142.106.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	143.191.282	142.106.380,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	101.686.830	100.614.611,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	41.504.452	41.491.769,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	147.398.140	121.238.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	147.398.140	121.238.294,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0001	Pemeliharaan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	75.006.752	48.992.904,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kemiskinan Keluarga	72.391.388	72.245.390,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	545.057.790	544.872.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	73.267.790	73.087.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	8.351.790	8.330.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dokumen Pelayanan	64.916.000	64.761.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02	Pengelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	471.790.000	471.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	471.790.000	471.790.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	40.999.507	40.999.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.999.507	40.999.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06	1.06.0.00.0.00.01.0000	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	40.999.507	40.999.507,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	35.437.640.917	34.574.232.834,00	12.177.901.119	11.039.736.190,00	0	0,00	0	0,00
2.07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.026.233.260	2.026.111.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.026.233.260	2.026.111.587,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	39.724.410	39.634.410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	39.724.410	39.634.410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	39.724.410	39.634.410,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	54.743.054	54.733.054,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Prioritas berdasarkan Unit Kompetensi	54.743.054	54.733.054,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	54.743.054	54.733.054,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.941.765.796	1.931.744.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	1.941.765.796	1.931.744.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.07	2.07.3.32.0.00.01.0000	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.941.765.796	1.931.744.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.404.779.206	3.349.613.962,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	3.404.779.206	3.349.613.962,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.850.269.952	2.812.480.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	164.809.415	164.783.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	102.890.280	102.798.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	33.426.960	33.423.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.030.838	8.019.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.023.175	4.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.177.940	3.174.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.350.227	14.346.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.324.747.050	2.277.629.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.746.779	2.237.654.875,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.000.271	39.974.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	71.993.041	71.993.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	39.813.741	39.813.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.180.000	32.180.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	57.783.000	57.474.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kerjasama Tarra	3.000.000	3.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.783.000	49.474.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.587.410	184.578.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.340	95.988.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	88.590.170	88.590.170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.599.336	34.415.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.999.336	18.813.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.750.000	26.609.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000	24.959.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Perkantoran dan Bangunan Lainnya	1.750.000	1.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.07.0000	2.08.03	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	212.868.634	212.317.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	62.868.169	62.380.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	62.868.169	62.380.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	150.000.465	149.937.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	150.000.465	149.937.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.07.0000	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	159.661.743	154.359.217,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	159.661.743	154.359.217,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	159.661.743	154.359.217,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.07.0000	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	99.999.854	98.504.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	99.999.854	98.504.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.07.0000	2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	99.999.854	98.504.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	71.979.023	71.952.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	71.979.023	71.952.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.08	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.03.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	71.979.023	71.952.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	256.600.915	256.405.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	256.600.915	256.405.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.07	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	229.393.420	229.205.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	97.600.430	97.469.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.01.0015	Penyaluran Harga dan Pasokan Pangan	97.600.430	97.469.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Perumusan Target Konsumsi Pangan Per Kapita/Tahun serta dengan Angka Kecukupan Gizi	131.792.990	131.736.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	41.130.043	41.114.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	90.662.947	90.622.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	27.207.495	27.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	27.207.495	27.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.09	2.09.3.27.0.00.01.0000	2.09.05.2.01.0007	Pengelolaan Kerasa Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	27.207.495	27.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	903.235.503	749.703.893,00	1.950.750.000	1.856.384.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	903.235.503	749.703.893,00	1.950.750.000	1.856.384.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	903.235.503	749.703.893,00	1.950.750.000	1.856.384.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	903.235.503	749.703.893,00	1.950.750.000	1.856.384.000,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	191.489.731	191.485.195,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.10	1.04.2.10.0.00.02.0000	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	711.745.772	558.218.698,00	1.950.750.000	1.856.384.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	5.677.213.819	4.956.796.012,00	376.625.582	331.768.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.677.213.819	4.956.796.012,00	376.625.582	331.768.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.356.970.044	2.206.929.702,00	75.955.582	75.468.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.072.511	36.199.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.254.181	30.231.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.252.405	911.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.229.674	1.103.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.429.244	1.320.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.305.244	1.203.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.601.763	1.431.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.078.390.941	1.063.751.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	974.042.072	960.376.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	83.303.000	82.803.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.373.940	3.304.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	17.674.929	17.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.813.272	10.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.04.0003	Penyelidikan dan Pengembangan Kebijakan Retribusi Daerah	10.813.272	10.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.850.000	15.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.850.000	15.190.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.370.380	82.905.250,00	75.955.582	75.468.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.721.325	1.035.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	75.955.582	75.468.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.251.275	2.594.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.605.000	1.677.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.710.000	7.667.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.082.800	69.931.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.991.000	119.991.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.991.000	119.991.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.160.988	49.732.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.560.988	22.132.480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000	27.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	854.320.952	828.459.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.018.250	58.309.123,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	568.792.702	548.797.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Berat	214.610.000	211.603.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.900.000	9.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	592.040.000	592.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	592.040.000	592.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	552.200.000	552.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	39.840.000	39.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	83.290.918	74.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	83.290.918	74.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengelolaan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	61.709.632	59.129.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	21.581.286	15.194.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	276.090.536	249.026.000,00	14.290.000	1.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	276.090.536	249.026.000,00	14.290.000	1.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	276.090.536	249.026.000,00	14.290.000	1.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	85.823.663	82.082.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	85.823.663	82.082.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Penerbitan Keputusan Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dikeluarkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	77.781.659	74.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Menerbitkan Penerbitan Penyimpanan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	8.042.004	7.811.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	109.193.091	101.531.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	109.193.091	101.531.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Penerbitan Keterikan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	25.981.010	21.499.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.06.2.01.0003	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Perlindungan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	83.212.081	80.032.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	17.312.191	17.107.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	17.312.191	17.107.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	17.312.191	17.107.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.656.493.376	1.633.757.000,00	286.380.000	254.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1.656.493.376	1.633.757.000,00	286.380.000	254.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0,00	286.380.000	254.900.000,00	0	0,00	0	0,00
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	17.843.376	10.857.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.11	2.11.0.00.0.00.01.0000	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST lainnya/kota atau TPA/TPST Regional	1.638.650,000	1.632.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.629.103.358	2.581.796.400,00	66.380.000	66.380.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.629.103.358	2.581.796.400,00	66.380.000	66.380.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.656.047.279	1.612.590.495,00	19.980.000	19.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.381.410	144.722.808,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	74.143.646	73.643.176,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	71.237.764	71.079.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.117.336.864	1.098.441.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.117.336.864	1.098.441.628,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	30.112.500	30.112.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.112.500	8.112.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90.000.000	75.715.688,00	19.980.000	19.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	19.980.000	19.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90.000.000	75.715.688,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	220.704.505	213.581.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.104.505	80.981.721,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	132.600.000	132.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.512.000	50.016.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.512.000	50.016.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	402.948.372	399.075.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	88.319.875	88.276.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0002	Pencetakan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	78.320.675	78.314.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	9.999.400	9.962.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02	Pencatatan Pendaftaran Penduduk	35.322.160	35.311.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	35.322.160	35.311.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	278.956.337	275.488.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	91.528.680	91.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	187.427.657	183.968.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	341.875.977	341.772.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	140.419.101	140.359.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0001	Pencetakan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelayanan Peristiwa Penting	63.315.581	63.312.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	9.999.400	9.967.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.01.0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	67.104.120	67.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	201.455.876	201.413.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	55.702.128	55.697.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	145.753.848	145.716.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	133.269.896	133.051.705,00	46.400.000	46.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14.036.455	13.947.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	14.036.455	13.947.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	119.233.441	119.104.705,00	46.400.000	46.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemerikan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	57.827.000	57.702.205,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	25.000.000	25.000.000,00	46.400.000	46.400.000,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	36.406.441	36.402.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	95.312.734	95.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	95.312.734	95.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	80.312.734	80.306.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.12	2.12.0.00.0.00.01.0000	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Keterkaitan yang Lain	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.977.259.112	3.903.659.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.977.259.112	3.903.659.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.535.453.178	1.463.453.916,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	103.049.629	103.033.670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.804.914	24.794.714,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.550.652	30.549.779,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	32.307.198	32.307.198,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.386.865	15.381.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.050.035.217	1.007.070.026,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	945.363.223	902.572.532,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguiun/Verifikasi Keuangan SKPD	50.385.974	50.385.974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.276.193	8.276.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	46.009.827	45.835.327,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.500.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	13.500.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.220.300	179.777.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.417.700	1.417.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.428.500	8.397.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.485.000	15.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.945.127	140.533.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13.943.973	13.943.973,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	92.927.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	120.000.000	92.927.206,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.579.782	15.225.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.579.782	15.225.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	52.068.250	51.919.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.068.250	51.919.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.491.632.250	1.490.032.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.491.632.250	1.490.032.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.257.728.175	1.257.728.055,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	32.681.743	32.681.743,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	150.000.000	150.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	33.942.332	32.342.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	17.280.000	17.280.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	950.173.684	950.173.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelaksana Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	950.173.684	950.173.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.13	2.13.0.00.0.00.01.0000	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	950.173.684	950.173.684,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.14			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.644.924.936	2.617.953.400,00	759 983 832	758.891.634,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.644.924.936	2.617.953.400,00	759 983 832	758.891.634,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	169 870 852	169.858.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01	Pemadanan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kependudukan	23 470 852	23.458.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	23.470.852	23.458.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02	Pemaduan Perkiraan Pengendalian Penduduk Calanpas Daerah Kabupaten/Kota	146.400.000	146.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	86.400.000	86.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.589 702.404	1.566.482.700,00	759 983 832	758.891.634,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	667.500.812	663.523.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	134.995.437	134.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana & Data Penyelakan Bangga Kencana	157.500.008	157.392.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	75.000.367	73.585.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100.000.000	100.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.005.000	197.730.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyedia KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	168.001.800	167.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	168.001.800	167.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	469 920.792	452.026.600,00	759 983.832	758.891.634,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	174.552.400	173 134.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kecerian Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	273 358.392	256 901.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9.220.000	9.220.000,00	759.983.832	758 891 634,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12.710.000	12.710.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketahan Ber-KB	284.299.800	283 733.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.750.000	3.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	280.549.800	279 983.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	585 351.682	581 611.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	352.184.362	350 262.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjaga Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kewirausahaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	23 384.362	23.382.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	28.000.000	28.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKR, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	300.000.000	298.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	533 167.320	531.349.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0005	Pemutakhiran Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Balita/Balita)	269.167.320	267.349.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.14	2.08.2.14.0.00.02.0000	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/Kelahiran, Balita/Balita)	264.000.000	264 000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.098 340.969	1.967.455.584,00	164 379 246	164.216.513,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERHUBUNGAN	2.098 340.969	1.963.455.584,00	164.379 346	164.216.513,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.796 070.872	1.751 114.011,00	27.251 699	27.251.699,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	224.049 004	213 143.001,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	38.246 156	37 065.653,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.428.334	14.928.334,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	32.349.769	31.949.369,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	21.633.156	20.733.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	81.339.995	76.414.495,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	34.152.094	32.052.094,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.121.510.343	1.100.759.116,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 021 695.292	1 005.703 102,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	47.907.452	44.707.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	51.907.599	50.348.565,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.631.535	176.479.724,00	27.251.699	27.251.699,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	27.251.699	27.251.699,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.402.885	14.340.585,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.540.000	3.540.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.688.650	158.599.139,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	202.925.670	202.925 670,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95 997.240	95 997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106 928.430	106 928.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.856.320	24 093.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.256.320	8 493.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.600.000	15.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.098.000	15.713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	13.328.000	7.943.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.770.000	7.770.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	302.270.097	212.341.573,00	137.127.547	136.964 814,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	150.563.141	64.554.617,00	137.127.547	136.964 814,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	150.563.141	64.554 617,00	137.127.547	136.964 814,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	151.706.956	147.786 956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.15	2.15.0.00.0.00.01.0000	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan teknis Jalan Kabupaten/Kota	151.706.956	147.786.956,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.788 968.214	2.715.739.903,00	104.638.000	104.438.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	2.788 968.214	2.715 739.903,00	104 638.000	104.438.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.344.282.851	1.329.230.908,00	18.000.000	18.000 000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	62.181.517	61 476.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26 947.330	26 603 200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.857.413	3.815.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.638.779	3.568.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.620.180	3 580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 117 815	23 910.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	982 742 868	966 518.707,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	926 988.613	911.662.237,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25.320.585	25.240.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.953.670	10.771.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosa Realisasi Anggaran	19.480.000	18.645.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.058.442	10.905.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	11.058.442	10.905.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.064.250	50.864.991,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.705.000	4.705.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.359.250	46.159.991,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.991.000	77.297.970,00	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	18.000.000	18.000.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.991.000	77.297.970,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.942.000	31.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.136.000	4.136.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	28.806.000	27.244.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.308.774	130.787.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	134.308.774	130.787.440,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.30.2.21.04.0000	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	364.533.095	364.454.095,00	2.980.000	2.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	364.533.095	364.454.095,00	2.980.000	2.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik	15.900.000	15.825.000,00	2.980.000	2.980.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media	296.998.310	296.998.310,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	51.634.785	51.630.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.038.146.268	1.022.054.900,00	83.658.000	83.458.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	963.878.000	955.792.400,00	83.658.000	83.458.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0002	Pemutakhiranan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	247.928.020	240.800.000,00	75.000.000	74.800.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	715.950.000	714.992.400,00	8.658.000	8.658.000,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	66.268.268	66.262.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.16	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	66.268.268	66.262.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	492.579.368	492.468.088,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	492.579.368	492.468.088,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	27.275.188	27.275.188,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Skopas Pinjaman/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	27.275.188	27.275.188,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	27.275.188	27.275.188,00	3.545.500	3.545.500,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	25.116.038	25.004.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.116.038	25.004.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.116.038	25.004.738,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	24.412.591	24.412.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pengaturan Keterbangan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	24.412.591	24.412.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	24.412.591	24.412.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	415.775.571	415.775.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	415.775.571	415.775.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.17	2.17.3.30.3.31.01.0000	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	415.775.571	415.775.571,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.176.891.571	2.107.781.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.176.891.571	2.107.781.070,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.565.974.864	1.502.451.306,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01	Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.520.357	89.892.857,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	57.806.334	57.178.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.341.414	3.341.414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.462.197	10.462.197,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.910.422	18.910.422,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.110.249.469	1.039.486.574,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.039.416.532	1.019.355.905,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	67.262.226	66.559.958,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.570.711	3.570.711,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.661.568	8.661.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.661.568	8.661.568,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.717.400	38.209.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.717.400	38.209.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	82.254.400	81.143.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.795.000	10.794.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71.459.400	70.349.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.991.000	83.944.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	119.991.000	83.944.607,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.418.429	51.784.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.818.429	24.184.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	27.600.000	27.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.162.250	59.328.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.562.250	45.728.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.600.000	13.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	149.739.707	149.071.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	149.739.707	149.071.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.04.2.01.0006	Penyelenian Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	149.739.707	149.071.287,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	461.177.000	456.258.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	461.177.000	456.258.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	280.872.000	277.647.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.18	2.18.0.00.0.00.01.0000	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	180.305.000	178.611.477,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	5.107.497.230	5.037.670.649,00	7.068.911.179	6.978.578.089,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	5.107.497.230	5.037.670.649,00	7.068.911.179	6.978.578.089,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.277.006.152	1.258.273.971,00	72.800.389	72.799.589,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75.961.125	75.961.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18.074.471	18.074.471,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	14.085.025	14.085.025,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.366.092	14.366.092,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.121.301	9.121.301,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.867.702	9.867.702,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.913.715	4.913.715,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.532.819	5.532.819,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	868.662.854	874.233.442,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	809.861.513	795.435.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	61.340.400	61.340.165,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17.460.141	17.460.141,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	23.592.933	23.567.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	23.592.933	23.567.933,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.436.636	124.196.736,00	72.800.389	72.799.589,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	72.800.389	72.799.589,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.202.000	1.202.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.765.536	8.765.536,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13.860.800	13.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102.109.100	103.869.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	92.120.179	92.120.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	92.120.179	92.120.179,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.051.225	33.161.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.065.000	7.065.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26.986.225	26.096.556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	37.182.000	35.031.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.182.000	35.031.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.493.404.334	1.442.428.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.07.0000	2.19.02.2.01	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.493.404.334	1.442.428.934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	83.372.798	83.372.798,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	267.750.000	267.750.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	1.111.977.468	1.061.110.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.02.2.01.0008	Pemangkuan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kewirausahaan Pemuda	30.304.068	30.195.268,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.337.046.744	2.336.967.744,00	6.990.090.790	6.905.778.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	6.990.090.790	6.899.758.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	0	0,00	6.990.090.790	6.899.758.500,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.293.447.132	2.293.328.132,00	6.020.000	6.020.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.800.000.000	1.800.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	493.447.132	493.328.132,00	6.020.000	6.020.000,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	43.639.612	43.639.612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.19	2.19.3.26.0.00.02.0000	2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	43.639.612	43.639.612,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	11.250.745	11.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	11.250.745	11.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	11.250.745	11.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	11.250.745	11.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.20	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral	11.250.745	11.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	149.715.163	149.472.111,00	15.250.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	149.715.163	149.472.111,00	15.250.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	149.715.163	149.472.111,00	15.250.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	141.799.163	141.687.311,00	15.250.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	67.801.484	67.744.184,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	93.997.679	93.942.927,00	15.250.000	15.250.000,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	7.916.000	7.784.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.21	2.16.2.20.2.21.04.0000	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.916.000	7.784.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	333.408.564	333.224.564,00	494.158.680	479.902.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	333.408.564	333.224.564,00	494.158.680	479.902.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	148.353.691	148.169.691,00	494.158.680	479.902.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	142.512.553	142.328.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Kebudayaan	142.512.553	142.328.553,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Pengawasnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.841.138	5.841.138,00	494.158.680	479.902.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	5.841.138	5.841.138,00	494.158.680	479.902.000,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	185.054.873	185.054.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	185.054.873	185.054.873,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.02.0000	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	85.054.896	85.054.896,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.22	1.01.2.22.0.00.01.0000	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	99.999.977	99.999.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	1.268.755.901	1.240.459.196,00	1.169.733.600	276.836.952,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.268.755.901	1.240.459.196,00	1.169.733.600	276.836.952,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.090.588.295	1.062.430.503,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.215.143	97.157.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.01.0000	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.061.884	60.050.269,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.939.169	3.894.538,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.309.770	3.309.770,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.963.616	3.963.444,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.583.159	3.583.159,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.358.345	22.355.979,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	686.169.087	659.361.573,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	640.602.982	613.946.033,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.171.340	29.151.340,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.394.565	16.264.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.070.000	5.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.070.000	5.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	138.706.825	138.641.171,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.030.500	47.001.225,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.535.000	25.534.067,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.750.000	2.749.166,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.080.000	2.069.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	61.311.325	61.296.713,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240	95.997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240	95.997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.07.0000	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.07.0000	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.430.800	58.373.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	56.030.800	55.973.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.400.800	2.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	178.167.606	178.028.693,00	1.169.733.600	276.836.952,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.823.206	14.708.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	14.823.206	14.708.396,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02	Pemberdayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.344.400	163.320.297,00	1.169.733.600	276.836.952,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	9.764.753	9.754.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0002	Penyelenggaraan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	0	0,00	1.169.733.600	276.836.952,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	93.579.647	93.565.547,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.23	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	80.833.059	80.670.985,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	80.833.059	80.670.985,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	46.066.819	45.859.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	46.066.819	45.859.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	46.066.819	45.859.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	34.816.240	34.811.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05	Penerbitan Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	34.816.240	34.811.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.24	2.23.2.24.0.00.02.0000	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	34.816.240	34.811.785,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	19.470.074.125	18.491.602.167,00	305.245.100	253.614.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5.672.870.646	5.607.811.964,00	171.621.600	171.610.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000		DINAS PERIKANAN	5.672.870.646	5.607.811.964,00	171.621.600	171.610.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.195.035.458	2.148.289.780,00	57.091.000	57.080.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.227.593	39.102.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.321.593	20.318.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.098.541	4.015.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.896.412	3.834.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.878.659	1.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.177.483	1.175.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.854.900	7.840.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.682.120.667	1.639.802.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.645.663.100	1.603.350.072,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0003	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.438.384	3.438.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33.019.183	33.014.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.901.564	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.901.564	3.900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.680.038	29.968.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	5.020.038	4.998.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.660.000	24.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	158.339.431	158.176.449,00	57.091.000	57.080.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	500.000	500.000,00	57.091.000	57.080.000,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.111.500	7.111.250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.219.364	5.219.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.507.567	145.346.199,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	178.140.289	175.145.659,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	95.997.240	95.990.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	82.143.049	79.155.169,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.965.876	101.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.070.876	1.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.095.000	18.080.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	82.800.000	82.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	660.000	544.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	660.000	544.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	885.947.333	830.336.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01	Pengelolaan Perairan dan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dimanfaatkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	301.463.500	301.449.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	301.463.500	301.449.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	584.478.833	578.887.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	584.478.833	578.887.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.445.094.397	2.436.959.184,00	114.530.600	114.530.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	730.794.141	730.109.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	627.134.141	626.449.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Data Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	103.660.000	103.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayan Ikan	1.714.300.256	1.706.850.084,00	114.530.600	114.530.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Perbudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	418.971.267	418.570.484,00	114.530.600	114.530.600,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.057.691.077	1.052.292.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Perbudidayaan Ikan di Darat	237.637.912	235.987.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	146.798.458	142.226.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.662.514	26.363.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	30.662.514	26.363.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	116.135.944	115.863.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.145.944	63.919.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.25	3.25.0.00.0.00.01.0000	3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	51.990.000	51.943.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	869.193.316	869.170.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000		DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	869.193.316	869.170.371,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	339.804.410	339.781.279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	259.342.478	259.342.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	74.700.000	74.700.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	184.642.478	184.642.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.561.932	80.538.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	80.561.932	80.538.801,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	353.865.533	353.865.533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	353.865.533	353.865.533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	353.865.533	353.865.533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	175.523.573	175.523.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	175.523.573	175.523.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.26	2.19.3.26.0.00.02.0000	3.26.04.2.02.0003	Fasilitas Pendanaan dan Pembiayaan	175.523.573	175.523.559,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	8.162.287.526	7.314.505.896,00	113.078.000	61.868.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000		DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	8.162.287.526	7.314.505.896,00	113.078.000	61.868.000,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.840.767.218	4.810.124.516,00	53.368.000	53.368.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106.222.984	105.599.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.620.403	87.795.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.997.873	4.995.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.997.873	4.995.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.983.415	4.981.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.623.415	2.621.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.278.260.109	4.257.542.528,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.220.735.438	4.200.501.128,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	57.524.671	57.041.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	26.291.374	26.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	26.291.374	26.289.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.610.000	21.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.610.000	21.580.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.997.435	224.847.174,00	53.368.000	53.368.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.274.857	19.270.000,00	53.368.000	53.368.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.769.170	2.755.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	17.370.000	17.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	48.360.000	48.355.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	137.223.408	137.097.174,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.383.076	112.785.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	51.691.504	48.097.284,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	64.691.572	64.688.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.002.240	61.691.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	65.002.240	61.691.130,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.599.047.877	1.496.861.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.229.834.001	1.187.840.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Kemudian, Teknologi dan Spesifik Lokasi	757.200.209	756.959.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	472.633.792	430.850.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	309.213.876	309.020.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	309.213.876	309.020.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	343.850.134	43.673.700,00	51.210.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	343.850.134	43.673.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	43.850.134	43.673.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	300.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	0	0,00	51.210.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.03.2.02.0303	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0,00	51.210.000	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	181.920.828	181.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Aglan Daerah Kabupaten/Kota	181.920.828	181.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	181.920.828	181.654.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	95.400.789	94.906.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	95.400.789	94.906.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	95.400.789	94.906.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.161.300.680	687.285.680,00	8.500.000	8.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.161.300.680	687.285.680,00	8.500.000	8.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	450.000.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	311.300.680	311.282.500,00	8.500.000	8.500.000,00	0	0,00	0	0,00
3.27	2.09.3.27.0.00.01.0000	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	400.000.000	376.003.180,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.458.300.602	2.426.524.000,00	3.545.500	3.136.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2.458.300.602	2.426.524.000,00	3.545.500	3.136.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.138.084.777	2.106.376.482,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	109.123.231	109.011.723,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.012.975	35.956.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	27.481.368	27.469.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.939.544	4.918.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.164.396	20.162.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.525.943	20.505.948,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.829.648.639	1.798.020.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.829.648.639	1.798.020.181,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.950.000	19.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.950.000	19.950.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	70.722.799	70.722.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	609.799	609.799,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.992.000	1.992.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.405.000	8.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	59.716.000	59.716.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70.041.308	70.034.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	400.000	400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.101.600	11.097.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	58.539.708	58.527.869,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	38.598.500	38.596.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.698.500	37.696.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000	900.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	6.644.965	6.644.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	6.644.965	6.644.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6.644.965	6.644.965,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIGUSI PERDAGANGAN	176.608.304	176.608.304,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.525.630	15.525.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.525.630	15.525.630,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	161.082.674	161.082.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	161.082.674	161.082.674,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	66.593.202	66.593.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	66.593.202	66.593.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	66.593.202	66.593.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	70.369.354	70.351.053,00	3.545.500	3.136.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	70.369.354	70.351.053,00	3.545.500	3.136.000,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Urutan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	46.105.166	46.086.865,00	3.545.500	3.136.000,00	0	0,00	0	0,00
3.30	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Pengelolaan Metrologi Legal	24.264.188	24.264.188,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	506.663.510	504.520.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000		DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	506.663.510	504.520.140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	429.653.914	427.510.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	429.653.914	427.510.544,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	55.000.000	55.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	199.683.875	197.540.505,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	174.970.039	174.970.039,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	77.009.596	77.009.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUR, IPUR, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	77.009.596	77.009.596,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengelolaan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	44.218.786	44.218.786,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.31	2.17.3.30.3.31.01.0000	3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	32.790.810	32.790.810,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1.800.758.325	1.769.069.790,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.800.758.325	1.769.069.790,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.671.641.132	1.640.467.559,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	241.456.276	235.256.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.049.204	51.449.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	37.171.152	36.771.152,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	36.620.562	36.520.562,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	35.661.214	32.981.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	36.817.478	36.417.478,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.136.666	41.136.666,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.203.647.386	1.182.914.313,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.175.327.448	1.154.594.375,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	28.319.938	28.319.938,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	5.241.202	3.081.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.03.0006	Pemetaan/aan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.241.202	3.081.202,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.400.000	25.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	25.400.000	25.380.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	62.830.228	62.327.028,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.125.900	1.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.110.900	5.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.595.228	56.092.028,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240	95.997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240	95.997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.472.300	25.915.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.472.300	25.915.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.596.500	9.596.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0002	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.596.500	8.596.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.000.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	139.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	139.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.02.2.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	139.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	65.784.109	65.650.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01	Penataan Pemukiman Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.784.109	65.650.021,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.511.980	29.376.992,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.03.2.01.0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Selaras Lokasi Kawasan Transmigrasi	36.273.029	36.273.029,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	63.214.084	62.952.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01	Pengembangan Sarana Pemukiman pada Tahap Konsolidasi	63.214.084	62.952.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0001	Pengisian SDM dalam rangka Kemandirian Sarana Pemukiman	43.040.410	43.013.260,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.32	2.07.3.32.0.00.01.0000	3.32.04.2.01.0002	Pengisian Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Sarana Pemukiman	20.173.674	19.938.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	50.324.787.395	49.309.879.919,00	1.412.986.686	1.410.959.953,00	0	0,00	0	0,00
4.01			SEKRETARIAT DAERAH	29.754.963.068	29.330.349.052,00	1.088.509.811	1.087.983.075,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001		BAGIAN PEMERINTAHAN	586.386.071	575.969.902,00	550.000.000	549.994.264,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02	PROGRAM PENERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	586.386.071	575.969.902,00	550.000.000	549.994.264,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	545.461.321	535.357.839,00	550.000.000	549.994.264,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0001	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	221.042.551	216.934.155,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	91.677.772	86.661.932,00	550.000.000	549.994.264,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	232.740.998	231.771.752,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	40.924.750	40.612.063,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	38.337.033	38.226.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0001	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	2.587.717	2.385.367,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002		BAGIAN HUKUM DAN HAM	530.870.285	496.500.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	530.870.285	496.500.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	530.870.285	496.500.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	228.974.351	225.187.190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	147.951.686	121.364.986,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0002	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	153.944.248	149.948.048,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003		BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.130.561.875	1.850.899.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.130.561.875	1.850.899.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	2.130.561.875	1.850.899.032,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Dana Mental Spiritual	1.834.709.409	1.556.709.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	216.891.999	216.507.406,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0003	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	78.960.467	77.682.217,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004		BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	469.202.871	465.911.470,00	13.103.200	13.103.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.01	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	469.202.871	465.911.470,00	13.103.200	13.103.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	371.690.057	370.208.050,00	13.103.200	13.103.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	266.439.010	265.645.320,00	13.103.200	13.103.200,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.01.0003	Perumusan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	105.251.057	104.562.730,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam	97.512.804	95.703.420,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	19.999.564	19.969.360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0004	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	77.513.240	75.734.060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	374.048.478	373.633.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	374.048.478	373.633.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	374.048.478	373.633.177,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	228.799.478	228.385.977,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	80.289.000	80.287.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0005	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	64.960.000	64.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	914.739.151	914.082.650,00	298.000.000	298.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	914.739.151	914.082.650,00	298.000.000	298.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	914.739.151	914.082.650,00	298.000.000	298.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	454.852.867	454.720.040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	362.945.477	362.934.700,00	298.000.000	298.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0006	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	96.941.007	96.427.910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007		BAGIAN UMUM	23.218.067.281	23.177.249.470,00	184.189.611	184.098.611,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.218.067.281	23.177.249.470,00	184.189.611	184.098.611,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.458.460	24.435.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.221.960	10.221.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.371.960	6.370.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.844.540	7.844.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.008.001.715	3.983.304.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.774.151.873	3.754.459.515,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	233.849.842	233.845.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	467.305.478	467.303.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	369.043.891	369.043.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	98.261.587	98.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	896.620.000	896.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	896.620.000	896.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.210.408.195	7.210.026.992,00	26.500.000	26.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	294.589.195	294.585.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.073.097.400	1.072.915.850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.092.750	32.000.000,00	26.500.000	26.500.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	457.860.000	457.850.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.142.000	30.110.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.326.650.000	1.326.445.502,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.996.176.850	3.996.120.642,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	111.940.082	111.938.000,00	140.689.611	140.598.611,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0,00	19.548.611	19.548.611,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	111.940.082	111.938.000,00	121.141.000	121.050.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.540.494.187	3.535.402.858,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43.724.738	43.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	972.823.000	972.765.010,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.799.815.000	1.798.972.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	724.131.449	719.945.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.074.994.800	2.062.923.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.070.310.000	1.058.259.319,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	552.945.000	552.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	451.739.000	451.729.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	959.143.314	956.026.895,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	174.273.314	172.171.158,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	183.870.000	183.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	280.000.000	279.985.737,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	321.000.000	320.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	3.924.721.850	3.924.368.000,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.126.370.000	2.126.240.000,00	17.000.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0007	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	1.798.351.850	1.798.128.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008		BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	969.642.800	969.510.142,00	15.000.000	14.570.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	969.642.800	969.510.142,00	15.000.000	14.570.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	969.642.800	969.510.142,00	15.000.000	14.570.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	429.600.340	429.520.595,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	140.075.964	140.075.900,00	15.000.000	14.570.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	115.381.504	115.381.504,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	83.288.862	83.241.943,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0008	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	201.296.130	201.290.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009		BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	561.444.256	556.593.015,00	28.217.000	28.217.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	561.444.256	556.593.015,00	28.217.000	28.217.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	561.444.256	556.593.015,00	28.217.000	28.217.000,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	382.955.119	378.238.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	145.889.539	145.766.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.01	4.01.0.00.0.00.01.0009	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	32.619.598	32.588.500,00	28.217.000	28.217.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02			SEKRETARIAT DPRD	20.569.824.327	19.929.530.837,00	324.476.875	322.976.875,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000		SEKRETARIAT DPRD	20.569.824.327	19.929.530.837,00	324.476.875	322.976.875,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.419.198.800	13.847.283.538,00	324.476.875	322.976.875,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.735.207	48.710.233,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.617.533	6.617.533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.435.200	7.435.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.450.145	8.444.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.559.904	9.546.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.541.966	6.539.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.130.397	10.128.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.428.952.570	1.395.235.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.419.680.826	1.385.964.193,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.271.744	9.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	597.806.487	581.701.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	518.445.487	517.643.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	33.860.000	33.860.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	23.125.000	17.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23.376.000	13.198.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.489.430.026	1.279.817.121,00	76.678.000	75.378.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.825.068	7.825.068,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	66.378.000	66.378.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.057.750	0,00	10.300.000	9.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	101.125.038	98.226.953,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.361.885.000	1.173.765.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.537.170	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.242.000	43.242.000,00	26.640.000	26.640.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.242.000	43.242.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	26.640.000	26.640.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	592.688.278	524.988.766,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.347.878	19.339.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	287.340.400	234.149.215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285.600.000	271.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.781.520	152.580.800,00	143.958.875	143.958.875,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.781.520	116.780.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	40.000.000	35.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0,00	143.958.875	143.958.875,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	8.628.902.993	8.545.648.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	7.995.902.993	7.944.928.208,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	633.000.000	600.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	1.349.659.739	1.275.359.617,00	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD	324.315.959	252.745.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1.025.343.750	1.022.614.417,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	0	0,00	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.150.635.517	6.082.247.299,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	165.969.126	160.618.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	149.969.126	144.618.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	16.000.000	16.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	113.702.727	111.883.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	21.218.420	21.213.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	24.831.105	23.125.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	10.720.000	10.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	19.327.502	19.325.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	105.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	37.500.000	37.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.03.0003	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	20.000.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.578.620.603	1.547.133.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	406.358.003	386.989.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	751.163.800	739.144.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	338.598.000	338.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	82.900.000	82.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	723.509.883	694.041.276,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	30.361.500	9.185.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	7.213.551	7.213.551,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	685.934.832	677.642.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	14.678.302	14.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	14.678.302	14.677.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	3.534.144.680	3.533.894.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.02	4.02.0.00.0.00.01.0000	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3.534.144.680	3.533.894.049,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	19.287.765.834	18.130.442.704,00	2.183.986.064	1.999.175.082,00	616.770.079	475.105.500,00	28.823.663.300	3.823.663.300,00
5.01			PERENCANAAN	3.773.305.423	3.647.220.043,00	240.503.600	240.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	3.773.305.423	3.647.220.043,00	240.503.600	240.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.604.351.424	2.532.063.751,00	65.503.600	65.300.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	195.302.935	193.299.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	53.013.778	52.993.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.587.421	11.885.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.039.914	8.927.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.765.322	11.689.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.141.031	9.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.705.469	98.705.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.547.964.866	1.500.731.732,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.536.149.892	1.489.239.332,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.814.974	11.492.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000	67.418.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	80.000.000	67.418.648,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	102.349.943	102.006.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	37.539.943	37.536.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	64.810.000	64.470.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	369.941.122	366.165.531,00	65.503.600	65.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.218.155	4.193.300,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.941.367	7.931.500,00	65.503.600	65.500.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	33.784.000	33.784.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.800.000	50.760.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273.197.600	269.491.731,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	176.027.580	174.818.906,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	78.650.672	78.626.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.868.903	20.592.006,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	76.100.000	75.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.164.978	127.622.734,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	111.914.978	107.392.734,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.250.000	20.230.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	634.405.833	591.615.573,00	175.000.000	174.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Penelaahan	352.062.078	346.433.641,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	165.750.000	165.383.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	58.919.745	58.908.107,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	16.999.056	15.725.136,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	9.461.573	7.501.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	39.687.054	39.460.002,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	13.490.816	12.895.816,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	47.753.804	46.558.580,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	40.827.611	39.105.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.374.603	11.158.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0002	Pembahasan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	11.319.443	10.813.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	17.133.560	17.133.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	181.433.450	142.013.328,00	175.000.000	174.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	55.577.679	38.390.474,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.907.771	103.662.854,00	175.000.000	174.800.000,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	70.030.694	64.063.604,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	31.729.400	30.538.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.02.2.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	38.301.294	33.525.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	544.548.171	523.540.719,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	282.321.169	275.028.044,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.360.915	9.360.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.134.404	3.134.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3.260.040	3.259.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	13.679.839	13.660.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	51.406.144	51.368.582,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.833.950	5.833.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	6.727.636	6.567.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	188.918.241	181.844.762,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	81.040.387	79.895.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	55.350.888	54.930.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25.689.579	24.964.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	181.186.615	168.617.475,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	30.206.998	23.161.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	19.783.736	19.608.576,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.088.534	23.932.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	47.333.522	46.272.290,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.182.480	19.316.409,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.01	5.01.5.05.0.00.02.0000	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	38.592.075	36.325.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02			KEUANGAN	11.217.035.825	10.242.341.265,00	1.822.984.000	1.633.836.862,00	616.770.079	475.105.500,00	3.823.663.300	3.823.663.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	11.217.035.825	10.242.341.265,00	1.822.984.000	1.633.836.862,00	616.770.079	475.105.500,00	3.823.663.300	3.823.663.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.831.066.086	5.138.987.926,00	89.984.000	83.924.862,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	117.295.832	117.228.615,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	29.003.641	29.003.641,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.448.990	11.448.990,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.864.418	10.864.418,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.815.618	11.815.618,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	10.255.882	10.255.882,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28.378.431	28.313.264,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.526.802	15.526.802,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.596.796.116	3.242.967.925,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.491.701.376	3.140.961.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	105.094.740	102.006.053,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.452.213	43.445.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24.400.957	24.395.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.03.0006	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.051.256	19.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	293.433.464	293.401.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	109.601.462	109.571.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	63.340.057	63.339.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pemilaian Kinerja Pegawai	120.491.950	120.491.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	897.200.005	887.537.155,00	24.420.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	406.890.750	401.919.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.511.705	47.511.705,00	24.420.000	20.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62.875.000	62.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	15.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	364.922.550	360.230.550,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	162.000.000	156.000.000,00	65.564.000	63.924.862,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	162.000.000	156.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	32.564.000	32.009.862,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	33.000.000	31.915.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	187.080.000	186.332.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187.080.000	186.332.362,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.810.456	212.074.919,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	372.819.440	76.095.725,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.000.000	7.832.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.991.016	128.147.694,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	3.107.576.866	2.968.562.062,00	170.000.000	168.000.000,00	616.770.079	475.105.500,00	3.823.663.300	3.823.663.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.739.187.958	1.666.687.111,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	30.941.884	30.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	32.061.884	31.520.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	64.812.577	63.311.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	64.832.577	64.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	28.904.978	28.899.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	59.259.724	58.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	781.968.329	740.769.363,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	412.518.025	387.912.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	263.808.000	260.635.248,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	414.158.067	401.411.101,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	210.432.462	203.341.891,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0003	Penyusun, Pelaksanaan Pengatahan dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	11.267.776	11.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	103.662.503	98.042.210,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pembiayaan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	88.795.326	88.767.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	523.942.606	521.326.806,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	34.553.008	34.550.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Triwulanan dan Semesteran	31.039.665	29.455.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	185.662.613	185.270.445,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah tentang Pertanggungjawaban, Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan	84.293.324	84.216.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	73.243.998	73.109.921,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	115.150.000	114.725.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0,00	0	0,00	616.770.079	475.105.500,00	3.823.663.300	3.823.663.300,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.823.663.300	3.823.663.300,00

KODE			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.02.2 04 0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	0	0,00	0	0,00	616.770.079	475.105.600,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02 02 2 05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lembaga Keuangan Daerah	430.288.235	379.136.984,00	170.000.000	168.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.02.2 05 0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	100.061.348	88.120.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.02.2 05 0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	204.534.000	168.536.984,00	170.000.000	168.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.02.2 05 0003	Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	125.692.987	122.480.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	529.531.281	414.791.793,00	43.000.000	43.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5 02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	529.531.281	414.791.793,00	43.000.000	43.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02 03 2 01 0001	Penyusunan Standar Harga	58.275.172	53.417.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02 03 2 01 0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	28.259.263	28.259.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02 03 2 01 0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	61.162.000	42.440.920,00	43.000.000	43.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	80.686.433	55.683.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	74.513.221	45.262.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	11.246.049	11.246.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	315.289.063	179.083.373,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02 04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.748.861.672	1.719.999.484,00	1.515.000.000	1.333.912.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5.02.0.00.0.00.04.0000	5 02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.748.861.672	1.719.999.484,00	1.515.000.000	1.333.912.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	216.266.954	212.310.600,00	1.465.000.000	1.283.912.000,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Pelayanan Kebijakan Pajak Daerah	285.086.503	282.083.175,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	217.600.000	213.178.453,00	10.000.000	10.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Data Pajak Daerah	152.052.788	147.867.000,00	40.000.000	40.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0007	Pemilusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	36.846.392	36.843.914,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	47.087.015	37.937.015,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	143.187.696	143.187.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0010	Penetiksa dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	17.663.346	17.599.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	385.053.447	383.451.381,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	2.769.355	2.769.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	204.623.046	202.119.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	30.604.348	30.582.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 02	5 02 0 00 0 00 04 0000	5 02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	10.020.782	10.020.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03			KEPEGAWAIAN	3.591.711.052	3.536.554.420,00	100.498.464	100.088.220,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04 0.00 02 0000		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.591.711.052	3.536.554.420,00	100.498.464	100.088.220,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.789.441.930	1.754.241.727,00	50 498.464	50.088.220,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.427.792	41.427.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04 0.00.02.0000	5 03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.279.707	14.279.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.260.533	6.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	6.260.533	6.260.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.627.019	6.627.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	8.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04 0.00.02.0000	5 03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.337.146.560	1.309.182.682,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.307.836.027	1.279.922.182,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	29.260.533	29.260.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.855.298	3.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3.855.298	3.855.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	173.926.280	173.880 775,00	3.885.000	3.885.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.748.680	8.704.500,00	3.885.000	3.885.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.9.00.02.0000	5 03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.150.000	8.150.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157.027.680	157.026.275,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	46.613.464	46.203.220,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	46.613.464	46.203.220,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.664.000	164.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	171.664.000	164.664.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.422.000	61.232.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.09.0001	Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.122.000	54.932.270,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000	6.300.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.802.269.122	1.782.312.693,00	50 000.000	49.950 000,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04 0.00 02.0000	5 03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	550.270.929	549.903.344,00	50.000.000	49.950.000,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Promosi ASN	17.051.516	16.861.016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00 02.0000	5 03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	512.758.753	512.758.468,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administasi Pemberhentian	20.460.660	20.283.860,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0,00	50.000.000	49.950 000,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	452.844.909	452.044.878,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	3.131.415	3.131.415,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	35.713.583	35.713.583,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	413.999.911	413.199.880,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	686.568.264	667.780.868,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center	291.513.054	182.778.654,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04 9.00.02.0000	5 03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	485.055.214	485.002.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	112.585.016	112.583.603,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.0.00.02.0000	5 03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	37.512.379	37.512.379,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 03	5 03 5 04.9.00.02.0000	5 03.02.2.04.0007	Pemetaan Daerah ASN	75.072.637	75.071.224,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 05			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	705.713.529	704.326.976,00	25 000.000	25 000 000,00	0	0,00	0	0,00
5 05	5 01 5 05 0.00 02.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	705.713.529	704.326.976,00	25 000.000	25 000 000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 02.0000	5 05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	705.713.529	704.326.976,00	25 000.000	25.000 000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 07.0000	5 05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Perguruan	391 883.613	390.592 279,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 02.0000	5 05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	111.684.131	110.453.479,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 02.0000	5 05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	280 199.482	280.138.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05 0.00 02.0000	5 05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	313.829.916	313.734.697,00	25.000.000	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 02.0000	5 05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	140.000.000	140.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.05	5 01 5 05.0.00 02.0000	5 05.02.2.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	173.829.916	173.734.697,00	25 000.000	25 000 000,00	0	0,00	0	0,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	4.262.853.355	4.113.339.502,00	39.440.241	39.349.241,00	0	0,00	0	0,00
6.01			INSPEKTORAT DAERAH	4.262.853.355	4.113.339.502,00	39.440.241	39.349.241,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000		INSPEKTORAT	4.262.853.355	4.113.339.502,00	39 440.241	39.349.241,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3 076 089.700	2.927.419 512,00	27.091.000	27 000 000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00 0.00.01 0000	6 01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	124.282.958	124.170.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 455.035	16.392 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.517.140	11.506.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.489.820	12.476 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	61.579.600	61.572.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	11.953.971	11.934 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 01	6 01 0 00 0.00 01 0000	6 01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.307.432	10.287.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 01	6 01 0 00.0.00 01 0000	6 01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 156 307.933	2.104.167 455,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 01	6 01 0 00 0.00 01 0000	6 01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.133 996 689	2.081 861.955,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6 01	6 01 0 00 0.00 01 0000	6 01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11 125 611	11 119 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Urusan Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	11.185.673	11.181.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	134.650.800	110.399.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	134.650.800	110.399.665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	383.790.587	328.977.761,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.262.287	1.260.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.000.000	65.714.557,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.341.500	1.916.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.299.000	4.290.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	255.687.800	255.797.204,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0,00	22.091.000	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	22.091.000	22.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	223.317.132	209.343.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	40.617.132	36.843.431,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.200.000	171.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.510.250	50.366.200,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.261.250	24.961.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	11.249.000	9.405.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.000.000	16.000.000,00	5.000.000	5.000.000,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	988.140.000	988.033.430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	772.536.000	772.431.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	60.000.000	60.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	167.360.000	167.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja	226.240.000	226.240.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan	193.108.000	193.008.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa	59.360.000	59.360.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	66.468.000	66.463.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	215.604.000	215.602.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0001	Pemanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	64.000.000	64.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	151.604.000	151.602.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	198.623.655	197.836.590,00	12.349.241	12.349.241,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	198.623.655	197.836.590,00	12.349.241	12.349.241,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	74.831.664	74.104.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.01	6.01.0.00.0.00.01.0000	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	123.791.991	123.782.590,00	12.349.241	12.349.241,00	0	0,00	0	0,00
7			UNSUR KEWILAYAHAN	7.178.105.786	7.031.786.842,00	49.500.000	47.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01			KECAMATAN	7.178.105.786	7.031.786.842,00	49.500.000	47.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000		KECAMATAN TOPOYO	1.581.879.624	1.536.707.822,00	30.500.000	28.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.442.498.304	1.387.331.072,00	30.500.000	28.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.919.856	143.917.496,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.728.271	6.728.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.286.710	5.286.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.553.582	5.553.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.995.142	3.994.700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.161.207	4.160.696,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	115.407.268	115.407.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.787.676	2.787.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.048.579.836	998.419.114,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.046.108.425	995.948.214,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.471.411	2.470.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21.992.215	21.867.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja Pegawai	2.822.215	2.822.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.170.000	19.045.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	67.755.282	67.663.749,00	26.500.000	24.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.000	350.000,00	26.500.000	24.700.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.005.020	4.005.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.176.302	4.174.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	14.640.000	14.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	44.584.000	44.494.149,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.148.078	3.146.200,00	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	4.000.000	4.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.148.078	3.146.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.569.117	66.290.463,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.760.687	34.754.820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.941.780	13.670.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	17.866.650	17.865.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.534.000	86.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.534.000	86.027.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	84.045.284	84.044.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	84.045.284	84.044.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Tarkait	30.442.144	30.441.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	53.603.140	53.603.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	41.918.354	41.915.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	41.918.354	41.915.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	34.772.810	34.772.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.145.544	7.142.800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.020.536	6.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.020.536	6.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6.020.536	6.020.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.820.000	3.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Semua Pengguna Kepala Daerah	3.820.000	3.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.05.2.01.0005	Pemanganan Konflik Sosial Sosial Kelasifikasi Peraturan Perundang-Undangan	3.820.000	3.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.577.146	3.577.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.577.146	3.577.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.01.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	3.577.146	3.577.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000		KECAMATAN PANGALE	1.485.550.492	1.463.943.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.402.471.709	1.380.887.750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.771.057	41.713.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.613.134	2.599.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.613.134	2.607.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.613.134	2.605.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.613.124	2.607.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.318.561	31.294.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.127.641.707	1.106.930.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.058.839.681	1.038.154.741,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.225.810	10.212.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.464.232	43.456.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	15.111.984	15.108.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.820.000	16.820.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	5.100.000	5.100.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.720.000	11.720.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	42.128.000	42.264.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.875.000	1.875.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.400.000	15.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.053.000	24.989.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.403.149	64.281.909,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.997.324	26.963.900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.068.405	6.000.509,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	31.336.920	31.317.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.672.000	89.045.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	82.672.000	82.045.100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.000.000	7.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13	Pemaduan Organisasi	19.835.796	19.833.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	19.835.796	19.833.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5.555.488	5.543.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.555.488	5.543.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.555.488	5.543.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	34.358.528	34.354.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	34.358.528	34.354.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24.653.992	24.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.704.536	9.704.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	27.065.695	27.061.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.065.695	27.061.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	27.065.695	27.061.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	16.099.072	16.098.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Satuan Perangkat Kepala Daerah	16.099.072	16.098.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.02.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Kewenangan Peraturan Perundang-Undangan	16.099.072	16.098.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000		KECAMATAN TUBADAK	1.360.666.797	1.363.387.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.302.312.095	1.285.013.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.054.515	17.054.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.054.515	17.054.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.017.358.613	1.006.553.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	995.174.804	984.371.598,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.681.821	1.681.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	20.501.988	20.501.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.724.021	46.224.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	32.724.021	32.724.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.000.000	13.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	99.365.893	66.977.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	974.200	974.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	6.250.000	6.250.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.500.000	1.500.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.253.692	9.253.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.288.000	43.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	45.026.527	43.323.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.162.527	26.162.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.864.000	17.161.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.882.527	32.882.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10.021.000	10.021.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	2.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.861.527	20.861.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	33.739.151	31.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.739.151	31.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.739.151	31.739.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	46.635.551	46.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	46.635.551	46.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.03.0000	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	46.635.551	46.635.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000		KECAMATAN KAROSSA	1.558.991.061	1.536.581.040,00	19.000.000	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.485.463.754	1.463.920.640,00	19.000.000	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.066.804	44.936.150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.230.336	15.224.200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	18.421.668	18.330.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.550.850	5.518.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.863.950	5.863.950,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.222.066.095	1.205.061.348,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.166.107.169	1.148.793.470,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	52.950.653	52.585.500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.808.273	3.682.378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.700.000	12.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12.700.000	12.680.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	48.784.017	47.064.986,00	19.000.000	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.152.017	1.145.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0,00	19.000.000	19.000.000,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.002.000	1.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1.978.000	1.970.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.827.000	4.660.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.630.000	37.099.936,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.502.624	73.845.156,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.681.024	47.679.756,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.871.600	14.165.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12.000.000	12.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.344.214	8.333.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.341.286	3.394.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.002.928	4.939.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10.492.636	10.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.492.636	10.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	10.492.636	10.485.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.870.000	12.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.870.000	12.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.870.000	12.870.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50.164.671	49.305.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50.164.671	49.305.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	23.397.465	23.380.400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.990.000	8.990.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.04.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	17.777.206	16.935.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000		KECAMATAN BUDONG-BUDONG	1.170.997.812	1.141.166.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.006.802.893	979.660.632,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.810.513	44.235.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.528.629	30.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.853.108	4.530.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.243.235	3.960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.185.341	5.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	746.592.132	732.810.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	739.449.385	728.200.733,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.142.747	4.610.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	41.575.000	36.862.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.625.500	18.462.899,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	18.950.000	18.400.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	32.502.506	29.220.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	834.706	830.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.137.300	960.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.770.300	2.525.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.300	1.800.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	13.900.300	13.965.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11.380.900	9.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.000.000	72.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.323.242	64.532.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48.513.978	48.510.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.809.264	10.022.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.000.000	6.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100.150.125	99.350.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.640.476	33.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	33.640.476	33.640.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Diklasifikasikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	29.517.669	29.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	29.517.669	29.140.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	36.991.980	36.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	36.991.980	36.570.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.979.301	16.979.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.979.301	16.979.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.979.301	16.979.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.997.744	12.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.997.744	12.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12.997.744	12.997.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	15.430.452	14.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	15.430.452	14.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	15.430.452	14.050.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	18.637.297	18.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	18.637.297	18.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.01	7.01.0.00.0.00.05.0000	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	18.637.297	18.130.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	27.552.637.004	27.534.670.980,00	60.563.736	60.563.736,00	0	0,00	0	0,00
8.01			KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.552.637.004	27.534.670.980,00	60.563.736	60.563.736,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	27.552.637.004	27.534.670.980,00	60.563.736	60.563.736,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.191.716.847	1.174.015.063,00	60.563.736	60.563.736,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.916.108	21.916.108,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12.349.591	12.349.591,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.267.745	3.267.745,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.169.386	3.169.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.129.386	3.129.386,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	770.265.726	752.641.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	770.265.726	752.641.490,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	204.040.000	204.040.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	192.200.000	192.200.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	11.840.000	11.840.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	54.557.850	54.503.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.118.200	2.118.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.030.000	5.030.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.409.650	47.355.401,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95.997.240	95.997.240,00	60.563.736	60.563.736,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.997.240	95.997.240,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	0	0,00	33.329.363	33.329.363,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0,00	27.234.373	27.234.373,00	0	0,00	0	0,00

KODE			Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	KELOMPOK BELANJA							
				Operasi		Modal		Tak Terduga		Transfer	
				Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	44.939.923	44.916.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.046.538	7.045.824,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.293.385	13.271.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.600.000	24.600.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	850.111.282	849.915.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	850.111.282	849.915.042,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	424.413.644	424.217.404,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepasukibrakaan dan Purnapasukibraka	425.697.638	425.697.638,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	25.164.516.299	25.164.448.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	25.164.516.299	25.164.448.499,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	25.151.506.174	25.151.438.374,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	13.010.125	13.010.125,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	87.600.663	87.600.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	87.600.663	87.600.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.05.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	87.600.663	87.600.663,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	258.691.913	258.691.713,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	258.691.913	258.691.713,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	236.152.041	236.151.841,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.01	8.01.0.00.0.00.01.0000	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	22.539.872	22.539.872,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
			Jumlah	479.600.220.454	469.025.200.983,91	146.739.840.857	139.134.589.716,00	616.770.079	475.105.500,00	88.823.663.300	3.823.663.300,00

Mamuju Tengah, 29 September 2025
Bupati Kab. Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	7.5.2.a	41.381.753.452,10	6.156.200.188,44
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	7.5.2.b	41.381.753.452,10	6.156.200.188,44
3	Sub Total		0,00	0,00
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	7.5.2.c	13.874.382.874,43	41.381.753.452,10
5	Sub Total		13.874.382.874,43	41.381.753.452,10
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir	7.5.2.d	13.874.382.874,43	41.381.753.452,10

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	URAIAN	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / Penurunan	%
1	**KEGIATAN OPERASIONAL**					
2	**PENDAPATAN**	**7.5.4.a**	**631.124.344.302,20**	**671.605.457.172,68**	**(40.481.112.870,48)**	**(6,03)**
3	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**7.5.4.a.1**	**60.232.316.138,65**	**44.388.561.731,68**	**15.843.754.406,97**	**35,69**
4	Pajak Daerah	7.5.4.a.1.a)	17.446.886.106,00	11.863.164.254,00	5.583.721.852,00	47,07
5	Retribusi Daerah	7.5.4.a.1.b)	14.101.109.594,00	28.347.412.735,00	(14.246.303.141,00)	(50,26)
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.4.a.1.c)	729.061.014,00	482.055.891,00	247.005.123,00	51,24
7	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.4.a.1.d)	27.955.259.424,65	3.695.928.851,68	24.259.330.572,97	656,38
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**7.5.4.a.2**	**557.051.912.311,00**	**569.220.933.215,00**	**(12.169.020.904,00)**	**(2,14)**
9	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN**	**7.5.4.a.2.a)**	**531.765.771.129,00**	**535.340.776.623,00**	**(3.575.005.494,00)**	**(0,67)**
10	Dana Bagi Hasil (DBH)		11.934.784.000,00	14.002.499.000,00	(2.067.715.000,00)	(14,77)
11	Dana Alokasi Umum (DAU)		369.183.892.749,00	349.658.672.391,00	19.525.220.358,00	5,58
12	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		82.048.913.591,00	101.224.309.437,00	(19.175.395.846,00)	(18,94)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		68.598.180.789,00	70.455.295.795,00	(1.857.115.006,00)	(2,64)
14	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA**	**7.5.4.a.2.b)**	**0,00**	**6.018.759.000,00**	**(6.018.759.000,00)**	**(100,00)**
15	Insentif Fiskal-LO		0,00	6.018.759.000,00	(6.018.759.000,00)	100,00
16	**TRANSFER PEMERINTAH DAERAH - LAINNYA**	**7.5.4.a.2.c)**	**25.286.141.182,00**	**27.861.397.592,00**	**(2.575.256.410,00)**	**(9,24)**
17	Pendapatan Bagi Hasil		25.286.141.182,00	26.361.397.592,00	(1.075.256.410,00)	(4,08)
18	Bantuan Keuangan		0,00	1.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(100,00)
19	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.5.4.a.3**	**13.840.115.852,55**	**57.995.962.226,00**	**(44.155.846.373,45)**	**(76,14)**
20	Pendapatan Hibah		6.147.586.949,55	50.979.119.468,00	(44.831.532.518,45)	(87,94)
21	Pendapatan Lainnya		7.692.528.903,00	7.016.842.758,00	675.686.145,00	9,63
22	**BEBAN**	**7.5.4.b**	**628.131.704.159,13**	**572.891.382.501,50**	**55.240.321.657,63**	**9,64**
23	**BEBAN OPERASI**	**7.5.4.b.1**	**590.769.255.859,13**	**532.566.066.901,50**	**58.203.188.957,63**	**10,93**
24	Beban Pegawai	7.5.4.b.1.a)	225.500.671.076,00	186.514.182.863,00	38.986.488.213,00	20,90
25	Beban Barang dan Jasa	7.5.4.b.1.b)	202.734.273.172,64	204.758.984.328,91	(2.024.711.156,27)	(0,99)
26	Beban Hibah	7.5.4.b.1.d)	40.313.528.000,01	21.487.237.877,31	18.826.290.122,70	87,62
27	Beban Bantuan Sosial	7.5.4.b.1.e)	18.500.000,00	124.000.000,00	(105.500.000,00)	(85,08)
28	Beban Penyisihan	7.5.4.b.1.f)	5.685.179.894,90	2.734.907.958,50	2.950.271.936,40	107,87
29	Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.4.b.1.g)	116.517.103.715,58	116.946.753.873,78	(429.650.158,20)	(0,37)
30	**BEBAN TRANSFER**	**7.5.4.b.2**	**37.362.448.300,00**	**40.325.315.600,00**	**(2.962.867.300,00)**	**(7,35)**
31	Beban Bantuan Keuangan		37.362.448.300,00	40.325.315.600,00	(2.962.867.300,00)	(7,35)
32	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**2.992.640.143,07**	**98.714.074.671,18**	**(95.721.434.528,11)**	**(96,97)**
33	**KEGIATAN NON OPERASIONAL**				0,00	
34	**SURPLUS NON OPERASIONAL**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**DEFISIT NON OPERASIONAL**		**(0,01)**	**1.995.546.689,60**	**(1.995.546.689,61)**	**(100,00)**
36	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		(0,01)	1.995.546.689,60	(1.995.546.689,61)	(100,00)
37	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	**7.5.4.c**	**0,01**	**(1.995.546.689,60)**	**1.995.546.689,61**	**(100,00)**
38	**POS LUAR BIASA**	**7.5.4.d**			0,00	
39	BEBAN LUAR BIASA	**7.5.4.d.1**	475.105.500,00	326.062.160,00	149.043.340,00	45,71
40	**SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA**		**(475.105.500,00)**	**(326.062.160,00)**	**(149.043.340,00)**	**45,71**
41	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**7.5.4.e**	**2.517.534.643,08**	**96.392.465.821,58**	**(93.874.931.178,50)**	**(97,39)**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	**EKUITAS AWAL**	**7.5.6.a**	**1.370.346.846.195,22**	**1.317.924.619.801,64**
2	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	**7.5.6.b**	**2.517.534.643,08**	**96.392.465.821,58**
3	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:**	**7.5.6.c**	**(2.002.668.291,70)**	**(43.970.239.428,00)**
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		4.581.200,00	0,00
5	KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP		0,00	0,00
6	LAIN-LAIN		(2.007.249.491,70)	(43.970.239.428,00)
7	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas		(1.000.000,00)	
8	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang		2.560.000,00	
9	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap		(2.068.209.491,69)	
10	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset lainnya		59.399.999,99	
11	**EKUITAS AKHIR**	**7.5.6.d**	**1.370.861.712.546,60**	**1.370.346.846.195,22**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran V PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

NERACA

PER 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	**ASET**	**7.5.3.a**	**1.378.301.374.472,31**	**1.387.420.137.414,53**
2	**ASET LANCAR**	**7.5.3.a.1**		
3	Kas di Kas Daerah	7.5.3.a.1.a)	10.009.738.986,53	39.075.017.660,06
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.a.1.b)	225.421.845,00	96.509.756,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.3.a.1.c)	18.800.000,00	43.350.439,00
6	Kas di BLUD	7.5.3.a.1.d)	2.103.923.795,86	0,00
7	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	7.5.3.a.1.e)	0,00	0,00
8	Kas Dana BOS	7.5.3.a.1.f)	0,00	1.790.122,04
9	Kas Lainnya	7.5.3.a.1.g)	218.879.508,00	2.165.085.475,00
10	Kas Dana BOSP	7.5.3.a.1.h)	40.938.422,04	0,00
11	Kas Dana BOK Puskesmas	7.5.3.a.1.i)	1.465.886.736,00	0,00
12	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.a.1.j)	22.259.634.950,00	16.877.669.962,00
13	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.a.1.k)	1.414.766.945,00	940.613.250,00
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	7.5.3.a.1.l)	3.552.070.295,00	411.770.440,00
15	Piutang Transfer	7.5.3.a.1.m)	0,00	1.127.948.456,00
16	Penyisihan Piutang	7.5.3.a.1.n)	(15.520.273.439,20)	(9.835.093.544,30)
17	Persediaan	7.5.3.a.1.o)	10.665.853.614,35	11.972.254.864,53
18	**JUMLAH ASET LANCAR**		**36.455.641.658,58**	**62.876.916.880,33**
19	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**7.5.3.a.2**		
20	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.3.a.b	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
21	Penyertaan Modal		6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
22	**JUMLAH INVESTASI PERMANEN**		**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
23	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**6.000.000.000,00**	**6.000.000.000,00**
24	**ASET TETAP**	**7.5.3.a.3**		
25	Tanah	7.5.3.a.3.a)	67.787.756.175,00	66.833.889.667,00
26	Peralatan dan Mesin	7.5.3.a.3.b)	311.380.597.717,34	279.733.386.440,66
27	Gedung dan Bangunan	7.5.3.a.3.c)	610.628.683.427,77	584.372.010.415,60
28	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.5.3.a.3.d)	1.114.859.229.056,45	1.062.927.244.654,54
29	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.a.3.e)	9.616.240.817,91	9.435.638.671,91
30	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.a.3.f)	36.845.057.769,67	26.550.240.206,76
31	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.a.3.g)	(829.107.439.372,65)	(716.444.200.993,00)
32	**JUMLAH ASET TETAP**		**1.322.010.125.591,49**	**1.313.408.209.063,47**
33	**PROPERTI INVESTASI**	**7.5.3.a.4**		
34	Properti Investasi Tanah		5.447.999.112,00	0,00
35	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
36	**JUMLAH PROPERTI INVESTASI**		**5.447.999.112,00**	**0,00**
37	**ASET LAINNYA**	**7.5.3.a.5**		
38	Tagihan Jangka Panjang	7.5.3.a.5.a)	3.052.198.564,18	0,00
39	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.a.5.b)	5.501.621.941,00	5.004.522.700,00
40	Aset Lain-lain	7.5.3.a.5.c)	20.416.109.038,75	15.166.716.615,79
41	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(3.900.717.310,00)	(3.407.987.956,34)
42	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(16.736.023.123,69)	(12.226.932.888,72)
43	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	7.5.3.a.5.d)	54.419.000,00	598.693.000,00
44	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**8.387.608.110,24**	**5.135.011.470,73**
45	**JUMLAH ASET**		**1.378.301.374.472,31**	**1.387.420.137.414,53**
46	**KEWAJIBAN**	**7.5.3.b**	**7.439.661.925,71**	**17.073.291.219,31**
47	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**7.5.3.b.1**		
48	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.b.1.a)	209.206.419,00	0,00
49	Utang Belanja	7.5.3.b.1.b)	7.230.455.506,71	17.073.291.219,31
50	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**7.439.661.925,71**	**17.073.291.219,31**
51	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**7.439.661.925,71**	**17.073.291.219,31**
52	**EKUITAS**	**7.5.3.c**	**1.370.861.712.546,60**	**1.370.346.846.195,22**
53	EKUITAS	7.5.3.c	1.370.861.712.546,60	1.370.346.846.195,22
54	**JUMLAH EKUITAS**		**1.370.861.712.546,60**	**1.370.346.846.195,22**
55	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS**		**1.378.301.374.472,31**	**1.387.420.137.414,53**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	Tahun 2024	Tahun 2023
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**7.5.5.a**		
2	***ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI***	7.5.5.a	**669.720.851.424,24**	**670.003.526.761,66**
3	Penerimaan Pajak Daerah		12.064.921.118,00	10.986.888.633,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		14.041.286.339,00	28.164.198.735,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		729.061.014,00	482.055.891,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		25.007.704.283,24	2.985.580.547,66
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		12.479.058.000,00	14.557.434.438,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		369.183.892.749,00	349.658.672.391,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		82.048.913.591,00	101.224.309.437,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		68.598.180.789,00	70.455.295.795,00
12	Penerimaan Dana Desa		51.461.215.000,00	51.720.040.000,00
13	Penerimaan Insentif Fiskal		0,00	6.018.759.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		26.414.089.638,00	25.233.449.136,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	1.500.000.000,00
16	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		7.692.528.903,00	7.016.842.758,00
17	***ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI***	7.5.5.a	**558.323.969.783,91**	**500.251.597.135,00**
18	Pembayaran Pegawai		224.098.755.376,00	186.514.182.863,00
19	Pembayaran Barang dan Jasa		203.336.294.992,91	200.826.460.987,00
21	Pembayaran Belanja Hibah		41.571.650.615,00	20.415.535.525,00
22	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		18.500.000,00	124.000.000,00
23	Pembayaran Tak Terduga		475.105.500,00	326.062.160,00
24	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		88.823.663.300,00	92.045.355.600,00
25	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi**		**111.396.881.640,33**	**169.751.929.626,66**
26	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI**	**7.5.5.b**		
27	***ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI***	7.5.5.b	**230.337.498,00**	**471.142.054,00**
28	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
29	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		230.337.498,00	471.142.054,00
30	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
31	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
32	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
33	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
34	***ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI***	7.5.5.b	**139.134.589.716,00**	**134.997.518.417,00**
35	Perolehan Tanah		2.055.173.000,00	1.653.332.000,00
36	Perolehan Peralatan dan Mesin		35.957.625.906,00	13.926.590.864,00
37	Perolehan Gedung dan Bangunan		41.278.328.853,00	52.462.883.837,00
38	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		57.979.234.714,00	62.321.642.916,00
39	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.267.128.002,00	1.363.483.800,00
40	Perolehan Aset Lainnya		597.099.241,00	269.585.000,00
41	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	3.000.000.000,00
42	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi**		**(138.904.252.218,00)**	**(134.526.376.363,00)**
43	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**	**7.5.5.c**		
44	***ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN***	7.5.5.c	**0,00**	**0,00**
45	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
47	***ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN***	7.5.5.c	**0,00**	**0,00**
48	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00
49	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
50	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**
51	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS**	**7.5.5.d**		
52	***ARUS KAS MASUK AKTIVITAS TRANSITORIS***	7.5.5.d	**36.389.712.744,93**	**33.507.265.695,00**
53	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		36.389.712.744,93	33.507.265.695,00
55	***ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS TRANSITORIS***	7.5.5.d	**36.180.506.325,93**	**33.513.624.495,00**
56	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		36.180.506.325,93	33.513.624.495,00
58	**Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris**		**209.206.419,00**	**(6.358.800,00)**
59	**Kenaikan/Penurunan Kas**		**(27.298.164.158,67)**	**35.219.194.463,66**
60	**Saldo Awal Kas**		**41.381.753.452,10**	**6.162.558.988,44**
61	**Koreksi SiLPA**		**0,00**	**0,00**
62	**Saldo Awal Kas Setelah Koreksi**		**41.381.753.452,10**	**6.162.558.988,44**
63	**Saldo Akhir Kas**	7.5.5.e	**14.083.589.293,43**	**41.381.753.452,10**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. Pendahuluan

Dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam melaksanakan pembangunan selalu diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD Tahun Anggaran 2024.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII bahwa Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*. Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Salah satu bagian yang terpenting dan tak terpisahkan dari Laporan Keuangan adalah Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan ungkapan naratif atas pos-pos Laporan Keuangan, sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh *stakeholder*.

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada *stakeholders* mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode akuntansi. Penyusunan laporan keuangan ini merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
d. Menyediakan informasi transaksi non kas baik berupa pendapatan dan beban yang merupakan tolok ukur kinerja keuangan daerah;
e. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan
g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan adalah:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
n. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan Nasional;
o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir;
p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
s. Peraturan Daerah Kab. Mamuju Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
t. Peraturan Daerah Kab. Mamuju Tengah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2022;
u. Peraturan Daerah Kab. Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah;
v. Peraturan Daerah Kab. Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024;
w. Peraturan Bupati Kab. Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah; dan
x. Peraturan Bupati Kab. Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah.

7.1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah sebagai berikut :

7.1. Pendahuluan

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan Dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

7.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

7.2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Visi dan Misi Pembangunan Kab. Mamuju Tengah

7.3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

7.3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

7.3.4 Prosedur yang Telah Dijalankan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

7.4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran

7.5.2 Laporan Perubahan SAL

7.5.3 Neraca

7.5.4 Laporan Operasional

7.5.5 Laporan Arus Kas

7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas

7.5.7 Catatan atas Laporan Keuangan

7.6. Penutup

7.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, tingkat kemiskinan, rasio gini dan indeks pembangunan manusia (Pemerintah Kab. Mamuju Tengah) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

a. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kab. Mamuju Tengah periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya. Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 1
Persentase Penduduk Miskin Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
1	Kab/Kota (%)	7,17	7,32	7,72	Naik (0,40)
2	Kab/Kota (Ribu Orang)	9,98	10,39	11,16	Naik (0,77)
3	Provinsi (%)	11,75	11,49	11,21	Turun (0,28)

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/turun (%)
4	Peringkat di Lingkup Provinsi	5	5	4	

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Persentase penduduk miskin Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 sebesar 7,72% mengalami peningkatan sebesar 0,40% dari tahun 2023 sebelumnya sebesar 7,32%. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam sembilan tahun di Kab. Mamuju Tengah dalam tren naik, bergerak dari kemiskinan sebesar 6,86% menuju ke 7,72%. Dimana menempati posisi ke 4 dari 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat dan naik ke posisi 12 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia pada tahun 2024, maka dalam perencanaan penganggaran tahun mendatang harus mendapat prioritas untuk menekan angka kemiskinan. Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7. 2
Tingkat Kedalaman Kemiskinan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kab/Kota	1,15	0,97	0,92	Turun (0,05)
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	2,09	1,8	1,85	Naik (0,05)
3	Peringkat Provinsi	4	4	5	

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Tabel 7. 3
Tingkat Keparahan Kemiskinan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No.	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab/Kota	0,24	0,18	0,19	Naik (0,01)
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,52	0,42	0,45	Naik (0,03)
3	Peringkat Provinsi	5	5	5	

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

b. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju Tengah Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 1,7% turun menjadi 0,13% dari Tahun 2023, Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 4
Tingkat Pengangguran Terbuka Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota (%)	1,88	1,83	1,7
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	3,04	2,27	2,68
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,45	5,32	4,91
4	Peringkat Provinsi	1	1	1

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 1,7%, sedangkan TPT pada Tahun 2023 adalah sebesar 1,83% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2023. Dengan demikian TPT Kab. Mamuju Tengah lebih rendah dibandingkan TPT Provinsi Sulawesi Barat yang sebesar 2,68%. dan lebih rendah dari Nasional yang sebesar 4,91%.

c. Gini Ratio

Indeks *Gini* atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada *kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

1. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama; dan
2. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Kab. Mamuju Tengah Tahun 2023, Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 5
Gini Ratio Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Kab/Kota	0,35	0,344	Tidak Rilis
2	Tingkat Provinsi	0,362	0,351	0,354
3	Peringkat Provinsi	3	3	3

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Pada Maret 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio untuk level Kabupaten tidak dirilis.

d. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat upaya dan kinerja pembangunan manusia di suatu wilayah dengan mengukur perbandingan dari harapan hidup, pendidikan dan standar hidup. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Umur panjang dan umur sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Standar hidup layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan *(knowledge)*, dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

1. Rendah (< 80);
2. Sedang (60≤IPM<70);
3. Tinggi (70 ≤IPM<80);
4. Sangat Tinggi (>80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kab. Mamuju Tengah Realisasi pencapaian IPM Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 mengalami kenaikan Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 6
Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Kabupaten/Kota	66,89	67,45	68,36
2	Provinsi	69,19	69,8	68,20
3	Peringkat Provinsi	5	6	6

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Hasil pembangunan manusia dapat dilihat melalui indikator yang disebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada Tahun 2024 pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tercatat sebesar 68,36%. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,91% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dilihat dari klasifikasi IPM menurut UNDP, nilai IPM Mamuju Tengah pada tahun 2024 termasuk kategori sedang. Jika dilihat dari tahun 2014 hingga tahun 2024, IPM Kab. Mamuju Tengah terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya sebesar 5,97 poin yaitu dari 61,48% pada tahun 2014 menjadi 68,36% pada tahun 2024.

Hal ini berarti bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik, seperti program pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang telah lebih dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat. Dari tahun 2014 hingga 2024, IPM Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan secara rata-rata sebesar 1,04% dengan rata-rata peningkatan sebesar

0,66 poin di setiap tahunnya. Peningkatan IPM pada periode tahun tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di Mamuju Tengah semakin membaik.

e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan *output*. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7. 7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022*	Tahun 2023**	Tahun 2024**	Tahun 2024	Tahun 2024
1	PDRB (harga konstan 2010) (miliar Rp)	2.332,23	2.397,44	2.469	37.088	12.920.282
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,3	2,77	2,98	4,76	5,11
3	Peringkat Provinsi	5	5	5	-	-

**Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Laju pertumbuhan PDRB menurut harga konstan atau yang lebih dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Mamuju Tengah tahun 2024 adalah sebesar 2,98%.

f. Tingkat Inflasi

Tekanan inflasi global terus meningkat seiring dengan tingginya harga komoditas akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan *proteksionisme*, terutama pangan. Berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) merespons peningkatan inflasi tersebut dengan pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga menahan pemulihan ekonomi dan meningkatkan risiko *stagflasi*. Secara nasional inflasi IHK tahunan sampai bulan Juni 2024 tercatat 4,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,55% (yoy). Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok *volatile food* meningkat, terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok *administered prices* juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada Tahun 2022 diperkirakan lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0 % pada Tahun 2023. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat Tingkat Inflasi Kab. Mamuju Tengah mengikuti inflasi Kabupaten Mamuju yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Barat.

Tingkat perubahan indeks tahun kalender pada Juni 2024 di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Mamuju Tengah mencatatkan terjadinya inflasi 3,92% dan tingkat perubahan indeks tahun ke tahun (Juni 2024 terhadap Juni 2023) menunjukkan adanya inflasi sebesar 3,84%. Inflasi disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya enam indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau 0,58%; kelompok pakaian dan alas kaki 0,54%; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,29%; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%; kelompok kesehatan 1,24%; kelompok transportasi 2,27%; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,37%.

Laporan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Mamuju Tengah melaporkan bahwa sampai pada bulan Juni 2024 berapa komoditas yang mengalami kenaikan harga pada antara lain beras kualitas I dan II, daging ayam ras segar, udang, telur ayam ras segar, bawang merah ukuran sedang, cabai merah, dan keriting, cabai hijau, minyak goreng curah, gula pasir lokal, tepung terigu dan gas elpiji. Untuk komoditas yang mengalami penurunan harga di antaranya: beras kualitas medium I dan II, beras kualitas super I dan II, Ikan tuna, Ikan cakalang, ikan bandeng, telur ayam ras, bawang putih, minyak goreng kemasan. Sedangkan komoditas daging sapi segar, tahu dan tempe masih cenderung stabil.

Tabel 7. 8
Tingkat Inflasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Tingkat Inflasi Kab/Kota (%)			
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	4,85	1,82	1,63
3	Peringkat Provinsi (Pulau Sulawesi 11 Kota)	1	1	1

Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

Tingkat inflasi di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan kenaikan sebesar 0,2 % dari tahun sebelumnya 2023 yang hanya 1,82%. Inflasi ini juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi nasional yang berada pada 1,57% pada Tahun 2024.

g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB-ADHB)

Struktur perekonomian Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 9
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

No	Lapangan Usaha	Tahun		
		2022*	2023*	2024**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.786,70	2.965,34	3.378,62
2	Pertambangan dan Penggalian	40,43	45,47	49,06
3	Industri Pengolahan	345,69	374,97	396,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,45	0,51	0,57
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,93	2,03	2,15
6	Konstruksi	46,99	50,06	54,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	152,79	165,03	175,47
8	Transportasi dan Pergudangan	19.94	23,33	25,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,2	8,14	8,93
10	Informasi dan Komunikasi	33,84	37,23	40,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	32,02	33,85	35,84
12	Real Estate	109,73	116,76	126,42
13	Jasa Perusahaan	0,4	0,43	0,47
14	Administrasi pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	112,67	115,25	121,72
15	Jasa Pendidikan	107,5	110,75	119,74
16	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,29	10,03	10,90
17	Jasa Lainnya	6,2	6,62	6,90
	Produk Domestik Regional Bruto	**3.813,78**	**4.065,80**	**4.554,87**
	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas	**2.332.228,00**	**2.397.438,64**	
	PDRB Provinsi	**58.551,82**	**54.070,98**	**64.214,88**
	Peringkat Provinsi	**5**	**5**	**5**

**Angka sementara*
*** Angka sangat sementara*
Sumber Dokumen: Kab. Mamuju Tengah Dalam Angka 2024

7.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan dilakukan Pada Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 30 menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan; dan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Untuk Tahun 2024 ini Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah masih bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, asumsi target pendapatan berasal dari:
   a) Hasil Pajak Daerah, terdiri dari:
      1) Pajak Hotel;
      2) Pajak Restoran;
      3) Pajak Hiburan;
      4) Pajak Reklame;
      5) Pajak Penerangan Jalan;
      6) Pajak Air Bawah Tanah;
      7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
      8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
      9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
   b) Hasil Retribusi Daerah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kab. Mamuju Tengah, terdiri dari:
      1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
      2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
      3) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan;
      4) Retribusi Pelayanan Pasar;
      5) Retribusi Terminal;
      6) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
      7) Retribusi Izin Gangguan;
      8) Retribusi Izin Trayek;
      9) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas;
      10) Hasil Pertanian;
      11) Pelayanan Penggunaan Air Bersih;
      12) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
      13) Surat Izin Tempat Usaha;
      14) Sewa Alat-alat Berat;
      15) Jasa Ketatausahaan; dan
      16) Jasa Usaha Pemeriksaan Kesehatan dan Badan Hewan.
   c) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, asumsi target pendapatan ini berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kab. Mamuju Tengah, terdiri dari:
      1) Penerimaan Jasa Giro;
      2) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
      3) Pendapatan Dari Pengembalian;
      4) Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya; dan
      5) Sumbangan Pihak Ketiga (SP3).
2. Dana Perimbangan diasumsikan berasal dari:
   a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak;
   b) Dana Alokasi Umum;
   c) Dana Alokasi Khusus;
   d) Dana Penyesuaian;
   e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak; dan
   f) Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berasal dari:
   a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah; dan
   b) Pendapatan Lainnya.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akan mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kab. Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kab. Mamuju Tengah berhak mendapatkan alokasi dana perimbangan dan dana transfer lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang ada.

Arah Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat saran, dengan berdasar analisis perkembangan ekonomi daerah. Diharapkan di tahun 2024 kondisi keuangan daerah sudah stabil dan kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah Kab. Mamuju Tengah pada tahun 2024 secara umum diarahkan untuk:

1. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas, melalui kebijakan pendapatan Tahun Anggaran 2024 diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber

pendapatan yang berkelanjutan (*sub stained*), serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif;

2. Kebijakan belanja pada APBD Kab. Mamuju Tengah digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan program/kegiatan prioritas, terutama diarahkan untuk pencapaian target sebagaimana tertuang pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun anggaran 2023; dan
3. Kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2024 diarahkan untuk meningkatkan daya dukung keuangan daerah untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Besaran alokasi belanja daerah pada setiap tahun anggaran sangat ditentukan oleh kapasitas keuangan daerah atau besaran pendapatan daerah. Dengan demikian jika besaran pendapatan daerah relatif kecil/minim dibandingkan kebutuhan untuk pelaksanaan program dan kegiatan, maka penentuan skala prioritas belanja daerah menjadi suatu keharusan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana.

b. Upaya-upaya Pemerintah Dalam Mencapai Target

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah berdasarkan peraturan perundangan-undangan di bidang keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud meliputi keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Termasuk yang dilaksanakan dalam mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi-potensi PAD, dana perimbangan dan pendapatan hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat adalah dengan penetapan APBD Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 ini melalui peraturan daerah, penetapan ini telah didasarkan pada peraturan per Undang-Undangan yang berlaku, sehingga Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dapat merealisasikan Rencana Kerja Tahunannya.

c. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan mendasar penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan. Dalam pelaksanaannya prinsip-prinsip anggaran perlu ditegaskan kembali terutama pada efisiensi dan efektivitas.

Adapun kebijakan Bupati Mamuju Tengah terhadap Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2024, yaitu:

a) Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, untuk Pemerintah Kab. Mamuju Tengah hanya meliputi Belanja Pegawai, dan Belanja Barang, Hibah dan Bantuan Keuangan ke Desa hanya dialokasikan di PPKD saja. Kecuali khusus Bantuan Sosial yang dikelola sendiri oleh Sekretariat Daerah bagian Kesejahteraan Rakyat.

Anggaran Belanja Operasi untuk Tahun 2024 senilai Rp479.600.220.454,88 terealisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp469.025.200.983,91 atau 97,80% dari anggaran.

Penjelasan lebih lanjut mengenai target dan realisasi belanja operasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp227.183.341.761,79 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp224.098.755.376,00 atau 98,64%.

Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan:

(a) Pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14;

(b) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besar maksimum 2,5% dari jumlah gaji pokok dan tunjangan;

(c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD, serta alokasi belanja penunjang operasional DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan perubahannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

(d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

(e) Insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, dianggarkan pada SKPD Badan Keuangan. Insentif dimaksud dapat diberikan sepanjang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(f) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD;

(g) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;

(h) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD, penentuan kriteria harus ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah;

(i) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

(j) Tunjangan profesi guru PNSD dan dana tambahan penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2024 melalui dana transfer ke daerah dianggarkan dalam RKA Belanja Operasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang pakai habis guna menunjang kegiatan operasional yang diselenggarakan tiap unit kerja. Anggaran belanja barang dan jasa untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp 209.941.443.206,39 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp203.336.294.992,91 atau 96,85% dari anggaran yang ditetapkan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah dipergunakan untuk menganggarkan pemberian hibah, dengan anggaran hibah untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp 42.430.935.486,70 dengan realisasi sampai 31 Desember 2024 senilai Rp41.571.650.615,00 atau 97,97% yang diberikan kepada:

(a) Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah;

(b) Organisasi kemasyarakatan, diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang telah dibentuk berdasarkan peraturan per Undang-Undangan (memiliki akta notaris);

(c) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan

(d) Penganggaran hibah dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

4) Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, bantuan sosial berupa uang atau barang. Anggaran bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp44.500.000,00 realisasi sampai 31 Desember 2024 senilai Rp18.500.000,,00 atau 41,57% yang diberikan kepada:

(a) Anggota/kelompok masyarakat yang meliputi individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

(b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial; dan

(c) Penganggaran bantuan sosial dalam bentuk uang dan barang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Daerah atas dasar rekomendasi SKPD.

b) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan belanja yang dianggarkan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp146.739.840.857,22 direalisasikan senilai Rp139.134.589.716,00 atau 94,82%.

c) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional, Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun 2024 senilai Rp616.770.079,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2024 senilai Rp475.105.500,00 atau 77,03%, mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan berpengaruh terhadap pemerintah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti:

1) Kebutuhan tanggap darurat;
2) Penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
3) Dana pendamping DAK yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

d) Transfer Bantuan Keuangan

Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah mengalokasikan anggaran Alokasi Dana Desa dalam APBD sebesar 10% dari dana DAU ditambah DBH non earmarked yang diterima daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa (DD).

Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dianggarkan untuk Tahun Anggaran 2024 senilai Rp88.823.663.300,00 dengan realisasi sampai 31 Desember 2024 senilai Rp88.823.663.300,00 atau 100,00% yang terdiri dari:

1) Alokasi Dana Desa (ADD) APBD dianggarkan senilai Rp36.927.448.300,00 dengan realisasi senilai Rp36.927.448.300,00 atau 100,00%.
2) Dana Desa (DD) APBN dianggarkan senilai Rp51.461.215.000,00 dengan realisasi senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100%.
3) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa dianggarkan senilai Rp435.000.000,00 dengan realisasi senilai Rp435.000.000,00 atau 100,00%.

d. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Kendala yang Dihadapi

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menghadapi beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa tantangan tersebut teridentifikasi sebagai berikut:

a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah;
b) Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan
c) Terbatasnya jumlah dan kapabilitas aparatur Pemerintah Daerah.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam pelaksanaan Tahun Anggaran 2024 ini, kebijakan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah:

a) Akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan belanja daerah;
b) Alokasi belanja daerah sesuai skala prioritas dalam rangka memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
c) Pemenuhan kebutuhan data dan informasi dalam rangka memenuhi prasyarat usulan pembangunan infrastruktur kawasan pemerintahan, jalan dan jembatan, kesehatan, pendidikan, pertanian, kawasan permukiman, dan pemberdayaan masyarakat; dan
d) Peningkatan pemahaman dan kompetensi aparatur Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melalui penajaman visi dan misi dalam penyelenggaraan tugas.
e) Pemantapan infrastruktur dasar untuk penguatan perekonomian rakyat berbasis agribisnis agropolitan didukung pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman.

e. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

1. Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan urusan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, dilaksanakan sesuai urusan pemerintahan daerah yang mendasar untuk dilaksanakan oleh daerah otonomi baru. Sehingga kebijakan yang akan dilaksanakan adalah prioritas belanja daerah pada upaya memenuhi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah.

2. Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah yang telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Di tahun 2024 dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah .

Adapun SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintah fungsi penunjang, yang dilaksanakan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a) Sekretariat Daerah, terdiri dari 9 (sembilan) Bagian yaitu:
   1) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
   2) Bagian Pemerintahan;
   3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
   4) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
   5) Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan;
   6) Bagian Administrasi Pembangunan;
   7) Bagian Umum;
   8) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
   9) Bagian Hukum dan HAM.
b) Sekretariat DPRD;
c) Inspektorat Daerah;
d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e) Dinas Kesehatan;
f) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
h) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i) Dinas Sosial;
j) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
k) Dinas Lingkungan Hidup;
l) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
m) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
n) Dinas Perhubungan;
o) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
p) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

q) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
r) Dinas Perikanan;
s) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
t) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
u) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
v) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
w) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
x) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
y) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
aa) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
bb) Rumah Sakit Umum Daerah;
cc) Kecamatan, yang terdiri dari 5 (lima) Kecamatan, yaitu:
    1) Kecamatan Tobadak;
    2) Kecamatan Topoyo;
    3) Kecamatan Karossa;
    4) Kecamatan Budong-Budong;
    5) Kecamatan Pangale.

SKPD yang menangani urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintah fungsi penunjang, tersebut dapat diuraikan di bawah ini:

a) Urusan Wajib Pelayanan Dasar
    1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    2) Dinas Kesehatan;
    3) Rumah Sakit Umum Daerah;
    4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
    5) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan;
    6) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
    7) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
    8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
    9) Dinas Sosial.

b) Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
    1) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
    2) Dinas Lingkungan Hidup;
    3) Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil;
    4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
    6) Dinas Perhubungan;
    7) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
    8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
    9) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

c) Urusan Pilihan
    1) Dinas Perikanan;
    2) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
    3) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
    4) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

d) Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
    1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
    3) Sekretariat Daerah;
    4) Bagian Administrasi Pemerintahan;
    5) Bagian Kesejahteraan;
    6) Bagian Pemerintahan;
    7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
    8) Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
    9) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;

10) Bagian Administrasi Pembangunan;
11) Bagian Hukum dan HAM;
12) Bagian Umum;
13) Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
14) Sekretariat DPRD;
15) Kecamatan Tobadak;
16) Kecamatan Topoyo;
17) Kecamatan Karossa;
18) Kecamatan Budong-Budong;
19) Kecamatan Pangale;
20) Inspektorat Daerah;
21) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
22) Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
23) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Kebijakan belanja daerah untuk pelaksanaan tugas SKPD didasarkan pada upaya pemenuhan kebutuhan pelaksanaan tugas yang mendasar sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan data dan informasi dalam rangka penyusunan perencanaan program dan kegiatan tahun depan.

Adapun pemenuhan kebutuhan dasar tersebut lebih kepada penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyelenggaraan program dan kegiatan urusan *desentralisasi* masing-masing SKPD dan pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Pusat, serta lembaga/instansi terkait pelaksanaan rencana kerja Tahun Anggaran 2024.

f. Berdasarkan Jenis Belanja yang Terkait Langsung dengan Program dan Kegiatan

Penganggaran belanja yang terkait langsung dengan program dan kegiatan (belanja) dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan SKPD, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, dan *top-down* dan *bottom-up*;
2. Penyusunan RKA-SKPD wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Analisis Standar Belanja (ASB), dan Standar Harga Satuan (SHS) yang telah ditetapkan. ASB dan SHS ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah; dan
3. Setiap belanja yang dicantumkan dalam suatu kegiatan harus mencerminkan nama kegiatan dan indikator kinerja serta hubungan langsung dari kegiatan tersebut.

Jenis belanja dirinci lebih lanjut ke dalam jenis-jenis belanja sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang yang diberikan kepada pegawai pemerintah (pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS) yang bertugas untuk kepentingan daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai *output* dalam kategori belanja barang dialokasikan bersamaan dengan belanja barang/modal tersebut.

2. Belanja Barang dan Jasa

   Belanja barang dan jasa, dipergunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan barang yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 sampai dengan Pasal 63.

3. Belanja Modal

   Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah nilai aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (12 bulan) serta melebihi batas minimal kapitalisasi aset atau aset lainnya yang dialokasikan sebesar biaya belanja modal ditambah dengan biaya-biaya pendukung lainnya sampai dengan belanja tersebut siap digunakan. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja atau dipergunakan oleh masyarakat/publik namun tercatat dalam registrasi aset SKPD terkait serta bukan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat atau pihak ke tiga.

4. *Surplus/(Defisit)*

Kebijakan daerah di Tahun Anggaran 2024 adalah bersaldo nol. Namun dalam proses penganggaran program dan kegiatan SKPD diperkirakan akan mengalami *defisit*, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang dan/atau dapat melakukan efisiensi belanja SKPD.

Kebijakan defisit dapat dilakukan dengan mempedomani batas maksimal defisit APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan melaporkan posisi *surplus/defisit* APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester Tahun Anggaran 2024.

5. Pembiayaan Daerah

Sebagai daerah otonomi baru, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah merencanakan anggaran untuk Pembiayaan Daerah baik itu Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan, berupa penyertaan modal (investasi) pemerintah pada Badan Usaha Milik Daerah yaitu Bank Sulselbar, yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal.

6. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nol. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, *volume* program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal perhitungan SILPA tahun berjalan negatif, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatan.

g. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target

Berkaitan dengan kebijakan pendapatan daerah, strategi yang akan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mencapai target atau meningkatkan pencapaian target pendapatan yang diarahkan pada pemantapan landasan ekonomi daerah yang mandiri, antara lain adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim yang kondusif;
3. Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan- hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
4. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
5. Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, Pemerintah Daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta;
6. Struktur ekonomi daerah diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
7. Mengoptimalkan pendapatan melalui *intensifikasi*, *ekstensifikasi* dan *diversifikasi* sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
8. Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah, melalui *profesionalisme* manajemen; dan
9. Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.

h. Kebijakan Pembangunan Daerah

Sebagai Daerah Otonomi Baru, pada Tahun Anggaran 2024 Kebijakan Umum Anggaran yang akan dilaksanakan merupakan penjabaran dari empat tugas Bupati Mamuju Tengah serta berpedoman pada RPJMD Provinsi dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2024, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Integrasi perencanaan pembangunan yang diperoleh secara sistematis dan berjenjang melalui mekanisme musrenbang baik aspirasi dari kebutuhan masyarakat maupun kebijakan pemerintah adalah diharapkan dapat menjamin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dengan demikian kepentingan hak dan kewajiban masyarakat dapat berjalan secara bersinergi untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana komitmen visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan daerah. Sebagai mana di jelaskan pada tabel berikut :

Tabel 7. 10
Sinergi Kebijakan Pembangunan Pusat dan Daerah Tahun 2024

No	Kebijakan Nasional RI	Kebijakan Provinsi Sulawesi Barat	Kebijakan Kab. Mamuju Tengah
1	Dimensi Pembangunan Manusia;	Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);	Melanjutkan Pembangunan Prasarana Pemerintahan;
2	Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan;	Pengembangan Anak Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;	Melaksanakan PERDA Kelembagaan;
3	Dimensi Pembangunan Pemerataan dan Kewilayahan;	Penurunan Angka Buta Huruf;	Swasembada Pangan dan Restorasi Fungsi Lahan;
4	Kondisi yang diperlukan memuat program untuk peningkatan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, tata kelola dan reformasi birokrasi.	Pengurangan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi dan Balita;	Meningkatkan Infrastruktur Dasar (listrik, air bersih, jalan dan jembatan, serta pertanian);
5		Peningkatan Cakupan Masyarakat terhadap Air Minum, Sanitasi, dan Listrik;	Masyarakat Mamuju Tengah Pintar;
6		Pemenuhan Target Surplus 1 Juta Ton Beras;	Masyarakat Mamuju Tengah Sehat;
7		Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan;	Pemeliharaan Infrastruktur Transportasi Perdesaan;
8		Pemantapan Pelaksanaan Program Bangun Mandar	Bantuan Keuangan Kepada Desa (ADD);
9			Pengelolaan DAS Budong- Budong;
10			Penguatan Infrastruktur Kawasan Pemukiman;
11			Pemantauan dan Pengendalian harga kebutuhan pokok masyarakat;
12			Reformasi Birokrasi;
13			Penanganan Bencana Sosial dan Bencana Alam; dan
14			Pencegahan dan Penanganan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

i. Tantangan dan Upaya Pembangunan Tahun 2024

1. Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Pelayanan dibidang Pendidikan dan Kesehatan adalah dua hal yang memiliki andil atau sumbangan terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Jika kualitas Pendidikan dan Kesehatan baik, maka kualitas Sumber Daya Manusia akan terus meningkat, oleh karena itu menjadi hal yang sangat penting untuk mendapat penanganan yang serius sebagaimana Program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Program MDGS.

Kualitas Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menjadi perhatian yang serius oleh Pemerintah Daerah walaupun data tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah mengalami peningkatan dari 0,10% pada Tahun 2024.

SDM adalah modal utama dalam proses pembangunan, suatu daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik serta memiliki tingkat kesejahteraan yang juga baik, cenderung memiliki kualitas Sumber Daya Manusia yang baik. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tersebut, maka masalah-masalah yang berkaitan dengan Pendidikan dan Kesehatan harus mendapat perhatian yang cukup serius dalam penanganannya.

Untuk meningkatkan IPM dihadapkan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan peningkatan paritas daya beli *(income per kapita)* Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dihadapkan pada tantangan untuk mengurangi angka buta huruf dan meningkatkan angka partisipasi kasar/sekolah serta meningkatkan *income per kapita.* Upaya demikian akan memungkinkan terjadi manakala terdapat pemerataan akses pendidikan ke berbagai penjuru wilayah. Selain itu, juga dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, para siswa akan lebih mudah untuk melanjutkan pendidikan di sekolah-sekolah atau perguruan-perguruan tinggi yang berkualitas. Bagi yang tidak melanjutkan pendidikan, bisa lebih mudah terserap di lapangan kerja, atau bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masalah peningkatan kualitas pendidikan ini juga terkait dengan berbagai jenis pendidikan yang ada. Peningkatan kualitas pendidikan, misalnya, tidak hanya untuk pendidikan formal, tetapi juga informal dan non-formal. Dengan demikian, peningkatan akses dan kualitas pendidikan itu bisa berlangsung lebih menyeluruh.

Selain pendidikan, kesehatan juga masih menjadi isu penting, Umur Harapan Hidup (UHH) di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 adalah 69,68 tahun. Keadaan ini juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, angka kematian ibu, angka kematian bayi, Prevalensi balita gizi buruk dan stunting, penemuan penderita tuberkulosis, penemuan penderita HIV/AIDS, penemuan penderita demam berdarah, penemuan penderita hipertensi, penemuan penderita diabetes melitus, persentase desa/kelurahan universal *child immunization* (UCI).

Karena rendahnya pola pangan yaitu pola kecukupan asupan pangan dan gizi termasuk akses terhadap air bersih. Disamping angka kematian bayi dan ibu yang melahirkan masih perlu perhatian yang serius. Keadaan demikian akan menjadi tantangan di dalam meningkatkan kualitas kesehatan di Kab. Mamuju Tengah. Status gizi balita bersifat labil, karena sangat dipengaruhi pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta, misalnya BBLR, diare, cacingan, demam berdarah, tipes, dan lain-lain. Masih diperlukan adanya upaya peningkatan status gizi bayi dan balita melalui program-program yang terkait dengan kesehatan bayi dan balita. Kesehatan seorang balita sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang terserap dalam tubuh. Kurangnya gizi yang diserap oleh tubuh mengakibatkan seorang balita mudah terserang penyakit, karena gizi memberikan pengaruh yang besar terhadap kekebalan tubuh. Peningkatan gizi pada balita ini dipengaruhi oleh peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, perbaikan ekonomi keluarga, perbaikan perilaku pengasuhan, konsumsi makanan dengan gizi seimbang dan peningkatan kesehatan ibu dan anak. Salah satu akibat kekurangan gizi balita dapat menyebabkan stunting.

Reformasi struktural, yang difokuskan pada:

a. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era *"new normal"*.
b. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dalam pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.

2. Infrastruktur

Salah satu syarat bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketersediaan sarana infrastruktur, khususnya infrastruktur fisik. Infrastruktur fisik akan menunjang proses produksi yang lebih efisien dan efektif, demikian pula proses distribusi hasil produksi. Oleh karena itu, suatu daerah ketika terjadi percepatan perbaikan ekonomi, mau tidak mau harus memperhatikan infrastruktur. Kondisi infrastruktur fisik di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah masih belum memadai bagi berbagai kegiatan masyarakat, khususnya kegiatan ekonomi. Kerusakan jalan, menjadi tidak kondusif bagi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi dan akses kegiatan masyarakat lainnya. Keadaan semacam itu bisa jadi bukan tantangan yang cukup serius manakala terdapat dana yang memadai. Di daerah ini, anggaran untuk kepentingan pembangunan masih relatif terbatas. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Diantaranya adalah pengutamaan pembangunan infrastruktur yang menjadi poros bagi desa satu dengan desa lainnya, atau antara desa dengan kota, dan infrastruktur-infrastruktur lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti pembangunan dan perbaikan dam dan saluran irigasi, serta jalan tani. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada mengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, status jalan dibagi ke dalam lima jenis yaitu, Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota, dan Jalan Desa. Jalan Kabupaten didefinisikan sebagai jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa. Jalan Kabupaten juga bisa berupa jalan sekunder yang tidak masuk sebagai jalan provinsi dan jalan strategis kabupaten, lalu penghubung antar-pusat kegiatan lokal. Kode jalan ini ditandai dengan K4. Pengelolaan dan penanggung jawab jalan kabupaten adalah pemerintah daerah kabupaten baik oleh bupati maupun pejabat yang ditunjuk. Ciri warna marka jalan kabupaten sama dengan jalan provinsi yakni hanya berwarna putih saja, baik terputus maupun garis tanpa putus. Namun biasanya jalan kabupaten memiliki ukuran lebar yang lebih kecil dari jalan provinsi.

Konektivitas antar wilayah kecamatan di Kab. Mamuju Tengah sudah cukup bagus, karena sudah terhubung dengan fasilitas jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan poros desa. Panjang jalan di Kab. Mamuju Tengah pada tahun 2024 mencapai 442,18 kilometer. Berdasarkan Data Dasar Prasarana Jalan (DDI) 2024, untuk jalan kondisi baik 19,12%, kondisi sedang 17,18%, kondisi rusak ringan 0,98%, kondisi rusak berat 74,47%. Jalan provinsi di Kab. Mamuju Tengah ada 2 ruas masing-masing panjang 17 Km dan 8,2 Km dengan total panjang 25,2km . Dengan adanya dana desa diharapkan konektivitas di dalam desa maupun antar desa dapat terhubung dengan baik sehingga tidak ada lagi dusun yang terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur jalan dan modal transportasi yang memadai untuk mendukung konektivitas tersebut sehingga akan mendukung kelancaran mobilitas barang maupun orang, mendorong aksesibilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan serta dapat mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif mudah.

Masalah dibalik realitas ini adalah kondisi infrastruktur jalan yang masih buruk sehingga mempengaruhi aspek ekonomi dan pelayanan di desa. Dari total panjang jalan kabupaten, hanya sekitar 20% dalam kondisi baik. Sebagian besar jalan antar desa serta jalan dari desa ke ibu kota kabupaten masih berstatus jalan tanah dan jalan kerikil. Jalan aspal antar desa atau dari desa ke ibu kota kabupaten sebagian dalam kondisi rusak dan rusak berat. Selain itu, sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibu kota Kabupaten serta sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di ibu kota kecamatan, belum tersedia dengan cukup. Akar masalah dari kondisi ini terkait dengan aspek historis daerah ini yang awalnya merupakan daerah transmigrasi berbasis unit permukiman transmigrasi (UPT), setelah berstatus desa maka jalan antar desa itu sebelumnya merupakan jalan antar UPT yang memerlukan dana dalam jumlah besar untuk pembangunannya. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam pembangunan sarana/prasarana dalam mewujudkan agropolitan di ibukota kabupaten yang ditopang oleh sarana/prasarana pendukung sentra agribisnis di seluruh kecamatan.

3. Kemiskinan dan Ketertinggalan

Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026, dimana kemiskinan termasuk masalah pokok dalam pembangunan Kab. Mamuju Tengah dalam lima tahun kedepan. Menurut SDGs, tujuan yang dituju adalah terhapusnya semua kemiskinan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin di Kab. Mamuju Tengah 9.160 orang, bertambah dibanding tahun 2015 yang sebanyak 8.390 orang. Persentase penduduk miskin tahun 2019 adalah 6,87%, bertambah dibanding tahun 2015 (6,86%). Masalah dibalik kemiskinan ini adalah pengangguran terbuka dan pengangguran tersembunyi serta rendahnya pendapatan masyarakat yang bekerja. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja sendiri sebanyak 10.880 orang, memiliki usaha dan dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 17.499 orang, berusaha dan dibantu buruh tetap sebanyak 1.222 orang, pekerja bebas pertanian 4.004 orang, pekerja bebas non pertanian 3.976 orang. Pekerja pada berbagai jenis pekerjaan utama ini rata-rata memiliki pendapatan rendah. Masalah lain terkait dengan perbedaan sistem nafkah rumah tangga yang mengarah pada kesenjangan. Lebih dari 50% rumah tangga hidup dari sistem nafkah kebun sawit yang hingga saat ini hasil nafkahnya relatif tinggi (di atas garis kemiskinan), bersifat reguler, dan sebagian besar pelakunya adalah bekas transmigran. Berbeda dengan masyarakat nelayan yang bermukim di sepanjang pesisir Kab. Mamuju Tengah yang sistem nafkahnya bergantung pada musim tangkap, teknologinya sederhana, alokasi waktu kerjanya tinggi, dan pendapatannya rendah sehingga hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu penanganan penting dalam bidang perumahan dan penanganan kemiskinan selama lima tahun terakhir adalah pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi Rumah Layak Huni (RLH). Pembangunan RTLH dilakukan secara bersinergi, dengan melibatkan secara langsung komponen masyarakat. Pembangunan RTLH menggunakan berbagai sumber pendanaan meliputi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN melalui

Kementerian Perumahan Rakyat maupun Kementerian Sosial RI. Ada lima kriteria rumah layak huni yaitu Ketahanan dan Keselamatan Bangunan, Kecukupan Luas Ruang Penghuni, Akses Sanitasi Layak, Air Minum Layak dan adanya Luas Pencahayaan dan Pengawasan.

4. Rendahnya Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik

Rendahnya kepuasan masyarakat atas pelayanan publik juga merupakan masalah pokok. Pada tahun 2019, kepuasan masyarakat atas pelayanan pada RSUD, UPTD Air Minum, DPM PTSP Koperasi dan UKM, serta Disdukcapil hanya mencapai kategori C atau Kurang Baik, sementara pelayanan pada Dinas Sosial kategori B atau Baik. Capaian SPM juga belum memenuhi target 100% pada berbagai indikator yakni pelayanan ibu hamil sesuai (76,51%), pelayanan ibu melahirkan (84,88%), pelayanan bayi baru lahir (88,67%), pelayanan kesehatan balita (76,36%), penyediaan air minum sehari-hari (65%), pengelolaan limbah domestik (69%), pelayanan warga terkait penegakan hukum Perda (50%), pelayanan informasi bencana (14%) dan rehabilitas sosial dasar di luar panti 63,90%. Masalah terkait rendahnya kepuasan masyarakat dan capaian SPM terkait dengan keterbatasan sarana-prasarana, teknologi, dan SDM penyelenggara pelayanan. Fasilitas dan tenaga kesehatan, termasuk dokter ahli, untuk pelayanan kesehatan level rumah sakit, puskesmas serta puskesmas pembantu dan jaringannya belum sepenuhnya memenuhi standar dan sebarannya belum menjangkau seluruh penerima layanan terutama layanan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir dan balita. Pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar juga berhadapan dengan masalah terbatasnya jumlah dan kualitas sarana. Demikian halnya dengan tenaga guru yang dari segi jumlah, kualitas dan sebaran belum optimal. Fasilitas pelayanan air minum sehari-hari dan fasilitas sanitasi juga masih terbatas.

5. Pembangunan Pertanian

Masalah pokok urusan pertanian adalah adanya alih fungsi lahan pertanian yang diakibatkan oleh ketidakstabilan harga hasil produksi di tingkat petani. Ketersediaan infrastruktur prasarana pertanian yang kurang memadai seperti jalan tani dan jalan produksi, irigasi teknis untuk mengairi lahan sawah seluas 198 Ha dalam kondisi rusak berat dan sedang. Untuk ketersediaan sarana pertanian yang masih kurang seperti pupuk bersubsidi, bibit dan benih tanaman yang tidak optimal. Dari segi SDM penyuluh pertanian juga menjadi masalah karena kurangnya kualitas pengetahuan SDM penyuluh dan jumlah tenaga penyuluh pertanian organik serta banyaknya penyuluh yang memasuki masa pensiun.

6. Lingkungan

Suatu pembangunan akan bermakna lebih baik manakala memiliki keberlanjutan (*sustainability*). Diantara faktor penting bagi adanya keberlanjutan adalah berkaitan dengan lingkungan. Di daerah ini masalah lingkungan menjadi isu yang sangat penting karena kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berkaitan dengan pemanfaatan sumber-sumber alam. Sektor yang berkaitan dengan pertanian, seperti perkebunan, pertambangan, dan perikanan. Misalnya, sangat jelas tergantung pada masalah lingkungan. Ketika kualitas lingkungan mengalami penurunan, kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam itu juga akan mengalami penurunan.

Lingkungan juga terkait dengan kepentingan ekologi, seperti ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati dan pengaruh perubahan cuaca. Daya dukung lingkungan ini mengalami penurunan, seperti menurunnya sumber mata air untuk kepentingan air bersih dan irigasi. Menurunnya keseimbangan ekosistem dan kualitas udara. Karena itu, tantangan besar bagi daerah ini adalah menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam itu tidak hanya untuk kepentingan sesaat dan jangka pendek, melainkan untuk kelangsungan alam itu sendiri dan kelangsungan pemanfaatannya oleh generasi berikutnya.

Masalah pokok urusan lingkungan hidup adalah degradasi lingkungan dan sumber daya alam yaitu berbagai persoalan seperti deforestasi atau penggundulan hutan, pembuangan limbah dan persampahan. Degradasi lingkungan dapat mengganggu siklus hidrologi dengan dampak pada terjadinya banjir karena luapan air sungai, bencana kebakaran lahan, hutan dan persoalan-persoalan lain yang ditimbulkan dari Degradasi lingkungan dan sumber daya alam. Tercemarnya air sungai karena limbah pabrik utamanya di dua sungai utama yaitu Sungai Budong-Budong dan Sungai Barakkang.

Selain hal tersebut, persoalan lingkungan juga dipicu dari kurangnya sarana prasarana yang mendukung baik dari pengelolaan persampahan maupun air limbah sehingga kondisi persampahan dan air limbah terutama di wilayah Tumbuh perkotaan belum dikelola dengan maksimal, hal lain yang menjadi persoalan adalah belum tersusunnya Dokumen Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) sehingga potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya belum dapat dipetakan dengan baik. Dari segi sumber daya manusia juga masih mengalami kendala yaitu masih sangat kurangnya pejabat pengawas lingkungan hidup yang mengikuti diklat bersertifikat hal ini mengakibatkan tidak maksimalnya Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RKPD Perubahan Tahun 2024 persentase Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,59%, sedangkan berdasarkan Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Mamuju Tengah 2024 sebesar 73,32% dengan predikat baik atau kategori B.

7. Pengawasan

Pengawasan Intern Pemerintah Daerah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah mengamanatkan Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern atas penyelenggara urusan pemerintahan daerah untuk memberikan jaminan (*reasonable assurance*) bahwa pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana secara efektif dan efisien serta mempedomani ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dalam mewujudkan tujuan dan visi Inspektorat, terdapat beberapa kendala – kendala antara lain:

1. Dari segi SDM yaitu kompetensi teknis (adanya kesenjangan antara bimtek/diklat dengan kebutuhan);
2. Dari segi Anggaran yaitu belum adanya jaminan kecukupan anggaran bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
3. Dari segi *Stakeholder*/Auditan yaitu masih kurangnya tanggapan objek pemeriksaan terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Atas beberapa masalah tersebut, Inspektorat berharap dukungan dari Pemerintah Daerah, antara lain:
   a. Program pembinaan Jabatan Fungsional secara periodik bagi APIP;
   b. Dukungan kebijakan anggaran dalam bidang pengawasan APIP;
   c. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan *Good Governance*.

j. Mandatory Spending

1. Pendidikan

Anggaran Pendidikan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp185.714.874.843,00 dari jumlah APBD kesceluruhan senilai Rp715.780.494.691,10 atau 25,95% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang pendidikan senilai Rp182.225.709.039,00 atau 98,12%.

2. Kesehatan

Anggaran Kesehatan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 senilai Rp112.124.261.239,00 dari jumlah APBD keseluruhan diluar gaji senilai Rp545.115.537.966,31 atau 25,66% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Kesehatan senilai Rp108.858.052.115,00 atau 97,09%.

3. Infrastruktur

Anggaran Infrastruktur dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu 25,00% dari DTU senilai Rp192.303.115.568,00 dari jumlah APBD senilai Rp715,780.494.691,10 atau 26,86% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi dari bidang Infrastruktur senilai Rp183.688.384.485,00 atau 95,52%.

4. Alokasi Dana Desa

Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu 10% dari DAU dan DBH senilai Rp36.927.448.300,00 dari jumlah DAU dan DBH senilai Rp382.057.764.000,00 atau 9,67% dari jumlah anggaran. Sedangkan realisasi Alokasi Dana Desa senilai Rp36.927.448.300,00 atau 100%.

5. Transfer Desa

Anggaran Transfer Desa dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu senilai Rp51.461.215.000,00 dari jumlah PAD senilai Rp715,780.494.691,10 sedangkan realisasi Transfer Desa senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100,00%.

6. **Pengawasan**

Anggaran Pengawasan dalam postur APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu senilai Rp4.302.293.596,00 dari jumlah APBD senilai Rp715,780.494.691,10 atau 0,60% sedangkan realisasi pengawasan senilai Rp4.152.688.743,00 atau 96,52%.

7.2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp674.398.741.239,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp52.309.072.127,00 Pendapatan Transfer senilai Rp613.833.052.176,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp8.256.616.936,00.

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp669.951.188.922,24 atau 99,34% yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah senilai Rp52.073.310.252,24 atau 99,55%, Pendapatan Transfer senilai Rp610.185.349.767,00 atau 99,41% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp7.692.528.903,00 atau 93,17%.

Anggaran Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp715.780.494.691,10 yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp479.600.220.454,88, belanja modal senilai Rp146.739.840.857,22 dan belanja tidak terduga senilai Rp616.770.079,00. Untuk Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan senilai Rp88.823.663.300,00.

Realisasi Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp697.458.559.499,91 atau 97,44% yang terdiri dari belanja operasi senilai Rp469.025.200.983,91 atau 97,80%, belanja modal senilai Rp139.134.589.716,00 atau 94,82%, belanja tidak terduga senilai Rp475.105.500,00 atau 77,03% dan transfer bantuan keuangan senilai Rp88.823.663.300,00 atau 100,00%.

Sebagai daerah otonomi baru Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2013-2024 akan berfokus pada pelaksanaan empat tugas yang diemban oleh Bupati Mamuju Tengah, yang akan diuraikan sebagai berikut:

Tugas 1: Pembentukan Struktur Kelembagaan dan Pemerintahan

Tahun 2024 ini merupakan tahun ke 12 (dua belas) efektifnya Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang diawali pelantikan Pj. Bupati Pertama oleh Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 8 Juli 2013 dan pelantikan Bupati Definitif pada tanggal 25 Juli 2014. kemudian mempermantap pembentukan kelembagaan dengan Peraturan Bupati, dengan membentuk beberapa kelembagaan yang terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) asisten yang dibawahi langsung oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari beberapa bagian-bagian, yaitu:
   1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
      a) Bagian Pemerintahan ;
      b) Bagian Kesejahteraan Rakyat;
      c) Bagian Hukum.
   2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
      a) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
      b) Bagian Administrasi Pembangunan; dan
      c) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
   3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
      a) Bagian Umum;
      b) Bagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
      c) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

   Sekretariat DPRD Kabupaten yang selanjutnya disebut Setwan merupakan unsur staf pelayanan terhadap DPRD Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Kabupaten.

   Sekretaris DPRD Kabupaten mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud Setwan mempunyai fungsi:

   1. Fasilitator rapat anggota DPRD;
   2. Pelaksanaan urusan Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Kehumasan dan Protokoler;

3. Pengelolaan administrasi tata usaha DPRD.

c. Staf Ahli

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli. Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Aparatur Sipil Negara. Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah. Staf Ahli Bupati Kab. Mamuju Tengah ada tiga orang dengan jabatan sebagai berikut:

1. Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. Staf Ahli Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan; dan
3. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

d. Dinas daerah yang terdapat di Kab. Mamuju Tengah, terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Dinas, yaitu:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan;
5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Lingkungan Hidup;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
11. Dinas Perhubungan;
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
13. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Dinas Perikanan;
16. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
18. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Transmigrasi dan Tenaga kerja.

e. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kab. Mamuju Tengah yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat yang dapat berbentuk Badan dan/atau Kantor, yang terdiri dari:

1. Inspektorat Daerah;
2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD);
3. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA);
4. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM);
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

f. Kantor Kecamatan, terdiri dari 5 (lima) kantor kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Tobadak;
2. Kecamatan Topoyo;
3. Kecamatan Karossa;
4. Kecamatan Budong-Budong; dan
5. Kecamatan Pangale.

g. Rumah Sakit Umum Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mamuju Tengah adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah, di bidang pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mamuju Tengah mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan Pelayanan Kesehatan (*Caring*);
2. Penyembuhan (*Curing*);
3. Penderita *(Sufferer);*
4. Pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (*Rehabilitation*);
5. Melaksanakan upaya rujukan dan
6. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mamuju Tengah diresmikan pada tanggal 20 Oktober 2014 oleh Bupati. Pada tahun 2017 telah terakreditasi untuk kali pertama dengan predikat perdana bintang satu, dengan kelas (tipe D) kemudian pada tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) telah melaksanakan *survey* akreditasi ke 2 (dua) dengan Predikat Paripurna bintang Lima. Pada Tahun 2024 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab. Mamuju Tengah telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai Surat Keputusan Bupati Mamuju Tengah Nomor 188.4.45/569/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023.

h. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah. telah diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Mamuju Tengah.

Menindaklanjuti pembentukan kelembagaannya, pengisian eselonisasi dalam lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mulai Tahun 2014 - 2024, telah dilaksanakan sebanyak 18 (Delapan Belas) kali pengambilan sumpah jabatan, baik itu eselon II, III, IV dan Jabatan Fungsional, sebagai berikut:

1. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2014;
2. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon III dan Eselon IV, dilaksanakan pada tanggal 5 September 2014;
3. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II dan Eselon, dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2016;
4. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2017;
5. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV dan Eselon II, dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2021;
6. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Penyetaraan Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 29 Desember 2021;
7. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Eselon IV-A dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 07 Januari 2022;
8. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
9. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon III-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 04 April 2022;
10. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Eselon IV-A dan Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 09 Mei 2022; dan
11. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II-B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2022.
12. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Fungsional dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 30 Desember 2022.
13. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A Eselon III B Eselon IV A Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 31 Januari 2023
14. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III, B, Eselon IV A, dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 11 April 2023.
15. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A, Eselon IV B dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 27 Oktober 2023.

16. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B, Eselon III A, Eselon III B, Eselon IV A dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 27 Mei 2024.
17. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Pejabat Sekretaris Daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 02 September 2024.
18. Pengambilan Sumpah dan Pelantikan dalam Jabatan Administrator Eselon II B,dalam Lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tanggal 28 Oktober 2024.

Masalah pokok urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil di Kab. Mamuju Tengah yang masih sangat kurang. Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara merupakan kebutuhan yang mendasar dalam penyelenggaraan birokrasi pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sangatlah diperlukan sebagai faktor penunjang keberlangsungan penyelenggaraan tata kelola birokrasi pada Pemerintah Daerah sehingga dapat berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Kab. Mamuju Tengah yang masih sangat terbatas, sehingga hal inilah yang menjadi faktor utama sampai dengan saat ini masih terdapat posisi jabatan yang belum terisi atau kosong, dimana tercatat sebanyak 139 jabatan yang kosong dari jumlah keseluruhan jabatan yaitu 296 jabatan, angka tersebut dilihat dari jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan fungsional pada instansi pemerintah daerah yang belum mencapai interpretasi. Hal tersebut disebabkan masih banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum memenuhi kualifikasi atau standar kompetensi untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut. Sebagaimana telah diamanatkan di dalam PP 17 Tahun 2020 perubahan atas PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengembangan karier, pemenuhan kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil belum bisa terlaksana secara baik dan optimal. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya serta alokasi anggaran untuk diklat kepemimpinan masih melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan tidak terpusat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN. Hal ini dapat dilihat dari persentase rata-rata lama pegawai yang mendapat pendidikan dan pelatihan, persentase pejabat ASN yang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan serta persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan formal, dimana ketiga substansi tersebut juga masih belum mencapai interpretasi. Sehingga kedepannya perlu adanya penambahan alokasi anggaran baik untuk pelaksanaan diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kediklatan lainnya yang kemudian pelaksanaannyapun baik itu berupa diklat kepemimpinan ataupun kediklatan lainnya semua pelaksanaannya terpusat atau dipusatkan secara satu pintu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melalui Bidang Pengembangan Karier ASN

Tugas 2: Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dimana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yaitu urusan Wajib pelayanan dasar menjadi delapan, urusan wajib bukan pelayanan dasar menjadi sembilan, urusan pilihan menjadi lima, dan urusan pemerintah fungsi penunjang menjadi 15.

Tugas 3 : Pengisian Keanggotaan DPRD Kab. Mamuju Tengah Hasil Pemilu 2024

Jumlah Anggota DPRD Kab. Mamuju Tengah berdasarkan hasil Pemilu 2024, dilantik sebanyak 25 (Dua Puluh Lima) orang, yang terdiri dari:

a. 3 (Tiga) orang Unsur Pimpinan, terdiri dari: 1 orang Ketua, 2 orang Wakil Ketua
b. 3 (Tiga) orang Unsur Komisi, terdiri dari Komisi I berjumlah 7 orang anggota, Komisi II 8 orang anggota dan Komisi III 7 orang anggota

Tugas 4 : Memfasilitasi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kab. Mamuju Tengah

Memfasilitasi Pemilukada Kab. Mamuju Tengah yang dilaksanakan di Tahun 2024 merupakan tugas keempat atau terakhir dari Bupati Mamuju Tengah, dan untuk pertama kalinya Pemilihan Bupati definitif sejak terbentuk menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) adalah di Tahun 2016. Bupati Mamuju Tengah menyusun dan menetapkan program dan kegiatan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 yang mendukung seluruh kelancaran pemilihan kepala daerah yang ke tiga yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 November 2024 yang lalu.

Berdasarkan Empat Tugas yang diemban Bupati Mamuju Tengah dan masalah daerah yang mendesak untuk dilaksanakan maka, isu strategis kabupaten dalam Rencana Kerja Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Penyelesaian Rancangan RT-RW untuk dijadikan program legislasi daerah. Adapun *progress* penyiapan RT-RW dari Tahun 2014-2024, antara lain:
   1. Konsultasi ke BPKRD;
   2. Konsultasi ke BPKRN;
   3. Asistensi Pemetaan BIG Tahap II (Peta Tematik);
   4. *Clearing House* dalam rangka evaluasi hasil-hasil tindak lanjut konsultasi dengan BPKRD Kabupaten dan Provinsi; dan
   5. Konsultasi ke Kementerian Agraria untuk memperoleh rekomendasi substansi teknis.

b. Penurunan Anak Putus Sekolah setiap jenjang sekolah. Salah satu indikator peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan pendidikan adalah penurunan angka putus sekolah (APS) di setiap jenjang pendidikan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam mendorong dan menarik kembali anak-anak yang putus sekolah sehingga mampu merasakan pelayanan pendidikan sebagai pelayanan dasar;

c. Penurunan Angka Kematian Ibu Melahirkan, Bayi, dan Balita. Salah satu indikator peningkatan kualitas pemerataan pelayanan kesehatan serta peningkatan kualitas keluarga adalah menurunnya angka kematian ibu melahirkan, bayi, dan balita. Indikator ini harus terpenuhi melalui ketersediaan tenaga medis yang memiliki kompetensi, prasarana dan sarana medis yang memadai dalam membantu ibu, bayi dan balita mendapatkan hak dasarnya;

d. Peningkatan infrastruktur, sebagai berikut:
   1. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air bersih/minum. Kab. Mamuju Tengah khususnya di sekitar Kecamatan Topoyo dan Tobadak yang merupakan kecamatan berpenduduk terbesar, belum memiliki jaringan air bersih/minum yang memadai untuk didistribusikan ke rumah-rumah penduduk. Berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah antara lain dengan memanfaatkan air permukaan, sumur bor dan mata air. Selain itu Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum diharapkan dapat membantu pelayanan air bersih/minum di wilayah ini;
   2. Pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan. Prasarana jaringan jalan dan jembatan yang ada di kabupaten ini kondisinya sangat belum cukup memadai, sehingga belum mampu secara maksimal menunjang pola pergerakan orang dan barang dalam menunjang kegiatan perekonomian masyarakat dan daerah;
   3. Pengembangan dan pengelolaan jaringan air dan irigasi. Dalam rangka peningkatan potensi sektor pertanian yang merupakan sektor kontribusi PDRB terbesar atau sektor yang penduduk bermata pencaharian terbesar untuk tetap dan meningkatkan sektor ini dengan masih minimnya prasarana pertanian maka perlu untuk pemeliharaan dan peningkatan jaringan air bersih dan irigasi/saluran pembuang serta pembangunan talud/turap/bronjong yang mampu mengaliri daerah pertanian dan perkebunan masyarakat;
   4. Peningkatan jaringan listrik. Secara umum pelayanan dan keterjangkauan listrik di daerah ini sudah sampai masuk ke desa-desa dan dirasakan oleh semua golongan masyarakat, namun kenyataannya pemadaman listrik seringnya terjadi karena belum dapat terpenuhinya kebutuhan daya listrik; dan
   5. Sarana transportasi berupa armada-armada transportasi (transportasi darat, transportasi air), dan prasarana transportasi diharapkan dapat menunjang arus transportasi dalam dan luar daerah.

e. Reformasi Birokrasi. Dalam menyinkronkan program pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah dalam mendukung pencapaian reformasi birokrasi yang bermuara pada pemerintahan yang bersih, maka perlu tatanan birokrasi Kab. Mamuju Tengah berupa Kegiatan Penataan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Kapasitas Aparatur, Penyusunan dan Penyelenggaraan SPM dan SOP SKPD;

f. Penanganan Pasca bencana dan Pengendalian Bencana Alam. Daerah ini merupakan daerah rawan bencana terutama air bah yang berasal dari hulu sungai, sungai yang berpotensi tersebut adalah Sungai Salulebo, Sungai Budong-budong, Sungai Antalili, Sungai Salowadak, Sungai Lumu, Sungai Salubarana dan Sungai Tasokko. Untuk itu penanganan pasca bencana dan pengendalian bencana alam diperlukan;

g. Pemberdayaan masyarakat dan Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha masyarakat. Daerah ini sangat kaya akan sumber daya alam utamanya di sektor pertanian/perkebunan, yang hasilnya boleh dijadikan produk olahan sehingga mampu membuka

usaha kewirausahaan lokal namun belum tersentuh, untuk itu perlu merangsang hal tersebut melalui bantuan pembinaan dan permodalan, melalui program usaha ekonomi masyarakat;

h. Penguatan Lembaga Desa berupa program Bangun Desaku. Banyaknya prasarana yang perlu untuk dibenah dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa, untuk itu perlu memberikan bantuan keuangan yang dapat dikelola langsung secara swakelola oleh masyarakat dan aparat desa; dan

i. Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Jumlah PNS menurut Eselon: dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. 11
Jumlah PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II			
	II/A		-	
	II/B	28	4	32
2	Eselon III			
	III/A	36	6	42
	III/B	60	25	85
3	Eselon IV			
	IV/A	50	38	88
	IV/B	6	4	10
4	Fungsional Umum (OPD,PKM,RSUD)	81	61	142
5	Fungsional Tertentu OPD	112	56	168
6	Fungsional Tertentu (PKS,RSUD)	52	234	286
7	Fungsional Tertentu (Sekolah)	341	476	817
8	Fungsional Umum (Sekolah)	5	9	14
Jumlah Eselon		**180**	**77**	**257**
Jumlah Non Eselon		**591**	**836**	**1427**

Tabel 7. 12
Jumlah PNS dan PPPK berdasarkan Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	**Golongan I**			
	I/C	-	-	-
	I/d	-	-	-
2	**Golongan II**			
	II/a	7		7
	II/b	11	9	20
	II/c	22	13	35
	II/d	24	69	93
	Total Golongan II	64	91	155
3	**Golongan III**			
	III/a	66	134	200
	III/b	215	295	510
	III/c	144	130	274
	III/d	87	111	198
	Total Golongan III	512	670	182
4	**Golongan IV**			
	IV/a	88	64	152
	IV/b	89	85	174
	IV/c	18	3	21
	IV/d	195	152	347
	Total Golongan IV	390	304	694

No	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah ASN (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
5	**Golongan VII**	61	220	281
6	**Golongan IX**	146	38	618
7	**Golongan X**	22	730	60
	Total P3K	229	730	959
	2023	**977**	**1.474**	**2.451**
	2024	**1.000**	**1.643**	**2.643**

Tabel 7. 13
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT)

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	LAKI-LAKI	1.080
2	PEREMPUAN	1.021
2024		**2.101**
2023		**2.676**

7.3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1. Visi dan Misi Pembangunan Kab. Mamuju Tengah

Aspek penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah visi dan misi yang merupakan cerminan tujuan serta proses pencapaiannya. Pada hakikatnya membentuk visi Pemerintah berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan yang pada akhirnya menjadi akselerator, termasuk menjadi pedoman dalam pengelolaan perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengembangan, pengukuran dan evaluasi kinerja daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kab. Mamuju Tengah dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa Tugas Bupati Mamuju Tengah sebagai berikut:

a. Kemandirian Daerah;
b. Bingkai *lalla tassisara'* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah dan
c. Kesejahteraan masyarakat.

Muara dari visi ini adalah kesejahteraan masyarakat, hulu dari visi ini adalah kemandirian daerah, sementara jembatan antara hulu dan hilir tersebut adalah bingkai *lalla tassisara'* melalui gerakan bersama membangun Mamuju Tengah.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi Pembangunan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah maka ditetapkan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2024 dinyatakan sebagai Gerbang - 8 sebagai berikut:

a. Percepatan peningkatan infrastruktur dasar meliputi perbaikan kualitas jalan dan jembatan, sarana dan prasarana air bersih, sumber energi listrik serta energi yang lain untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
b. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur kesehatan melalui peningkatan layanan rumah sakit, puskesmas dan pustu serta sumber daya manusia di bidang kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat;
c. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan untuk menciptakan generasi yang berkualitas, terandalkan dan bermoral;
d. Peningkatan dan penyediaan infrastruktur dan prasarana pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sebagai sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat;
e. Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki berdasarkan kondisi wilayah di setiap kecamatan;
f. Mendorong terwujudnya kualitas pelayanan birokrasi dan pemerintahan yang bersih, jujur dan bermartabat serta berdaya saing;
g. Mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan Masyarakat Mamuju Tengah melalui toleransi antar umat beragama serta perlindungan hak asasi manusia; dan
h. Mendorong terpeliharanya nilai-nilai keagamaan, budaya, kearifan lokal, tradisi dan keyakinan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan ras di wilayah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Prioritas dan sasaran pembangunan adalah gambaran dari prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah di dalam RPJMD pada tahun rencana yaitu pada Tahun 2024. Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 diprioritaskan untuk:

a. Pemulihan ekonomi, yang difokuskan terhadap :
   1. Peningkatan produktivitas dan kualitas produk ekonomi (barang dan jasa). Hal ini didukung dengan pengolahan komoditi potensial dan produk pangan organik, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, perikanan dan UMKM;
   2. Resiliensi Kesehatan terhadap pandemi *Covid-19*. Tahun 2024 diharapkan menjadi tahun perbaikan bagi kondisi ekonomi yang sempat menurun akibat pandemi *Covid-19*. Untuk mendukung relaksasi pemulihan ekonomi dibutuhkan antisipasi dalam penanganan *Covid-19* dengan cara fasilitasi pelaksanaan vaksinasi masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap kemungkinan lonjakan penderita *Covid-19*.
b. Infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah, yang difokuskan pada: mengefektifkan daya dukung infrastruktur dasar dan pendukungnya yaitu penguatan infrastruktur komunikasi dan informasi, pengelolaan lingkungan dan bangunan serta pembangunan infrastruktur transportasi perdesaan.
c. Reformasi struktural, yang difokuskan pada:
   1. Reformasi pelayanan Pendidikan dan Kesehatan serta transformasi digital. Dengan mengedepankan inovasi di bidang Pendidikan dan Kesehatan menghadapi era *"new normal"*.
   2. Reformasi iklim investasi daerah, dengan melakukan inovasi dan pengembangan investasi daerah serta promosi potensi daerah.
d. Penanggulangan Kemiskinan, yang difokuskan pada:
   1. Peningkatan pendapatan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kompetensi penduduk usia kerja.
   2. Pemberdayaan masyarakat miskin berbasis kelompok, melalui bantuan sosial masyarakat miskin dan peningkatan kapasitas kelompok ekonomi masyarakat.
e. Reformasi Birokrasi, yang difokuskan pada akselerasi tujuan reformasi birokrasi dengan cara peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kelembagaan, penguatan tatalaksana dan penguatan sistem pengawasan.

7.3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Dalam Tahun Anggaran 2024, direncanakan penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam APBD setelah perubahan senilai Rp674.398.741.239,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah senilai Rp52.309.072.127,00 pendapatan dana perimbangan/transfer senilai Rp613.833.052.176,00 serta lain-lain pendapatan daerah yang sah senilai Rp8.256.616.936,00 penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja daerah senilai Rp715.780.494.691,10 terdiri dari belanja operasi senilai Rp479.600.220.454,88, Belanja modal senilai Rp146.739.840.857,22 dan belanja tak terduga senilai Rp616.770.079,00. Sedangkan untuk transfer bantuan keuangan senilai Rp88.823.663.300,00

Dengan komposisi seperti tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mengalami *defisit* anggaran senilai Rp41.381.753.452,10. Defisit ini akan ditutupi dari pembiayaan netto yang mengalami *surplus* senilai Rp41.381.753.452,10. Sebagaimana diuaraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 14
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA.2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	Uraian	2024			2023
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	674.398.741.239,00	669.951.188.922,24	99,34	670.474.668.815,66
2	Belanja	715.780.494.691,10	697.458.559.499,91	97.44	632.249.115.552,00
3	Surplus/ Defisit	(41.381.753.452,10)	(27.507.370.577,67)	66,47	38.225.553.263,66
4	Pembiayaan Netto	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	100,00	3.156.200.188,44
5	SiLPA	0,00	13.874.382.874,43	0,00	41.381.753.452,10

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Tahun Anggaran 2024 secara umum untuk pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rincian pendapatan daerah dalam Perubahan APBD pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah dianggarkan senilai Rp52.309.072.127,00 dan terealisasi senilai Rp52.073.310.252,24 atau 99,55%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:
   a) Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp12.993.479.302,00 terealisasi senilai Rp12.064.921.118,00 atau 92,85%;
   b) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ini direncanakan senilai Rp15.747.142.378,00 terealisasi senilai Rp14.041.286.339,00atau 89,17%;
   c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2024 ini direncanakan senilai Rp1.980.000.000,00 terealisasi senilai Rp729.061.014,00 atau 36,82%; dan
   d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada perubahan anggaran senilai Rp21.588.450.447,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp25.238.041.781,24 atau 116,91%.
2. Pendapatan Transfer pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp613.833.052.176,00 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp610.185.349.767,00 atau 99,41% dengan rincian sebagai berikut:
   a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp587.932.352.000,00 realisasi sampai akhir Tahun 2024 senilai Rp583.771.260.129,00 atau 99,29%, yang terdiri dari:
      1) Dana Bagi Hasil dianggarkan senilai Rp11.880.365.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp12.479.058.000,00 atau 105,04% sampai akhir Tahun Anggaran 2024;
      2) Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai Rp370.177.399.000,00 sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasi senilai Rp369.183.892.749,00 atau 99,73% sampai akhir Tahun Anggaran 2024;
      3) Dana Alokasi Khusus Fisik dianggarkan senilai Rp82.474.072.000,00 dan terealisasi senilai Rp82.048.913.591,00 atau 99,48% sampai akhir Tahun Anggaran 2024;
      4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik dianggarkan senilai Rp71.939.301.000,00 dan terealisasi senilai Rp68.598.180.789,00 atau 95,36% sampai akhir Tahun Anggaran 2024.
   b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang dianggarkan senilai Rp51.461.215.000,00 dan terealisasi senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100,00% pada akhir Tahun Anggaran 2024. dengan rincian sebagai berikut:
      1) Dana Insentif Fiskal dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% sampai akhir Tahun Anggaran 2024.
      2) Dana Desa dianggarkan senilai Rp51.461.215.000,00 dan terealisasi senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100,00% pada akhir Tahun Anggaran 2024.
   c) Pendapatan Transfer antar Daerah yang dianggarkan senilai Rp25.900.700.176,00 dan terealisasi senilai Rp26.414.089.638,00 atau 101,98% pada akhir Tahun Anggaran 2024. dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp25.900.700.176,00 dan terealisasi senilai Rp3.754.610.082,00 atau 14,50%.
      2) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp5.352.561.968,00 atau 0,00%.
      3) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp8.357.499.019,00 atau 0,00%.
      4) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp17.334.878,00 atau 0,00%.
      5) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok dianggarkan senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp8.932.083.691,00 atau 0,00%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp8.256.616.936,00 dan terealisasi senilai Rp7.692.528.903,00 atau 93,17% pada akhir Tahun Anggaran 2024. dengan rincian sebagai berikut:
      1) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) senilai Rp8.256.616.936,00 dan terealisasi senilai Rp7.692.528.903,00 atau 93,17%.

b. Belanja

Pada perubahan anggaran tahun 2024, program dan kegiatan Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dianggarkan ke dalam belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal dan belanja tidak terduga. Di dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dialokasikan dana untuk belanja daerah senilai Rp715.780.494.691,10 yang sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dapat terealisasikan senilai Rp697.458.559.499,91 atau 97,44%, dengan prioritas mendukung peningkatan profesionalisme aparatur *(personal capacity building)* Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi vital, peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga baik dalam negeri maupun luar negeri, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan pemerintahan yang peduli lingkungan, yang sesuai dengan slogan *lalla tassi'sara* membangun Mamuju Tengah, serta dengan tetap menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai agar tetap dapat difungsikan secara maksimal.

c. Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber pembiayaan pada Badan/Dinas/Kantor Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam rangka pelaksanaan *desentralisasi*, terdapat pada Pembiayaan Penerimaan Daerah.

Pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp41.381.753.452,10 dan pada akhir tahun anggaran dapat direalisasikan senilai Rp41.381.753.452.10 atau 100,00% dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Tahun 2024 setelah perubahan dianggarkan senilai Rp0.00.

7.3.3. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja dalam yang tercantum dalam APBD yang telah ditetapkan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

a. Masih terbatasnya tenaga teknis baik kuantitas dan kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya;
b. Belum samanya persepsi pelaksana tugas dalam mengoperasionalkan kegiatan;
c. Belum maksimalnya koordinasi intern di SKPD diantara pelaku yang terkait pelaksanaan kegiatan dan pengelola keuangan dan pengelola barang di SKPD ;
d. *Fluktuasi* harga barang dan jasa mempengaruhi pelaksanaan kegiatan
e. Tingkat pemahaman masyarakat dalam implementasi pembangunan belum seragam sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda;
f. Belum adanya sistem *reward* (penghargaan terhadap prestasi) dan *punishment* (sanksi) bagi aparatur pengelola keuangan;
g. Teknologi informasi belum diterapkan secara maksimal dalam penatausahaan keuangan, administrasi dan pelayanan publik; dan
h. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai program-program pembangunan.

7.3.4. Prosedur yang telah dijalankan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Prosedur pengelolaan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual bagi Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
d. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 31/PER-BUP/XII/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang telah diubah menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Yang telah dilakukan perubahan menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

7.4. Kebijakan Akuntansi

7.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan per Undang-Undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Keuangan yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Sedangkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah:

a. Basis akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.

1. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah;
2. Basis akrual untuk Laporan Operasional dan Neraca berarti bahwa Pendapatan-LO, Beban, aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

b. Prinsip nilai perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi.

c. Prinsip realisasi

Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama satu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja/beban daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip substansi mengungguli formalitas

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip periodisitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode semesteran juga diperkenankan.

f. Prinsip konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh Pemerintah Daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

g. Prinsip pengungkapan lengkap (*Full Disclosure Principle*)

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

h. Prinsip penyajian wajar *(Fair Presentation Principle)*

Laporan keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak netral dan tidak andal.

Prinsip ini akan menentukan dasar yang akan digunakan untuk mencatat pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana. Berdasarkan prinsip ini maka akan ditentukan dalam periode mana/kapan pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban dan ekuitas dana akan dilaporkan.

7.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

a. Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan;

   Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perUndang-Undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

   Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

b. Beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban;

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

2. Terjadinya konsumsi aset;

   Konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

   Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu.

c. Pendapatan LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah.

d. Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi Perbendaharaan dengan diterbitkannya SP2D GU/ LPJ UP/TU.

e. Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Daerah sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah.

f. Transaksi dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

g. Kas dan setara kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Uang tunai terdiri atas uang kertas dan logam. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) Uang Persediaan (UP) Yang Belum di dipertanggungjawabkan hingga tanggal neraca. Termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari tiga bulan sejak tanggal perolehannya.

Pengakuan saat diterima atau dikeluarkan dan dinilai berdasarkan nilai nominal uang. Apabila ada kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi.

Kas terdiri atas Kas di Umum Daerah, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Setara kas terdiri atas simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

h. Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah serta dimiliki sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek terdiri dari Deposito Berjangka tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis *(revolving deposits)* serta pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Investasi jangka pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan.

Pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

i. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan per Undang-Undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan piutang terjadi pada akhir periode ketika akan disusun neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang Piutang yang belum dilunasi atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang yaitu pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Agar nilai piutang sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) maka disesuaikan dengan melakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya piutang sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang.

j. Piutang lain-lain

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. Piutang lain-lain terdiri dari :

1. Piutang bagian lancar penjualan angsuran;
2. Piutang ganti rugi atas kekayaan daerah;
3. Piutang hasil penjualan barang milik daerah;
4. Piutang dividen;
5. Piutang bagi hasil laba usaha perusahaan daerah; dan
6. Piutang fasilitas sosial dan fasilitas umum.

k. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan Pemerintah Daerah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*).

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
2. Biaya standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
3. Nilai wajar jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi/rampasan.

Persediaan antara lain terdiri dari:

1. Persediaan alat tulis kantor;
2. Persediaan alat listrik;
3. Persediaan material/bahan;
4. Persediaan benda pos;
5. Persediaan bahan bakar; dan
6. Persediaan bahan makanan pokok.

l. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; dan
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode, yaitu:

1. Metode biaya

   Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kriterianya adalah kepemilikan kurang dari 20%;

2. Metode ekuitas

   Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh *valuta* asing serta *revaluasi* aset tetap. Kriterianya adalah kepemilikan 20% sampai 50% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50%. Investasi Jangka panjang terdiri dari:

   a) Investasi Permanen yaitu: investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Terdiri dari: penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara serta investasi permanen lainnya.

   b) Investasi Non-Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Terdiri dari pembelian Surat Utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, investasi non permanen lainnya.

Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*). Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.

m. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Selain itu juga mempunyai nilai yang material sesuai nilai minimum kapitalisasi sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju tengah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi Pemerintah Daerah, seperti bahan *(materials)* dan perlengkapan *(supplies)*.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1. Tanah;
2. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
   a) alat-alat besar;
   b) alat-alat angkutan;
   c) alat-alat bengkel dan alat ukur;
   d) alat-alat pertanian/peternakan;
   e) alat-alat kantor dan rumah tangga;
   f) alat studio dan alat komunikasi;
   g) alat-alat kedokteran;
   h) alat-alat laboratorium; dan
   i) alat keamanan.
3. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
   a) bangunan gedung;
   b) bangunan monumen.
4. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
   a) jalan dan jembatan;
   b) bangunan air/irigasi;
   c) instalasi; dan
   d) jaringan.
5. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
   a) buku dan perpustakaan;
   b) barang bercorak kesenian/kebudayaan; dan
   c) hewan/ternak dan tumbuhan.
6. Konstruksi dalam pengerjaan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya *(capitalization thresholds)* tertentu untuk dapat digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa *(service potential)* yang akan mengalir ke Pemerintah Daerah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus *(straight line method)*. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi Tanpa Nilai Sisa; Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diklasifikasikan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah tentang Kebijakan Akuntansi.

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Aset tetap secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya.

n. Dana cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk beberapa tahun anggaran menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olah raga.

o. Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas:

1. Tagihan piutang penjualan angsuran

Menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara langsung kepada pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Contoh: tagihan piutang penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Tagihan piutang penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai Pemerintah Daerah/Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Tagihan tuntutan ganti kerugian Daerah

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara/daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah. Tuntutan ganti rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah/daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.

3. Properti Investasi

Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:

a) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau
b) Pemerintah daerah memiliki properti untuk disewakan atau untuk mendapatkan peningkatan nilai, dan menggunakan hasil yang diperoleh tersebut untuk membiayai kegiatannya.

Properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Berikut ini adalah aset yang merupakan properti investasi dan termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

a) Tanah, yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
b) Tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan. Jika pemerintah daerah belum menentukan penggunaan tanah sebagai properti yang digunakan sendiri atau akan dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada pemerintah yang lain dalam jangka pendek, tanah tersebut diakui sebagai tanah yang dimiliki dalam rangka kenaikan nilai;
c) Bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah (atau dikuasai oleh pemerintah daerah melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
d) Bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
e) Properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Sedangkan aset yang bukan merupakan properti investasi dan dengan demikian tidak termasuk dalam ruang lingkup kebijakan akuntansi ini:

a) Properti yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, misalnya properti yang diperoleh secara eksklusif dengan maksud diserahkan dalam waktu dekat atau untuk pengembangan dan diserahkan kembali;
b) Properti yang masih dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga;
c) Properti yang digunakan sendiri, termasuk di antaranya properti yang dikuasai untuk digunakan di masa depan sebagai properti yang digunakan sendiri, properti yang dimiliki untuk pengembangan di masa depan dan penggunaan selanjutnya sebagai properti yang digunakan sendiri, dan properti yang digunakan sendiri yang menunggu untuk dijual;
d) Properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan;
e) Properti yang dimiliki dalam rangka program bantuan sosial, seperti penyediaan perumahan,rumah susun, dan properti lainnya, bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui penetapan tarif sewa di bawah harga pasar.
f) Properti yang dimiliki untuk tujuan strategis yang dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur aset tetap.
g) Properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai, namun sesekali disewakan kepada pihak lain.

4. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan antara lain berupa:

a) Bangun, Kelola/Guna, Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. Dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun, Kelola/Guna, Serah tersebut. Aset yang berada dalam Bangun, Kelola/Guna, Serah ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
b) Bangun, Serah, Kelola/Guna adalah pemanfaatan aset Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dapat memiliki properti investasi yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan/ atau untuk peningkatan nilai dengan keadaan sebagai berikut:
c) Pemerintah daerah mengelola portofolio properti berdasarkan basis komersial; atau oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola/digunakan sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut oleh pihak ketiga/investor tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. Bangun, Serah, Kelola/Guna dicatat sebesar nilai perolehan aset yang

dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang dipisahkan dari aset tetap ditambah dengan jumlah aset yang dibangun oleh pihak ketiga/investor sesuai dengan perjanjian kerjasama.

d) Kerjasama Operasi (KSO) adalah perikatan antara Pemerintah Daerah yang menyediakan aset daerah dengan pihak ketiga menanamkan modalnya, selanjutnya kedua belah pihak secara bersama-sama atau bergantian mengelola manajemen dan proses operasionalnya sesuai dengan kesepakatannya. Pengakuan dan penilaian berdasarkan harga perolehan pada saat bangunan atau aset lainnya tersebut selesai dibangun.

p. Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. contoh: hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Aset tidak berwujud meliputi:

1. *Software* komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun;
2. Lisensi dan *franchise*;
3. Hak cipta (*copyright*), paten dan hak lainnya;
4. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang; dan
5. Aset lain-lain.

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengurangan ini dilakukan dengan mendebit akun "Beban Amortisasi" terhadap akun "Akumulasi Amortisasi". Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya. Pengukuran jumlah amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

q. Kewajiban jangka pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi terdiri dari:

1. Utang perhitungan fihak ketiga (PFK)

   Utang PFK merupakan kewajiban yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari SP2D atau dokumen lain yang dipersamakan.

   Nilai yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca. Terdiri dari: Utang Taspen, Utang Askes, Utang PPh Pusat, Utang PPN Pusat, Utang Taperum, Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya.

2. Utang bunga

   Utang bunga timbul karena Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membayar beban bunga atas utang. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar biaya bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh Pemerintah Daerah.

   Utang bunga terdiri dari: Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat, Utang Bunga kepada Daerah Otonom Lainnya, Utang Bunga kepada BUMN/BUMD, Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan, Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya, Utang Bunga Luar Negeri.

3. Bagian lancar utang jangka panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi.

   Pengakuan dan penilaian pada saat reklasifikasi dalam periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembayaran bagian lancar utang jangka panjang yang akan dibayarkan di satu periode akuntansi mendatang. Terdiri dari Utang Bank, Utang Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun pendapatan tersebut belum menjadi hak pada periode yang bersangkutan. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan. Terdiri dari setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka penjualan produk Pemerintah Daerah dari pihak III, uang muka lelang penjualan aset daerah.

5. Utang jangka pendek lainnya

Kewajiban Lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut.

r. Kewajiban jangka panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

1. Utang Dalam Negeri: Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, Utang Dalam Negeri Obligasi, Utang Pemerintah Pusat, Utang Pemerintah Provinsi, Utang Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Utang Luar Negeri: Utang Luar Negeri Sektor Perbankan.

s. Koreksi kesalahan, Perubahan kebijakan akuntansi, dan Peristiwa luar biasa

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang;
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau akun belanja dari periode yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, akun aset, serta akun ekuitas yang terkait.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Akibat koreksi kesalahan tersebut selanjutnya diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan Undang-Undang atau peraturan daerah.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas. Terhadap koreksi kesalahan yang berkaitan dengan belanja yang menghasilkan aset, disamping mengoreksi saldo kas dan pendapatan lain-lain juga perlu dilakukan koreksi terhadap aset yang bersangkutan dan pos ekuitas. Sebagai contoh, belanja aset tetap yang di-*mark up* dan setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, maka koreksi yang harus dilakukan adalah dengan menambah kas dan pendapatan lain-lain, serta mengurangi pos aset tetap dan pos ekuitas.

Koreksi kesalahan pendapatan dapat dibagi dua yaitu yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang menambah saldo kas yaitu terdapat transaksi penyetoran bagian laba perusahaan daerah yang belum dilaporkan. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah menambah saldo kas dan ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan yang mengurangi saldo kas yaitu kesalahan pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mengurangi saldo kas dan ekuitas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja pakai habis kantor. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi. Akibat kumulatif dari koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode- periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam baris tersendiri pada Laporan Arus Kas tahun berjalan.

t. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

u. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak tersangka atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal harus menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau pergeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa harus memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa harus diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dan Basis Kas untuk Pendapatan LRA dan Belanja.

a. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Kas Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Kas Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
b. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Kas Daerah; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Kas Daerah.
c. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Kas Daerah.

7.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode, agar informasi yang dijadikan dapat dipahami atau untuk memudahkan pembaca perlu diberikan penjelasan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan, sejalan dengan maksud tersebut tahapan penjelasan pos-pos Laporan Keuangan ini akan diawali dengan penjelasan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

7.5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan Pendapatan dan sumber Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan, di sisi lain Laporan Realisasi Anggaran mencerminkan komparasi antara anggaran dan realisasinya sehingga tingkat serapan anggaran pada kegiatan normal entitas dapat diukur secara nyata.

Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan menggunakan basis kas yang mengakui semua transaksi ketika terjadi penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penjelasan LRA ini akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan daerah-LRA adalah semua penerimaan pada Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Target pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang dianggarkan harus diperoleh oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada Tahun Anggaran tertentu. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA meliputi pendapatan pajak Daerah-LRA, Retribusi Daerah-LRA, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LRA dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah-LRA;
2. Pendapatan Transfer-LRA yang meliputi pendapatan transfer Pemerintah pusat terdiri dari DBH Pajak, Dana Desa-LRA, dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA dari transfer Pemerintah Provinsi; dan
3. Lain-lain Pendapatan yang sah-LRA yang meliputi Pendapatan Hibah-LRA dan Pendapatan Lainnya.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp669.951.188.922,24 atau 99,34% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp674.398.741.239,00 mengalami penurunan senilai (Rp523.479.893,42) atau (0,08%) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp670.474.668.815,66. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 15
Rincian Pendapatan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Pendapatan Asli Daerah	52.073.310.252,24	43.089.865.860,66	8.983.444.391,58
2	Pendapatan Transfer	610.185.349.767,00	620.367.960.197,00	(10.182.610.430,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.692.528.903,00	7.016.842.758,00	675.686.145,00
Jumlah		**669.951.188.922,24**	**670.474.668.815,66**	**(523.479.893,42)**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) –LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2024 senilai Rp52.309.072.127,00 terealisasi senilai Rp52.073.310.252,24 atau mencapai realisasi 99,55% dari anggaran yang ditetapkan, dan realisasi Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp43.089.865.860,66 yang meliputi pendapatan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 16
Rincian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	2024		%	Realisasi 2023
		Anggaran	Realisasi		
1	Pendapatan hasil Pajak Daerah – LRA	12.993.479.302,00	12.064.921.118,00	92,85	10.986.888.633,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	15.747.142.378,00	14.041.286.339,00	89,17	28.164.198.735,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.980.000.000,00	729.061.014,00	36,82	482.055.891,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	21.588.450.447,00	25.238.041.781,24	116,91	3.456.722.601,66
Jumlah		**52.309.072.127,00**	**52.073.310.252,24**	**99,55**	**43.089.865.860,66**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 senilai Rp52.073.310.252,24 meliputi:

a) Pendapatan Pajak Daerah – LRA

Anggaran Pendapatan dari penerimaan Hasil Pajak Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp12.993.479.302,00 dan terealisasi senilai Rp12.064.921.118,00 atau 92,85% mengalami kenaikan senilai Rp1.078.032.485,00 atau 9,81% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp10.986.888.633,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 17
Rincian Pendapatan Pajak – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pajak Hotel	148.500.000,00	32.673.000,00	22,00	19.165.000,00
Pajak Restoran	1.000.000.000,00	1.006.742.551,00	100,67	1.058.473.729,00
Pajak Hiburan	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Pajak Reklame	400.000.000,00	302.845.126,00	75,71	208.292.000,00
Pajak Penerangan Jalan	5.171.738.904,00	6.225.662.570,00	120,38	5.436.165.267,00
Pajak Air Tanah	2.908.500,00	3.000.000,00	103,15	3.000.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	700.000.000,00	658.879.733,00	94,13	407.273.154,00
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	4.500.000.000,00	3.175.091.213,00	70,56	3.070.521.571,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.064.831.898,00	659.526.925,00	61,94	783.997.912,00
Jumlah	**12.993.479.302,00**	**12.064.921.118,00**	**92,85**	**10.986.888.633,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 1-9

b) Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah ditetapkan per 31 Desember 2024 senilai Rp15.747.142.378,00 dan terealisasi senilai Rp14.041.286.339,00 atau mencapai 89,17%. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai (Rp14.122.912.396,00) atau (50,14%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp28.164.198.735,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 7. 18
Rincian Retribusi Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pelayanan Kesehatan	8.573.761.128,00	7.169.986.069,00	83,63	22.340.047.235,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	256.800.000,00	221.640.000,00	86,31	124.965.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	147.593.000,00	187.700.000,00	127,17	120.759.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	230.000.000,00	132.250.000,00	57,50	0,00
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.942.488.250,00	5.818.791.000,00	97,92	5.052.402.500,00
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	0,00	0,00	0,00	146.500.000,00
Retribusi Terminal	40.000.000,00	0,00	0,00	27.700.000,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	0,00	41.105.000,00	0,00	0,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	520.000.000,00	469.814.270,00	90,35	351.825.000,00
Jumlah	**15.747.142.378,00**	**14.041.286.339,00**	**89,17**	**28.164.198.735,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 10-16

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2024 senilai Rp1.980.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp729.061.014,00 atau 36,82%, sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp482.055.891,00. Ini merupakan Pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah per 31 Desember 2024 senilai Rp21.588.450.447,00 dan terealisasi senilai Rp25.238.041.781,24 atau 116,91% dari nilai anggaran, mengalami kenaikan senilai Rp21.781.319.179,58 atau 630,11% dari realisasi Tahun 2023 senilai Rp3.456.722.601,66 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 19
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	350.000.000,00	230.337.498,00	65,81	471.142.054,00
Hasil Sewa BMD	173.000.000,00	57.025.000,00	32,96	0,00
Jasa Giro pada Kas Daerah	1.897.165.799,00	1.197.050.360,00	63,10	667.160.891,00
Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	6.798.593,00	0,00	28.465.426,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	674.998.598,00	2.340.745.761,96	346,78	1.159.915.434,73
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	18.000.000.000,00	20.013.832.347,00	111,19	0,00
Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	0,00	13.916.109,86	0,00	0,00
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	493.286.050,00	1.378.336.111,42	279,42	1.130.038.795,93
Jumlah	**21.588.450.447,00**	**25.238.041.781,24**	**116,91**	**3.456.722.601,66**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 17-24

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah mekanisme bantuan dari Pemerintah untuk menutupi keterbatasan sumber dana. Pendapatan Transfer Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 yang bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Pusat berupa penerimaan Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-lainnya yang merupakan dana penyesuaian, sedangkan transfer Pemerintah Provinsi, dana penyesuaian dan Bagi Hasil Pajak/Bantuan Keuangan dari Provinsi dikonversi pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan dana transfer untuk Tahun Anggaran 2024 dapat direalisasikan senilai Rp610.185.349.767,00 atau 99,41% dari anggaran setelah perubahan senilai Rp613.833.052.176,00 dan mengalami penurunan senilai (Rp10.182.610.430,00) atau (1,64%) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp620.367.960.197,00. Uraian Pendapatan Dana Transfer dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 20
Rincian Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	536.471.137.000,00	532.310.045.129,00	99,22	535.895.712.061,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	51.461.215.000,00	51.461.215.000,00	100,00	57.738.799.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA	25.900.700.176,00	26.414.089.638,00	101,98	26.733.449.136,00
Jumlah	**613.833.052.176,00**	**610.185.349.767,00**	**99,41**	**620.367.960.197,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2024 senilai Rp610.185.349.767,00 terdiri dari:

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2024 senilai Rp536.471.137.000,00 dan terealisasi senilai Rp532.310.045.129,00 atau 99,22% mengalami penurunan senilai (Rp3.585.666.932,00) atau (0,67%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp535.895.712.061,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 21
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.880.365.000,00	12.479.058.000,00	105,04	14.557.434.438,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	370.177.399.000,00	369.183.892.749,00	99,73	349.658.672.391,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	82.474.072.000,00	82.048.913.591,00	99,48	101.224.309.437,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	71.939.301.000,00	68.598.180.789,00	95,36	70.455.295.795,00
Jumlah	**536.471.137.000,00**	**532.310.045.129,00**	**99,22**	**535.895.712.061,00**

1) Dana Bagi Hasil (DBH)

Anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) per 31 Desember 2024 senilai Rp11.880.365.000,00 dan terealisasi senilai Rp12.479.058.000,00 atau 105,04% mengalami penurunan senilai (Rp2.078.376.438,00) atau (14,28%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp14.557.434.438,00 penurunan realisasi DBH dikarenakan adanya transfer DBH PPh Pasal 21, DBH SDA Mineral, DBH SDA Kehutanan dan DBH SDA Perikanan Mengalami Penurunan yang signifikan dari tahun 2023.

2) Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA

Anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) per 31 Desember 2024 senilai Rp370.177.399.000,00 dan terealisasi senilai Rp369.183.892.749,00 atau 99,73% mengalami kenaikan senilai Rp19.525.220.358,00 atau 5,58% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp349.658.672.391,00 dengan rincian sebagai berikut:

(a) Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp282.562.180.000,00 dan terealisasi senilai Rp282.562.180.000,00 atau 100,00%.
(b) Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp8.547.237.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.553.730.749,00 atau 88,38%.
(c) Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp44.235.636.000,00 dan terealisasi senilai Rp44.235.636.000,00 atau 100,00%.
(d) Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp21.832.361.000,00 dan terealisasi senilai Rp21.832.361.000,00 atau 100,00%.
(e) Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp12.999.985.000,00 dan terealisasi senilai Rp12.999.985.000,00 atau 100,00%.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik - LRA

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik per 31 Desember 2024 senilai Rp82.474.072.000,00 dan terealisasi senilai Rp82.048.913.591,00 atau 99,48% mengalami penurunan senilai (Rp19.175.395.846,00) atau (18,94%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp101.224.309.437,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(a) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp419.705.000,00 dan terealisasi senilai Rp418.504.000,00 atau 99,71%.
(b) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp7.761.041.000,00 dan terealisasi senilai Rp7.749.568.982,00 atau 99,85%.
(c) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp4.405.717.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.382.712.628,00 atau 99,48%.
(d) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp3.250.107.000,00 dan terealisasi senilai Rp3.118.571.200,00 atau 95,95%.
(e) DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp9.862.680.000,00 dan terealisasi senilai Rp9.738.033.800,00 atau 98,74%.

(f) DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp10.993.191.000,00 dan terealisasi senilai Rp10.943.717.000,00 atau 99,55%.
(g) DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp5.394.173.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.394.173.000,00 atau 100,00%.
(h) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp759.981.000,00 dan terealisasi senilai Rp758.891.636,00 atau 99,86%.
(i) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp39.627.477.000,00 dan terealisasi senilai Rp39.544.741.345,00 atau 99,79%.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA

Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik per 31 Desember 2024 senilai Rp71.939.301.000,00 dan terealisasi senilai Rp68.598.180.789,00 atau 95,36% mengalami penurunan senilai Rp1.857.115.006,00 atau 2,64% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp70.455.295.795,00. Dengan rincian sebagai berikut:

(a) DAK Non Fisik-BOS Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp18.387.100.000,00 dan terealisasi senilai Rp18.385.482.700,00 atau 99,99%.
(b) DAK Non Fisik-BOS Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp1.040.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.040.000.000,00 atau 100,00%.
(c) DAK Non Fisik-TPG PNSD dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp29.578.776.000,00 dan terealisasi senilai Rp29.578.776.000,00 atau 100,00%.
(d) DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp1.678.350.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.678.350.000,00 atau 100,00%.
(e) DAK Non Fisik-TKG PNSD dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp1.635.428.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.635.428.000,00 atau 100,00%.
(f) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp3.062.520.000,00 dan terealisasi senilai Rp1.964.836.264,00 atau 64,16%.
(g) DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal dengan anggaran per 31 Desember senilai 2024 Rp401.245.000,00 dan terealisasi senilai Rp398.597.500,00 atau 99,34%.
(h) DAK Non Fisik-BOKB-KB dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp2.361.108.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.325.032.000,00 atau 98,47%.
(i) DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp650.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp643.622.400,00 atau 99,02%.
(j) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp2.557.800.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.557.800.000,00 atau 100,00%.
(k) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp30.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp30.000.000,00 atau 100,00%.
(l) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp2.427.800.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.371.100.000,00 atau 97,66%.
(m) DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp90.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp90.000.000,00 atau 100,00%.
(n) DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas dengan anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp8.039.174.000,00 dan terealisasi senilai Rp5.899.155.925,00 atau 73,38%.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya ditetapkan per 31 Desember 2024 senilai Rp51.461.215.000,00 dan terealisasi senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100,00%, mengalami penurunan senilai (Rp6.277.584.000,00) atau (10,87%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp57.738.799.000,00. Pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya berasal dari penerimaan dana penyesuaian dari pemerintah pusat dan dana desa dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7. 22
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Dana Desa – LRA	51.461.215.000,00	51.461.215.000,00	100,00	51.720.040.000,00
Insentif Fiskal -- LRA	0,00	0,00	0,00	6.018.759.000,00
Jumlah	**51.461.215.000,00**	**51.461.215.000,00**	100,00	**57.738.799.000,00**

1) Dana Desa

Anggaran Dana Desa per 31 Desember 2024 senilai Rp51.461.215.000,00 dan terealisasi senilai Rp51.461.215.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan senilai (Rp258.825.000,00) atau (0,50%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp51.720.040.000,00. Terdapat penambahan Dana Desa, sebanyak 12 Desa yang dialokasikan berdasarkan kinerja Pemerintah Desa dan penghargaan dari kementerian/lembaga sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa. Adapun Dana yang di terima masing-masing desa senilai Rp120.430.000,00 dengan rincian Desa sebagai berikut :

(a) Desa Babana
(b) Desa Lumu
(c) Desa Salogatta
(d) Desa Salupangkang
(e) Desa Salupangkang IV
(f) Desa Tobadak
(g) Desa Salobaja
(h) Desa Bambadaru
(i) Desa Salulekbo
(j) Desa Saloadak
(k) Desa Waeputeh
(l) Desa Paraili

2) Insentif Fiskal

Anggaran Insentif Fiskal per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% mengalami penurunan senilai Rp6.018.759.000,00 atau 100,00% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp6.018.759.000,00. Insentif Fiskal merupakan wujud apresiasi Pemerintah atas kinerja keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 97 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk penghargaan kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran 2023.

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA

Anggaran Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA ditetapkan per 31 Desember 2024 senilai Rp25.900.700.176,00 dan terealisasi senilai Rp26.414.089.638,00 atau 101,98% mengalami kenaikan senilai Rp1.180.640.502,00 dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp25.233.449.136,00. Pendapatan transfer Pemerintah Daerah-lainnya berasal dari penerimaan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7. 23
Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.900.700.176,00	3.754.610.082,00	14,50	4.201.982.203,00
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan	0,00	5.352.561.968,00	0,00	4.212.258.615,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan	0,00	8.357.499.019,00	0,00	7.742.554.924,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	0,00	17.334.878,00	0,00	23.662.005,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	8.932.083.691,00	0,00	9.052.991.389,00
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Propinsi	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**25.900.700.176,00**	**26.414.089.638,00**	**101,98**	**26.733.449.136,00**

Pada rincian Pendapatan bagi hasil pajak–LRA terlihat bahwa penganggaran hanya ada di Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini disebabkan karena pada saat penganggaran belum ada informasi pendapatan bagi hasil pajak apa saja yang akan diterima, sehingga di tahun 2024 realisasi disesuaikan dengan rekening pendapatannya. Dalam Penganggaran juga tidak terdapat informasi rencana penganggaran dan di akhir tahun ternyata realisasinya melebihi dari rencana anggaran sebesar 101,98%.

2) Bantuan Keuangan - LRA

Anggaran Bantuan Keuangan ditetapkan per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% mengalami Penurunan dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai (Rp1.500.000.000,00.) Bantuan keuangan pada Tahun 2023 berasal dari penerimaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 7. 24
Rincian Bantuan Keuangan - LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Anggaran Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di Tahun Anggaran 2024 ditetapkan senilai Rp8.256.616.936,00 dan terealisasi senilai Rp7.692.528.903,00 atau 93,17% mengalami kenaikan senilai Rp675.686.145,00 atau 9,63% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp7.016.842.758,00. Nilai ini merupakan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD pada 11 Puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 25
Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD - LRA	8.256.616.936,00	7.692.528.903,00	93,17	7.016.842.758,00
Jumlah	**8.256.616.936,00**	**7.692.528.903,00**	**93,17**	**7.016.842.758,00**

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Realisasi belanja Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp697.458.559.499,91 atau 97,44% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp715.780.494.691,10 dan mengalami kenaikan senilai Rp65.209.443.947,91 atau 10,31% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 senilai Rp632.249.115.552,00. Rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 7. 26
Rincian Belanja Daerah

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Operasi	479.600.220.454,88	469.025.200.983,91	97,80	407.880.179.375,00
Belanja Modal	146.739.840.857,22	139.134.589.716,00	94.82	131.997.518.417,00
Belanja Tidak Terduga	616.770.079,00	475.105.500,00	77,03	326.062.160,00
Belanja Transfer	88.823.663.300,00	88.823.663.300,00	100.00	92.045.355.600,00
Jumlah	**715.780.494.691,10**	**697.458.559.499,91**	**97.44**	**632.249.115.552,00**

Jumlah Belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 telah termasuk realisasi pengeluaran dari Belanja Dana BOS, Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah dan belanja dana BOK Puskesmas.

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk membiayai operasional Pemerintahan Kab. Mamuju Tengah yang dalam Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp469.025.200.983,91 dari anggaran setelah perubahan senilai Rp479.600.220.454,88 atau 97,80% dan mengalami kenaikan senilai Rp61.145.021.608,91 atau 14,99% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp407.880.179.375,00 yang terdiri dari:

Tabel 7. 27
Rincian Belanja Operasi

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	227.183.341.761,79	224.098.755.376,00	98,64	186.514.182.863,00
Belanja Barang dan Jasa	209.941.443.206,39	203.336.294.992,91	96,85	200.826.460.987,00
Belanja Hibah	42.430.935.486,70	41.571.650.615,00	97,97	20.415.535.525,00
Belanja Bantuan Sosial	44.500.000,00	18.500.000,00	41,57	124.000.000,00
Jumlah	**479.600.220.454,88**	**469.025.200.983,91**	**97,80**	**407.880.179.375,00**

a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp227.183.341.761,79 dengan realisasi senilai Rp224.098.755.376,00 atau mencapai 98,64% mengalami kenaikan senilai Rp37.584.572.513,00 atau 20,15% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp186.514.182.863,00. Pengeluaran Belanja tersebut dialokasikan untuk gaji dan tunjangan ASN yang meliputi PNS dan PPPK, tambahan penghasilan PNS, Belanja untuk pimpinan dan anggota DPRD/KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak, pemungutan retribusi dan belanja pegawai. Rincian belanja pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 28
Rincian Belanja Pegawai

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	170.664.956.724,79	169.720.699.136,00	99,45	139.548.557.594,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.275.731.846,00	5.165.910.130,00	97,92	8.370.658.962,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.751.476.884,00	40.775.046.744,00	95,38	30.373.998.677,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.885.022.993,00	7.843.288.208,00	99,47	7.617.916.472,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	174.273.314,00	172.171.158,00	98,79	172.171.158,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	431.880.000,00	421.640.000,00	97,63	430.880.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**227.183.341.761,79**	**224.098.755.376,00**	**98,64**	**186.514.182.863,00**

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dimaksudkan untuk setiap pengeluaran pembelian barang dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp209.941.443.206,39 dan terealisasi senilai Rp203.336.294.992,91 atau mencapai 96,85% mengalami kenaikan senilai Rp2.509.834.005,91 atau 1,25% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp200.826.460.987,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 7. 29
Rincian Belanja Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Barang	42.936.332.837,99	41.479.567.467,00	96,61	54.170.261.945,00
Belanja Jasa	94.784.149.117,37	92.064.191.277,91	97,13	91.187.192.155,00
Belanja Pemeliharaan	3.087.839.224,00	2.964.644.154,00	96,01	3.763.056.567,00
Belanja Perjalanan Dinas	26.626.539.602,99	25.692.786.208,00	96,49	34.118.472.649,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	986.725.000,00	978.527.650,00	99,17	589.795.240,00
Belanja Barang dan Jasa BOS	16.750.492.362,04	16.712.447.138,00	99,77	16.997.682.431,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	7.131.447.212,00	5.879.182.437,00	82,44	0.00
Belanja Barang dan Jasa BLUD	17.637.917.850,00	17.564.948.661,00	99,59	0.00
Jumlah	**209.941.443.206,39**	**203.336.294.992,91**	**96,85**	**200.826.460.987,00**

1) Belanja Barang
   Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2024 senilai Rp42.936.332.837,99 dan terealisasi senilai Rp41.479.567.467,00 atau 96,61% mengalami penurunan senilai (Rp12.690.694.478,00) atau (23,43%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp54.170.261.945,00.
2) Belanja Jasa
   Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2024 senilai Rp94.784.149.117,37 dan terealisasi senilai Rp92.064.191.277,91 atau 97,13% mengalami kenaikan senilai Rp876.999.122,91 atau 0,96% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp91.187.192.155,00.
3) Belanja Pemeliharaan
   Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.087.839.224,00 dan terealisasi senilai Rp2.964.644.154,00 atau 96,01% mengalami penurunan senilai (Rp798.412.413,00) atau (21,22%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp3.763.056.567,00.
4) Belanja Perjalanan Dinas
   Anggaran Belanja Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 senilai Rp26.626.539.602,99 dan terealisasi senilai Rp25.692.786.208,00 atau 96,49% mengalami penurunan senilai (Rp8.425.686.441.00) atau (24,70%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp34.118.472.649,00.
5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
   Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat per 31 Desember 2024 senilai Rp986.725.000,00 dan terealisasi senilai Rp978.527.650,00 atau 99,17% mengalami kenaikan senilai Rp388.732.410,00 atau 65,91% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp589.795.240,00.
6) Belanja Barang dan Jasa BOS
   Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS per 31 Desember 2024 senilai Rp16.750.492.362,04 dan terealisasi senilai Rp16.712.447.138,00 atau 99,77% mengalami penurunan senilai (Rp285.235.293,00) atau (1,68)% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp16.997.682.431,00.
7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
   Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp7.131.447.212,00 dan terealisasi senilai Rp5.879.182.437,00 atau 82,44% mengalami kenaikan senilai Rp5.879.182.437,00 atau 100% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp 0,00.
8) Belanja Barang dan Jasa BLUD
   Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp17.637.917.850,00 dan terealisasi senilai Rp17.564.948.661,00 atau 99,59% mengalami kenaikan senilai Rp17.564.948.661,00 atau 100,00% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp 0,00.

c) Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah untuk Tahun Anggaran 2024 dianggarkan senilai Rp42.430.935.486,70 dengan realisasi senilai Rp41.571.650.615,00 atau 97,97% mengalami kenaikan senilai Rp21.156.155.090,00 atau 103,63% dari realisasi tahun anggaran 2023 senilai Rp20.415.535.525,00. Belanja Hibah tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 30
Rincian Belanja Hibah

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	251.000.000,00	100,40	165.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	4.462.000,00	4.462.000,00	100,00	140.499.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan	27.353.796.600,00	27.302.930.000,00	99,81	3.144.750.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.672.557.302,00	5.017.576.986,00	88,45	9.421.802.676,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3.806.429.584,70	3.704.609.629,00	97,33	6.880.416.649,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	0,00	0,00	0,00	354.572.200,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	308.550.000,00	308.495.000,00	99,98	308.495.000,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	347.040.000,00	346.977.000,00	99,98	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.245.800.000,00	2.235.900.000,00	99,56	0,00
Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.442.300.000,00	2.399.700.000,00	98,26	0,00
Jumlah	**42.430.935.486,70**	**41.571.650.615,00**	**97,97**	**20.415.535.525,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 25-33

1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
   Anggaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 senilai Rp250.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp251.000.000,00 atau 100,40% mengalami kenaikan senilai Rp86.000.000,00 atau 52,12% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp165.000.000,00
2) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat
   Anggaran Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2024 senilai Rp4.462.000,00 dan terealisasi senilai Rp4.462.000,00 atau 100,00% mengalami penurunan senilai (Rp136.037.000,00) atau (96,82%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp140.499.000,00.
3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
   Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan per 31 Desember 2024 senilai Rp27.353.796.600,00 dan terealisasi senilai Rp27.302.930.000,00 atau 99,81% mengalami kenaikan senilai Rp24.158.180.000,00 atau 768,21% dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp3.144.750.000,00
4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
   Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar per 31 Desember 2024 senilai Rp5.672.557.302,00 dan terealisasi senilai Rp5.017.576.986,00 atau 88,45% mengalami penurunan senilai (Rp4.404.225.690,00) atau (46,75%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp9.421.802.676,00.

5) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan
Anggaran Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.806.429.584,70 dan terealisasi senilai Rp3.704.609.629,00 atau 97,33% mengalami penurunan senilai (Rp3.175.807.020,00) atau (46,16%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp6.880.416.649,00.
6) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta
Anggaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00 dan terealisasi senilai Rp0,00 atau 0.00% mengalami penurunan senilai (Rp354.572.200,00) atau (100,00%) dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp354.572.200,00.
7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik per 31 Desember 2024 senilai Rp308.550.000,00 dan terealisasi senilai Rp308.495.000,00 atau 99,98% tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp308.495.000,00.
8) Belanja Hibah Dana BOSP-BOS
Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOS per 31 Desember 2024 senilai Rp347.040.000,00 dan terealisasi senilai Rp346.977.000,00 atau 99,98% mengalami kenaikan senilai Rp346.977.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.
9) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD
Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD per 31 Desember 2024 senilai Rp2.245.800.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.235.900.000,00 atau 99,56% mengalami kenaikan senilai Rp2.235.900.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.
10) Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan
Anggaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan per 31 Desember 2024 senilai Rp2.442.300.000,00 dan terealisasi senilai Rp2.399.700.000,00 atau 98,26% mengalami kenaikan senilai Rp2.399.700.000,00 dari realisasi per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00.

d) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah Daerah pada khususnya. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp18.500.000,00 atau 41,57% dari anggaran senilai Rp44.500.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp105.500.000,00) atau (85,08%) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp124.000.000,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 31
Rincian Belanja Bantuan Sosial

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bantuan Sosial	44.500.000,00	18.500.000,00	41,57	124.000.000,00
Jumlah	**44.500.000,00**	**18.500.000,00**	**41,57**	**124.000.000,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 34

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja Bantuan Uang yang direncanakan kepada Individu dan Belanja Bantuan yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat dengan rincian sebagai berikut Belanja Bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu di ditargetkan senilai Rp32.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp6.000.000,00 atau 18,75% dan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang ditargetkan senilai Rp12.500.000,00 terealisasi senilai Rp12.500.000,00 atau realisasi 100,00%.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah menganggarkan Belanja modal senilai Rp146.739.840.857,22 dan terealisasi senilai Rp139.134.589.716,00 atau 94,82% mengalami

kenaikan senilai Rp7.137.071.299,00 atau 5,41% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp131.997.518.417,00. Rincian realisasi belanja modal sebagai berikut:

Tabel 7. 32
Rincian Belanja Modal

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah	2.187.077.448,00	2.055.173.000,00	93,97	1.653.332.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.666.199.299,00	35.957.625.906,00	98,07	13.926.590.864,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.217.268.932,80	41.278.328.853,00	93,35	52.462.883.837,00
Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	61.801.947.634,42	57.979.234.714,00	93,81	62.321.642.916,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.267.998.302,00	1.267.128.002,00	99,93	1.363.483.800,00
Belanja Modal Aset lainnya	599.349.241,00	597.099.241,00	99,62	269.585.000,00
Jumlah	**146.739.840.857,22**	**139.134.589.716,00**	**94,82**	**131.997.518.417,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 35-40

a) Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Realisasi belanja tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp2.055.173.000,00 atau 93,97% dari anggaran senilai Rp2.187.077.448,00 mengalami kenaikan senilai Rp401.841.000,00 atau 24,30% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.653.332.000,00. Rincian Belanja Modal Tanah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 33
Rincian Belanja Modal Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.875.750.000,00	1.856.384.000,00	98,97	1.376.249.000,00
Belanja Modal lapangan	311.327.448,00	198.789.000,00	63,85	277.083.000,00
Jumlah	**2.187.077.448,00**	**2.055.173.000,00**	**93,97**	**1.653.332.000,00**

b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Realisasi belanja peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp35.957.625.906,00 atau 98,07% dari anggaran senilai Rp36.666.199.299,00 mengalami kenaikan senilai Rp22.031.035.042,00 atau 158,19% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.926.590.864,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 34
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Alat Besar	1.833.056.412,00	1.553.580.000,00	84,75	9.435.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	9.514.478.611,00	9.320.448.611,00	97,96	2.042.994.505,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00	0,00	0,00	98.695.279,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.813.242.539,00	3.800.926.451,00	99,68	2.753.026.476,00
Belanja Modal Alat Studio. Komunikasi dan Pemancar	1.618.099.400,00	1.436.954.200,00	88,81	823.056.272,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	15.627.158.177,00	15.601.150.752,00	99,83	4.243.973.249,00

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Komputer	1.628.556.641,00	1.605.962.182,00	98,61	2.229.021.818,00
Belanja Modal Alat keselamatan Kerja	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	108.180.600,00	108.180.600,00	100,00	139.969.000,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	99.324.509,00	99.161.850,00	99,84	54.964.155,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	64.200.000,00	64.065.000,00	99,79	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	1.997.820.260,00	2.008.320.260,00	100,53	1.514.155.110,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	362.082.150,00	358.876.000,00	99,11	0,00
Jumlah	**36.666.199.299,00**	**35.957.625.906,00**	**98,07**	**13.926.590.864,00**

c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 mencapai senilai Rp41.278.328.853,00 atau 93,35% dari anggaran senilai Rp44.217.268.932,80 mengalami Penurunan senilai (Rp11.184.554.984,00) atau (21,32%) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp52.462.883.837,00. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 35
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.832.939.832,80	37.209.398.557,00	93,41	49.054.782.461,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	2.270.219.506,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	4.384.329.100,00	4.068.930.296,00	92,81	1.136.381.870,00
Jumlah	**44.217.268.932,80**	**41.278.328.853,00**	**93,35**	**52.462.883.837,00**

d) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp57.979.234.714,00 atau 93,81% dari anggaran senilai Rp61.801.947.634,42 mengalami Penurunan senilai (Rp4.342.408.202,00) atau (6,97%) dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp62.321.642.916,00. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 36
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Jalan	35.721.200.018,42	34.177.145.950,00	95,68	38.930.390.511,00
Belanja Modal Jembatan	6.293.352.661,00	5.748.666.800,00	91,35	4.270.869.199,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	106.370.501,00	4.418.000,00	4,15	24.960.000,00
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	3.436.302.503,00	3.114.612.800,00	90,64	3.386.334.670,00
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	692.069.000,00	60.068.000,00	8,68	71.778.000,00

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Air Bersih/Air Baku	416.987.230,00	412.721.000,00	98,98	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	1.334.429.191,00	1.280.326.476,00	95,95	4.460.623.376,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	11.397.591.530,00	10.781.275.688,00	94,59	8.770.720.160,00
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.400.000.000,00	2.400.000.000	100,00	2.400.000.000
Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.645.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jaringan Gas	0,00	0,00	100,00	5.967.000,00
Jumlah	**61.801.947.634,42**	**57.979.234.714,00**	**93,81**	**62.321.642.916,00**

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Pada Tahun 2024 terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp1.267.128.002,00 atau 99,93% dari anggaran senilai Rp1.267.998.302,00 mengalami penurunan senilai (Rp96.355.798,00 atau (7.07)% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.363.483.800,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 37
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	2023
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	546.968.300,00	545.138.000,00	99,67	393.500.000,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	557.900.000,00
Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS	721.030.002,00	721.990.002,00	100,13	412.083.800,00
Jumlah	**1.267.998.302,00**	**1.267.128.002,00**	**99,93**	**1.363.483.800,00**

f) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset lainnya sampai siap pakai. Pada Tahun 2024 terdapat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya senilai Rp597.099.241,00 atau 99,62% dari anggaran senilai Rp599.349.241,00 dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp269.585.000,00. Rincian Belanja Modal Aset Lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 38
Rincian Belanja Modal Aset Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset tidak berwujud	599.349.241,00	597.099.241,00	99,62	269.585.000,00
Jumlah	**599.349.241,00**	**597.099.241,00**	**99,62**	**269.585.000,00**

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran Pemerintah Daerah yang digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 terealisasi senilai Rp475.105.500,00 atau 77,03% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp616.770.079,00 mengalami kenaikan senilai Rp149.043.340,00 atau 45,71% dari realisasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp326.062.160,00.

4. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan untuk Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah mencapai senilai Rp88.823.663.300,00 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp88.823.663.300,00 atau mencapai 100,00%. Pada Transfer Bantuan Keuangan Desa

yang dianggarkan senilai Rp88.388.663.300,00 dan realisasi senilai Rp88.388.663.300,00 atau mencapai 100,00%. Rincian Transfer Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 39
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	88.388.663.300,00	88.388.663.300,00	100,00	87.175.355.600,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	435.000.000,00	435.000.000,00	100,00	4.870.000.000,00
Jumlah	**88.823.663.300,00**	**88.823.663.300,00**	**100,00**	**92.045.355.600,00**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 41-42

c. Surplus/Defisit – LRA

Berdasarkan hasil realisasi total pendapatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp669.951.188.922,24 dan realisasi total belanja Tahun Anggaran 2024 senilai Rp697.458.559.499,91 maka Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mengalami *defisit* senilai (Rp27.507.370.577,67).

d. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Realisasi Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp41.381.753.452,10. Realisasi pembiayaan Tahun Anggaran 2024 dapat disajikan dalam ikhtisar realisasi pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 7. 40
Rincian Pembiayaan

Dalam Rupiah

Uraian	2024		%	Realisasi 2023
	Anggaran	Realisasi		
Penerimaan Pembiayaan	41.381.753.452,10	41.381.753.452,10	100,00	6.156.200.188,44
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00
Jumlah	**41.381.753.452,100**	**41.381.753.452,10**	**100,00**	**3.156.200.188,44**

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2024 dianggarkan senilai Rp41.381.753.452,10 dan terealisasi senilai Rp41.381.753.452,10 atau 100,00% yang merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya senilai Rp41.381.753.452,10.

Pada Tahun Anggaran 2024 Kab. Mamuju Tengah tidak melakukan penyetoran Penyertaan Modal untuk tahun ke 3 ini sebagai pengeluaran pembiayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2021, disebabkan pada Tahun 2024 Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah menganggarkan pembiayaan untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp13.874.382.874,43 yang merupakan selisih dari *Surplus/(Defisit)* senilai (Rp27.507.370.577,67) setelah ditutup dengan pembiayaan neto senilai Rp41.381.753.452,10. Rincian SiLPA per sumber dana dapat dilihat pada *lampiran 43.*

7.5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal. Penggunaan saldo tahun berjalan, sisa lebih/kurang pembiayaan tahun berjalan, koreksi kesalahan dan saldo anggaran lebih akhir.

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai Rp41.381.753.452,10 jumlah ini merupakan hasil posisi SiLPA Tahun 2023 yang disajikan senilai Rp41.381.753.452,10.

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah memanfaatkan keseluruhan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun senilai Rp41.381.753.452,10 untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tahun berjalan.

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) merupakan akumulasi SiLPA awal tahun dan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Jumlah Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2023 senilai Rp41.381.753.452,10. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Surplus/(Defisit)* Anggaran (Rp27.507.370.577,67)
- Pembiayaan Neto Rp41.381.753.452,10
- SiLPA Tahun berjalan Rp13.874.382.874,43

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir menggambarkan posisi saldo anggaran Pemerintah Kab. Mamuju Tengah di akhir periode akuntansi. Posisi SiLPA awal tahun yang diakui sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan ditambah dengan koreksi pembukuan tahun sebelumnya akan menggambarkan posisi Saldo Anggaran per 31 Desember 2024 senilai Rp13.874.382.874,43.

7.5.3. Neraca

Neraca (*statement of financial performance*) adalah pernyataan tertulis sah bagi publik tentang kewajaran keuangan yang dinyatakan oleh entitas karena postur neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu, posisi keuangan tersebut adalah posisi tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup seluruh sumber daya yang memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kewajiban merupakan utang yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang. Ekuitas mencerminkan kekayaan bersih Pemerintah Daerah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban. Berikut ini deskripsi setiap akun-akun yang disajikan dalam Neraca Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Posisi keuangan per 31 Desember 2024 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 41
Rincian Neraca

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	ASET	1.378.301.374.472,31	1.387.420.137.414,53	(9.118.762.942,22)	(0,66)
2	KEWAJIBAN	7.439.661.925,71	17.073.291.219,31	(9.633.629.293,60)	(56,43)
3	EKUITAS	1.370.861.712.546,60	1.370.346.846.195,22	514.866.351,38	0,04

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah sendiri maupun masyarakat, dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan dan sumber daya lainnya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah aset Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.378.301.374.472,31 dan per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp1.387.420.137.414,53 mengalami penurunan senilai (Rp9.118.762.942,22) atau (0,66)%. Rincian aset dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 42
Rincian Aset

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Aset Lancar	36.455.641.658,58	62.876.916.880,33	(26.421.275.221,75)	(42,02)
2	Investasi Jangka Panjang	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	0,00	0,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
3	Aset Tetap	1.322.010.125.591,49	1.313.408.209.063,47	8.601.916.528,02	0,65
4	Properti Investasi	5.447.999.112,00	0,00	5.447.999.112,00	100,00
5	Aset Lainnya	8.387.608.110,24	5.135.011.470,73	3.252.596.639,51	63,34
	Jumlah	**1.378.301.374.472,31**	**1.387.420.137.414,53**	**(9.118.762.942,22)**	**(0,66)**

1. Aset Lancar

Aset Lancar diklasifikasikan berdasarkan tingkat likuiditasnya sebab diharapkan akan dipakai dalam jangka waktu di bawah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca. Aset Lancar per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp36.455.641.658,58 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp62.876.916.880,33. Mengalami penurunan senilai (Rp26.421.275.221,75) atau (42,02)%. Rincian Aset Lancar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 43
Rincian Aset Lancar

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	10.009.738.986,53	39.075.017.660,06	(29.065.278.673,53)	(74,38)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	225.421.845,00	96.509.756,00	128.912.089,00	133,57
3	Kas di Bendahara Penerimaan	18.800.000,00	43.350.439,00	(24.550.439,00)	(56,63)
4	Kas di BLUD	2.103.923.795,86	0,00	2.103.923.795,86	100,00
5	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kas Dana BOS	0,00	1.790.122,04	(1.790.122,04)	(100,00)
7	Kas Lainnya	218.879.508,00	2.165.085.475,00	(1.946.205.967,00)	(89,89)
8	Kas Dana BOSP	40.938.422,04	0,00	40.938.422,04	100,00
9	Kas Dana BOK Puskesmas	1.465.886.736,00	0,00	1.465.886.736,00	100,00
10	Piutang Pajak Daerah	22.259.634.950,00	16.877.669.962,00	5.381.964.988,00	31,89
11	Piutang Retribusi Daerah	1.414.766.945,00	940.613.250,00	474.153.695,00	50,41
12	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.552.070.295,00	411.770.440,00	3.140.299.855,00	762,63
13	Piutang Transfer	0,00	1.127.948.456,00	(1.127.948.456,00)	(100,00)
14	Penyisihan Piutang	(15.520.273.439,20)	(9.835.093.544,30)	(5.685.179.894,90)	57,81
15	Persediaan	10.665.853.614,35	11.972.254.864,53	(1.338.327.699,18)	(11,40)
Jumlah		**36.455.641.658,58**	**62.876.916.880,33**	**(26.421.275.221,75)**	**(42,02)**

a) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10.009.738.986,53 mengalami penurunan senilai Rp(29.065.278.673,53) atau (74,38)% dari saldo kas per 31 Desember 2023 senilai Rp39.075.017.660,06 Jumlah ini merupakan saldo kas Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang berada di rekening bank dengan rincian sebagai berikut

Tabel 7. 44
Daftar Rekening Kas Daerah

Dalam Rupiah

No	Nama Bank	No. Rekening	Jumlah
1	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (RKUD)	077-001-000000001-3	3.031.479.435,53
2	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK FISIK)	077-001-000000002-1	4.723.347.955,00
3	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DAK NON FISIK)	077-001-000000003-0	746.070.465,00
4	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (BKK)	077-001-000000004-8	120.287.344,00
5	Bank SULSELBAR Cabang Topoyo (DKTG)	077-001-000000006-4	1.388.553.787,00
Jumlah			**10.009.738.986,53**

b) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp225.421.845,00 mengalami kenaikan senilai Rp128.912.089,00 atau 133,57% dari kas per 31 Desember 2023 senilai Rp96.509.756,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada tiga SKPD dengan rincian pada tabel dibawah ini:

Tabel 7. 45
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran			Jumlah
		Sisa UP	Sisa TU	PFK	
1	Setda Bag. Administrasi Pembangunan	32.660,00	0,00	0,00	32.660,00
2	Sekretariat DPRD	225.289.185,00	0,00	0,00	225.289.185,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Jumlah		**225.421.845,00**	**0,00**	**0,00**	**225.421.845,00**

Terdapat saldo kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 pada tabel di atas yang merupakan sisa UP yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Akan tetapi sisa UP tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 09 - 10 Januari 2025.

c) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp18.800.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp24.550.439,00)atau (56,63)% dari saldo kas per 31 Desember 2023 senilai Rp43.350.439,00. Penurunan saldo ini mencerminkan upaya optimalisasi pengelolaan kas oleh Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal percepatan penyetoran penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Hal ini juga mencerminkan peningkatan efisiensi administrasi pengelolaan kas serta kepatuhan bendahara penerimaan terhadap ketentuan penatausahaan keuangan daerah. Adapun Kas di Bendahara Penerimaan yang terdapat pada dua SKPD dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. 46
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.750.000,00
2	Dinas Kesehatan (Puskesmas Durikumba)	50.000,00
Jumlah		**18.800.000,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 pada tabel di atas yang merupakan penerimaan retribusi daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2024. Akan tetapi kas penerimaan tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari dan Maret 2025

d) Kas di BLUD

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi BLUD yang terdiri BLUD RSUD Mamuju Tengah pada tahun anggaran 2024. Kas di BLUD per 31 Desember 2024 senilai Rp2.103.923.795,86 mengalami kenaikan senilai Rp2.103.923.795,86 atau 100,00%

dari saldo kas per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00, atas laporan keuangan BLUD RSUD Kab. Mamuju Tengah terdapat pada *lampiran 44.*

e) Kas Dana Kapitasi pada FKTP

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi dana kapitasi JKN yang dikelola oleh seluruh Puskesmas di Kab. Mamuju Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 saldo kas di Bendahara JKN adalah senilai Rp0,00. Rekapan penerimaan dan pengeluaran dana kapitasi JKN yang secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 45.*

f) Kas Dana BOS

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi Dana BOS yang dikelola oleh sekolah-sekolah. Pada tahun anggaran 2024 terdapat perubahan kodefikasi rekening dari Kas Dana BOS ke Kas BOSP sehingga sisa kas Dana BOS tahun anggaran 2023 senilai Rp1.790.122,04, direklas ke Kas BOSP.

g) Kas Lainnya

Kas lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan Kas BLUD serta menjadi tanggungjawab entitas pelaksana teknis.

Pada kas lainnya terdapat sisa kas di buku rekening prolanis BPJS senilai Rp9.673.089,00 dan Penerimaan PFK yang belum disetor hingga per 31 Desember 2024 senilai Rp209.206.419,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7. 47
Rincian Kas Lainnya

Dalam Rupiah

No.	SKPD	2024	2023
1	Prolanis BPJS Kesehatan	9.673.089,00	24.067.400,00
2	DSP BPBD	0,00	1.000.000,00
3	Dana BOK Puskesmas	0,00	2.140.018.075,00
4	Penerimaan PFK – BOP Paud	9.565.593,00	0,00
5	Penerimaan PFK – BOS	168.655.530,00	0,00
6	Penerimaan PFK – BOK	2.734.407	0,00
7	Penerimaan PFK – Kapitasi JKN	7.235.590	0,00
8	Penerimaan PFK – Sekretariat DPRD	11.662.799,00	0,00
9	Penerimaan PFK – Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	9.352.500,00	0,00
Jumlah		**218.879.508,00**	**2.165.085.475,00**

Untuk dana prolanis BPJS kesehatan di 11 puskesmas, DSP BPBD dan Penerimaan PFK yang belum disetor, rincian dapat dilihat pada *lampiran 46-48.*

h) Kas Dana BOSP

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi Dana BOSP yang dikelola oleh sekolah-sekolah di Kab. Mamuju Tengah sampai dengan 31 Desember 2024 saldo Kas Bendahara BOSP adalah senilai Rp40.938.422,04 yang mengalami kenaikan senilai Rp40.938.422,04 atau 100,00% dari saldo kas per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOSP dapat dilihat pada *lampiran 49.*

i) Kas Dana BOK Puskesmas

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat transaksi kas dana BOK Puskesmas yang dikelola oleh 11 (Sebelas) Puskesmas yang ada di Kab. Mamuju Tengah sampai dengan 31 Desember 2024, saldo kas dana BOK Puskesmas tersebut adalah senilai Rp1.465.886.736,00 yang mengalami penurunan senilai (Rp674.131.339,00) atau (45,98%) dari saldo kas per 31 Desember 2023 senilai Rp2.140.018.075,00. Saldo awal tahun 2024 pada rekening kas dana BOK Puskesmas senilai Rp2.140.018.075,00, yang diperoleh dari kas lainnya. Tahun Anggaran 2023 dana BOK Puskesmas dicatat di Kas Lainnya dikarenakan belum dilakukan pemutakhiran kode rekening kas dana BOK Puskesmas pada aplikasi SIPD, sehingga Tahun Anggaran 2024 dilakukan reklas kas saldo awal dari kas lainnya ke kas dana BOK Puskesmas sesuai kode rekening terbaru pada aplikasi SIPD. Secara rinci penerimaan dan pengeluaran dana BOK Puskesmas dapat dilihat pada *lampiran 50.*

j) Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah yang timbul pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp22.259.634.950,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.381.964.988,00 atau 31,89% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.877.669.962,00 dengan rincian piutang pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 7. 48
Rincian Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Uraian	2024	2023
Piutang Pajak PBB	21.715.497.206,00	16.298.511.417,00
Piutang Pajak Penerangan Jalan	544.137.744,00	579.158.545,00
Jumlah	**22.259.634.950,00**	**16.877.669.962,00**

1) Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp22.259.634.950,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.381.964.988,00 atau 31,89% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp16.877.669.962,00;
2) Piutang pajak daerah senilai Rp22.259.634.950,00 terdiri dari Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Piutang Pajak Penerangan Jalan;
3) Piutang PBB-P2 merupakan nilai piutang selama Tahun 2013-2024 senilai Rp21.715.497.206,00 sesuai data yang telah diperbaharui dari Bidang Pendapatan BPKPAD. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 51*;
4) Terdapat pula Piutang Pajak Penerangan Jalan senilai Rp544.137.744,00 untuk penggunaan Bulan Desember 2024 dan piutang tersebut tidak dilakukan penyisihan piutang di tahun berjalan sesuai dengan kebijakan akuntansi. Data Piutang Pajak Penerangan Jalan dapat dilihat pada *lampiran 52*;

k) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi Daerah per tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp1.414.766.945,00 mengalami kenaikan senilai Rp474.153.695,00 atau 50,41% dari saldo piutang per 31 Desember 2023 senilai Rp940.613.250,00.

1) Piutang retribusi UPTD Air Bersih periode sampai dengan Desember 2024 yang belum terbayarkan sampai berakhir Tahun Anggaran 2024 senilai Rp830.141.250,00. Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 53*.
2) Saldo Piutang Retribusi ini merupakan piutang retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas senilai Rp584.625.695,00, Secara rinci dapat dilihat pada *lampiran 54*.

l) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp3.552.070.295,00 mengalami kenaikan senilai Rp3.140.299.855,00 atau 762,63% dari saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp411.770.440,00 dengan rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

Tabel 7. 49
Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Per 31 Desember 2024

Dalam Rupiah

Uraian	2024	2023
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	38.681.900,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	62.635.488,00	0,00
Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.450.752.907,00	0,00
Piutang pendapatan dana kapitasi JKN di Puskesmas	0,00	411.770.440,00
Jumlah	**3.552.070.295,00**	**411.770.440,00**

(1) Saldo piutang penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp38.681.900,00. Saldo ini merupakan piutang dana prolanis pada 11 puskesmas yang belum diterima hingga berakhirnya tahun anggaran 2024.
(2) Saldo piutang Pendapatan dari Pengembalian pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp62.635.488,00. Saldo ini merupakan kelebihan pembayaran pada pekerjaan Instalasi Pengolahan Air/IPA/Penambahan Sumur Dalam Terlindungi/Broncaptering pada Dinas PUPR hingga berakhirnya tahun anggaran 2024.

(3) Saldo piutang pendapatan BLUD dari jasa layanan pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp3.450.752.907,00. Saldo ini menunjukkan adanya pendapatan yang belum diterima oleh RSUD dari jasa layanan hingga berakhirnya tahun anggaran 2024.
(4) Saldo Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN di Puskesmas per 31 Desember 2024 senilai Rp0,00;
(5) Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00, penyisihan ini merupakan aturan di kebijakan akuntansi yang dimana piutang kurang dari satu tahun penyisihannya 0,00%;
(6) Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan netto merupakan nilai bersih dari Piutang Pendapatan Lain-lain dikurangi penyisihan piutang selama satu tahun senilai Saldo Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan per 31 Desember 2024 senilai Rp3.450.752.907,00 nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
   (a) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,00%;
   (b) Kualitas kurang lancar jika umur piutang satu sampai dua tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10,00%;
   (c) Kualitas diragukan jika umur piutang tiga sampai lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50,00%; dan
   (d) Kualitas macet jika umur piutang diatas lima tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100,00%.

m) Piutang Transfer

Piutang Transfer pada Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah per tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp0,00.

n) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang Pajak untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp 15.520.273.439,20 mengalami kenaikan senilai Rp5.685.179.894,90 atau 57,81% dari Tahun 2023 senilai Rp9.835.093.544,30. Penyisihan ini merupakan penyisihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan selama Tahun 2013-2024; dan Piutang pajak neto merupakan nilai bersih dari piutang pajak dikurangi penyisihan piutang pajak selama Tahun 2013-2024. Piutang Pajak Neto senilai Rp6.739.361.510,80, nilai tersebut diatas didapatkan dari perhitungan sebagai berikut:
(1) Kualitas lancar jika umur piutang kurang dari satu tahun, dengan besaran persentase penyisihan 0,00%;
(2) Kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai 2 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 10,00%;
(3) Kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 50,00%; dan

Kualitas macet jika umur piutang diatas 5 tahun semenjak jatuh tempo dengan besaran persentase penyisihan 100,00%.

o) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp10.665.853.614,35 mengalami penurunan senilai (Rp1.306.401.250,18) atau (10,91%) dari saldo Tahun 2023 senilai Rp11.972.254.864,53. Adapun rincian persediaan yang dimaksud dapat dilihat pada *lampiran 55.*

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 telah memiliki Investasi Jangka Panjang senilai Rp6.000.000.000,00, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari Tahun 2023 senilai Rp6.000.000.000,00.

a) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

b) Investasi Jangka Panjang Permanen

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah merencanakan Investasi Jangka Panjang Permanen senilai Rp10.000.000.000,00 dalam jangka waktu 4 (empat) tahun mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024 akan tetapi tidak dilakukan penganggaran di tahun 2024 dikarenakan ada keterbatasan anggaran disebabkan karena terdapat pembiayaan PEMILUKADA dan akan dianggarkan kembali di tahun 2025. Adapun rincian pembayaran Investasi Jangka Panjang Permanen di tahun pertama (2021) senilai Rp1.000.000.000,00, tahun kedua (2022) senilai Rp2.000.000.000,00, tahun ketiga (2023) senilai Rp3.000.000.000,00 dengan total nilai Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 senilai Rp6.000.000.000,00.

3. Aset tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Saldo aset tetap yang dikuasai Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sampai akhir Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp1.328.313.336.524,70 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp1.313.408.209.063,47 mengalami kenaikan senilai Rp14.905.127.461,23 atau 1,13%. Rincian aset tetap Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 50
Rincian Aset tetap

Dalam Rupiah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Tanah	67.563.713.775,00	66.833.889.667,00	729.824.108,00	1,09
2	Peralatan dan mesin	312.141.048.392,70	279.733.386.440,66	32.407.661.952,04	11,59
3	Gedung dan Bangunan	610.901.615.935,60	584.372.010.415,60	26.529.605.520,00	4,54
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.117.836.025.561,54	1.062.927.244.654,54	54.908.780.907,00	5,17
5	Aset tetap Lainnya	9.631.050.817,91	9.435.638.671,91	195.412.146,00	2,07
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	38.221.842.256,76	26.550.240.206,76	11.671.602.050,00	43,96
7	Akumulasi Penyusutan	(829.107.439.372,65)	(716.444.200.993,00)	(112.663,238.379,65)	15,73
Jumlah		**1.322.010.125.591,49**	**1.313.408.209.063,47**	**8.601.916.528,02**	**0,65**

a) Tanah

Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak dan biaya yang berhubungan dengan pengukuran.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2024 senilai Rp67.787.756.175,00 mengalami kenaikan senilai Rp953.866.508,00 atau 1,43% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp66.833.889.667,00. Rincian Aset tetap tanah senilai Rp67.787.756.175,00 pada OPD per 31 Desember 2024, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 56.*

Tabel 7. 51
Rincian Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Tanah	66.833.889.667,00	6.600.654.620,00	5.646.788.112,00	67.787.756.175,00

1) Penambahan Aset tetap Tanah senilai Rp6.600.654.620,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 52
Rincian Penambahan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.789.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	2.080.426.400,00
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.321.439.220,00
	Total	**6.600.654.620,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp6.600.654.620,00 terdiri dari:

(a) Penambahan aset tetap tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp198.789.000,00 merupakan realisasi belanja modal Tanah Tahun Anggaran 2024.

(b) Penambahan aset tetap tanah pada Dinas Perumahan Rakyat senilai Rp2.080.426.400,00 terdiri dari:
   (1) Penambahan aset tetap tanah senilai Rp1.856.384.000,00 merupakan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024;
   (2) Penambahan aset tetap tanah senilai Rp224.042.400,00 merupakan jurnal koreksi kurang pencatatan berupa kesalahan penganggaran barang dan jasa ke modal atas belanja jasa penilaian tanah.

(c) Penambahan aset tanah pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.321.439.220,00 dengan rincian sebagai berikut:
   (1) Penambahan aset tetap tanah senilai Rp55.507.650,00 merupakan utang belanja modal penimbunan halaman sekolah;
   (2) Penambahan aset tetap tanah berupa reklasifikasi antar KIB dari gedung dan bangunan senilai Rp3.440.931.570,00;
   (3) Penambahan nilai aset tetap tanah berupa Peralihan Status Sekolah TK Swasta menjadi Sekolah TK Negeri senilai Rp825.000.000,00.

2) Pengurangan Aset tetap Tanah senilai Rp5.646.788.112,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 53
Rincian Pengurangan Aset tetap Tanah pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	198.789.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	5.447.999.112,00
	Total	**5.646.788.112,00**

Adapun penjelasan Pengurangan aset tetap tanah Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.646.788.112,00 terdiri dari:

(a) Pengurangan aset tetap tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp198.789.000,00 terdiri dari :
   (1) Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Bangunan Papan Nama Instansi RSUD Kab. Mamuju Tengah senilai Rp196.081.000,00;
   (2) Kesalahan Penganggaran merupakan barang yang diserahkan ke Masyarakat namun terealisasi di Belanja Modal Tanah Lapangan Lainnya senilai Rp2.708.000,00, berupa Pengawasan Pembangunan Pagar Gereja Sion Batu Parigi

(b) Pengurangan aset tetap pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp5.447.999.112,00 merupakan reklasifikasi aset tetap tanah ke Properti Investasi Tanah.

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Tanah

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**66.833.889.667,00**
Mutasi Tahun 2024		
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	2.055.173.000,00
- Utang 2024	Rp	55.507.650,00
- Terima Hibah	Rp	825.000.000,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp	3.440.931.570,00

- Jukor kurang pencatatan	Rp	224.042.400,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**6.600.654.620,00**
Pengurangan :		
- Kesalahan Rekening Belanja	Rp	2.708.000,00
- Reklasifikasi Antar KIB	Rp	196.081.000,00
- Properti Investasi	Rp	5.447.999.112,00
Sub. Total Pengurangan	**Rp**	**5.646.788.112,00**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**67.787.756.175,00**

Per 31 Desember 2023 ditemukan adanya kurang pencatatan aset tanah bawah gedung dan bangunan dikarenakan bukti atas hak belum sepenuhnya memenuhi syarat untuk pengakuan sebagai tanah milik Pemda. Dan untuk tanah dibawah jalan berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Kab. Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2023 tanggal 06 Januari 2023, jika disandingkan dengan SK Ruas Jalan Kab. Mamuju Tengah Nomor : 90/HK/KEP-BUP/I/2015 tanggal 07 Januari 2015.

Risiko hukum terkait Aset Tetap yang belum tercatat dalam laporan keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah karena belum dimiliki secara legal dan sah berpotensi menjadi masalah serius di masa depan karena status kepemilikan dan penggunaan aset-aset tersebut belum dapat diakui secara hukum akan berpengaruh pada pencatatan dan pelaporan aset yang tidak dilakukan tepat waktu dan yang lebih terpenting lagi adalah status kepemilikan aset yang belum jelas. Jika pencatatannya tidak lengkap, maka dapat mengakibatkan aset sulit diidentifikasi, sulit ditemukan keberadaannya dan terdapat risiko berupa hilangnya aset. Namun, hingga saat ini, tidak ada klaim hukum, litigasi, atau permasalahan hukum lain yang teridentifikasi yang dapat memberikan dampak material terhadap keberadaan atau nilai aset tetap.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akan terus memantau dan mengevaluasi perkembangan terkait dengan aset-aset ini serta berkomitmen untuk memberikan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu tentang segala resiko hukum yang relevan di masa mendatang dan mengupayakan Pengamanan Hukum agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap Aset Tanah milik Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dimana ketika apabila terjadi suatu permasalahan yang melibatkan bukti kepemilikan dapat dibuktikan bahwa Aset tersebut di bawah kepemilikan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sehingga Pengelola Barang Milik Daerah khususnya pada proses Pengamanan Aset Tetap Tanah di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sudah berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah dan juga beracuan pada Peraturan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Milik Daerah.

Aset tetap Tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah pada tahun 2023, ada beberapa yang belum tercatat di KIB diantaranya tanah di bawah Gedung dan Bangunan, tanah Jalan, Irigasi dan Jaringan belum tercatat secara komprehensif karena merupakan Pelimpahan dari Pemerintah Kab. Mamuju yang data pelimpahannya tidak disertai dengan data yang lebih rinci sehingga Pemerintah Kab. Mamuju Tengah belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi keberadaannya secara maksimal. Dalam Pencatatan Aset Tetap Tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah tidak menuangkan batasan nilai Kapitalisasi pada Kebijakan Akuntansi karena Aset Tetap Tanah belum memiliki Batasan Kapitalisasi.

Untuk menentukan nilai catat tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah belum memiliki tenaga ahli penilai tanah, hanya berdasarkan dengan nilai perolehan dan disesuaikan dengan Nilai Jual Objek pajak (NJOP).

Dalam hal pengungkapan properti investasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah belum melaksanakan pemetaan daftar aset yang memenuhi standarisasi dalam properti investasi sesuai PSAP 17. Jika terdapat tanah idle yang masuk dalam kategori properti investasi, PSAP 17 mungkin mengharuskan entitas tersebut untuk merekam nilai aset tersebut dengan cara yang berbeda. Properti investasi biasanya diukur dengan nilai wajar, yang mungkin berubah dari waktu ke waktu tergantung pada faktor-faktor seperti permintaan pasar, kondisi ekonomi, dan perubahan regulasi. Jika terdapat tanah idle yang termasuk dalam kategori properti investasi, maka pencatatan tanah tersebut akan disesuaikan berdasarkan standar akuntansi perubahan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Dalam Pencatatan aset tetap tanah Pemerintah Kab. Mamuju Tengah tidak ada rincian mengenai jenis-jenis aset tetap tanah dikarenakan jenis-jenis Aset Tetap Tanah belum dituangkan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, sehingga penyesuaian dalam daftar pencatatan akan ditindaklanjuti berdasarkan perubahan standar akuntansi yang akan ditetapkan.

Kurangnya Pencatatan Terkait Tanah dibawah Jalan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah berdasarkan identifikasi dan verifikasi dokumen pendukung sebagai dasar dalam melakukan pencatatan, ditemukan berbagai permasalahan yang diantaranya adalah data pelimpahan dari Pemerintah Kab. Mamuju tidak didukung oleh bukti alas hak atau sumber perolehan lainnya yang sah sehingga menyebabkan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah tidak dapat memberikan informasi secara valid.

Pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah terdapat 540 Bidang Tanah senilai Rp66.833.889.667,00 yang tercatat di KIB. Dari 540 Bidang tanah tersebut terdapat 277 Bidang Tanah senilai Rp23.436.988.819,00 yang bersertifikat serta tercatat di KIB dan 263 Bidang Tanah senilai Rp43.396.900.848,00 yang belum bersertifikat dan tercatat di KIB. Total 293 Bidang Tanah yang sudah memiliki sertifikat terbit. Dari 293 bidang tanah yang bersertifikat terdapat 277 bidang tanah yang bersertifikat serta tercatat di KIB dan 16 bidang tanah yang bersertifikat namun belum terdeteksi di KIB.

b) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 54
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Untuk Peralatan dan Mesin

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	2	1	1	ALAT BESAR DARAT	≥10.000.000
1	3	2	1	2	ALAT BESAR APUNG	≥10.000.000
1	3	2	1	3	ALAT BANTU	≥1.000.000
1	3	2	2	1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	≥5.000.000
1	3	2	2	2	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	≥1.000.000
1	3	2	2	3	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	≥5.000.000
1	3	2	2	4	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	≥1.000.000
1	3	2	2	5	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	≥10.000.000
1	3	2	3	1	ALAT BENGKEL BERMESIN	≥300.000
1	3	2	3	2	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	≥300.000
1	3	2	3	3	ALAT UKUR	≥300.000
1	3	2	4	1	ALAT PENGOLAHAN	≥5.000.000
1	3	2	5	1	ALAT KANTOR	≥300.000
1	3	2	5	2	ALAT RUMAH TANGGA	≥300.000
1	3	2	5	3	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	≥300.000
1	3	2	6	1	ALAT STUDIO	≥300.000
1	3	2	6	2	ALAT KOMUNIKASI	≥500.000
1	3	2	6	3	PERALATAN PEMANCAR	≥500.000
1	3	2	6	4	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	≥300.000
1	3	2	7	1	ALAT KEDOKTERAN	≥300.000
1	3	2	7	2	ALAT KESEHATAN UMUM	≥300.000
1	3	2	8	1	UNIT ALAT LABORATORIUM	≥300.000
1	3	2	8	2	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	≥300.000
1	3	2	8	3	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	≥300.000
1	3	2	8	4	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	≥300.000
1	3	2	8	5	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	≥300.000
1	3	2	8	6	RADIATION APPLICATION AND NONDESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	≥300.000

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	2	8	7	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	≥300.000
1	3	2	8	8	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	≥300.000
1	3	2	8	9	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	≥300.000
1	3	2	9	1	SENJATA API	≥500.000
1	3	2	9	2	PERSENJATAAN NON SENJATA API	≥500.000
1	3	2	9	3	SENJATA SINAR	≥500.000
1	3	2	9	4	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	≥500.000
1	3	2	10	1	KOMPUTER UNIT	≥300.000
1	3	2	10	2	PERALATAN KOMPUTER	≥300.000
1	3	2	11	1	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	≥5.000.000
1	3	2	11	2	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	≥5.000.000
1	3	2	12	1	ALAT PENGEBORAN MESIN	≥5.000.000
1	3	2	12	2	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	≥5.000.000
1	3	2	13	1	SUMUR	≥5.000.000
1	3	2	13	2	PRODUKSI	≥5.000.000
1	3	2	13	3	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	≥5.000.000
1	3	2	14	1	ALAT BANTU EKSPLORASI	≥1.000.000
1	3	2	14	2	ALAT BANTU PRODUKSI	≥1.000.000
1	3	2	15	1	ALAT DETEKSI	≥500.000
1	3	2	15	2	ALAT PELINDUNG	≥500.000
1	3	2	15	3	ALAT SAR	≥500.000
1	3	2	15	4	ALAT KERJA PENERBANGAN	≥500.000
1	3	2	16	1	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	≥300.000
1	3	2	17	1	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	≥300.000
1	3	2	18	1	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	≥10.000.000
1	3	2	18	2	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	≥10.000.000
1	3	2	18	3	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	≥10.000.000
1	3	2	19	1	PERALATAN OLAH RAGA	≥300.000

Saldo Aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai Rp311.380.597.717,34. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp31.647.211.276,68 atau 11,31% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp279.733.386.440,66. Akumulasi penyusutan aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 senilai (Rp230.038.851.774,53), sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp81.341.745.942,82. Rincian Aset tetap Peralatan dan Mesin pada SKPD per 31 Desember 2024, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 57*.

Tabel 7. 55
Penambahan/pengurangan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Peralatan dan Mesin	279.733.386.440,66	40.200.215.854,00	8.553.004.577,32	311.380.597.717,34

1) Penambahan aset tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp40.200.215.854,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 56
Rincian Penambahan Aset tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Tambah
1	Sekretariat DPRD	200.635.775,00
2	Sekretariat Daerah	437.988.811,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	374.960.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan	3.998.000,00

No	Nama SKPD	Tambah
5	Dinas Perhubungan	126.413.549,00
6	Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian	119.688.000,00
7	Dinas Kesehatan	7.633.633.427,00
8	Rumah Sakit Umum Daerah	18.429.413.052,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.545.500,00
10	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.191.853.083,00
11	Dinas Sosial	12.545.500,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	52.750.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	61.380.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	61.868.000,00
15	Dinas Perikanan	171.610.600,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	6.681.500,00
17	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	1.425.836.862,00
18	Inspektorat	22.000.000,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	65.500.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup	4.261.742.650,00
21	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	78.819.589,00
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	60.563.736,00
23	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	1.299.000.000,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.088.220,00
25	Kecamatan Topoyo	28.700.000,00
26	Kecamatan Karossa	19.000.000,00
	Total	**40.200.215.854,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp40.200.215.854,00 sebagai berikut:

(a) Penambahan Aset tetap Peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp200.635.775,00 terdiri dari:
   (1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp174.018.000,00;
   (2) Jurnal koreksi ekstra ke intra senilai Rp26.617.775,00.

(b) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp437.988.811,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(c) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp374.960.000,00 berupa:
   (1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp194.980.000,00;
   (2) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp179.980.000,00.

(d) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan senilai Rp3.998.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(e) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp126.413.549,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(f) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian senilai Rp119.688.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(g) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp7.633.633.427,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(h) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp18.429.413.052,00, merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(i) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

senilai Rp3.545.500,00, merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(j) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.191.853.083,00 merupakan:
   (1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp3.082.515.300;
   (2) Reklasifikasi tambah antar KIB berupa *Sound System* senilai Rp5.000.000,00;
   (3) Realisasi belanja modal dana BOS peralatan dan mesin senilai Rp2.008.320.260,00
   (4) Reklasifikasi antar KIB dana BOS senilai Rp31.434.000,00;
   (5) Reklasifikasi berupa barang dan jasa dana BOS yang di akui sebagai aset tetap senilai Rp64.583.523,00.

(k) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Sosial senilai Rp12.545.500,00, merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(l) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp52.750.000,00, merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(m) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp61.380.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(n) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp61.868.000,00, merupakan realiasasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(o) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan senilai Rp171.610.600,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(p) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp6.681.500,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(q) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.425.836.862,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(r) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Inspektorat Daerah senilai Rp22.000.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(s) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan senilai Rp65.500.000,00 merupakan:
   (1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60.500.000;
   (2) Reklasifikasi tambah dari aset tetap lainnya berupa sound system senilai Rp5.000.000,00.

(t) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp4.261.742.650,00 merupakan:
   (1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp331.768.000;
   (2) Terima hibah senilai Rp3.929.974.650,00.

(u) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata senilai Rp78.819.589,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(v) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp60.563.736,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(w) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran senilai Rp1.299.000.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(x) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp50.088.220,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

(y) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Kecamatan Topoyo senilai Rp28.700.000,00 merupakan realisasi belanja modal Peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.
(z) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin pada Kecamatan Karossa senilai Rp19.000.000,00 merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024.

2) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp8.553.004.577,32 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 57
Rincian Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Kurang
1	Sekretariat DPRD	66.378.000,00
2	Sekretariat Daerah	2.796.099.428,96
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	296.090.000,00
4	Dinas Perhubungan	16.500.000,00
5	Dinas Kesehatan	1.799.664.738,06
6	Rumah Sakit Umum Daerah	2.968.039.627,30
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	39.975.000,00
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	324.394.415,00
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	39.098.000,00
10	Dinas Perikanan	110.680.600,00
11	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	15.889.000,00
12	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	2.636.889,00
13	Inspektorat	17.051.200,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	800.000,00
15	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	1.700.000,00
16	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.007.679,00
	Total	**8.553.004.577,32**

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap peralatan dan mesin Tahun Anggaran 2024 senilai Rp8.553.004.577,32 sebagai berikut

(a) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp66.378.000,00 merupakan pembayaran Utang pada Tahun sebelumnya.
(b) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.796.099.428,96 terdiri dari:
  (1) reklasifikasi ke aset lain-lain berupa barang yang rusak senilai Rp2.792.769.428,96;
  (2) Jurnal koreksi aset intra ke ekstra senilai Rp3.330.000,00.
(c) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp296.090.000,00 berupa :
  (1) Pengurangan berupa pembayaran utang pada tahun sebelumnya senilai Rp179.980.000,00;
  (2) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp116.110.000,00.
(d) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp16.500.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain.
(e) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.799.664.738,06 merupakan:
  (1) Pembayaran utang pada Tahun sebelumnya senilai Rp41.565.000,00;
  (2) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp392.993.675,00;
  (3) Reklasifikasi ke gedung dan bangunan berupa Bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) senilai Rp600.000.000,00;
  (4) Aset Tetap dari Intra ke Ekstra senilai Rp9.023.500,00;
  (5) Jurnal koreksi kelebihan pencatatan berupa pengadaan alat kesehatan (Hematology Analyzer) senilai Rp756.082.563,06.
(f) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp2.968.039.627,30 merupakan:
  (1) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp1.003.859.440,00;

(2) Reklasifikasi ke jalan, jaringan dan irigasi berupa Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) senilai Rp1.924.500.000,00;
(3) Reklasifikasi ke aset tetap lainnya berupa aset renovasi pada bangunan yang belum tercatat induknya senilai Rp14.810.000,00;
(4) Jurnal koreksi kelebihan pencatatan berupa belanja modal alat kedokteran umum Rencare EKG Digital senilai Rp24.870.187,30.

(g) Pengurangan aset teap peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana senilai Rp39.975.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain.

(h) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp324.394.415,00 merupakan :
(1) Aset Tetap dari Intra ke ekstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp168.253.300,00;
(2) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin berupa hibah senilai Rp31.185.000,00;
(3) Aset tetap dari intra ke ekstra Dana BOS senilai Rp100.300.315,00;
(4) Reklasifikasi antar KIB Dana BOS senilai Rp16.215.300,00;
(5) Reklasifikasi ke barang dan jasa Dana BOS senilai Rp5.654.800,00;
(6) Jurnal koreksi aset tetap dari intra ke ekstra senilai Rp2.785.700,00.

(i) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp39.098.000,00 berupa:
(1) Pembayaran utang pada tahun sebelumnya senilai Rp20.598.000,00;
(2) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp18.500.000,00.

(j) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perikanan senilai Rp110.680.600,00 merupakan:
(1) Pembayaran utang pada tahun sebelumnya senilai Rp108.180.600,00;
(2) Aset Tetap dari Intra ke Ekstra senilai Rp2.500.000,00.

(k) Pengurangan aset pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan senilai Rp15.889.000,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain.

(l) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah senilai Rp2.636.889,00 merupakan hibah ke SAMSAT berupa kursi.

(m) Pengurangan aset peralatan dan mesin pada Inspektorat senilai Rp17.051.200,00 merupakan reklasifikasi ke aset lain-lain.

(n) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp800.000,00 merupakan koreksi Aset Tetap dari Intra ke Ekstra

(o) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp1.700.000,00 merupakan reklasifikasi ke barang dan jasa.

(p) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp58.007.679,00
(1) Aset Tetap dari intra ke ekstra senilai Rp1.200.000,00;
(2) Reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp56.807.679,00.

3) Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai (Rp230.038.851.774,53) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 58
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
312.141.048.392,70	(201.261.461.292,07)	(33.536.186.201,42)	(4.758.795.718,96)	(230.038.851.774,53)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Peralatan dan mesin

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**279.733.386.440,66**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	33.949.305.646,00
- Hibah	Rp	3.929.974.650,00
- Reklas antar KIB	Rp	189.980.000,00
- Realisasi belanja modal Dana BOS	Rp	2.008.320.260,00
- Reklas antar KIB Dana BOS	Rp	31.434.000,00

- Reklas dari barang dan jasa Dana BOS	Rp	64.583.523,00
- Jurnal koreksi dari ekstra ke intra	Rp	26.617.775,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**40.200.215.854,00**
Pengurangan:		
- Pembayaran utang	Rp	416.701.600,00
- Ekstrakom Dari Pengadaan APBD	Rp	181.776.800,00
- Di Hibahkan	Rp	33.821.889,00
- Reklas ke barang dan jasa	Rp	1.700.000,00
- Reklas kurang antar KIB	Rp	2.539.310.000,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	4.470.455.422,96
- Ekstrakom Dari Pengadaan Dana BOS	Rp	100.300.315,00
- Reklas antar KIB Dana BOS	Rp	16.215.300,00
- Reklas ke barang dan jasa Dana BOS	Rp	5.654.800,00
- Jurnal koreksi kelebihan pencatatan	Rp	780.952.750,36
- Jurnal koreksi intra ke ekstra	Rp	6.115.700,00
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**8.553.004.577,32**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**311.380.597.717,34**
Akumulasi Penyusutan	Rp	(230.038.851.774,53)
Nilai Buku	**Rp**	**81.341.745.942,81**

Dalam Pencatatan Aset tetap Peralatan dan Mesin Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah menyusun Batasan Kapitalisasi terkait dengan Aset tetap Peralatan dan Mesin sesuai rincian dan jenis Peralatan dan Mesin yang terdapat pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Pencatatan nilai perolehan pada Aset tetap peralatan dan mesin berdasarkan harga pasar dan sesuai dengan Realisasi belanja. Adanya Penyebab perubahan kondisi (Rusak Berat/Ringan) disebabkan Aset sudah melewati masa usia pakai sehingga aset tersebut sudah tidak layak digunakan lagi untuk mendukung operasional kerja pada OPD terkait, Kesalahan Pencatatan disebabkan oleh OPD kurang cermat dalam pemilihan kode rekening yang seharusnya rekening belanja modal akan tetapi menggunakan rekening barang dan jasa sehingga menyebabkan reklasifikasi begitu pun sebaliknya.

Pada lingkup Pemerintah Kab. Mamuju Tengah berdasarkan dalam daftar pencatatan dan pembukuan telah memiliki jumlah kendaraan dinas sebanyak 934 unit kendaraan, terdapat 670 unit kendaraan yang didukung dokumen kepemilikan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 264 yang belum didukung dengan dokumen kepemilikan kendaraan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Terhadap Aset Tetap yang dihentikan penggunaannya karena sudah dilakukan pemindahtanganan melalui penjualan lelang dan selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui Proses Penghapusan Aset dari pencatatan setelah diterbitkannya surat keputusan Bupati selaku kuasa pengelola BMD Pemerintah Kab. Mamuju Tengah.

Pada Sekretariat Daerah Bagian Umum SETDA Kab. Mamuju Tengah telah Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Empat berupa Truk yang senilai Rp405.300.000,00 telah dilaporkan ke pihak yang berwajib (Kepolisian) berdasarkan Surat Keterangan Tanda Penerimaan Laporan Nomor:STTP/B/41/IV/2023/SPKT/POLRES MAMUJU TENGAH/POLDA SULBAR, Kendaraan Dinas Roda Dua pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan nilai perolehan Rp20.000.000,00 belum dilaporkan ke pihak berwajib serta Pada Kecamatan Topoyo tetap peralatan dan mesin yang hilang berupa Laptop dengan nilai Rp7.500.000,00 telah dilaporkan ke pihak berwajib berdasarkan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dengan Nomor: SKTLK/20/III/2024/POLSEK TOPOYO.

c) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan adalah seluruh aset dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 59
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Gedung dan Bangunan

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	3	1	1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	≥10.000.000

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	3	1	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	≥10.000.000
1	3	3	2	1	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	≥10.000.000
1	3	3	3	1	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	≥10.000.000
1	3	3	4	1	TUGU/TANDA BATAS	≥10.000.000

Per 31 Desember 2023 terdapat kesalahan penganggaran atas realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang telah dilakukan koreksi sehingga terdapat mutasi kurang dan mutasi tambah pada pencatatan nilai aset tetap Gedung dan Bangunan. Atas permasalahan kesalahan penganggaran tersebut Pemerintah Kab. Mamuju Tengah akan memverifikasi kembali usulan-usulan belanja OPD berdasarkan Standar Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dan penentuan kode rekening belanja di tahun berikutnya.

Saldo aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai Rp610.628.683.427,77. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp26.256.673.012,17 atau 4,49% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp584.372.010.415,60. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 senilai (Rp213.122.029.201,81) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp397.506.654.225,96. Rincian Aset tetap Gedung dan Bangunan pada SKPD per 31 Desember 2024, sebagaimana diuraikan pada *lampiran 58*.

Tabel 7. 60
Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024
Gedung dan Bangunan	584.372.010.415,60	46.284.245.843,00	20.027.572.830,83	610.628.683.427,77

Penambahan/pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp46.284.245.843,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 61
Rincian Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat DPRD	148.958.875,00
2	Sekretariat Daerah	549.994.264,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.548.377.500,00
4	Dinas Perhubungan	37.802.964,00
5	Dinas Kesehatan	14.648.285.790,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	1.049.297.200,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	758.891.636,00
8	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	20.164.925.162,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	201.117.000,00
10	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	6.899.758.500,00
11	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	276.836.952,00
Total		**46.284.245.843,00**

Adapun penjelasan Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2024 senilai Rp46.284.245.843,00 sebagai berikut:

(a) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat DPRD senilai Rp148.958.875,00 berasal dari Realisasi belanja modal;
(b) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah senilai Rp549.994.264,00 berasal dari Realisasi belanja modal;
(c) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp1.548.377.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa:
    (1) Realisasi belanja modal senilai Rp1.341.469.500,00;
    (2) Utang Belanja Modal yang akan dibayarkan tahun 2025 senilai Rp10.827.000,00;

(3) Reklasifikasi dari aset tetap tanah senilai Rp196.081.000,00.

(d) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan senilai Rp37.802.964,00 merupakan realiasasi belanja modal gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2024;

(e) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp14.648.285.790,00 berupa :
   (1) Realisasi belanja modal Senilai Rp13.419.343.140,00;
   (2) Reklasifikasi tambah dari aset tetap peralatan dan mesin berupa bangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) senilai Rp600.000.000,00;
   (3) Reklasifikasi dari barang dan jasa senilai Rp628.942.650,00 terdiri dari:
      - Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Lara senilai Rp184.293.300,00;
      - Perencanaan Pembangunan rumah dinas Puskesmas Lara senilai Rp21.694.950,00;
      - Perencanaan Pembangunan rumah dinas Puskesmas Salugatta senilai Rp21.694.950,00;
      - Perencanaan Pembangunan rumah dinas PKM Saloadak senilai Rp21.694.950,00;
      - Jasa konsultansi pengawasan Pembangunan Gedung Puskesmas Lara senilai Rp281.562.600,00;
      - Jasa Konsultansi Pengawasan Rumah Dinas Paramedis Puskesmas Lara, Salugatta dan Saloadak senilai Rp98.001.900,00.

(f) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.049.297.200,00 berupa:
   (1) Realisasi belanja modal senilai Rp749.447.200,00;
   (2) Pembayaran utang yang akan di bayarkan pada tahun 2025 senilai Rp299.850.000,00.

(g) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan realiasasi belanja modal senilai Rp758.891.636,00.

(h) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp20.164.925.162,00 berupa :
   (1) Realisasi belanja modal senilai Rp17.095.825.822;
   (2) Utang yang akan dibayarkan Tahun 2024 senilai Rp1.451.864.840,00;
   (3) Hibah dari TK senilai Rp925.562.000,00;
   (4) Reklasifikasi tambah dari Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Rp198.624.500,00.
   (5) Jurnal koreksi berupa kesalahan pencatatan pengakuan KDP Rumah Adat senilai Rp493.048.000,00

(i) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp201.117.000,00 merupakan mutasi kapitalisasi.

(j) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata senilai Rp6.899.758.500,00 merupakan realisasi belanja modal.

(k) Penambahan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan senilai Rp276.836.952 merupakan realisasi belanja modal.

2) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan senilai Rp20.027.572.830,83 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 62
Rincian Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan
Pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Kurang
1	Sekretariat DPRD	148.958.875,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	340.947.000,00
3	Dinas Perhubungan	37.802.964,00
4	Dinas Kesehatan	2.059.269.008,81
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.049.297.200,00
6	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	9.214.702.331,02
7	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	6.899.758.500,00
8	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	276.836.952,00
JUMLAH		**20.027.572.830,83**

Adapun penjelasan pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp20.027.572.830,83 sebagai berikut:

(a) Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan pada Sekretariat DPRD senilai Rp148.958.875,00 merupakan pembayaran utang.
(b) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 340.947.000,00 berupa :
    (1) Pembayaran Utang Tahun sebelumnya senilai Rp139.830.000,00
    (2) Pengurangan Aset Tetap berupa mutasi kapitalisasi ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp201.117.000,00.
(c) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perhubungan senilai Rp37.802.964,00 merupakan reklasifikasi ke aset tetap jalan jaringan dan irigasi berupa instalasi penerangan lampu jalan.
(d) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.059.269.008,81 berupa :
    (1) Reklasifikasi ke Aset Rusak Berat/ Usang, merupakan Pembongkaran Gedung dan Bangunan yang direhab Total senilai Rp778.937.000,00, adapun hasil bongkaran yang masih bernilai ekonomis telah terjual melalui Lelang.go.id (KPKNL Mamuju).
    (2) Reklasifikasi ke jalan jaringan dan irigasi berupa Pembangunan Sarana Air Bersih Puskesmas Tobadak senilai Rp248.589.000,00;
    (3) Reklasifikasi ke jalan jaringan dan irigasi berupa Pembangunan Sarana Air Bersih Puskesmas Polo Camba senilai Rp 247.282.000,00;
    (4) Reklasifikasi ke jalan jaringan dan irigasi berupa Pembangunan Sarana Air Bersih Puskesmas Saloadak senilai Rp 249.403.000,00.
    (5) Jurnal koreksi berupa kelebihan pencatatan senilai Rp535.058.008,81.
(e) Pengurangan Aset tetap gedung dan bangunan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Gedung UTD Rumah Sakit senilai Rp1.049.297.200,00.
(f) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp9.214.702.331,02 berupa:
    (1) Pembayaran Utang Tahun sebelumnya senilai Rp11.045.660,00;
    (2) Kesalahan Kode Rekening Belanja yang seharusnya Belanja Hibah dan terealisasi Belanja Modal senilai Rp149.608.414,00;
    (3) Kesalahan Kode Rekening Belanja yang seharusnya Belanja Jasa atau Hibah, adapun uraian belanja merupakan pembayaran utang Pengawasan Rehabilitasi TK Agung Suhada Kire yang merupakan Sekolah TK Swasta senilai Rp2.700.688,00;
    (4) Hibah dari Sekolah TK Swasta yang beralih status menjadi TK Negeri Duta Mario, namun nilainya tidak memenuhi standar menjadi Aset Intrakomptabel senilai Rp17.775.000,00;
    (5) Reklasifikasi ke Aset Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp5.361.718.500,00;
    (6) Reklasifikasi dan kapitalisasi aset Tanah yang merupakan penimbunan halaman sekolah senilai Rp3.440.931.570,00; dan
    (7) Jurnal koreksi berupa kelebihan pencatatan yang seharusnya menggunakan nilai berdasarkan progres fisik namun diawal di catat menggunakan nilai kontrak senilai Rp230.922.499,02.
(g) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata senilai Rp6.899.758.500,00 berupa :
    (1) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Lapangan Tembak senilai Rp389.833.000,00;
    (2) Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Pembangunan Sport Center senilai Rp6.509.925.500,00.
(h) Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan pembayaran utang pada tahun sebelumnya senilai Rp276.836.952,00.

3) Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan senilai (Rp213.122.029.201,81) dan dapat dijelaskan pada rincian berikut:

Tabel 7. 63
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024
610.628.683.427,77	(184.603.874.869,45)	29.113.968.332,36	595.814.000,00	(213.122.029.201,81)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Gedung dan Bangunan

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**584.372.010.415,60**
Penambahan :		
- Realisasi belanja modal	Rp	41.278.328.853,00
- Utang	Rp	1.762.541.840,00
- Reklas dari Barang dan Jasa	Rp	628.942.650,00
- Reklas antar KIB	Rp	994.705.500,00
- Terima Hibah	Rp	925.562.000,00
- Mutasi antar SKPD	Rp	201.117.000,00
- Jurnal koreksi kesalahan pencatatan	Rp	493.048.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**46.284.245.843,00**
Pengurangan:		
- Di Hibahkan	Rp	149.608.414,00
- Pembayaran Utang	Rp	576.671.487,00
- Reklas ke Barang dan Jasa	Rp	2.700.688,00
- Reklas ke aset lain-lain	Rp	778.937.000,00
- Koreksi aset dari intra ke ekstra	Rp	17.775.000,00
- Reklasifikasi antar KIB	Rp	17.534.782.734,00
- Mutasi Antar SKPD	Rp	201.117.000,00
- Jurnal koreksi kelebihan pencatatan	Rp	765.980.507,83
Sub. Total Pengurangan	Rp	**20.027.572.830,83**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**610.628.683.427,77**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	*(213.122.029.201,81)*
Nilai Buku	**Rp**	**397.506.654.225,96**

Pencatatan Aset tetap Gedung dan Bangunan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah saat ini adalah berdasarkan pada Nilai NJOP dan Realisasi Anggaran Pada OPD yang seharusnya Pemerintah Kab. Mamuju Tengah sudah memiliki Tim Penilai BMD yang dapat menghitung besaran dan Nilai suatu Bangunan yang sesuai dengan standarisasi seharusnya.

Rincian jenis-jenis Aset tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari dua bagian yaitu Bangunan Gedung tempat Kerja dan Bangunan Gedung Tempat Tinggal, dan keduanya terdiri dari beberapa jenis Bangunan. Sesuai dengan rincian dalam Kebijakan Akuntansi.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencatat Gedung dan Bangunan sebanyak 1.620 unit jenis bangunan, dari 1.620 unit Bangunan tersebut telah memiliki 293 alas hak berupa sertifikat. Dalam satu (1) alas hak tanah terdapat beberapa jenis bangunan di atasnya mencerminkan potensi pengembangan yang luas dan kompleks.

Dalam hal pengamanan Gedung dan Bangunan baik secara administrasi, fisik dan hukum, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai upaya dan langkah-langkah strategis sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku. Namun pun demikian berbagai upaya yang telah dilakukan belum menjamin sepenuhnya status Gedung dan Bangunan aman dalam penguasaan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Pencatatan Gedung dan Bangunan saat ini masih ditemukan adanya Gedung dan Bangunan yang berdiri diatas tanah yang belum bersertifikat atau diakui secara legal oleh Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Hal ini berkonsekuensi hukum dan berpotensi adanya pengakuan dari pihak lain dan itu berarti memungkinkan dimiliki oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian daerah.

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 64
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	4	1	1	JALAN	≥10.000.000
1	3	4	1	2	JEMBATAN	≥10.000.000
1	3	4	2	1	BANGUNAN AIR IRIGASI	≥10.000.000
1	3	4	2	2	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	≥10.000.000
1	3	4	2	3	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	≥10.000.000
1	3	4	2	4	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	≥10.000.000
1	3	4	2	5	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	≥10.000.000
1	3	4	2	6	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	≥10.000.000
1	3	4	2	7	BANGUNAN AIR KOTOR	≥10.000.000
1	3	4	3	1	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	≥10.000.000
1	3	4	3	2	INSTALASI AIR KOTOR	≥10.000.000
1	3	4	3	3	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	≥10.000.000
1	3	4	3	4	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	≥10.000.000
1	3	4	3	5	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	≥10.000.000
1	3	4	3	6	INSTALASI GARDU LISTRIK	≥10.000.000
1	3	4	3	7	INSTALASI PERTAHANAN	≥10.000.000
1	3	4	3	8	INSTALASI GAS	≥10.000.000
1	3	4	3	9	INSTALASI PENGAMAN	≥10.000.000
1	3	4	3	10	INSTALASI LAIN	≥10.000.000
1	3	4	4	1	JARINGAN AIR MINUM	≥10.000.000
1	3	4	4	2	JARINGAN LISTRIK	≥1.000.000
1	3	4	4	3	JARINGAN TELEPON	≥1.000.000
1	3	4	4	4	JARINGAN GAS	≥10.000.000

Saldo Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.114.859.229.056,45 dan mengalami kenaikan senilai Rp51.931.984.401,91 atau 4,89% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp1.062.927.244.654,54. Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 senilai (Rp383.834.922.394,32) sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp731.024.306.662,13 Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada SKPD per 31 Desember 2024. sebagaimana diuraikan pada *lampiran 59.*

Tabel 7. 65
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024
Jalan. Irigasi, dan Jaringan	1.062.927.244.654,54	69.329.173.090,00	17.397.188.688,09	1.114.859.229.056,45

Penambahan nilai aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp69.329.173.090,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp69.329.173.090,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 66
Rincian Penambahan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	63.903.497.826,00
2	Dinas Perhubungan	37.802.964,00

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
3	Dinas Kesehatan	3.197.532.800,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.924.500.000,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	214.624.500,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.215.000,00
Jumlah		69.329.173.090,00

Adapun penjelasan penambahan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp69.329.173.090,00 sebagai berikut:

(a) Penambahan aset jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp63.903.497.826,00 terdiri dari:
   (1) Realisasi belanja modal Tahun 2024 senilai Rp55.340.471.214,00;
   (2) Penambahan utang belanja modal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp1.525.729.462,00;
   (3) Reklasifikasi antar KIB senilai Rp7.037.297.150,00

(b) Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan merupakan reklasifikasi tambah dari gedung dan bangunan berupa Instalasi Penerangan Lampu Jalan senilai Rp37.802.964,00.

(c) Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.197.532.800,00 terdiri dari:
   (1) Penambahan aset tetap dari realisasi belanja modal Tahun 2024 senilai Rp2.400.000.000;
   (2) Reklasifikasi dari barang dan jasa terkait salah pemilihan kode rekening berupa perencanaan dan pengawasan bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp52.258.800,00; dan
   (3) Reklasifikasi tambah antar KIB gedung dan bangunan senilai Rp745.274.000,00 terdiri dari:
      - Pembangunan Prasarana Air Bersih Puskesmas Tobadak senilai 248.589.000,00;
      - Pembangunan Prasarana Air Bersih Puskesmas Polo Camba senilai 247.282.000,00;dan
      - Pembangunan Prasarana Air Bersih Puskesmas Saloadak senilai 249.403.000,00.

(d) Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan reklasifikasi dari peralatan dan mesin berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah senilai Rp1.924.500.000,00;

(e) Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pendidikan senilai Rp214.624.500,00 yang terdiri dari:
   (1) Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp187.548.500,00;
   (2) Penambahan hutang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp11.076.000,00; dan.
   (3) Reklasifikasi antar KIB Dana BOS senilai Rp16.000.000,00.

(f) Penambahan aset jalan, irigasi dan jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 senilai Rp51.215.000,00.

2) Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang senilai Rp17.397.188.688,09 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 67
Rincian Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	17.040.884.062,09
2	Dinas Perhubungan	37.802.964,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212.124.500,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.215.000,00
5	Dinas Kesehatan	55.162.162,00
Jumlah		17.397.188.688,09

Adapun penjelasan pengurangan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp17.397.188.688,09 sebagai berikut:

(a) Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp17.040.884.062,09 terdiri dari:
   (1) Pembayaran utang tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum senilai Rp6.247.156.719,00;
   (2) Reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp2.345.203.000,00;
   (3) Reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp5.526.890.000,00;
   (4) Lebih Catat Kelebihan Pembayaran Kekurangan Volume tahun anggaran 2023 senilai Rp2.680.378.843,09

(b) Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan adalah senilai Rp37.802.964,00 yang merupakan Koreksi nilai aset tetap dari intra ke ekstra.

(c) Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp212.124.500,00 berupa :
   (1) Reklasifikasi ke gedung dan bangunan senilai Rp198.624.500,00;
   (2) Koreksi aset tetap intra ke ekstra Dana BOS senilai Rp13.500.000,00.

(d) Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan reklasifikasi ke konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp51.215.000,00.

(e) Pengurangan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kesehatan merupakan Jurnal koreksi kelebihan pembanyaran atas kekurangan volume Pekerjaan Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Puskesmas Salupangkang dan Puskesmas Batuparigi TA 2023 senilai Rp55.162.162,00.

3) Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan senilai (Rp383.834.922.394,32) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 68
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Dalam Rupiah

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2024
1.114.859.229.056,45	(328.790.363.680,48)	55.235.020.985,00	190.462.271,16	(383.834.922.394,32)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**1.062.927.244.654,54**
Penambahan:		
- Realisasi belanja modal	Rp	57.979.234.714,00
- Utang	Rp	1.536.805.462,00
- Reklas dari barang dan jasa	Rp	52.258.800,00
- Reklas antar KIB	Rp	9.744.874.114,00
- Reklas Antar KIB Dana BOS	Rp	16.000.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**69.329.173.090,00**
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang	Rp	6.247.156.719,00
- Reklas Barang/Jasa/Hibah	Rp	2.345.203.000,00
- Aset tetap dari intra ke ekstra	Rp	37.802.964,00
- Reklas kurang antar KIB	Rp	5.776.729.500,00
- Aset tetap dari intra ke ekstra Dana BOS	Rp	13.500.000,00
- Jukor Aset tetap dari intra ke ekstra	Rp	50.693.500,00
- Jukor JIJ ke KDP	Rp	190.562.000,00
- Jukor Kurvol	Rp	2.735.541.005,09
- Sub Total Pengurangan	**Rp**	**17.397.188.688,09**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**1.114.859.229.056,45**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	(383.834.922.394,32)
Nilai Buku	**Rp**	**731.024.306.662,13**

Tanggal 31 Desember 2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum menyelesaikan catatan wajib per 31 Desember 2022, terkait dua ruas jalan yang seharusnya dicatat oleh Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2023, namun masih tercatat sebagai aset tetap di Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dengan ruas sebagai berikut:

1) Jalan Polohu – Babana (Pelabuhan)
2) Jalan Tobadak II – Tobadak VIII

Adapun hasil dari tindak lanjut tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah bersedia menerima hibah tersebut dengan bukti Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dengan Nomor Surat : 000.4.3.2/47/2023 Tanggal 20 Oktober 2023.

Dasar nilai pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan nilai Realisasi Anggaran yang terdapat Pada OPD. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah belum menggunakan jasa Tim Penilai yang telah memiliki Sertifikasi sebagaimana yang dipersyaratkan.

Nilai Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun berjalan dan tahun sebelumnya diketahui terjadi penambahan dan pengurangan nilai catat hal ini disebabkan adanya proses mutasi tambah, mutasi kurang, dan reklasifikasi.

Kesalahan Penganggaran pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah, terjadi disebabkan adanya perubahan kebijakan yang berimplikasi pada pelaksana pengguna anggaran khususnya kepada OPD atas kekeliruan pemilihan kodefikasi dan rekening belanja.

Rincian Aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disesuaikan dengan rincian Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Berdasarkan SK Jalan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 188.4/278/SULBAR/VII/2023 dan SK Penetapan Ruas Jalan Kab. Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2023 tanggal 06 Januari 2023.

Berdasarkan SK Penetapan Ruas Jalan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Nomor : 607/42/I/2023 tanggal 06 Januari 2023 terdapat 93 Jalan Kabupaten dan 225 Ruas Jalan yang tercatat dalam daftar pembukuan Pemerintah Daerah.

Dalam pencatatan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dengan berdasarkan SK Jalan diketahui seluruhnya belum memiliki sertifikat hak secara legal sebagai dasar pengakuan sah sebagai aset Pemerintah Daerah. Kondisi ini dapat mengakibatkan terjadinya dobel intervensi penganggaran antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

Pengadaan Aset Tetap berupa sambungan rumah (SR) yang telah dinyatakan hilang dan tidak diketahui keberadaannya dan telah dilaporkan kepada Kepolisian. Mengenai hal ini pemerintah daerah akan melakukan penelusuran dan investigasi yang selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

e) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Adapun Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 7. 69
Batasan Kapitalisasi Untuk Pengadaan Baru Jalan, Irigasi dan Jaringan

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	5	1	1	BUKU DAN PERPUSTAKAAN	≥100.000
1	3	5	1	2	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	≥100.000
1	3	5	1	3	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	≥100.000
1	3	5	1	4	MUSIK	≥100.000
1	3	5	1	5	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	≥100.000
1	3	5	1	6	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	≥100.000
1	3	5	1	7	TARSCALT	≥100.000
1	3	5	2	1	BARANG BERCORAK KESENIAN	≥300.000
1	3	5	2	2	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	≥300.000
1	3	5	2	3	TANDA PENGHARGAAN	≥300.000
1	3	5	3	1	HEWAN PIARAAN	≥1.000.000
1	3	5	3	2	TERNAK	≥1.000.000
1	3	5	3	3	HEWAN LAINNYA	≥1.000.000
1	3	5	4	1	IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	≥1.000.000
1	3	5	4	2	CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000
1	3	5	4	3	MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000
1	3	5	4	4	COELENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000

Kode Rekening					Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru/unit (Rp)
1	3	5	4	5	ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000
1	3	5	4	6	AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000
1	3	5	4	7	REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURA-KURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA	≥1.000.000
1	3	5	4	8	MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	≥1.000.000
1	3	5	4	9	ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	≥1.000.000
1	3	5	4	10	BIOTA PERAIRAN LAINNYA	≥1.000.000
1	3	5	5	1	TANAMAN	≥1.000.000
1	3	5	6	1	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	≥1.000.000
1	3	5	7	1	ASET TETAP DALAM RENOVASI	≥10.000.000

Saldo Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp9.616.240.817,91. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp180.602.146,00 atau 1,91% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp9.435.638.671,91. Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya per 31 Desember 2024 senilai (Rp2.111.636.002,00), sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp7.504.604.815,91, rincian dapat dilihat pada *lampiran 60.*

Tabel 7. 70
Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024
Aset tetap Lainnya	9.435.638.671,91	1.282.742.002,00	1.102.139.856,00	9.616.240.817,91

Penambahan aset tetap lainnya senilai Rp1.282.742.002,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 71
Rincian Penambahan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Penambahan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	14.810.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.262.932.002,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00
Jumlah		**1.282.742.002,00**

1) Adapun penjelasan penambahan senilai Rp1.282.742.002,00 sebagai berikut:
   (a) Penambahan aset tetap lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan reklasifikasi dari peralatan dan mesin berupa aset renovasi pada bangunan yang belum tercatat induknya senilai Rp14.810.000,00;
   (b) Penambahan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.262.932.002,00 berupa:
      (1) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp540.138.000,00;
      (2) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya Dana BOS senilai Rp 721.990.002,00;
      (3) Reklasifikasi antar KIB Dana BOS senilai Rp215.300,00;
      (4) Reklasifikasi dari barang dan jasa Dana Bos senilai Rp588.700,00;
   (c) Penambahan aset tetap lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan merupakan realisasi belanja modal senilai Rp5.000.000,00.
2) Pengurangan aset tetap lainnya senilai Rp1.087.329.856,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 72
Rincian Pengurangan Aset tetap Lainnya pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Rumah Sakit Umum Daerah	14.810.000,00
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.082.329.856,00

No	Nama SKPD	Pengurangan
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	5.000.000,00
	Jumlah	**1.102.139.856,00**

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp 1.102.139.856,00 sebagai berikut:

(a) Pengurangan aset tetap lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp14.810.000,00 merupakan jurnal koreksi aset dari intra ke ekstra;

(b) Pengurangan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp1.082.329.856,00 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Aset tetap Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dari intra ke ekstra senilai Rp7.741.244,00;

(2) Pengurangan aset tetap lainnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa hibah senilai Rp4.571.600,00;

(3) Reklasifikasi ke barang dan jasa senilai Rp522.825.156,00;

(4) Reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa *sound system* senilai Rp5.000.000,00;

(5) Aset tetap lainnya Dana BOS dari intra ke ekstra senilai Rp17.802.800,00;

(6) Reklasifikasi antar KIB Dana BOS senilai Rp31.434.000,00;

(7) Reklasifikasi Dana BOS ke barang dan jasa senilai Rp500.696.300,00

(c) Pengurangan aset tetap lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan berupa reklasifikasi ke peralatan dan mesin berupa *sound system* senilai Rp5.000.000,00;

3) Akumulasi penyusutan Aset tetap Lainnya senilai (Rp2.111.636.002,00) dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 73
Rincian Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya

Dalam Rupiah

Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
9.616.240.817,91	(1.788.501.151,00)	323.134.851,00	0,00	(2.111.636.002,00)

Penambahan/Pengurangan Aset tetap Lainnya adalah sebagai berikut:

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**9.435.638.671,91**
Penambahan:		
- Realisasi belanja modal	Rp	545.138.000,00
- Reklas antar KIB	Rp	14.810.000,00
- Realisasi belanja modal Dana BOS	Rp	721.990.002,00
- Reklasifikasi antar KIB Dana BOS	Rp	215.300,00
- Reklasifikasi dari Barjas Dana BOS	Rp	588.700,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**1.282.742.002,00**
Pengurangan:		
- Di Hibahkan	Rp	4.571.600,00
- Reklas Ke Barang dan Jasa	Rp	522.825.156,00
- Reklas kurang antar KIB	Rp	10.000.000,00
- Aset Ekstrakom Dana BOS	Rp	17.802.800,00
- Reklas kurang antar KIB Dana BOS	Rp	31.434.000,00
- Reklas ke barang dan jasa Dana BOS	Rp	500.696.300,00
- Jurnal koreksi intra ke ekstra	Rp	14.810.000,00
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**1.102.139.856,00**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**9.616.240.817,91**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	*(2.111.636.002,00)*
Nilai Buku	**Rp**	**7.504.604.815,91**

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal Laporan Keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Tanah, Peralatan dan mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan : Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:

1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
2) Berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
3) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
4) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.

Biaya-biaya yang dapat distribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:

1) Asuransi;
2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
5) Retensi.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 senilai Rp36.845.057.769,67. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp10.294.817.562,91 atau 38,77% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp26.550.240.206,76 sebagaimana diuraikan pada *lampiran 61.*

Tabel 7. 74
Rincian Penambahan/Pengurangan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Konstruksi dalam Pengerjaan	26.550.240.206,76	19.079.441.200,00	8.784.623.637,09	36.845.057.769,67

1) Penambahan KDP senilai Rp19.079.441.200,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 75
Rincian Penambahan Konstruksi dalam Pengerjaan

Dalam Rupiah

No	Nama Dinas	Mutasi Tambah
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	5.717.452.000,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	1.049.297.200,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	5.361.718.500,00
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.215.000,00
5	Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata	6.899.758.500,00
Jumlah		**19.079.441.200,00**

Adapun penjelasan penambahan konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2024 senilai Rp19.079.441.200,00 sebagai berikut:

(a) Penambahan KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp 5.717.452.000,00 terdiri dari:
   (1) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan, per 31 Desember 2024 progres pekerjaan belum mencapai 100,00% sehingga tercatat sebagai KDP senilai Rp5.526.890.000,00;
   (2) Jurnal koreksi kesalahan pencatatan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan perpipaan desa Polo Camba seharusnya dicatat sebagai KDP senilai Rp190.562.000,00.

(b) Penambahan KDP senilai Rp1.049.297.200,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan reklasifikasi dari gedung dan bangunan berupa pembangunan Gedung UTD Rumah Sakit.

(c) Penambahan KDP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp5.361.718.500,00 terdiri dari :
   (1) Rumah Adat senilai Rp493.048.000,00;
   (2) Pembangunan UKS, RKB, Perpustakaan, Ruang Guru dan Laboratorium Komputer pada UPTD SD Inpres Barakkang senilai Rp2.090.927.550,00;
   (3) Pembangunan UKS, RKB, Perpustakaan, Ruang Guru, dan Laboratorium Komputer pada UPTD SDN Kecil Simbar Allo senilai Rp2.766.742.950
   (4) Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas Baru senilai Rp6.600.000,00 dan Perencanaan Pembangunan Toilet pada SMPN 7 Tobadak senilai Rp4.400.000,00

(d) Penambahan KDP senilai Rp51.215.000,00 dari jalan, irigasi dan jaringan berupa perencanaan pembangunan tanggul karossa.

(e) Penambahan KDP senilai Rp6.899.758.500,00 pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata berupa :
   (1) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan berupa pembangunan Lapangan Tembak senilai Rp389.833.000,00
   (2) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan berupa pembangunan Sport Center senilai Rp6.509.925.500,00

2) Pengurangan KDP senilai Rp8.784.623.637,09 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 76
Rincian Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Pengurangan
1	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.474.311.685,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	40.979.500,00
3	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.027.990.987,60
4	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	241.341.464,49
Jumlah		**8.784.623.637,09**

Adapun penjelasan Pengurangan senilai Rp8.784.623.637,09 sebagai berikut:

(a) Pengurangan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang senilai Rp7.474.311.685,00 terdiri dari:
   (1) Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan sebagai aset tetap senilai Rp7.217.277.150,00;
   (2) Jurnal koreksi kelebihan pencatatan senilai Rp257.034.535,00.

(b) Pengurangan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp40.979.500,00 merupakan jurnal koreksi kelebihan pencatatan.

(c) Pengurangan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan senilai Rp1.027.990.987,60 terdiri dari:
   (1) Jurnal koreksi kelebihan pencatatan senilai Rp534.942.987,60;
   (2) Jurnal koreksi kesalahan pencatatan senilai Rp493.048.000,00.

(d) Pengurangan pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan senilai Rp241.341.464,49 merupakan jurnal koreksi kelebihan pencatatan.

Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**26.550.240.206,76**
Penambahan:		
- Menjadi KDP	Rp	18.888.879.200,00
- Jurnal koreksi kesalahan pencatatan	Rp	190.562.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	19.079.441.200,00
Pengurangan:		
- Menjadi Aset tetap (-)	Rp	7.217.277.150,00
- Jurnal koreksi kesalahan pencatatan	Rp	493.048.000,00
- Jurnal koreksi kelebihan pencatatan	Rp	1.074.298.487,09
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**8.784.623.637,09**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**36.845.057.769,67**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	*0,00*
Nilai Buku	**Rp**	**0,00**

g) Akumulasi Penyusutan

Dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan perubahan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual menjadi Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengamanatkan penyusunan laporan berbasis akrual. Menggunakan Metode penyusutan garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan, pada nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Dengan memperhatikan Nilai residu 0 serta nilai residu konsekuensi pada Peraturan Bupati tentang penilaian barang dan untuk aset yang diperoleh pada tahun berjalan penyusutan dilakukan pada penyusunan Laporan Keuangan tahun berkenaan.

Sesuai amanat tersebut Pemerintah Kab. Mamuju Tengah melakukan penyesuaian penyusutan dengan menggunakan aplikasi Simda BMD

Per 31 Desember 2023 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah ditemukan penggunaan masa manfaat pada aplikasi Simda BMD belum sesuai pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. dan telah dilakukan penyesuaian pada beberapa kode barang. Adapun beberapa kode barang yang belum sempat disesuaikan karena perhitungan penyusutan yang memiliki nilai kapitalisasi dan akan dilakukan penyesuaian saldo awal di tahun anggaran 2025. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 7. 77
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset tetap
Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan mesin	201.261.461.292,07	230.038.851.774,52
3	Gedung dan Bangunan	184.603.874.869,45	213.122.029.201,81
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	328.790.363.680,48	383.834.922.394,32
5	Aset tetap Lainnya	1.788.501.151,00	2.111.636.002,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Jumlah		**716.444.200.993,00**	**829.107.439.372,65**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 62.

Tabel 7. 78
Kenaikan/penurunan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Kenaikan/ penurunan	%
Akumulasi Penyusutan	(716.444.200.993,00)	(829.107.439.372,65)	(112.663.238.379,65)	15,73

Tabel 7. 79
Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Dalam Rupiah

Uraian	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024
Akumulasi *Penyusutan*	716.444.200.993,00	118.208.310.369,78	5.545.071.990,13	829.107.439.372,65

1) Penambahan dari beban penyusutan tahun berjalan senilai Rp118.208.310.369,78
2) Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap senilai Rp5.545.071.990,13 merupakan aset yang sudah dilelang dan direklas ke Aset lain-lain.

Penambahan/pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**716.444.200.993,00**
Penambahan:		
- Akumulasi Tahun berjalan	Rp	118.208.310.369,78
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**118.208.310.369,78**
Pengurangan:		
- Reklas Ke Aset Lain-lain	Rp	5.545.071.990,13
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**5.545.071.990,13**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**829.107.439.372,65**

Dari rincian diatas diketahui bahwa saldo akhir penyusutan 31 Desember 2023 adalah Rp716.444.200.993,00, selama tahun berjalan terdapat penambahan beban penyusutan tahun berjalan senilai Rp118.208.310.369,78, adapun pengurangan yang berasal dari reklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp5.545.071.990,13, Sehingga saldo akhir akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 senilai Rp829.107.439.372,65.

4. Properti Investasi

Properti investasi adalah aset berupa tanah atau bangunan (atau bagian dari bangunan, atau keduanya) yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan sewa, kenaikan nilai, atau keduanya, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional entitas sehari-hari. Properti investasi dicatat menggunakan model biaya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Pada tahun 2024, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mengidentifikasi sejumlah tanah yang berpotensi menghasilkan keuntungan jika disewakan atau dijual di masa mendatang. Tanah tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara aktif, namun dipertahankan sebagai aset dengan prospek peningkatan nilai investasi. Penilaian atas tanah tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lokasi strategis dan potensi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun Rincian mutasi properti investasi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 80
Rincian Properti Investasi

Dalam Rupiah

No.	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Properti Investasi -Tanah	0.00	5.447.999.112,00	0.00	5.447.999.112,00
	(Nilai Buku)	**0.00**	**5.447.999.112,00**	**0.00**	**5.447.999.112,00**

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain (Aset Rusak Berat, Aset Tidak ditemukan, dan Aset hilang) dan Dana *Transfer Treasury Deposit* (TDF).

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2024 senilai Rp8.387.608.110,24 mengalami kenaikan senilai Rp3.252.596.639,51 atau 63,34% sedangkan saldo per 31 Desember 2023 senilai Rp5.135.011.470,73 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 81
Rincian Aset Lainnya

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Des 2023 (Nilai Buku)	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Des 2024 (Nilai Buku)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	3.052.198.564,18	0,00	3.052.198.564,18
2	Aset Tak berwujud	1.596.534.743,66	597.099.241,00	592.729.353,66	1.600.904.631,00
3	Aset Lain-lain	2.939.783.727,07	5.368.192.422,95	4.627.890.234,96	3.680.085.915,06
4	Aset Lainnya - TDF	598.693.000,00	54.419.000,00	598.693.000,00	54.419.000,00
Jumlah		**5.135.011.470,73**	**9.071.909.228,13**	**5.819.312.588,62**	**8.387.608.110,24**

Penambahan/pengurangan Aset lainnya

Saldo Akhir 2023 (Nilai Buku)	**Rp**	**5.135.011.470,73**
Penambahan:		
- Tagihan Jangka Panjang	Rp	3.052.198.564,18
- Realisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	597.099.241,00
- Reklas Aset tetap ke Aset Lain-lain	Rp	5.249.392.422,95
- Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	Rp	54.419.000,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**9.071.909.228,13**
Pengurangan:		
- Pembayaran Utang ATB	Rp	100.000.000,00
- Beban Amortisasi ATB Tahun Berjalan	Rp	492.729.298,00
- Koreksi Penyesuaian Amortisasi ATB	Rp	55,66
- Akumulasi Penyusutan Aset Lelang	Rp	4.627.890.234,97
- TDF Tersalurkan	Rp	598.693.000,00
Sub Total Pengurangan	**Rp**	**5.819.312.588,62**
Saldo Akhir 2024 (Nilai Buku)	**Rp**	**8.387.608.110,24**

a) Tagihan Jangka Panjang

Per 31 Desember 2024, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mencatat Aset Lainnya – Tuntutan Ganti Kerugian Negara senilai Rp3.052.198.564,18 yang berasal dari kelebihan pembayaran Belanja Modal kepada pihak ketiga/rekanan.

Penggunaan akun Tuntutan Ganti Kerugian Negara dilakukan karena dalam sistem SIPD belum tersedia akun Aset Lainnya yang secara spesifik digunakan untuk mencatat tagihan kepada pihak ketiga/rekanan atas kelebihan pembayaran belanja modal tersebut. Oleh karena itu, sementara waktu pencatatan dilakukan melalui akun Tuntutan Ganti Kerugian Negara sebagai bentuk pengamanan atas hak pemerintahPemerintah.

b) Aset Tak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) didefinisikan sebagai aset *non keuangan* yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. Serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset tidak berwujud merupakan bagian dari aset non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset tak berwujud Pemerintah Kab. Mamuju Tengah terdiri dari *License Office* dan *Windows*, Antivirus, *Software*, *Website.*

Amortisasi adalah pengurangan atau penurunan nilai Aset Tidak Berwujud secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Aset Tidak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

1) Pengakuan Amortisasi
   Pengakuan amortisasi Aset Tidak Berwujud dilakukan pada saat akhir tahun saat akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindahtangankan kepemilikannya.
2) Pengukuran Amortisasi
   (a) Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.
   (b) Masa manfaat Aset Tidak Berwujud dapat dijelaskan dalam berikut ini:

3) Pengungkapan Amortisasi

Amortisasi Aset Tidak Berwujud diungkapkan dalam Neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi Nilai Buku dari Aset Tidak Berwujud tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam LO sebagai "Beban Amortisasi".

Tabel 7. 82
Rincian Pengungkapan Amortisasi

Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
ASET TIDAK BERWUJUD	
Goodwill	Tidak Terbatas
Hak Paten atau Hak Cipta	20
Royalti	20
Software	5
Lisensi	10
Hasil Kajian	5
Aset Tak Berwujud Lainnya	5
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	5

4) Penyajian amortisasi

Penyajian Amortisasi disajikan dalam Neraca bagian dari "Aset Tidak Berwujud"

Nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2024 pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp5.501.621.941,00 dan amortisasi senilai Rp3.900.717.310,00 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2024 senilai Rp1.600.904.631,00 dan mengalami kenaikan senilai nilai buku Rp497.099.241,00 atau 9,93% jika dibandingkan dengan Nilai perolehan aset tak berwujud tahun 2023 pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp5.004.522.700,00 dan amortisasi senilai Rp3.407.987.956,34 sehingga nilai buku neraca pada 31 Desember 2023 senilai Rp1.596.534.743,66. Rincian aset tak berwujud sebagai berikut:

Tabel 7. 83
Aset Tak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan	%
Aset Tak Berwujud	5.501.621.941,00	5.004.522.700,00	497.099.241,00	9,93
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(3.900.717.310,00)	(3.407.987.956,34)	(492.729.353,66)	14,46
Aset Tak Berwujud Netto	**1.600.904.631,00**	**1.596.534.743,66**	**4.369.887,34**	**0,27**

Tabel 7. 84
Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Aset Tidak Berwujud	5.004.522.700,00	597.099.241,00	100.000.000,00	5.501.621.941,00

1) Penambahan nilai aset tidak berwujud senilai Rp597.099.241,00 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 85
Rincian Penambahan Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	100.000.000,00
2	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5.000.000,00
3	Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah	208.000.000,00
4	Inspektorat	17.349.241,00
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	199.800.000,00
6	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.950.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	17.000.000,00
Jumlah		**597.099.241,00**

Adapun penjelasan penambahan aset tidak berwujud senilai Rp597.099.241,00 Tahun Anggaran 2024, yang berasal dari:

(a) Penambahan aset tidak berwujud pada Sekretariat Daerah senilai Rp100.000.000,00 merupakan realisasi belanja modal;
(b) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan realisasi belanja modal senilai Rp5.000.000,00;
(c) Penambahan aset tidak berwujud pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merupakan realisasi belanja modal senilai Rp208.000.000,00;
(d) Penambahan aset tidak berwujud pada Inspektorat merupakan realisasi belanja modal senilai Rp17.349.241,00;
(e) Penambahan aset tidak berwujud pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan realisasi belanja modal Rp199.800.000,00;
(f) Penambahan aset tidak berwujud pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan realisasi belanja modal senilai Rp49.950.000,00;
(g) Penambahan aset tidak berwujud pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan realisasi belanja modal aset senilai Rp17.000.000,00.

2) Pengurangan nilai aset tidak berwujud senilai Rp100.000.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:
   (a) Pengurangan aset tidak berwujud pada Sekretariat Daerah senilai Rp100.000.000.00, merupakan pembayaran utang belanja modal ATB tahun sebelumnya.
3) Amortisasi Aset Tidak Berwujud senilai Rp3.900.717.310,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 86
Rincian Penambahan/Pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(3.407.987.956,34)	(492.729.353,66)	0,00	(3.900.717.310,00)

Penambahan/Pengurangan Aset Tidak Berwujud

Saldo Akhir 2023	**Rp**	**5.004.522.700,00**
Penambahan:		
- Realisasi belanja modal	Rp	597.099.241,00
Sub. Total Penambahan	**Rp**	**597.099.241,00**
Pengurangan :		
- Pembayaran Utang	Rp	100.000.000,00
Sub. Total Pengurangan	**Rp**	**100.000.000,00**
Saldo Akhir 2024	**Rp**	**5.501.621.941,00**
Amortisasi	*Rp*	*(3.900.717.310,00)*
Nilai Buku (Neto)	**Rp**	**1.600.904.631,00**

Per 31 Desember 2024 terdapat perbedaan perhitungan Amortisasi pada saldo awal senilai Rp55,66 yang disebabkan karena pada excel tidak menggunakan rumus ROUND untuk pembulatan, dan telah dilakukan koreksi penyesuaian saldo awal.

Beban Amortisasi yang diperoleh sampai 31 Desember 2024 senilai Rp492.729.298,00 dan ditambahkan kurang catat beban amortisasi Saldo Awal senilai Rp55.66 sehingga total penambahan beban amortisasi senilai Rp492.729.353,66.

c) Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat/usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp20.416.109.038,75 dan mengalami kenaikan senilai Rp5.249.392.422,96 atau 34,61% dibandingkan dengan saldo aset lain-lain per 31 Desember 2023 senilai Rp15.166.716.615,79. Akumulasi penyusutan yang dihentikan pada aset lain-lain per 31 Desember 2024 senilai Rp16.736.023.123,69 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan senilai Rp3.680.085.915,06. Adapun rincian penambahan/pengurangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7. 87
Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
1	Aset Lain-lain	15.166.716.615,79	5.249.392.422,96	0,00	20.416.109.038,75
2	Akumulasi Penyusutan	(12.226.932.888,72)	(4.509.090.234,97)	(0,00	(16.736.023.123,69)
	(Nilai Buku)	**2.939.783.727,07**	**740.302.187,99**	**0,00)**	**3.680.085.915,06**

Penambahan nilai Aset lain-lain senilai Rp5.249.392.422,96 dijelaskan sebagai berikut:

1) Penambahan Aset lain-lain senilai Rp5.249.392.422,96 dapat dilihat pada rincian tabel berikut:

Tabel 7. 88
Rincian Penambahan Aset lain-lain

Dalam Rupiah

No	Nama SKPD	Mutasi Tambah
1	Sekretariat Daerah	2.792.769.428,96
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	116.110.000,00
3	Dinas Perhubungan	16.500.000,00
4	Dinas Kesehatan	1.171.930.675,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	1.003.859.440,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	39.975.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	18.500.000,00
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Perindustrian Dan Perdagangan	15.889.000,00
9	Inspektorat	17.051.200,00
10	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.807.679,00
Jumlah		**5.249.392.422,96**

Adapun penjelasan penambahan Aset lain-lain senilai Rp5.249.392.422,96 sebagai berikut:

(a) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah senilai Rp2.792.769.428,96;
(b) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp116.110.000,00;
(c) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan senilai Rp16.500.000,00;
(d) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.171.930.675,00;
(e) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp1.003.859.440,00;
(f) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp39.975.000,00;
(g) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian senilai Rp18.500.000,00;
(h) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp15.889.000,00;
(i) Reklasifikasi dari aset tetap peralatan dan mesin pada Inspektorat senilai Rp17.051.200,00;
(j) Penambahan aset lain-lain pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia senilai Rp56.807.679,00;

2) Akumulasi penyusutan yang direklasifikasi ke aset lain-lain senilai Rp16.736.023.123,69 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

Saldo Akhir 2023	***Rp***	**15.166.716.615,79**
Penambahan:		
- Peralatan dan Mesin	Rp	4.470.455.422,96
- Gedung dan Bangunan	Rp	778.937.000,00
Sub. Total Penambahan	***Rp***	**5.249.392.422,96**
Pengurangan:		

- Penghapusan	Rp	0,00
Sub Total Pengurangan	***Rp***	**0,00**
Saldo Akhir 2024	***Rp***	**20.416.109.038,75**
Akumulasi Penyusutan	*Rp*	*(16.736.023.123,69)*
Nilai Buku	***Rp***	**3.680.085.915,06**

Rincian aset lain-lain dapat dilihat pada *lampiran 63.*

d) Aset Lainnya – TDF

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara Non tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF), perlu ditindaklanjuti dengan tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening *Treasury Deposit Facilities* (TDF) dalam APBD sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemerintah Daerah Kab. Mamuju Tengah mempunyai saldo dan remunerasi pada rekening *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDP-TKD) senilai Rp54.419.000,00 serta remunerasi senilai Rp0,00 mencatat sebagai Aset lainnya kedalam Neraca. Berkenaan dengan hal tersebut dan sambil menunggu kebijakan pengelolaan dan kebijakan akuntansi atas DBH/DAU yang disalurkan melalui fasilitas TDF pada APBD yang akan ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri, perlakuan akuntansi atas penyaluran remunerasi sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mencatat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Akun Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenisnya (Akun Laporan Operasional).
2. Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemerintah Kab. Mamuju Tengah mencatat sebagai Kas di RKUD (Akun Neraca) dan Pendapatan Bunga - Lain-Lain PAD yang Sah atau akun sejenis pada LRA, dan di sisi lain mencatat pengurangan/pelunasan Piutang atas Piutang Lain-Lain PAD yang Sah.

b. Kewajiban

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu. Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp7.439.661.925,71. Nilai ini mengalami penurunan senilai (Rp9.633.629.293,60) atau (56,43%) jika dibandingkan dengan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 senilai Rp17.073.291.219,31. Jumlah tersebut seluruhnya terdiri dari Utang Beban dan Utang Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 89
Rincian Kewajiban

Dalam Rupiah

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	209.206.419,00	0,00	209.206.419,00	100,00
2	Utang Belanja	7.230.455.506,71	17.073.291.219,31	(9.842.835.712,60)	(57,65)
Jumlah		**7.439.661.925,71**	**17.073.291.219,31**	**(9.633.629.293,60)**	**(56,43)**

a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 senilai Rp209.206.419,00, mengalami kenaikan senilai Rp209.206.419,00 dari saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 senilai Rp0,00 atau 100,00%. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 90
Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Dalam Rupiah

No	Uraian	PPN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPh Pasal 4 ayat (2)	Jumlah
1	BOP PAUD	6.144.939,00	739.594,00	0,00	2.681.060,00	0,00	9.565.593,00
2	BOS SD-SMP	128.975.974,00	12.044.892,00	0,00	27.634.664,00	0,00	168.655.530,00
3	BOK Puskesmas	1.984.407,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.734.407,00
4	KAPITASI Puskesmas	7.130.590,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	7.235.590,00
5	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	963.325,00	3.635.099,00	7.064.375,00	11.662.799,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	9.112.500,00	240.000,00	0,00	0,00	9.352.500,00
	JUMLAH	**144.235.910,00**	**22.646.986,00**	**1.308.325,00**	**33.950.823,00**	**7.064.375,00**	**209.206.419,00**

b) Utang Belanja

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2024 senilai Rp7.230.455.506,71 mengalami penurunan senilai (Rp9.842.835.712,60) atau (57,65%) dari saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 senilai Rp17.073.291.219,31. Diantaranya terdapat sisa Utang Belanja pada Tahun 2016-2023 yang belum sempat terbayarkan sampai saat berakhirnya Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.970.893.832,31. Utang Belanja per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 91
Rincian Utang Belanja

Dalam Rupiah

No	Uraian	Penambahan Utang tahun 2024	Sisa Utang sampai tahun 2023	Jumlah
1	Utang Belanja Pegawai	1.401.915.700,00	0,00	1.401.915.700,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	838.733.707,00	315.045.477,00	1.153.779.184,00
3	Utang Belanja Hibah	434.378.850,00	0,31	434.378.850,31
4	Utang Belanja Modal	2.584.533.417,40	1.655.848.355,00	4.240.381.772,40
Jumlah		**5.259.561.674,40**	**1.970.893.832,31**	**7.230.455.506,71**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 64.

1) Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2024 senilai Rp1.401.915.700,00, saldo ini merupakan utang belanja pegawai pada Dinas Pendidikan berupa tunjangan sertifikasi senilai Rp1.430.500,00, tunjangan khusus guru senilai Rp106.135.200,00, dan tambahan penghasilan guru senilai Rp1.294.350.000,00, dan sudah dibayarkan di bulan Maret 2025.

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 senilai Rp1.153.779.184,00 mengalami penurunan senilai (Rp4.948.811.050,00) atau (81,09%) dari saldo Utang Belanja dan Jasa per 31 Desember 2023 senilai Rp6.102.590.234,00. Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7. 92
Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	SKPD	Penambahan Utang tahun 2024	Sisa Utang sampai tahun 2023	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	0,00	258.087.577,00	258.087.577
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	136.162.500,00	15.363.000,00	151.525.500,00
3	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	41.475.900,00	41.475.900,00
4	Dinas Transmigrasi	0,00	119.000,00	119.000,00
5	Rumah Sakit Umum Daerah	702.571.207,00	0,00	702.571.207,00
Jumlah		**838.733.707,00**	**315.045.477,00**	**1.153.779.184,00**

3) **Utang Belanja Hibah**

Saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 senilai Rp434.378.850,31 mengalami penurunan senilai (Rp1.204.246.674,00) atau (73,49%) dari saldo Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2023 senilai Rp1.638.625.524,31. Utang Belanja Hibah per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 93
Rekapitulasi Utang Belanja Hibah 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	SKPD	Penambahan Utang tahun 2024	Sisa Utang sampai tahun 2023	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	109.673.000,00	0,00	109.673.000,00
2	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	324.705.850,00	0,00	324.705.850,00
3	Dinas Perikanan	0,00	0,31	0,31
Jumlah		**434.378.850,00**	**0,31**	**434.378.850,31**

4) **Utang Belanja Modal**

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 senilai Rp4.240.381.772,40 mengalami penurunan senilai (Rp5.091.693.688,60) atau (54,56%) dari saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2023 senilai Rp9.332.075.461,00. Utang Belanja Modal yang belum dibayarkan akan tetapi barangnya telah diterima yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan jumlah senilai Rp4.240.381.772,40. Utang Belanja Modal per 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. 94
Rekapitulasi Utang Belanja Modal 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

No	SKPD	Penambahan Utang tahun 2024	Sisa Utang sampai tahun 2023	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	0,00	3.669.029,00	3.669.029,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	12.890.000,00	12.890.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.342.157.415,00	1.539.055.819,00	2.881.213.234,00
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	983.505.502,40	15.140.000,00	998.645.502,40
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	51.210.000,00	51.210.000,00
6	Rumah Sakit Umum Daerah	258.870.500,00	33.883.507,00	292.754.007,00
Jumlah		**2.584.533.417,40**	**1.655.848.355,00**	**4.240.381.772,40**

c. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kab. Mamuju Tengah yang berasal dari total aset dikurangi dengan total kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah senilai Rp1.370.861.712.546,60 mengalami kenaikan senilai Rp514.866.351,38 atau 0,04% dari saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 senilai Rp1.370.346.846.195,22.

7.5.4. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, *Surplus/(Defisit)* operasional dari satu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle*), sehingga penyusunan laporan keuangan operasional, laporan perubahan ekuitas dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Laporan Operasional disusun dengan pendekatan basis akuntansi akrual yaitu seluruh transaksi atau kejadian ekonomi diakui pada saat terjadinya tanpa melihat kas diterima atau dibayarkan.

a. Pendapatan-LO

1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 adalah senilai Rp60.232.316.138,65 mengalami kenaikan

senilai Rp15.843.754.406,97 atau 35,69% dari Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 adalah senilai Rp44.388.561.731,68,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 95
Rincian Pendapatan Asli Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	17.446.886.106,00	11.863.164.254,00	5.583.721.852,00	47,07
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	14.101.109.594,00	28.347.412.735,00	(14.246.303.141,00)	(50,26)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	729.061.014,00	482.055.891,00	247.005.123,00	51,24
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	27.955.259.424,65	3.695.928.851,68	24.259.330.572,97	656,38
Jumlah		**60.232.316.138,65**	**44.388.561.731,68**	**15.843.754.406,97**	**35,69**

a) Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan yang berasal dari pajak daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp17.446.886.106,00 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp11.863.164.254,00 mengalami kenaikan senilai Rp5.583.721.852,00 atau 47,07%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 96
Rincian Pendapatan Pajak Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Pajak Hotel – LO	32.673.000,00	19.165.000,00
2	Pajak Restoran – LO	1.006.742.551,00	1.058.473.729,00
3	Pajak Hiburan-LO	500.000,00	0,00
4	Pajak Reklame – LO	302.845.126,00	208.292.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	6.190.641.769,00	5.583.102.342,00
6	Pajak Air Tanah – LO	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	658.879.733,00	407.273.154,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	8.592.077.002,00	3.799.860.117,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	659.526.925,00	783.997.912,00
Jumlah		**17.446.886.106,00**	**11.863.164.254,00**

b) Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi-LO Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp14.101.109.594,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp28.347.412.735,00 mengalami penurunan senilai (Rp14.246.303.141,00) atau (50,26%). Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 97
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	7.340.281.324,00	22.340.047.235,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	221.640.000,00	124.965.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	187.700.000,00	120.759.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	132.250.000,00	0,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	5.708.319.000,00	5.235.616.500,00
6	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	0,00	146.500.000,00
7	Retribusi Terminal-LO	0,00	27.700.000,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	41.105.000,00	0,00
8	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	469.814.270,00	351.825.000,00
Jumlah		**14.101.109.594,00**	**28.347.412.735,00**

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp729.061.014,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp482.055.891,00 mengalami kenaikan senilai Rp247.005.123,00 atau 51,24%. Ini merupakan pembagian laba bagi Pemerintah daerah dari Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

d) Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp27.955.259.424,65 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.695.928.851,68 mengalami kenaikan senilai Rp24.259.330.572,97 atau 656,38%. Lain-lain PAD yang sah-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. 98
Rincian Lain-lain PAD yang Sah–LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LO	230.337.498,00	471.142.054,00
2	Hasil Sewa BMD-LO	57.025.000,00	0,00
3	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	1.197.050.360,00	667.160.891,00
4	Remunerasi dana Transfer Treasury Deposit (TDF)-LO	0,00	28.185.636,02
5	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	6.798.593,00	0,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	2.332.161.942,72	1.159.915.434,73
7	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	23.464.585.254,00	0,00
8	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah-LO	13.916.109,86	0,00
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	0,00	239.486.040,00
10	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO	653.384.667,07	1.130.038.795,93
Jumlah		**27.955.259.424,65**	**3.695.928.851,68**

2. Pendapatan Transfer-LO

Sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka untuk Tahun Anggaran 2024, pendapatan yang berasal dari Dana Transfer adalah senilai Rp557.051.912.311,00 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp569.220.933.215,00 mengalami penurunan senilai (Rp12.169.020.904,00) atau (2,14%). Rincian Pendapatan Transfer-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 99
Rincian Pendapatan Transfer-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	531.765.771.129,00	535.340.776.623,00	(3.575.005.494,00)	(0,67)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	0,00	6.018.759.000,00	(6.018.759.000,00)	(100,00)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO	25.286.141.182,00	27.861.397.592,00	(2.575.256.410,00)	(9,24)
Jumlah		**557.051.912.311,00**	**569.220.933.215,00**	**(12.169.020.904,00)**	**(2,14)**

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp531.765.771.129,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp535.340.776.623,00 mengalami penurunan senilai (Rp3.575.005.494,00) atau (0,67%). Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 100
Rincian Transfer Pemerintah Pusat-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	DBH PBB-LO	1.265.542.436,00	879.084.650,00
2	DBH PPh Pasal 21-LO	1.293.737.000,00	1.666.289.000,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	24.049.000,00	57.046.000,00
4	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	84.000,00	0,00
5	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	54.418.000,00	6.323.250,00
6	DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	257.597.564,00	9.610.532.100,00
7	DBH SDA Perikanan-LO	1.519.879.000,00	1.783.224.000,00
8	DBH Sawit-LO	7.519.477.000,00	0,00
9	DAU-LO	282.562.180.000,00	349.658.672.391,00
10	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja-LO	7.553.730.749,00	0,00
11	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan-LO	44.235.636.000,00	0,00
12	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan-LO	21.832.361.000,00	0,00
13	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum-LO	12.999.985.000,00	0,00
14	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD-LO	418.504.000,00	630.901.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD-LO	7.749.568.982,00	11.087.253.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP-LO	4.382.712.628,00	8.465.030.000,00
17	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	0,00	10.996.651.500,00
18	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting-LO	3.118.571.200,00	471.000.000,00
19	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat-LO	0,00	266.408.500,00
20	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan-LO	9.738.033.800,00	0,00
21	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	0,00	21.174.587.750,00
22	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	10.943.717.000,00	0,00
23	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan-LO	0,00	7.876.994.850,00
24	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	5.394.173.000,00	0,00
25	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan-LO	0,00	13.790.314.000,00
26	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana-LO	758.891.636,00	1.384.513.000,00
27	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan-LO	39.544.741.345,00	25.080.655.837,00
28	DAK Non Fisik-BOS Reguler-LO	18.385.482.700,00	18.631.643.350,00
29	DAK Non Fisik-BOS Kinerja-LO	1.040.000.000,00	640.000.000,00
30	DAK Non Fisik-TPG PNSD-LO	29.578.776.000,00	26.225.040.000,00
31	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD-LO	1.678.350.000,00	724.900.000,00
32	DAK Non Fisik-TKG PNSD-LO	1.635.428.000,00	1.065.843.000,00
33	DAK Non Fisik-BOP PAUD-LO	0,00	2.884.602.000,00
34	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan-LO	0,00	1.932.800.000,00
35	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK-LO	1.964.836.264,00	4.826.431.845,00
36	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	0,00	9.776.006.000,00
37	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal-LO	398.597.500,00	542.165.000,00
38	DAK Non Fisik-BOKB-KB-LO	2.325.032.000,00	2.697.789.600,00
39	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	643.622.400,00	508.075.000,00
40	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler-LO	2.557.800.000,00	0,00
41	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja-LO	30.000.000,00	0,00
42	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler-LO	2.371.100.000,00	0,00
43	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja-LO	90.000.000,00	0,00
44	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas-LO	5.899.155.925,00	0,00
	Total	**531.765.771.129,00**	**535.340.776.623,00**

Untuk Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH) terdapat perbedaaan nilai LO dan LRA. Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LO senilai Rp11.934.784.000,00 sedangkan Dana Transfer Umum- Dana Bagi hasil (DBH)-LRA senilai Rp12.479.058.000,00. Perbedaan yang terjadi dikarenakan dari TDF Tahun 2023 senilai Rp598.693.000,00 merupakan dana yang telah diterima di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) pada tahun 2023, namun baru disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada tahun 2024. Dalam basis kas (LRA), pengakuan dilakukan saat dana

disalurkan ke RKUD, sedangkan dalam basis akrual (LO), pendapatan telah diakui saat hak diterima pada tahun 2023 dan TDF Tahun 2024 senilai Rp54.419.000,00 merupakan dana yang masih berada di RKUN hingga akhir tahun 2024 dan belum disalurkan ke RKUD. Dalam LRA, dana tersebut belum diakui sebagai pendapatan sedangkan dalam LO, beban telah diakui sesuai dengan terjadinya hak dan kewajiban.

b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp0,00 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp6.018.759.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp6.018.759.000,00) atau (100,00%). Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 101
Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Dalam Rupiah

Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
Insentif Fiskal-LO	0,00	6.018.759.000,00
Jumlah	**0,00**	**6.018.759.000,00**

c) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.286.141.182,00 dan Tahun 2023 adalah senilai Rp27.861.397.592,00 mengalami penurunan senilai (Rp2.575.256.410,00) atau (9,24%) yang merupakan Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi Sulawesi Barat selama Tahun 2023 dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 102
Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	3.754.610.082,00	4.201.982.203,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	5.352.561.968,00	4.212.258.615,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	8.357.499.019,00	7.742.554.924,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan- LO	17.334.878,00	23.662.005,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	7.804.135.235,00	10.180.939.845,00
6	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	0,00	1.500.000.000,00
Jumlah		**25.286.141.182,00**	**27.861.397.592,00**

3. Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp13.840.115.852,55 mengalami penurunan senilai (Rp44.155.846.373,45) atau (76,14%) dibandingkan dari Tahun 2023 senilai Rp57.995.962.226,00, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 103
Rincian Lain- Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	467.050.299,55	50.719.376.344,00
2	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	3.929.974.650,00	114.508.800,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	1.750.562.000,00	145.234.324,00
4	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.692.528.903,00	7.016.842.758,00
Jumlah		**13.840.115.852,55**	**57.995.962.226,00**

Pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdapat selisih antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional senilai Rp6.147.586.949,55, dengan rincian sebagai berikut:

a) Reklasifikasi pendapatan hibah obat RSUD dari Kementrian Kesehatan senilai Rp467.050.299,55 yang awalnya dicatat sebagai beban persediaan seharusnya dicatat sebagai pendapatan hibah tahun 2024;

b) Terima Hibah Dari Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp3.929.974.650,00;

c) Terima Hibah Tanah dari peralihan status TK Swasta Menjadi TK Negeri senilai Rp1.750.562.000,00;

b. Beban- LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Di Tahun Anggaran 2024, total beban adalah senilai Rp628.131.837.359,13 sedangkan total beban Tahun 2023 adalah senilai Rp572.891.382.501,50 mengalami kenaikan senilai Rp55.240.454.857,63 atau 9,64%. Rincian beban Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7. 104
Rincian Beban

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Kenaikan/(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Operasi	474.252.152.143,55	415.619.313.027,72	58.632.972.315,83	14,11
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.517.103.715,58	116.946.753.873,78	(429.650.158,200	(0,37)
3	Beban Transfer	37.362.448.300,00	40.325.315.600,00	(2.962.867.300,00)	(7,35)
4	Beban Tak terduga	475.105.500,00	326.062.160,00	149.043.340,00	45,71
Jumlah Beban		**628.131.837.359,13**	**572.891.382.501,50**	**55.240.454.857,63**	**9,64**

1. Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi antara lain meliputi, Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Subsidi, Beban Hibah, dan Beban Bantuan Sosial. Beban Operasi Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp590.769.255.859,13 sedangkan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp532.566.066.901,50 mengalami peningkatan Rp58.203.188.957,63 atau 10,93 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 105
Rincian Beban Operasi

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan(Penurunan)	
				Rp	%
1	Beban Pegawai	225.500.671.076,00	186.514.182.863,00	38.986.488.213,00	20,90
2	Beban Barang dan Jasa	202.734.273.172,64	204.758.984.328,91	(2.024.711.156,27)	(0,99)
3	Beban Hibah	40.313.528.000,01	21.487.237.877,31	18.826.290.122,70	87,62
4	Beban Bantuan Sosial	18.500.000,00	124.000.000,00	(105.500.000,00)	(85,08)
5	Beban Penyisihan	5.685.179.894,90	2.734.907.958,50	(2.950.271.936,40)	107,87
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	116.517.103.715,58	116.946.753.873,78	(429.650.158,20)	(0,37)
Jumlah		**590.769.225.859,13**	**532.566.066.901,50**	**58.203.188.957,63**	**10,93**

a) Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah pengeluaran anggaran untuk membiayai seluruh gaji, tunjangan dan seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pegawai yang ada pada Pemerintah Kab. Mamuju Tengah. Beban Pegawai untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp225.500.671.076,00 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp186.514.182.863,00 mengalami peningkatan senilai Rp38.986.488.213,00 atau 20,90%. Rincian Beban Pegawai terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 106
Rincian Beban Pegawai

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	169.720.699.136,00	139.548.557.594,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	6.567.825.830,00	8.370.658.962,00

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	40.775.046.744,00	30.373.998.677,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.843.288.208,00	7.617.916.472,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	172.171.158,00	172.171.158,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	421.640.000,00	430.880.000,00
Jumlah		**225.500.671.076,00**	**186.514.182.863,00**

b) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp202.734.273.172,64 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp204.758.984.328,91 mengalami penurunan senilai (Rp2.024.711.156,27) atau (0,99%). Rincian Beban Barang dan Jasa terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 107
Rincian Beban Barang dan Jasa

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Barang	44.560.115.284,77	52.664.888.743,91
2	Beban Jasa	86.087.968.527,91	93.947.325.555,00
3	Beban Pemeliharaan	5.236.347.154,00	5.911.136.060,00
4	Beban Perjalanan Dinas	25.692.786.208,00	34.118.472.649,00
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.104.212.650,00	589.795.240,00
6	Beban Barang dan Jasa BOS	17.153.626.015,00	17.527.366.081,00
7	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.879.182.437,00	0,00
8	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.020.034.895,96	0,00
Jumlah		**202.734.273.172,64**	**204.758.984.328,91**

Pada rincian tabel Beban Barang dan Jasa di atas, terbagi menjadi delapan beban yang terdiri dari Beban Barang, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, dan Beban Barang dan Jasa BOS, Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas, Beban Barang dan Jasa BLUD dengan rincian sebagai berikut:

1) Beban Barang
Jumlah Beban Barang Tahun Anggaran 2024 senilai Rp44.560.115.284,77 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp52.664.888.743,91 mengalami penurunan (Rp8.104.773.459,14) atau (15,39%). Beban Barang merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai dan barang tak habis pakai. Rincian Beban Barang Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada *lampiran 65.*

2) Beban Jasa
Jumlah Beban Jasa pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp86.087.968.527,91 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp93.947.325.555,00 mengalami penurunan (Rp.7.859.357.027,09) atau (8,37%). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2024 disajikan pada *lampiran 66.*

Realisasi Belanja Jasa Tahun Anggaran 2024 menurut Laporan Operasional senilai Rp86.087.968.527,91, sedangkan menurut Laporan Realisasi senilai Rp92.064.191.277,91. Perbedaan tersebut disebabkan atas pengakuan utang jasa di Neraca dan reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa. Perbedaan tersebut senilai Rp5.976.222.750,00.

3) Beban Pemeliharaan
Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp5.236.347.154,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.911.136.060,00 mengalami penurunan senilai (Rp674.788.906,00) atau (11,42%). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada *lampiran 67.*

4) Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp25.692.786.208,00 dan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp34.118.472.649,00 mengalami penurunan senilai (Rp8.425.686.441,00) atau (24,70%). Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 108
Rincian Beban Perjalanan Dinas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	18.665.119.273,00	21.505.611.810,00
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	747.292.125,00	4.899.005.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.607.549.810,00	6.712.251.571,00
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	375.635.000,00	775.163.000,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	297.190.000,00	44.950.000,00
6	Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	0,00	181.491.268,00
Jumlah Beban		**25.692.786.208,00**	**34.118.472.649,00**

5) Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Jumlah Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp1.104.212.650,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp589.795.240,00 mengalami kenaikan Rp514.417.410,00 atau 87,22% . Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 109
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	154.700.000,00	91.100.000,00
2	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	131.400.000,00	88.000.000,00
3	Beban Beasiswa	513.250.000,00	192.000.000,00
4	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	46.077.500,00	0,00
5	Beban uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	125.685.000,00	0,00
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	133.100.150,00	218.695.240,00
Jumlah Beban		**1.104.212.650,00**	**589.795.240,00**

6) Beban Barang dan Jasa BOS

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOS pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp17.153.626.015,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp17.527.366.081,00, mengalami penurunan senilai (Rp373.740.066,00) atau (2,13%). Rincian beban barang dan jasa BOS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 110
Rincian Beban Barang dan Jasa BOS

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Barang dan Jasa BOS	17.153.626.015,00	17.527.366.081,00
Jumlah		**17.153.626.015,00**	**17.527.366.081,00**

7) Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Jumlah Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp5.879.182.437,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp5.879.182.437,00 atau 100,00%. Rincian beban barang dan jasa BOK Puskesmas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 111
Rincian Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	5.879.182.437,00	0,00
Jumlah		**5.879.182.437,00**	**0,00**

8) Beban Barang dan Jasa BLUD

Jumlah Beban Barang dan Jasa BLUD pada Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp17.020.034.895,96 dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp0,00, mengalami kenaikan senilai Rp17.020.034.895,96 atau 100,00%. Rincian beban barang dan jasa BLUD dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 112
Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.020.034.895,96	0,00
Jumlah		**17.020.034.895,96**	**0,00**

c) Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp40.313.528.000,01 dan pada Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp21.487.237.877,31 mengalami kenaikan senilai Rp18.826.290.122,70 atau 87,62%. Rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 113
Rincian Beban Hibah

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	250.000.000,00	309.961.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	144.961.000,00
3	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	2.636.889,01	0,00
4	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	34.769.819.111,00	20.514.209.677,31
5	Beban Hibah Dana BOS	0,00	354.572.200,00
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	308.495.000,00	308.495.000,00
7	Beban Hibah Dana BOSP-BOS	4.982.577.000,00	0,0
8	Beban Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	2.235.900.000,00	0,0
9	Beban Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	2.399.700.000,00	0,0
Jumlah Beban		**40.313.528.000,01**	**21.487.237.877,31**

d) Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp18.500.000,00 dan pada Tahun Anggaran 2023 Rp124.000.000,00 mengalami penurunan senilai (Rp105.500.000,00) atau (85,08%). Rincian beban bantuan sosial dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 114
Rincian Beban Bantuan Sosial

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	6.000.000,00	24.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	12.500.000,00	0,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan,Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	100.000.000,00
Jumlah		**18.500.000,00**	**124.000.000,00**

e) Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp5.685.179.894,90 dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.734.907.958,50 mengalami kenaikan senilai Rp2.950.271.936,40 atau 107,87% yang merupakan

penambahan Penyisihan Piutang Pajak PBB-P2. Piutang yang lainnya tidak dilakukannya penyisihan piutang karena kurang dari satu tahun berdasarkan Kebijakan Akuntansi. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. 115
Rincian Beban Penyisihan Piutang

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2022
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.685.179.894,90	2.734.907.958,50
Jumlah		**5.685.179.894,90**	**2.734.907.958,50**

f) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah menetapkan Kebijakan Akuntansi dengan masa manfaat yang diatur dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi yang berlaku untuk keseluruhan aset tetap sejak aset tetap diperoleh. Selain tanah, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*) berdasarkan tahun perolehan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Adapun masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada *lampiran* 68.

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp116.517.103.716,58 sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp116.946.753.873,78 mengalami Penurunan senilai (Rp429.650.157,20) atau (0,37%) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 116
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.223.781.126,41	32.074.660.565,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.113.968.332,17	30.693.244.781,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	53.363.490.108,00	53.311.155.190,78
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	323.134.852,00	346.487.614,00
5	Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	492.729.298,00	521.205.723,00
Jumlah		**116.517.103.716,58**	**116.946.753.873,78**

Dengan rincian terdapat pada lampiran 69.

2. Beban Transfer

Beban Transfer untuk Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp37.362.448.300,00 sedangkan Tahun Anggaran 2023 senilai Rp40.325.315.600,00 mengalami penurunan senilai (Rp2.962.867.300,00) atau (7,35%) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 117
Rincian Beban Transfer

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan/Penurunan	
				Rp	%
1	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	0,00	35.455.315.600,00	(35.455.315.600,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	36.927.448.300,00	0,00	36.927.448.300,00	100,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	435.000.000,00	4.870.000.000,00	(4.435.000.000,00)	(91,07)
	Jumlah	**37.362.448.300,00**	**40.325.315.600,00**	**(2.962.867.300,00)**	**(7,35)**

c. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada Tahun Anggaran 2024 senilai (Rp0,01) dan pada Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.995.546.689,60 mengalami penurunan senilai (Rp1.995.546.689,61) atau (100,00%). Defisit ini terjadi karena adanya pengurangan piutang PBB-

P2 yang telah dihapuskan Berdasarkan SK Bupati dan Pemutakhiran Data SK No. 790/6.1/I/2023 senilai Rp1.232.243.775,00 dan SK No. 790/400/VI/2023 senilai Rp2.920.165.572,00.

d. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan rekening yang menampung peristiwa atau kejadian Luar Biasa Tahun 2024 yang mempunyai karakteristik kejadiannya tidak normal dan jarang terjadi serta di luar kendali entitas Pemerintah Daerah.

1. Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan	Rp	0,00
Pendapatan	Rp	0,00+
Pendapatan Luar Biasa	Rp	0,00

2. Beban Luar Biasa

Beban	Rp	0,00
Beban Tak Terduga	Rp475.105.500,00 +	
Beban Luar Biasa	Rp475.105.500,00	
Surplus/(Defisit) Pos Luar Biasa	(Rp475.105.500,00)	

e. Surplus/(Defisit)- LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.517.534.643,08 dan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp96.392.465.821,58 mengalami penurunan senilai (Rp93.874.931.178,50) atau (97,39%) *Surplus* tersebut merupakan jumlah antara surplus/defisit kegiatan operasional, non operasional dan pos luar Tahun Anggaran 2024.

7.5.5. Laporan Arus Kas

Arus Kas (*cash flow statement*) dapat memberikan manfaat untuk menguji keakuratan perencanaan kas sekaligus menjadi indikator untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. dengan menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan. perubahan kas dan setara kas dengan mengklasifikasi aktivitas dan tempat aktivitas diantaranya aktivitas operasi. aset non keuangan. pembiayaan. dan non-anggaran. Dari masing-masing aktivitas ini akan dihitung kas masuk dan kas keluar sehingga diperoleh kas bersih dari masing-masing aktivitas. Berikut ini deskripsi dari akun-akun yang disajikan pada Laporan Arus Kas:

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Kas untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi. merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2024 adalah senilai Rp111.396.881.640,33 atau mengalami penurunan senilai (Rp58.355.047.986,33) atau (34,37%) dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi selama Tahun 2023 senilai Rp169.751.929.626,66 dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 118
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI	**669.720.851.424,24**	**670.003.526.761,66**
Penerimaan Pajak Daerah	12.064.921.118,00	10.986.888.633,00
Penerimaan Retribusi Daerah	14.041.286.339,00	28.164.198.735,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	729.061.014,00	482.055.891,00
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	25.007.704.283,24	2.985.580.547,66
Penerimaan Dana Bagi Hasil	12.479.058.000,00	14.557.434.438,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	369.183.892.749,00	349.658.672.391,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	82.048.913.591,00	101.224.309.437,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	68.598.180.789,00	70.455.295.795,00
Penerimaan Dana Desa	51.461.215.000,00	51.720.040.000,00
Penerimaan Insentif Fiskal	0,00	6.018.759.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	26.414.089.638,00	25.233.449.136,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	1.500.000.000,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	7.692.528.903,00	7.016.842.758,00
ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI	**558.323.969.783,91**	**500.251.597.135,00**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Pembayaran Pegawai	224.098.755.376,00	186.514.182.863,00
Pembayaran Barang dan Jasa	203.336.294.992,91	200.826.460.987,00
Pembayaran Belanja Hibah	41.571.650.615,00	20.415.535.525,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	18.500.000,00	124.000.000,00
Pembayaran Tak Terduga	475.105.500,00	326.062.160,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	88.823.663.300,00	92.045.355.600,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	**111.396.881.640,33**	**169.751.929.626,66**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi di dalamnya termasuk juga Belanja Barang dan Jasa dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Belanja Barang Jasa yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan selama Tahun 2024 adalah senilai (Rp138.904.252.218,00) atau mengalami penurunan senilai (Rp4.377.875.855,00) atau (3,25%) dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi selama Tahun 2023 senilai (Rp134.526.376.363,00) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 119
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI	**230.337.498,00**	**471.142.054,00**
Penjualan atas Tanah	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	230.337.498,00	471.142.054,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI	**139.134.589.716,00**	**134.997.518.417,00**
Perolehan Tanah	2.055.173.000,00	1.653.332.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	35.957.625.906,00	13.926.590.864,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.278.328.853,00	52.462.883.837,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	57.979.234.714,00	62.321.642.916,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.267.128.002,00	1.363.483.800,00
Perolehan Aset Lainnya	597.099.241,00	269.585.000,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	**(138.904.252.218,00)**	**(134.526.376.363,00)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi di dalamnya termasuk juga aset dari semua sekolah yang bersumber dari Belanja Dana BOS yang dinaungi oleh Dinas Pendidikan dan aset yang bersumber dari Belanja Dana Kapitasi JKN di Puskesmas yang dinaungi oleh Dinas Kesehatan.

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2024 adalah senilai Rp0,00 dan penurunan 0,00% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan selama Tahun 2023 senilai Rp0,00. dengan tabel rincian sebagai berikut :

Tabel 7. 120
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun Anggaran 2024 dan 2023
Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN	**0,00**	**0,00**
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN	**0,00**	**0,00**
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	**0,00**	**0,00**

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran selama Tahun 2024 adalah senilai Rp209.206.419,00 mengalami kenaikan senilai Rp215.565.219,00 atau (33,90%) dibandingkan dengan Tahun 2023 senilai (Rp6.358.800,00) dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 7. 121
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran Tahun Anggaran 2024 dan 2023

.Dalam Rupiah

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
ARUS KAS MASUK AKTIVITAS TRANSITORIS	**36.389.712.744,93**	**33.507.265.695,00**
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.389.712.744,93	**33.507.265.695,00**
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS TRANSITORIS	**36.180.506.325,93**	**33.513.624.495,00**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	36.180.506.325,93	**33.513.624.495,00**
Pemberian Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran	0,00	0,00
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	**209.206.419,00**	**(6.358.800,00)**

Arus Kas Masuk dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran terdiri dari penerimaan PFK Tahun 2024 senilai Rp36.389.712.744,93 sedangkan Arus Kas Keluar senilai Rp36.180.506.325,93 sehingga Arus Kas Bersih dari Aktivitas *Transitoris/Non* Anggaran Tahun 2024 adalah senilai Rp209.206.419,00.

e. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas merupakan saldo kas milik Pemerintah Kab. Mamuju Tengah per 31 Desember 2024 senilai Rp14.083.589.293,43 dengan rincian seperti terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. 122
Rincian Saldo Akhir Kas

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 2024
1	Kas di Kas Daerah	10.009.738.986,53
2	Kas di Bendahara Penerimaan	18.800.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	225.421.845,00
4	Kas di BLUD	2.103.923.795,86
5	Kas Dana BOS	0,00
6	Kas Lainnya	218.879.508,00
7	Kas Dana BOSP	40.938.422,04
8	Kas Dana BOK Puskesmas	1.465.886.736,00
Saldo Kas Akhir		**14.083.589.293,43**

7.5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Ekuitas untuk periode yang berakhir Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal menggambarkan Ekuitas Neraca *Audited* per 31 Desember 2023 yang menjadi Ekuitas Awal Tahun 2024. Jumlah Ekuitas Awal Pemerintah Kab. Mamuju Tengah senilai Rp1.370.346.846.195,22.

b. *Surplus/Defisit* – LO

Surplus/Defisit LO selama satu Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp2.517.534.643,08 dibandingkan Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp96.392.465.821,58 mengalami penurunan sekitar (97,39%). Jumlah ini berasal dari total pendapatan dikurangi dengan total beban selama satu Tahun Anggaran 2024. Rincian dari jumlah *surplus/defisit* LO dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional.

c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar merupakan transaksi atau kejadian yang mempunyai pengaruh pada akun Ekuitas akibat transaksi masa lalu. Dampak kumulatif yang terjadi dalam Tahun Anggaran 2024 adalah senilai (Rp2.002.668.291,70) yang merupakan koreksi atas penambahan/pengurangan Ekuitas selama Tahun 2024 dapat dilihat pada rincian koreksi Ekuitas sebagai berikut:

Tabel 7. 123
Rincian Koreksi Ekuitas

Dalam Rupiah

No	Keterangan	2024	2023
1	Koreksi Nilai Persediaan	4.581.200,00	0,00
2	Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
3	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Kas	(1.000.000,00)	0,00
4	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Piutang	2.560.000,00	0,00
5	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Tetap	(2.068.209.491,69)	(43.970.239.428,00)
6	Koreksi Nilai Ekuitas Awal Aset Lainnya	59.399.999,99	0,00
	JUMLAH	**(2.002.668.291,70)**	**(43.970.239.428,00)**

d. Ekuitas Akhir

Posisi Ekuitas Akhir per 31 Desember 2024 Pemerintah Kab. Mamuju Tengah adalah senilai Rp1.370.861.712.546,60. Jumlah ini berasal dari Ekuitas Awal senilai Rp1.370.346.846.195,22, ditambah dengan posisi *Surplus/Defisit* LO senilai Rp2.517.534.643,08 dan penyesuaian yang terdapat dalam pos Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar adalah Koreksi Ekuitas senilai (Rp2.002.668.291,70).

7.6. Penutup

Laporan Keuangan ini merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi *riil* aspek keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 yang penyusunannya didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Sebagai penutup penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024 disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dipengaruhi oleh Ekonomi Makro yang terdiri dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Inflasi. Sedangkan dalam pelaksanaan pembangunan juga dipengaruhi oleh Data Penduduk, Ketenagakerjaan, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia.
2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah disajikan untuk menggambarkan kecukupan penerimaan periode berjalan dalam membiayai seluruh pengeluaran. Memperlihatkan kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perUndang-Undangan. Menyajikan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pelaporan serta hasil-hasil yang dicapai. menunjukkan bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kebutuhan kasnya. Menjabarkan posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman serta membandingkan perubahan posisi keuangan entitas pelaporan. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
3. Secara keseluruhan pencapaian target penerimaan periode Tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2023. Realisasi belanja Tahun 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi belanja di Tahun 2023.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Mamuju Tengah Tahun 2024 ini diharapkan dapat memenuhu kewajiban Akuntanbilitas Pemerintah Kab. Mamuju tengah dalam penyampaian laporan keuangan. Pemerintah Kab. Mamuju Tengah telah mencoba memenuhi komitmen moral bahwa perbaikan kinerja yang telah dicapai akan menjadi pondasi yang proposional dalam penyelenggarann pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kab. Mamuju Tengah dimasa yang akan datang serta sejalan dengan percepatan perubahan lingkungan strategis yang luar biasa. Berbagai perestasi dan kekurangan hasil kebijakan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sesuai dengan kondisi obyektif dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi impan balik terhadap penetapan kebijakan umum pada periode berikutnya.

Laporan keuangan ini merupakan bentuk upaya dari Pemerintah Kab. Mamuju Tengah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan belum sepenuhnya menyajikan informasi secara lengkap dan rinci seperti yang diharapkan. Di samping itu, keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ini mengakibatkan penyajian laporan keuangan ini tidak terlepas dari kelemahan-kelemahan. Untuk itu kami mengharapkan masukan-masukan dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini. Sehingga manfaat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dapat kami wujudkan dengan baik.

Mamuju Tengah, 29 September 2025

Bupati Mamuju Tengah

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	Jenis Piutang	Saldo Awal Piutang	Penambahan Piutang	Pengurangan Piutang	Saldo Akhir Piutang
1	2	3	4	5	6	7= 4+5-6
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang PBBP2	16.298.511.417,00	5.571.319.005,00	154.333.216,00	21.715.497.206,00
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	579.158.545,00	544.137.744,00	579.158.545,00	544.137.744,00
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	1.127.948.456,00	0,00	1.127.948.456,00	0,00
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	940.613.250,00	830.141.250,00	940.613.250,00	830.141.250,00
5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	0,00	62.635.488,00	0,00	62.635.488,00
6	DINAS KESEHATAN	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	411.770.440,00	584.625.695,00	411.770.440,00	584.625.695,00
7	DINAS KESEHATAN	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	38.681.900,00	0,00	38.681.900,00
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	0,00	3.450.752.907,00	0,00	3.450.752.907,00
TOTAL			**19.358.002.108,00**	**11.082.293.989,00**	**3.213.823.907,00**	**27.226.472.190,00**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JENIS PIUTANG	JUMLAH PIUTANG	JUMLAH PENYISIHAN	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1	Piutang PBBP2	21.715.497.206,00	(15.520.273.439,20)	6.195.223.766,80
2	Piutang Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	544.137.744,00	0,00	544.137.744,00
3	Piutang Retribusi Pemakaian Alat	830.141.250,00	0,00	830.141.250,00
4	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jaringan Air Minum-Jaringan Sambungan ke Rumah	62.635.488,00	0,00	62.635.488,00
5	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	584.625.695,00	0,00	584.625.695,00
6	Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	38.681.900,00	0,00	38.681.900,00
7	Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	3.450.752.907,00	0,00	3.450.752.907,00
TOTAL		**27.226.472.190,00**	**(15.520.273.439,20)**	**11.706.198.750,80**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran X PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIR

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	JUMLAH DANA BERGULIR	JUMLAH PENYISIHAN DANA BERGULIR	JUMLAH PIUTANG BERSIH
1				
2				
3				
4				
5				
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ Lembaga Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7 + 8	10 = 6 - 9	11	12	13 = 9 - 12
1	2024	BANK SULSELBAR	PERDA	SAHAM	10.000.000.000	6.000.000.000	0,00	6.000.000.000,00	4.000.000.000,00	729.061.014,00	0,00	6.000.000.000,00

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.036.562.897,00	58.007.679,00	50.088.220,00	1.028.643.438,00
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	282.467.870,00	0,00	60.563.736,00	343.031.606,00
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	20.431.630.534,00	51.215.000,00	155.180.000,00	20.535.595.534,00
4	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	5.067.611.922,27	2.636.889,00	1.425.836.862,00	6.490.811.895,27
5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.625.733.808,00	5.000.000,00	70.500.000,00	3.691.233.808,00
6	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	7.011.443.980,00	6.901.458.500,00	13.878.336.589,00	13.988.322.069,00
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.922.032.227,99	0,00	61.380.000,00	1.983.412.227,99
8	DINAS KESEHATAN	236.938.965.886,18	3.914.095.908,87	25.479.452.017,00	258.504.321.994,30
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	10.057.160.473,00	39.098.000,00	61.868.000,00	10.079.930.473,00
10	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	1.623.482.000,00	0,00	119.688.000,00	1.743.170.000,00
11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	29.926.363.315,73	15.889.000,00	207.798.500,00	30.118.272.815,73
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	5.546.911.677,00	800.000,00	4.261.742.650,00	9.807.854.327,00
13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.149.662.190.842,60	25.351.021.747,09	71.743.076.326,00	1.196.054.245.421,51
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	722.464.197,00	0,00	0,00	722.464.197,00
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.842.252.797,00	39.975.000,00	762.437.136,00	12.564.714.933,00
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.739.111.814,00	0,00	0,00	2.739.111.814,00
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	324.225.730.457,24	11.861.542.089,62	36.517.492.467,00	348.881.680.834,62
18	DINAS PERHUBUNGAN	6.288.479.011,00	92.105.928,00	202.019.477,00	6.398.392.560,00
19	DINAS PERIKANAN	4.121.436.000,00	110.680.600,00	171.610.600,00	4.182.366.000,00
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	11.450.728.316,20	518.178.416,49	276.836.952,00	11.209.386.851,71
21	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	19.565.461.421,00	5.447.999.112,00	2.084.424.400,00	16.201.886.709,00
22	DINAS SOSIAL	541.650.813,00	0,00	12.545.500,00	554.196.313,00
23	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.048.527.852,00	0,00	0,00	6.048.527.852,00
24	INSPEKTORAT	893.856.065,02	17.051.200,00	22.000.000,00	898.804.865,02
25	KECAMATAN BUDONG-BUDONG	1.934.579.811,00	0,00	0,00	1.934.579.811,00
26	KECAMATAN KAROSSA	1.457.920.163,00	0,00	19.000.000,00	1.476.920.163,00
27	KECAMATAN PANGALE	1.526.062.214,00	0,00	0,00	1.526.062.214,00
28	KECAMATAN TOBADAK	5.286.103.675,00	0,00	0,00	5.286.103.675,00
29	KECAMATAN TOPOYO	1.148.945.850,00	0,00	28.700.000,00	1.177.645.850,00
30	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	75.645.058.691,93	4.073.126.327,30	22.467.317.452,00	94.039.249.816,63
31	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	2.378.996.860,00	0,00	1.299.000.000,00	3.677.996.860,00
32	SEKRETARIAT DAERAH	68.567.389.065,98	2.796.099.428,96	987.983.075,00	66.759.272.712,02
33	SEKRETARIAT DPRD	10.335.097.548,34	215.336.875,00	349.594.650,00	10.469.355.323,34
	JUMLAH	**2.029.852.410.056,47**	**61.511.317.701,33**	**182.776.472.609,00**	**2.151.117.564.964,14**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAP
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Uraian	Saldo Awal 2024	Mutasi		Saldo Akhir 2024
			Pengurangan	Penambahan	
1	2	3	4	5	6 = 3 - 4 + 5
1	Tanah	66.833.889.667,00	5.646.788.112,00	6.600.654.620,00	67.787.756.175,00
2	Peralatan dan Mesin	279.733.386.440,66	8.553.004.577,32	40.200.215.854,00	311.380.597.717,34
3	Gedung dan Bangunan	584.372.010.415,60	20.027.572.830,83	46.284.245.843,00	610.628.683.427,77
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.062.927.244.654,54	17.397.188.688,09	69.329.173.090,00	1.114.859.229.056,45
5	Aset Tetap Lainnya	9.435.638.671,91	1.102.139.856,00	1.282.742.002,00	9.616.240.817,91
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	26.550.240.206,76	8.784.623.637,09	19.079.441.200,00	36.845.057.769,67
7	Akumulasi Penyusutan	(716.444.200.993,00)	(5.545.071.990,13)	(118.208.310.369,78)	(829.107.439.372,65)
	TOTAL	**1.313.408.209.063,47**	**55.966.245.711,20**	**64.568.162.239,22**	**1.322.010.125.591,49**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama SKPD	SALDO AWAL 2024	MUTASI								REKLASIFIKASI /PENGHAPUSAN	SALDO AKHIR 2024
			BERTAMBAH				BERKURANG					
			ASET TETAP TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	ASET TETAP TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN		
1	SEKRETARIAT DAERAH	13.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.370.000,00
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	5.361.718.500,00	0,00	0,00	0,00	1.027.990.987,60	0,00	0,00	4.333.727.512,40
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16.096.505.354,76	0,00	0,00	0,00	5.717.452.000,00	0,00	0,00	0,00	7.474.311.685,00	0,00	14.339.645.669,76
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	254.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.770.000,00
6	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0,00	0,00	0,00	6.899.758.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899.758.500,00
7	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	98.000.000,00	0,00	0,00	1.049.297.200,00	0,00	0,00	0,00	40.979.500,00	0,00	0,00	1.106.317.700,00
8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	839.149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839.149.000,00
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	51.215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.215.000,00
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	9.245.745.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.341.464,49	0,00	0,00	9.004.404.387,51
	Total	**26.550.240.206,76**	**0,00**	**0,00**	**13.310.774.200,00**	**5.768.667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.311.952,09**	**7.474.311.685,00**	**0,00**	**36.845.057.769,67**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Lampiran XV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	SKPD	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1	SEKRETARIAT DPRD	151.740.000,00	0,00	0,00	151.740.000,00
2	SEKRETARIAT DAERAH	2.132.474.992,00	2.892.769.428,95	100.000.000,00	4.925.244.420,95
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	463.906.000,00	2.581.284.242,04	0,00	3.045.190.242,04
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN	1.015.649.500,00	16.500.000,00	0,00	1.032.149.500,00
6	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	87.475.000,00	0,00	0,00	87.475.000,00
7	DINAS KESEHATAN	2.685.612.232,75	1.436.988.683,81	0,00	4.122.600.916,56
8	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	1.579.010.000,00	1.028.729.627,30	0,00	2.607.739.627,30
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCAN	44.800.000,00	39.975.000,00	0,00	84.775.000,00
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5.610.304.805,33	155.754.661,54	0,00	5.766.059.466,87
11	DINAS SOSIAL	82.373.500,00	0,00	0,00	82.373.500,00
12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00
14	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	957.842.127,00	5.000.000,00	0,00	962.842.127,00
15	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	253.597.900,00	18.500.000,00	0,00	272.097.900,00
16	DINAS PERIKANAN	476.900.000,00	0,00	0,00	476.900.000,00
17	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	112.147.300,00	15.889.000,00	0,00	128.036.300,00
18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	2.189.945.102,72	262.419.000,00	598.693.000,00	1.853.671.102,72
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	331.989.000,00	0,00	0,00	331.989.000,00
20	INSPEKTORAT DAERAH	14.000.000,00	34.400.441,00	0,00	48.400.441,00
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	776.884.000,00	199.800.000,00	0,00	976.684.000,00
22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00
23	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00
24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0,00	0,00	0,00	0,00
25	SATUAN POLISI PAMONGPRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	362.270.000,00	106.757.679,00	0,00	469.027.679,00
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	222.923.000,00	141.341.464,49	0,00	364.264.464,49
28	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	19.650.000,00	17.000.000,00	0,00	36.650.000,00
29	KECAMATAN PANGALE	312.588.152,00	0,00	0,00	312.588.152,00
30	KECAMATAN TOPOYO	156.882.352,00	0,00	0,00	156.882.352,00
31	KECAMATAN BUDONGBUDONG	270.882.352,00	0,00	0,00	270.882.352,00
32	KECAMATAN TOBADAK	139.882.350,00	0,00	0,00	139.882.350,00
33	KECAMATAN KAROSSA	119.502.650,00	0,00	0,00	119.502.650,00
	TOTAL	**20.769.932.315,80**	**8.953.109.228,13**	**698.693.000,00**	**29.024.348.543,93**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XVII PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	209.206.419,00	0,00	209.206.419,00
2	Utang Belanja Pegawai	0,00	1.401.915.700,00	0,00	1.401.915.700,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa	6.102.590.234,00	838.733.707,00	5.787.544.757,00	1.153.779.184,00
4	Utang Belanja Hibah	1.638.625.524,31	434.378.850,00	1.638.625.524,00	434.378.850,31
5	Utang Belanja Modal	9.332.075.461,00	2.584.533.417,40	7.676.227.106,00	4.240.381.772,40
	Total	**17.073.291.219,31**	**5.468.768.093,40**	**15.102.397.387,00**	**7.439.661.925,71**

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN, S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XVIII RERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
PER 31 DESEMBER 2024

No	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI		SALDO AKHIR
			TAMBAH	KURANG	
1	2	3	4	5	6
1					
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XIX PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
DAFTAR SUB KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2024
DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

NO.	NAMA SKPD	NAMA SUB KEGIATAN	JUMLAH			%	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIANGGARKAN KEMBALI PADA APBD BERIKUTNYA	DASAR HUKUM
			ANGGARAN	REALISASI	TAMBAH/ KURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
JUMLAH								

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XX.1 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (NERACA) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Aset Lancar	Aset Tidak Lancar	Aset Lainnya	Total Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYDS	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Daerah	Kepemilikan Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19=17x18
1				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-			-			-								-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Seluruh Bidang Industri			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Lampiran XX.2 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
Nomor : 3 TAHUN 2025
Tentang : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN (LAPORAN LABA/RUGI) BADAN USAHA MILIK DAERAH/PERUSAHAAN DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

No	BUMD/ Perusahaan Daerah Tahun	Sumber a)	Status b)	Pendapatan	Beban	Laba (Rugi) Kotor	Pendapatan di luar usaha	Beban di luar usaha	Laba (Rugi) Sebelum Pajak
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
				-	-	-	-	-	-
2									
				-	-	-	-	-	-
3									
				-	-	-	-	-	-
	Total Seluruh Bidang Industri			-	-	-	-	-	-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

Mamuju Tengah, 29 September 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH

ttd

H. ARSAL ARAS